

METODOLOGI PENELITIAN SEJARAH ISLAM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DUDUNG ABDURAHMAN

METODOLOGI PENELITIAN SEJARAH ISLAM



PENERBIT OMBAK
www.penerbit-ombak.com
2011

METODOLOGI PENELITIAN SEJARAH ISLAM

Copyright@Dudung Abdurahman, 2011

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Ombak, 2011
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
www.penerbit-ombak.com

PO.190.10.'11

Penulis: Dudung Abdurahman
Tata letak: Turatea Kreatif
Sampul: Nanjar Tri Mukti

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

METODOLOGI PENELITIAN SEJARAH ISLAM

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011
x + 220 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-8335-

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS

BAB I METODOLOGI SEJARAH

- A. Ilmu Sejarah
- B. Penulisan Sejarah
- C. Pendekatan-pendekatan dalam Rekonstruksi Sejarah
 - 1. Pendekatan Sosiologis
 - 2. Pendekatan Antropologis
 - 3. Pendekatan Ilmu Politik
 - 4. Pendekatan Keagamaan
- D. Kerangka Konseptual dan Teoretik dalam Metodologi Sejarah
 - 1. Kerangka Konseptual
 - 2. Kerangka Teoretik
- E. Perubahan (*Changes*) sebagai Asas Konsepsi Sejarah
- F. Sumber dan Fakta Sejarah
 - 1. Sumber Sejarah
 - 2. Fakta Sejarah

BAB II ORIENTASI METODOLOGI SEJARAH ISLAM

- A. Studi Keislaman dalam Perspektif Sejarah
- B. Kritisisme Sejarah Islam
- C. Bentangan Sejarah Islam
- D. Sejarah Peradaban Islam
- E. Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam
- F. Ibn Khaldun tentang Penulisan Sejarah Kritis
 - 1. Ibn Khaldun dan Karyanya
 - 2. Penulisan Sejarah sebelum Khaldun
 - 3. Metodologi Sejarah Kritis
- G. Rekonstruksi Sejarah Islam di Indonesia
 - 1. Model-model Penulisan Sejarah Islam
 - 2. Perspektif Sosiologis dalam Historiografi Islam
 - 3. Arah Penulisan Sejarah Islam di Indonesia

BAB III METODE SEJARAH

- A. Metode Heuristik (Pengumpulan Sumber)
- B. Metode Verifikasi (Kritik Sumber)
 - 1. Keaslian Sumber
 - 2. Kesahihan Sumber
- C. Metode Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)
- D. Metode Historiografi (Penulisan Sejarah)

BAB IV TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN SEJARAH

- A. Teknik Pemilihan Topik dan Judul Penelitian Sejarah
- B. Teknik Proposal Penelitian Sejarah
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Pembatasan dan Perumusan Masalah
 - 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - 4. Tinjauan Pustaka
 - 5. Landasan Teori
 - 6. Metode Penelitian
- C. Contoh Proposal

DAFTAR PUSTAKA

APENDIKS

CONTOH METODOLOGI INTERPRETASI SEJARAH

Model Interpretasi Sejarah I

MENJELASKAN TINDAKAN-TINDAKAN KOLEKTIF

Model Interpretasi Sejarah II

MENILAI PENAFSIRAN PERISTIWA SEJARAH

INDEKS

TENTANG PENULIS

PENGANTAR PENULIS

Secara tulus penulis patut memanjatkan puji dan syukur ke-hadirat Ilahi, atas limpahan rahmat serta inayah-Nya, buku ini dapat disajikan kepada khalayak pembaca khususnya para peminat studi sejarah dan studi keislaman. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., pembawa dan penyampai risalah Islam, yang berabad-abad perkembangannya hingga sekarang bukan saja menjadi sistem keyakinan umat manusia, melainkan juga sistem pengetahuan yang tidak pernah habisnya melahirkan berbagai ilmu keislaman. Keragaman ilmu ini pada perkembangan mutakhir dipicu aneka sudut pandang dari ilmu-ilmu lain, yang justru semakin memperkaya kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman itu.

Buku ini sebetulnya hanyalah sebagian kecil dari paradigma besar keilmuan Islam itu, yakni berkenaan dengan perspektif sejarah. Buku ini juga merupakan edisi lanjut dari buku penulis tentang *Metodologi Penelitian Sejarah*, dengan revisi serta penekanan pembahasan metodologi sejarah untuk studi keislaman, maka buku ini diberi judul *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Muatan metodologi sejarah lebih diarahkan kepada pembentukan paradigma *integrasi-interkoneksi* antara ilmu sejarah dengan ilmu keislaman. Dengan kata lain, kedua disiplin tersebut sebagai dasar epistemologi ataupun perspektif yang dikombinasikan menjadi pisau analisis dalam membedah obyek-obyek studi keislaman, khususnya mengenai sejarah Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi bahan bacaan di kalangan pencari ilmu bidang sejarah

terutama mengenai mata kuliah “Metode Penelitian Sejarah”. Buku ini dimungkinkan lebih luas lagi penggunaannya, terutama dalam proses diversifikasi keilmuan Islam seperti yang tengah berlangsung di sejumlah UIN untuk mengembangkan keilmuannya ke arah *integrasi-interkoneksi* antara ilmu keislaman dan ilmu umum. Sudah barang tentu ilmu sejarah sebagai salah satu disiplin dari ilmu-ilmu umum itu dapat bersentuhan dengan berbagai disiplin keislaman seperti *adab, dakwah, syariah, tarbiyah, dan ushuluddin*. Dalam pengembangan masing-masing ilmu keislaman ini terdapat kecondongan sebagian studinya kepada analisis yang bersifat historis, sehingga arti penting pendekatan sejarah pada dasarnya berlaku bagi semua disiplin keislaman, tidak terbatas pada jurusan SKI saja, bahkan untuk berbagai disiplin keilmuan pada umumnya.

Dewasa ini, jika diperhatikan, banyak studi di Pascasarjana IAIN/UIN baik penulisan tesis maupun disertasi berkenaan dengan objek-objek sejarah Islam (bidang pemikiran, biografi tokoh, dan sebagainya), tetapi kurang diperkuat dengan metodologi serta perangkat analisis sejarah. Objek yang sesungguhnya dalam studi-studi semacam itu adalah sejarah, maka seharusnya diperkaya dengan fakta-fakta sejarah dan diperketat dengan memperhatikan aspek kronologis serta diakronis atas fakta-fakta bersangkutan. Tetapi yang terjadi justru “bias sejarah”, bahwa fakta-fakta yang ditunjukkan kurang berada pada lingkup kesejarahan, bahkan lebih banyak penafsiran-penafsiran berdasar wacana kekinian yang kurang obyektif dan relevan dengan sejumlah peristiwa sejarah. Sementara ini, secara sepihak pula penulis beranggapan bahwa kecenderungan itu terjadi karena penguasaan atau mungkin pengetahuan terhadap metodologi sejarah belum merata di kalangan civitas akademika perguruan tinggi tersebut.

Lebih dari itu, bidang sejarah Islam merupakan bagian pokok dalam ilmu-ilmu keislaman, ia telah berkembang seumur perkembangan ilmu-ilmu keislaman yang lain. Ilmu sejarah Islam jelas berkenaan dengan masa lampau Islam dan umatnya, sehingga ia mengandung kadar pengetahuan yang senantiasa berguna bagi manusia kini maupun masa mendatang. Apalagi dalam era kemajuan zaman yang menuntut segenap umat Islam memperluas wawasan ilmu pengetahuan, maka wacana keislaman dalam perspektif sejarah tidak bisa diabaikan. Kini seiring perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan itu, pengembangan ilmu sejarah sendiri tidak lagi sekedar ceritera masa lalu yang kaya mitologis, mistis, dan herois, melainkan sejarah adalah ilmu yang perlu ditunjang pemahaman kritis dan metodologis. Laksana masa lampau Islam yang menyimpan khazanah intelektual dan spiritual, namun masa lalu umatnya juga menampilkan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya membutuhkan perangkat metodologis yang relevan dengan obyek sejarah bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan inilah buku ini disusun dengan harapan dapat mengantarkan para peminat sejarah kepada proses penelitiannya dalam keluasan perspektif dan keragaman obyek kajian.

Penulis menyadari, bahwa buku ini tidak lebih dari sekedar rekonstruksi atas kerangka konseptual dalam pendekatan sejarah maupun keislaman yang telah dikemukakan para ahli terdahulu. Karena itu patut diucapkan terima kasih kepada para sejarawan pribumi maupun asing. Buku-buku mereka telah dijadikan rujukan, dikutip, disadur, ataupun diterjemahkan bagi kelengkapan data buku ini. Secara umum, ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada para guru mulai di tingkat dasar hingga di perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu. Secara khusus, terima kasih

disampaikan kepada para guru penulis di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, atas jasa-jasa mereka dalam bimbingan maupun dorongan bagi pengembangan akademik penulis; dan para guru besar sejarah di UGM, yang karya-karya mereka telah dijadikan referensi bagi penyusunan buku ini serta bimbingan dan pengajaran mereka yang langsung penulis terima selama menimba ilmu di Pascasarjana UGM jurusan sejarah. Demikian pula, disampaikan terima kasih kepada Penerbit Ombak yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga amal baik semua pihak memperoleh rida dan limpahan pahala Allah Swt. Akhirnya, kepada segenap pembaca diharapkan kritik serta sarannya bagi kelengkapan dan perbaikan atas segala kekurangan buku ini.

Yogyakarta, awal Oktober 2011

Penulis

BAB I

METODOLOGI SEJARAH

A. Ilmu Sejarah

Pengertian yang lebih komprehensif tentang sejarah adalah “kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia”. Definisi ini mengandung dua makna sekaligus, yakni sejarah sebagai kisah atau ceritera merupakan sejarah dalam pengertiannya secara subyektif, karena peristiwa masa lalu itu telah menjadi pengetahuan manusia; sedangkan sejarah peristiwa merupakan sejarah secara obyektif, sebab peristiwa masa lampau itu sebagai kenyataan yang masih di luar pengetahuan manusia. Berdasarkan pengertian terakhir, peristiwa sejarah itu mencakup segala hal yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia (Kuntowijoyo, 1995: 17), sehingga lapangan sejarah meliputi segala pengalaman manusia, dan lukisan sejarah merupakan pengungkapan fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuatu telah terjadi.

Faktor manusia dalam perspektif sejarah sangatlah esensial, karena berdasarkan kesadarannya manusia memiliki nilai historisitas, yakni selalu berkembang dalam rangka merealisasikan dirinya secara konkret. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa manusia sebagai kenyataan diri bersifat simbolis dan mengandung makna. Peristiwa sejarah bukan hanya kejadian fisik, melainkan peristiwa-peristiwa bermakna yang terpantul sepanjang waktu, sehingga dapat terungkap segi-segi pertumbuhan, kejayaan, dan keruntuhannya (Poespowardojo, 1992: 1). Dalam hal ini

sejarah sesungguhnya identik dengan peradaban manusia, dan pemahaman atas sejarah berarti juga pemahaman kebudayaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sejarah adalah sebuah ilmu yang berusaha menemukan, mengungkapkan, dan memahami nilai serta makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau.

Untuk mempertegas pemaknaan sejarah sebagai ilmu, kiranya terlebih dahulu perlu ditelusur dari asal-usul kata sejarah itu sendiri. 'Sejarah' dikatakan berasal dari kata Arab, '*syajarah*', artinya 'pohon' dan mengibaratkan "pohon kehidupan". Dalam bahasa asing lainnya peristilahan sejarah disebut *histore* (Prancis), *geschichte* (Jerman), *histoire* atau *geschiedenis* (Belanda), dan *history* (Inggris). Akar kata *history* itu sendiri berasal dari *historia* (Yunani) yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, terutama mengenai umat manusia yang bersifat kronologis, sedangkan yang tidak bersifat kronologis dipakai kata *scientia* atau *science* (Alfian, 1984: 3). Dalam perkembangannya, sejarah hanya terbatas pada aktivitas manusia berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu (*unik*) yang disusun secara kronologis. Adapun ilmu sejarah merupakan ilmu yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu (Gazalba, 1981: 2). Disiplin sejarah sebetulnya sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi; tetapi sejarah membicarakan masyarakat dengan selalu memperhatikan signifikansi ruang dan waktu.

Sejarah sebagai "ceritera tentang peristiwa di masa lampau" pada mulanya sangatlah naratif, yakni gambaran masa lalu itu hanya tersusun berdasarkan urutan fakta dengan penjelasan serta ulasan sekedarnya atas kenyataan-kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Laporan tentang masa lalu seperti

itu biasa disebut “Sejarah Naratif”, yang bercirikan sebagai berikut: 1) sejarah merupakan uraian logis mengenai suatu proses perkembangan terjadinya peristiwa; 2) berdasarkan *common sense* (akal sehat), imajinasi, keterampilan ekspresi bahasa, dan pengetahuan fakta; 3) proses terjadinya peristiwa secara genesis (dari awal sampai akhir); 4) keterangan mengenai sebab-sebabnya (kausalitas) secara deskriptif; dan 5) ditulis tanpa memakai teori dan metodologi.

Kebalikannya dari “Sejarah Naratif” adalah “Sejarah Ilmiah” atau “Sejarah Analisis”. Kriteria utama sejarah ilmiah ini, bahwa pengkajian terhadap suatu kejadian di masa lampau itu maupun penyajiannya dalam suatu kisah dengan menerangkan sebab-sebabnya yang bersumber pada kondisi lingkungan peristiwa (*kondisional*) dan konteks sosial-budaya (*kontekstual*). Namun, pelukisan sejarah ilmiah yang pada gilirannya bertujuan memberikan makna dan penjelasan tentang faktor-faktor terjadinya suatu peristiwa itu dapat dilakukan secara implisit di dalam deskripsi, artinya analisa berdasarkan konsep dan teori yang relevan dilakukan bersamaan dengan deskripsi (Kartodirdjo, 1992:3). Karena itu, dalam proses penulisan sejarah sebetulnya bisa terjadi penggabungan antara naratif dan analisis;

Terlepas dari dua kategori ilmu sejarah seperti disebutkan di atas, berbagai penyajian dan jenis sejarah muncul sesuai dengan sudut pandang sejarawan, kultur yang mempengaruhi, dan masa yang melahirkan. Segala bentuk penyajian sejarah merupakan pengetahuan yang dapat berfungsi untuk beragam kegunaan. Di antara kegunaan sejarah menurut Wang Gungwu, sebagaimana dikutip T. Ibrahim Alfian (1985: 3), adalah: *pertama*, untuk kelestarian identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu guna kelangsungan hidup. *Kedua*, sejarah berguna sebagai

pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh-contoh di masa lalu, sehingga memberikan azas manfaat secara lebih khusus demi kelangsungan hidup itu. Yang *ketiga*, sejarah berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai makna hidup dan mati. Dalam bahasa yang hampir sama, F.R. Ankersmit menyatakan bahwa dengan mengetahui kelakuan obyektif dari manusia masa lampau (*cognitio historica*) maka sejarah berfungsi sebagai guru mengenai kehidupan (*historia magistra vitae*). Oleh karena itu, dengan mengembangkan peristiwa-peristiwa masa silam kita dapat menimba ajaran-ajaran praktis, dan pada gilirannya sejarah bermakna sebagai pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang.

Begitu pentingnya sejarah bagi kehidupan umat manusia, di dalam kitab suci Alquran sendiri terdapat banyak kisah para Nabi dan tokoh masa lalu yang berisi pelajaran yang harus dilaksanakan atau, sebaliknya, harus dihindari oleh manusia dalam kehidupannya kini dan masa mendatang. Demikian pula misalnya di dalam karya-karya sejarah tradisional seperti *babad*, *hikayat*, dan *tambo* yang berisi mitos legenda, dan ceritera-ceritera pahlawan; selain karya-karya itu telah berfungsi memperkokoh identitas kelompok dan memperkuat solidaritas, juga sebagai pelajaran yang patut dipetik oleh bangsa Indonesia dewasa ini (Alfian, 1985: 4). Atas kegunaan sejarah seperti itulah, pengetahuan serta pelajaran sejarah merupakan alat penting untuk membentuk umat dan bangsa yang baik maupun untuk mengembangkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap agama, bangsa, dan negara.

B. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengkisahan atas peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia. Pengkisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subyektif, karena

setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa yang telah terjadi itu dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya adalah obyektif dan absolut, pada gilirannya akan menjadi suatu kenyataan yang relatif. Perang-perang di zaman Nabi Muhammad saw., misalnya, adalah peristiwa telah berlalu dan pelaku-pelakunya sudah tiada; tetapi penulis sejarah kemudian bisa saja menafsirkannya sebagai perang di jalan Allah, bentuk ekspansi Islam, pola dakwah, dan seterusnya.

Bagi sejarawan yang menganut “relativisme historis”, sikap netral dalam pengkajian dan penulisan sejarah merupakan sulit untuk direalisasikan. Alasannya bahwa pengetahuan sejarah itu pada dasarnya adalah mengalihkan fakta-fakta pada suatu bahasa lain, menundukkannya pada bentuk-bentuk, kategori-kategori, dan tuntutan-tuntutan khusus (al-Sharqawi, 1981: 124). Proses pemilihan unsur-unsur tertentu mengenai perjuangan seorang tokoh, umpamanya, dilakukan oleh penulis biografi dengan mendasarkan diri pada interpretasi historis atas peristiwa-peristiwa yang dikehendaknya, lalu disusunlah kisah baru. Demikian kecenderungan subyektivitas itu akan selalu mewarnai bentuk-bentuk penulisan sejarah lainnya, sejarah politik, sejarah sosial, sejarah budaya, dan sebagainya. Hal ini karena secara umum dapat dikatakan bahwa kerangka pengungkapan atau penggambaran atas kenyataan sejarah itu ditentukan oleh sejarawan, sedangkan kejadian sejarah sebagai aktualitas itu juga dipilih dan dikonstruksi menurut kecenderungan seorang penulis atau sejarawan.

Di samping alasan praktis di atas, ternyata dimungkinkan lebih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya subyektivitas. Ibnu

Khaldun (1332-1406), sejarawan muslim terkenal, menyebutkan tujuh faktor yang dipandang sebagai kelemahan dalam karya historiografi, yaitu: 1) sikap pemihakan sejarawan kepada mazhab-mazhab tertentu, 2) sejarawan terlalu percaya kepada pihak penulik berita sejarah, 3) sejarawan gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat dan didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan keliru, 4) sejarawan memberikan asumsi yang tidak beralasan terhadap sumber berita, 5) ketidaktahuan sejarawan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya, 6) kecenderungan sejarawan untuk mendekati diri kepada penguasa atau orang berpengaruh, dan 7) sejarawan tidak mengetahui watak berbagai kondisi yang muncul dalam peradaban. Bila ketujuh alasan tersebut atau sebagian darinya mewarnai karya sejarah dari suatu generasi maka generasi sejarawan yang lain juga akan terpengaruh dengannya. Karena itulah F.R. Ankersmit (1984) memberikan alasan induksi bahwa setiap telaah historis—baik dari masa silam, masa kini, atau masa depan—selalu bersifat subyektif. Alasan induksi ini, menurut sejarawan itu, juga tampak dari tataran relativisme yang terutama disebabkan oleh kepribadian sejarawan sendiri dalam memberikan penilaian dan sifat bahasa yang dipakainya. Demikian halnya penalaran seorang sejarawan yang menganut paham Marxis berbeda dengan jalan pikiran seorang idealis. Bagi kaum idealis, kenyataan historis itu merupakan buah hasil dari budi manusia, sedangkan menurut kaum Marxis bahwa pengetahuan sejarawan selalu berakar dalam pergaulannya dengan kenyataan; jadi bagi keduanya subyektivitas seorang sejarawan tak terelakkan (Ankersmit, 1987: 331-336).

Kalau kepribadian sejarawan tak dapat disangkal lagi merupakan faktor dominan yang dapat menjuruskan penulisan sejarah menjadi subyektif maka seluruh kesadaran sejarawan itu

sesungguhnya terselimuti oleh sistem kebudayaannya. Dalam hal ini, Sartono Kartodirdjo (1992: 64) mendefinisikannya sebagai subyektivitas kultural, yakni sikap atau pandangan penulis sejarah itu berhubungan dengan konteks kebudayaan masyarakatnya. Individu sejarawan sebagai anggota masyarakat akan lebur dalam proses sosialisasi sehingga seluruh pikiran, perasaan, dan kemauannya terpolakan menurut struktur etis, estetis, dan filosofis yang berlaku dalam masyarakat. Proses enkulturasi itu dengan serta merta sangat mempengaruhi pandangan penulis terhadap sejarah. Empu sejarawan Indonesia itu juga menandakan bahwa di dalam subyektivitas kultural itu tercakup pula subyektivitas waktu, karena kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam waktu tertentu. Telah menjadi istilah umum di kalangan ahli sejarah, seorang sejarawan merupakan anak zamannya dan bersama dengan orang-orang sezaman, tetapi ia pun menerima nilai-nilai yang dianut pada zamannya itu (Ankersmit, 1987: 333). Disinyalir bahwa subyektivitas waktu akan terasa lebih sulit untuk diatasi, apalagi dalam merekonstruksi sejarah kontemporer. Sejarawan yang menghayati hidup pada suatu masa tertentu baginya senantiasa merupakan masa kini (*contemporary*) maka rentang waktu yang amat dekat belum dapat membuat jarak antara sejarawan dengan peristiwa yang hendak ditulis.

Berdasarkan tinjauan mengenai subyektivitas sejarah di atas, timbulah persoalan apakah penulisan sejarah itu bisa menampilkan kenyataan obyektif, dan bagaimanakah sejarawan mampu mencapai obyektivitas sejarah? Pada dasarnya setiap hasil penulisan sejarah tidak seluruhnya relatif, karena dalam karya seperti itu dapat diperoleh pula hal-hal yang absolut, yakni fakta-fakta yang tidak diragukan lagi kesahihannya (Alfian, 1984: 6). Penunjukan fakta keras atau fakta yang telah menjadi pengetahuan umum dan tidak diragukan lagi

kebenarannya, contohnya fakta bahwa penyerbuan bangsa Mongol terhadap ibukota Baghdad terjadi pada 1258 M, merupakan keadaan yang mendukung obyektivitas. Sementara fakta lunak, yaitu apabila suatu fakta masih disangsikan kepastiannya, contohnya, mengenai awal penyebaran Islam ke Nusantara masih terjadi silang pendapat di kalangan sejarawan. Namun begitu, apapun keadaannya menyangkut fakta itu, obyektivitas sejarah sesungguhnya bisa dicapai apabila para sejarawan menyadari sebab-sebab yang membuat timbulnya ketidakpastian atau ketidaknetralan.

Bila kecenderungan pribadi merupakan pangkal terjadinya subyektivitas, menurut Walsh (1967) sebetulnya tidak selalu merupakan penghalang bagi obyektivitas, sebab sejarawan pun akan mampu untuk mengetahui perasaan-perasaan subyektif dalam dirinya dan ia akan selalu berusaha untuk berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam subyektivitas itu. Demikian halnya apabila teori-teori yang dipergunakan merupakan penyebab lain timbulnya kontradiksi dalam penafsiran sejarah, yang juga berakibat terjadinya perbedaan pendapat dalam menguraikan realitas-realitas sejarah, maka obyektivitas memungkinkan dapat dicapai dengan jalan mengkaji konflik sektarian dan filosofis. Lebih lanjut Walsh menjelaskan bahwa pengetahuan sejarah yang obyektif itu justru timbul bila terdapat beberapa pendapat di antara para sejarawan. Pernyataan mereka yang berbeda mengenai peristiwa sejarah yang sama belumlah merupakan perbedaan pendapat, sebab peristiwa sejarah itu bisa dilihat dari berbagai perspektif (Ankersmit, 1987: 343). Dengan demikian, seorang sejarawan dapat menulis sejarah Pemberontakan Cimareme 1919 dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomis, tetapi sejarawan lain dapat menyoroti latar belakang sosial atau budayanya. Kajian berdasarkan pendekatan yang berbeda itu saling melengkapi sehingga pada gilirannya bisa tercapai obyektivitas.

Atas dasar pertimbangan di atas, nyatalah bahwa penafsiran terhadap peristiwa sejarah akan beragam di dalam historiografi yang barangkali jumlahnya adalah sebanyak kepala penulis sejarah itu sendiri. Untuk ini, kejelasan tentang obyek bisa dilihat dengan cara pembedaan antara realitas sejarah seperti halnya yang ada dalam sejarah (*history as past actuality*) dan upaya sejarawan dalam memamparkan realitas sejarah itu (*history as written*). Dengan perkataan lain, obyektivitas dapat dicapai dengan jalan membedakan antara metode penelitian dalam menemukan realitas sejarah dan metode rasional guna menginterpretasikannya. Menurut Louis Gottschalk, benda-benda peninggalan masa lampau seperti mata uang, perkamen, dan reruntuhan adalah data sejarah, tetapi fakta-fakta sejarah yang hanya terdapat di dalam pikiran manusia merupakan lambang atas sesuatu yang pernah nyata terdapat dalam sejarah. Baik data maupun fakta merupakan landasan mutlak atas nilai karya-karya sejarah, padahal fakta sendiri diperoleh dari kesaksian dan tidak memiliki kenyataan obyektif. Untuk itu, agar fakta sejarah dapat dipelajari secara obyektif, ia harus mempunyai eksistensi yang bebas di luar pikiran penulis sejarah (Gottschalk, 1983: 28).

Bagaimanapun upaya sejarawan untuk menegakkan segi-segi obyektivitas itu hanyalah tampak di dalam perlawanannya terhadap alasan-alasan subyektivitas. Oleh karena itu, jalan tengah yang barangkali harus ditempuh seorang penulis sejarah ialah senantiasa mengutamakan realitas, bersikap jujur atas kecenderungan pribadinya, dan jelas pendekatan yang dipergunakannya. Khusus mengenai pendekatan di dalam penulisan sejarah, akhir-akhir ini para sejarawan modern menganjurkan adanya berbagai pendekatan, terutama ilmu-ilmu sosial. Langkah demikian bahkan diharapkan sebagai upaya untuk mengilmiahkan pengkajian sejarah, selain juga dapat mengakhiri perbedaan pendapat dalam penelitian sejarah,

mengurangi subyektivitas penelitian itu, dan meningkatkan kadar obyektivitas dalam pengkajian sejarah itu.

C. Pendekatan-pendekatan dalam Rekonstruksi Sejarah

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu menunjukkan fungsinya yang sejajar dengan disiplin-disiplin lain bagi kehidupan umat manusia kini dan masa mendatang. Kecenderungan demikian akan semakin nyata, apabila sejarah bukan hanya sebatas kisah biasa, melainkan di dalamnya terkandung eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang “bagaimana” dan “mengapa” peristiwa-peristiwa masa lampau terjadi. Di dalam upaya penulisan sejarah kritis itu sedikitnya terdapat dua implikasi metodologis, yaitu: *pertama*, keharusan memakai metode studi sejarah yang lebih *problem oriented*; dan *kedua*, penjelasan serta penelaahan sejarah didasarkan pada analisa yang *social-scientific*. Terdorong oleh kecenderungan metodologis ini maka di dalam praktiknya sejarawan harus menggunakan pendekatan apa dan konsep-konsep serta teori-teori yang bagaimana dari ilmu-ilmu sosial yang memungkinkan lebih strategis dalam merekonstruksi masa lampau itu.

Pembidangan ilmu sosial yang signifikan bagi pengkajian sejarah sangatlah beragam. Gambaran mengenai suatu peristiwa sejarah akan bisa ditentukan oleh disiplin atau pendekatan tertentu, yakni dari segi mana sejarawan memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan, unsur-unsur manakah yang diungkapkan, dan sebagainya. Dalam hal ini konstruk-konstruk konseptual atau teori-teori ilmu sosial mempunyai daya penjelas yang lebih besar bagi sejarawan dalam memberikan keterangan historis (*historical explanation*).

Diketahui bahwa sejarah sebagai ilmu tidak semata-mata bersifat naratif, tetapi ia juga bermaksud menerangkan kejadian

masa lampau itu secara analitis, maka dalam penulisannya dibutuhkan teori dan metodologi guna memahami pelbagai unsur dan faktor penyebab dari proses sejarah. Tentu saja di dalam proses itu terdapat perubahan-perubahan yang pada fase tertentu menciptakan situasi yang berbeda dengan situasi sebelum dan sesudahnya. Dalam sejarah naratif (cerita) biasanya diungkapkan bagaimana suatu peristiwa terjadi, lengkap dengan keterangan tentang apa, siapa, kapan dan di mana. Sementara dalam sejarah analitis, pertanyaan-pertanyaan itu lazimnya disusul dengan pertanyaan mengapa, untuk dapat memahami suatu peristiwa dengan melacak sebab-sebabnya (Kartodirdjo, 1992: 108-109). Penggabungan antara kedua model sejarah itu jadilah sejarah ilmiah yang menggambarkan kejadian sebagai proses sekaligus mengungkapkan aspek struktural atas kejadian-kejadian.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa cara penggarapan sejarah menghendaki penggunaan metodologi. Metodologi sebagai ilmu tentang metode sesungguhnya bermuara pada pendekatan yang hanya dapat dioperasionalisasikan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori. Oleh karena itu gambaran mengenai suatu peristiwa sangat ditentukan oleh pendekatan, yakni dari segi mana kita memandangnya, dimensi apa yang diperhatikan dan unsur-unsur apa yang diungkapkan. Untuk ini selanjutnya diuraikan sebagian dari bidang-bidang ilmu sosial itu, terutama sosiologi, antropologi, dan ilmu politik.

1. Pendekatan Sosiologis

Bila pendekatan ini dipergunakan dalam penggambaran tentang peristiwa masa lalu maka di dalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Konstruksi sejarah dengan pendekatan sosiologis itu bahkan dapat pula dikatakan sebagai sejarah sosial, karena pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan,

jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan, pelapisan sosial, peranan serta status sosial, dan lain sebagainya.

Secara metodologis, penggunaan sosiologi dalam kajian sejarah itu, sebagaimana dijelaskan Weber, adalah bertujuan memahami arti subyektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti obyektifnya. Dari sini tampaklah bahwa fungsionalisasi sosiologi mengarahkan pengkaji sejarah kepada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif sehingga pengetahuan teoretislah yang akan mampu membimbing sejarawan dalam menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa (Kartodirdjo, 1982: 54). Oleh karena itu, pemahaman sejarawan dengan pendekatan tersebut lebih bersifat subyektif.

Karya-karya sejarah sosial itu sendiri identik dengan sejarah berbagai pergerakan sosial; misalnya, gerakan petani, gerakan protes, gerakan keagamaan, gerakan kebangsaan, dan gerakan aliran ideologi atau politik. Untuk pembahasan peristiwa-peristiwa semacam ini antara lain biasa mempergunakan pendekatan *behavioral*. Tindakan atau perilaku mana yang ditonjolkan di dalam pembahasannya itu ialah mengenai aktor yang memimpin sebuah gerakan, latar belakang masyarakat yang dipimpinnya, dan interpretasi terhadap situasi pada zamannya. Selain itu, pola-pola serta bentuk-bentuk gerakan dijadikan perhatian utama, termasuk juga hal-hal yang terjadi setelah adanya gerakan sosial tertentu (Berkhofer, 1971: 66-74). Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh jalannya sesuatu gerakan sosial itu maka dalam pembahasannya perlu diungkapkan kondisi struktur sosial, pranata kepercayaan sebagai dasar gerakan, faktor-faktor pendukung atas pencetus gerakan, mobilisasi pengikutnya, tindakan perlawanan (*counter-action*) terhadap gerakan sosial itu, dan yang lebih penting

lagi adalah segi-segi pertumbuhan dan perkembangan dari segala faktor yang menyertai gerakan itu (Smelser, 1962: 47-70).

Penelitian pergerakan sejarah atas bantaun sosiologi itu biasanya dapat pula membantu mengungkapkan proses-proses sosial yang erat hubungannya dengan upaya pemahaman kausalitas antara pergerakan sosial dan perubahan sosial. Dengan perkataan lain, pergerakan sosial dapat ditempatkan dalam kerangka perubahan sosial yang keberlangsungannya mempunyai efek cukup luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Marvin E. Olsen (1968: 137) di dalam perubahan sosial itu sering kali disertai suasana kegelisahan sosial, disintegrasi, dan konflik sosial. Bahkan, antara konflik dan perubahan sosial itu sendiri, misalnya, pada dasarnya merupakan dua proses yang jalin-menjalin atau mempunyai efek yang timbal balik, tetapi pada kenyataannya pula satu sama lain tidak dapat disamakan karena merupakan proses yang terpisah.

Kajian atas perubahan sosial dan sejarah memang laksana seseorang memandang dua sisi mata uang. Seperti dijelaskan oleh Chitambar (1987) bahwa konsep perubahan itu menunjukkan perbedaan aspek fungsi dan struktur pada waktu kemudian dibanding dengan pada waktu sebelumnya. Apakah yang dimaksud dengan fungsi dan struktur itu? Ibrahim Alfian dengan mengikuti teori yang dijelaskan Chitambar itu menerangkan bahwa struktur adalah susunan sistematis yang menjadi sifat suatu masyarakat. Bagian-bagian dari struktur suatu masyarakat ialah kelompok, organisasi, institusi, komunitas, dan kolektivitas. Setiap bagian ini dapat dibedakan lagi berdasarkan jenis dan jumlahnya sehingga analisis struktural terjadi dengan jalan mengidentifikasi jenis dan jumlah bagian serta hubungan antar bagian atau komponen itu. Adapun fungsi adalah aspek pertalian antara berbagai komponen, termasuk di dalamnya jasa-jasa yang diberikan oleh suatu komponen kepada

komponen lainnya dalam keseluruhan struktur (*Basis*, 1992: 368).

Berdasarkan tema-tema sosial di atas, perhatian sejarawan dapat diarahkan kepada proses strukturisasi hubungan sosial antara berbagai komponen yang secara keseluruhannya mewujudkan sebuah sistem. Untuk ini dapat pula dipertimbangkan penggunaan pendekatan sistem (*system approach*). Dalam melukiskan sebuah sistem sosial itu dari suatu kurun sejarah, beberapa model dapat dipakai dalam mengorganisasikan dan mensintesis tulisan sejarah. Model di sini berfungsi pula sebagai inspirasi heuristik bagi pencarian dan pengumpulan bahan serta penyusunannya, tetapi secara umum penulisan sejarah sosiologis dapat dibedakan antara model yang bersifat sinkronis dan diakronis. Menurut Kuntowijoyo (1994: 36) dengan model sinkronis masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan bagiannya (substruktur), dan peristiwa-peristiwa dilihat dalam keadaan statis; sedangkan model diakronis lebih mengutamakan pelukisan sosial yang berdimensi waktu. Pada gilirannya, model diakronis sebagai tujuan utama dari penulisan sejarah itu bukan saja memperhatikan struktur dan fungsinya pada sebuah masyarakat, melainkan sebagai suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkrit. Dengan demikian model diakronis dapat bermula dari sebuah situasi secara sinkronis pula, atau melalui situasi antara permulaan menuju ke situasi terakhir.

Di dalam buku *Metodologi Sejarah* itu, selanjutnya Kuntowijoyo memperkenalkan enam model penulisan sejarah berdasarkan pendekatan sosiologis. Keenam model penulisan yang sekaligus berguna untuk meningkatkan keterampilan sejarawan dalam menentukan strateginya itu ialah: (1) Model Evolusi, yang melukiskan perkembangan sebuah masyarakat dan permulaan berdiri sampai dengan menjadi masyarakat yang kompleks; (2) Model Lingkaran

Sentral, hal mana penulisan sejarah bertolak dari titik peristiwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara sinkronis, lalu secara diakronis ditunjukkan pertumbuhannya; (3) Model Interval, yaitu berupa kumpulan lukisan sinkronis yang disusun secara kronologis, tetapi antara satu periode dengan periode lainnya tanpa adanya mata rantai dan tidakselalu menunjukkan hubungan sebab akibat; (4) Model Tingkat Perkembangan, yakni tahap-tahap perkembangan masyarakat dijelaskan dengan memakai model diferensiasi struktural; (5) Model Jangka Panjang-Menengah-Pendek, artinya sejarah ditetapkan dalam tiga macam keberlangsungan; sejarah jangka panjang merupakan perulangan yang konstan tetapi perubahannya lamban sehingga perkembangan waktunya tak dapat dilihat; sejarah jangka menengah perkembangannya lamban tetapi ritmenya dapat dirasakan; sedangkan sejarah jangka pendek adalah sejarah dari kejadian-kejadian yang berjalan dengan serba cepat; (6) Model Sistematis, model terakhir ini biasa dipegunakan untuk menelusuri sejarah masyarakat dalam konteks perubahan sosial.

2. Pendekatan Antropologis

Antropologi sering kali sukar dibedakan dari sosiologi karena kedua bidang ilmu tersebut sama-sama mempelajari masyarakat, terutama bentuk-bentuk sosial dan strukturnya, baik yang terwujud dalam kelakuan individu maupun yang terwujud dalam kelakuan sosial atau kelompok. Hal utama yang membedakan antropologi dan sosiologi adalah pendekatannya, sasaran utama kajiannya, dan sejarah perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan. Mengenai pendekatannya misalnya, antropologi sering kali dikembangkan di dalam bidang kajian untuk mempelajari masalah-masalah budaya. Demikian kajian antropologi lazimnya mencakup pelbagai dimensi kehidupan sehingga antropologi itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan cabang-cabangnya seperti antropologi sosial,

antropologi politik, dan antropologi budaya. Dalam tulisan ini hanya ingin dijelaskan mengenai antropologi budaya dan fungsionalisasinya sebagai pendekatan dalam pengkajian sejarah.

Titik singgung antara antropologi budaya dan sejarah sangatlah jelas karena keduanya mempelajari manusia sebagai obyeknya. Apabila sejarah menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lampau maka gambaran itu mencakup unsur-unsur kebudayaannya sehingga di sini tampak adanya tumpang tindih antara bidang sejarah dan antropologi budaya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya sejarah dan sosiologi, perpaduan antara pandangan sinkronis dan diakronis merupakan pendekatan yang bisa memadukan antara kedua disiplin itu.

Atas kedua pendekatan di atas, Koentjaraningrat, Profesor Antropologi dari Universitas Indonesia, menyebutkan istilah-istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama. *Pertama*, integrasi deskriptif, digunakan untuk penelitian diakronik, yaitu untuk memperoleh pengertian tentang manusia dan tingkah lakunya dengan merekonstruksi asal-usul, perkembangan, dan penyebarannya serta berbagai kontak antarbudaya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Data terpenting yang dimasukkan ke dalam integrasi deskriptif itulah data etnografis. Selanjutnya, analisa terhadap data etnografi tersebut dapatlah diperoleh suatu gambaran deskriptif yang menyeluruh tentang sejarah kebudayaan suku-suku bangsa. *Kedua*, pendekatan generalisasi, yaitu digunakan untuk penelitian segi-segi sinkronis tentang sesuatu kebudayaan. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pengertian tentang prinsip-prinsip dasar kebudayaan manusia dalam kerangka-kerangka kebudayaan yang hidup pada tataran waktu kekinian (Koentjaraningrat dalam Soedjatmoko, dkk., ed., 1995: 264-265).

Bagaimana data antropologis dan metodenya dapat

dipergunakan bagi penulisan sejarah? Dalam hal ini, sedikitnya lima metode yang dianggap penting, sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat dalam tulisannya itu:

- a. Metode asimilasi, yang menjelaskan proses saling menghisap unsur-unsur budaya dalam situasi kontak berbagai kelompok kebudayaan. Di sini “prinsip integrasi” dan “prinsip fungsi” merupakan metode-metode yang berkaitan dengan proses adaptasi serta asimilasi unsur kebudayaan asing. Prinsip integrasi dapat dilihat dari sejumlah unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dalam keseluruhannya apabila bisa disesuaikan dengan bentuk perilaku lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang ada pada saat itu. Adapun prinsip fungsi memandang suatu unsur kebudayaan itu tidak mudah berubah apabila unsur itu mempunyai suatu fungsi yang penting sekali dalam masyarakat bersangkutan.
- b. Metode fungsional dalam studi masyarakat, yaitu deskripsian suatu kebudayaan didasarkan pada sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah sebagai entitas yang lengkap dan sistematis. Dalam hal ini komunitas dapat dipandang sebagai suatu sistem ekologi, sistem sosial, sistem pandangan hidup, dan sistem penyesuaian kepribadian.
- c. Metode fungsional dalam analisis tentang mitologi. Berdasarkan metode ini, analisis mitologi didasarkan pada anggapan bahwa ceritera gaib berisi ide, pemikiran, pandangan hidup, dan sebagainya yang menjadi sumber motivasi dari kegiatan fisik dan spiritual masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, prinsip-prinsip yang mendasari ceritera gaib menjadi kunci dalam memahami prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sebagian besar

masyarakat dan kebudayaan yang memiliki mitos.

- d. Metode silsilah. Tujuan utama dari metode ini adalah melakukan pengumpulan terminologi kekerabatan dalam bahasa tertentu guna menganalisis sistem kekerabatan. Namun, melalui metode ini dapat juga digunakan untuk mengumpulkan keterangan tentang banyak unsur, gejala, dan peristiwa yang terjadi di sekeliling individu; bahkan dapat juga menghasilkan ketearngan tentang peristiwa yang terjadi pada beberapa generasi sebelumnya. Data yang dikumpulkan melalui metode silsilah ini kemudian dapat menjadi bahan dasar untuk menyusun kembali sejarah masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan metode-metode di atas, dapatlah disimpulkan bahwa antropologi akan selalu berfungsi dalam pengkajian sejarah, sebab melalui antropologilah latar bleakang sosial-budaya dari peristiwa-peristiwa sejarah dapat terpaparkan. Demikian pula ketika ingin diketahui mengapa suatu kebudayaan itu berubah maka perubahan itu harus dikaji dalam perspektif sejarahnya dengan menggunakan konsep dan teori antropologi atau kebudayaan.

3 Pendekatan Ilmu Politik

Bila kita membuka kembali karya-karya sejarah konvensional, dapatlah dikatakan bahwa sejarah adalah identik dengan politik. Alasannya, karena melalui karya-karya seperti itu lebih banyak diperoleh pengetahuan tentang jalannya sejarah yang ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik. Namun, apabila politik itu sendiri diartikan sebagai pola distribusi kekuasaan maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus dipelajari tentang hakikat dan tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola dari kelakuan individu dan kelompok yang membantu menjelaskan

bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi: partai-partai politik, kelompok-kelompok *interest*, komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.

Dalam proses politik biasanya masalah kepemimpinan dipandang sebagai faktor penentu dan senantiasa menjadi tolok ukur. Untuk ini penting diketahui klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah dibedakan oleh Max Weber ke dalam tiga jenis otoritas: (1) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; (2) otoritas tradisional, yang dimiliki berdasarkan pewarisan; dan (3) otoritas legal-rasional, yaitu yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya (Kartodirdjo, 1992: 150).

Dalam sejarah Indonesia abad ke-20 jenis-jenis kepemimpinan berdasarkan otoritas itu, secara umum dapat diperhatikan misalnya, semenjak pertumbuhan gerakan nasional. Bagaimana peranan kalangan pemuka agama (ulama) dengan karismatiknya mampu memobilisasi umat melalui organisasi-organisasi keagamaan. Begitu pula kalangan intelegensia yang berperan memimpin pergerakan nasional dengan sikap legal-rasionalnya untuk membawa Indonesia kepada gerbang kemerdekaan. Akan tetapi, di tengah maraknya proses modernisasi dan pembangunan Indonesia pada penghujung abad ini, masih dapat dijumpai pula eksistensi kepemimpinan tradisional sebagaimana halnya dalam kehidupan keraton di Jawa.

Selanjutnya, analisis sejarah berkenaan dengan tema-tema kepemimpinan seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan lebih mendalam lagi berdasarkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural; sebab telah menjadi kenyataan sejarah, atau bahkan merupakan *sunnatullah*, apabila seseorang mampu menduduki posisi sosial tinggi maka dia akan mudah mengambil peranan sebagai pemimpin dan berkesempatan untuk memperoleh

bagian dari kekuasaan. Begitu pula sumber daya ekonomis bisa merupakan pendukung kekuasaan, bukan hanya proses kekuasaan itu sendiri selalu membutuhkan biaya yang cukup banyak, melainkan dari model-model kekuasaan itu sendiri juga akan terpantul sebagai jenis kepentingan individu maupun golongan terhadap kebutuhan ekonomi. Tak pelak lagi, faktor kultural juga merupakan penentu otoritas kekuasaan karena politik sangat dipengaruhi oleh orientasi nilai dan pandangan hidup. Di dalam komunitas santri umpamanya, seorang pemimin itu akan selalu dilihat oleh masyarakatnya dari segi ketakwaan dan kesalehannya. Atas kecenderungan itu semua, telaah historis dapat dilakukan dengan jalan mengidentifikasi hubungan antar segala faktor dari suatu sistem atau komunitas. Jadi, semisal “konflik politik” akan dijadikan sasaran penelitian sejarah maka permasalahan serta eksplanasinya dapat dikembalikan kepada faktor-faktor sosial-budaya dan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

4. Pendekatan Keagamaan

Sebagai pengantar atas pembahasan ini, penting diberikan batasan-batasan terlebih dahulu tentang makna agama. Seperti disebutkan Keith A Roberts, bahwa agama dapat dilihat dalam definisinya secara *substansif*, *fungsional*, dan *simbolik*. Agama secara substansif berarti dilihat dari esensinya yang sering kali dipahami sebagai suatu kepercayaan, sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk-bentuk tradisional sesuatu agama. Sementara itu dalam definisinya secara fungsional, agama dilihat dalam segi-segi peran. Fungsi yang diperankan merupakan kriteria untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi suatu fenomena agama. Pada umumnya fungsi tersebut biasa dikategorikan menjadi fungsi *manifest*, yaitu fungsi yang disadari dan

dikehendaki oleh sesuatu pola sosial atau lembaga; dan fungsi *laten*, yang tidak disadari dan tidak dikehendaki. Adapun definisi simbolik tentang agama adalah dilihat dalam realitas simbol, yaitu benda yang menggambarkan atau mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap sentral dalam agama. Simbol bisa berupa objek, perilaku, mitos, legenda dan lain-lain (Djamari, 1988: 15-17).

Selanjutnya, apabila agama dijadikan sasaran penelitian, maka realitas agama secara objektif dapat dipetakan berdasarkan berbagai sudut pandang. Secara sosiologis, misalnya, agama dipahami sebagai sesuatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya. Sistem sosial dimaksud berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayai dan didayaguna untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luar. Unsur-unsur yang terangkum dalam definisi ini, antara lain: 1) agama disebut *jenis sistem sosial*, yang meliputi suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, dan suatu kompleks kaidah yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan tertentu, 2) agama sebagai *kekuatan-kekuatan non-empiris*, yakni agama itu hanya berurusan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dan yang dipercayai sebagai arwah, roh-roh, dan Roh Tertinggi; 3) agama didayagunakan untuk *kepentingan sendiri dan masyarakat sekitarnya*, yakni kepentingan dalam arti keselamatan di dunia dan sesudah kematian (Hendropuspito, 1984: 34).

Pemahaman atas makna serta obyek agama seperti tersebut di atas, apabila diarahkan terhadap agama Islam juga dapat dijumpai pendefinisian yang sangat beragam. Agama Islam secara umum biasa dipahami sebagai sistem kepercayaan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah (alquran), yang dijelaskan atas sabda-sabda Muhammad saw (al-Hadits), kemudian dikembangkan menjadi pandangan hidup pemeluknya melalui

pemikiran-pemikiran para Ulama, dan menjadi realitas kehidupan umat Islam di dalam keragaman paham, tindakan, komunitas, dan lingkungan. Pendefinisian lebih lanjut atas agama Islam ini, di dalam perkembangan mutakhir dapat dipetakan berdasarkan kecenderungan atau pembedaan studi Islam. Dilihat dari segi ajaran, sejumlah ulama tradisional mengklasifikasikan Islam itu menjadi tiga kelompok besar, yakni *akidah*, *syari'ah*, dan *akhlak-tasawuf*. Tiga disiplin ini memiliki percabangan masing-masing seiring sejarah perkembangan, pemikiran serta penafsiran-penafsiran, dan kecenderungan pengembangan dalam aliran-aliran. Masih banyak lagi pengklasifikasian tentang agama Islam yang diberikan para ahli, dan termasuk pembagian dalam pengembangan disiplin ilmu-ilmu keislaman, sebagaimana dikembangkan di perguruan tinggi Islam. Akan tetapi meninjau obyek penelitian agama dalam perspektif sejarah ini akan lebih mudah berdasarkan periodisasi sejarah Islam itu.

Lalu bagaimana agama itu dapat dijadikan sasaran penelitian berdasarkan pendekatan sejarah? Pendekatan di sini berarti mengutamakan orientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah, sehingga sejarah berperan sebagai *metode analisis*. Atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian, maka kaitannya dengan agama sebagai sasaran penelitian haruslah dijelaskan faktanya yang berhubungan dengan sesuatu waktu, apakah itu masalah kepercayaan, hukum, moral, sistem ekonomi, politik, budaya, pemikiran, dan sebagainya, dari mulai bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks.

Jika pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan gejala-gejala agama dengan menelusuri sumber di masa silam, maka pendekatan bisa didasarkan kepada personal historis atau

atas perkembangan kebudayaan umat pemeluknya. Pendekatan semacam itu berusaha menelusuri awal perkembangan tokoh keagamaan secara individual; untuk menemukan sumber-sumber dan jejak perkembangan perilaku keagamaan sebagai dialog dengan dunia sekitarnya, atau untuk mencari pola-pola interaksi antara agama dan masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut, sejarawan dapat menyajikan deskripsi detail dan eksplanasi tentang sebab dan akibat atas sesuatu kejadian tertentu. Pendekatan sejarah pada gilirannya akan membimbing ke arah pengembangan teori tentang evolusi agama dan perkembangan tipologi kelompok-kelompok keagamaan.

Pendekatan sejarah untuk penelitian agama sebetulnya bukan hanya dipergunakan oleh sejarawan murni, melainkan juga dipergunakan oleh ilmuwan lain. Di kalangan sosiolog agama misalnya, Talcott Parson dan Bellah mempergunakannya dalam rangka menjelaskan evolusi agama; Berger dalam uraian tentang mudarnya agama dalam masyarakat modern; dan Max Weber ketika menerangkan tentang sumbangan teologi Protestan dalam melahirkan kapitalisme (Djamari, : 52). Oleh karena itu pendekatan sejarah dapat melahirkan pemahaman lebih luas tentang berbagai persoalan agama, termasuk dapat dilakukan oleh para calon sarjana agama dalam berbagai disiplin ilmu.

Penelitian terhadap masalah-masalah agama dan keagamaan berdasarkan pendekatan sejarah dapat pula dikatakan sebagai penelitian “sejarah agama”, karena secara objektif akan mengarahkan sasaran penelitiannya terhadap berbagai persoalan sejarah agama, disamping keharusan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan sejarah. Aplikasi pendekatan ini di dalam proses penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan pendekatan lain seperti sosiologi dan antropologi, terutama dalam

penggunaan sumber sebagai instrumen pembuktian terhadap masalah yang diteliti, serta karakteristik lainnya sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu. Pendekatan sejarah secara khusus juga tampak dalam prosedur yang ditempuh di dalam proses penelitian.

Penelitian sejarah agama dapatlah ditempuh dengan prosedurnya dimulai dari penentuan topik penelitian berdasarkan asumsi atau problematika ilmiah di sekitar sejarah agama. Kemudian disusun proposal penelitian. Di dalam proposal ini dijelaskan arti penting sesuatu masalah akan diteliti, kerangka metodologis, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan sumber sejarah (*heuristik*) dilakukan terhadap berbagai sumber sejarah agama yang mempunyai nilai akurat, autentik dan kredibel, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber-sumber yang diperoleh perlu dipertimbangkan apakah termasuk *sumber primer*, ataukah *sumber sekunder*, yakni sumber yang langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa agama dalam sejarah.

Untuk mengurangi kesulitan di dalam menghadapi berbagai sumber sejarah, dan dalam rangka menghemat waktu serta ketepatan sumber, maka diperlukan seleksi sumber sejarah berdasarkan relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber yang relevan (benar-benar mendukung dan berhubungan) dengan penulisan sejarah agama penting diambil, sedangkan sumber yang tidak relevan lebih baik diabaikan. Sumber yang benar-benar memiliki nilai relevansi itu, kemudian dikaji ulang dengan menggunakan *metode kritik* sejarah.

Pada giliran lainnya, dilakukan *Interpretasi Sejarah*. Langkah ini sebetulnya merupakan proses atau kegiatan penelitian yang tidak terpisahkan dari langkah penulisan sejarah, yaitu proses

analisis terhadap fakta-fakta sejarah, bahkan proses penyusunan fakta-fakta sejarah itu sendiri. Fakta sejarah agama haruslah objektif, tetapi bukan berarti peneliti tidak memiliki peluang untuk menerangkan fakta itu atas dukungan teori-teori. Sebab di dalam proses interpretasi sejarah dimungkinkan terdapat unsur-unsur subjektif peneliti, terutama gaya bahasa dan sistem kategorisasi atau konseptualisasi terhadap fakta-fakta sejarah berdasarkan teori yang dikembangkan.

Akhirnya, selayaknya penelitian sejarah pada umumnya sampailah pada tahap penulisan sejarah atau *historiografi*. Dalam hal ini penulisan sejarah agama didasarkan kerangka penulisan yang sudah dipersiapkan, yang sesungguhnya pola penyusunan tergantung kepada penulis, apakah berdasarkan pola yang dikembangkan secara urut waktu atau periodisasi atau didasarkan kepada tema-tema unik sesuai peristiwa sejarah. Demikian pula model pemaparan atas fakta-fakta sejarah agama dapat ditempuh secara *deduktif* maupun *induktif*. Suatu hal yang penting dicatat, bahwa penulisan sejarah biasa dikembangkan secara *kualitatif*, sehingga antara deskripsi dan analisis fakta merupakan satu kesatuan di dalam pemaparan sejarah.

Demikian secara singkat dapat dinyatakan bahwa pendekatan sejarah yang menekankan kepada pemahaman masalah-masalah agama di dalam kenyataan masa lampau, dimungkinkan dapat melahirkan produk penelitian yang luas dan beraneka ragam masalah. Pendekatan sejarah memang suatu disiplin yang memiliki ciri khas dibanding disiplin-disiplin lain, namun ia akan mampu menguak tentang keseluruhan aspek agama dan ummatnya sepanjang sejarah. Peristiwa-peristiwa unik tentang agama dan keagamaan dapat dilacak dalam kesejarahan yang berlangsung sejak awal pertumbuhan agama sampai sekarang, termasuk dalam

penyebarannya melalui kawasan-kawasan yang berbeda latarkultur serta proses sosial masyarakat bersangkutan. Masing-masing perkembangan agama dan keagamaan di berbagai kawasan itu hingga kini juga dapat dipelajari berdasarkan periodisasi sejarah. Orientasi penelitian berdasarkan pendekatan sejarah ini dapat menjadi lahan penelitian yang amat luas bagi para mahasiswa dan sarjana agama dalam berbagai disiplin ilmu agama Islam khususnya.

D. Kerangka Konseptual dan Teoretik dalam Metodologi Sejarah

Para ahli di bidang metodologi sejarah sering kali menyatakan bahwa untuk mempermudah sejarawan di dalam pengkajiannya terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau akan selalu dibutuhkan kerangka konseptual dan teoretik, yang berfungsi sebagai alat-alat eksplanansi, analisis serta sintesis sejarah. Dengan kata lain, kerangka pemikiran tersebut merupakan pangkal metodologi sejarah, yang bersumberkan pada pendekatan ataupun disiplin ilmu tertentu yang dipergunakan dalam sesuatu penelitian sejarah. Guna mengetahui signifikansi konsep dan teori bagi pengkajian sejarah itu maka uraian berikut ini diharapkan dapat memperjelas tentang keduanya.

1. Kerangka Konseptual

Secara definitif, konsep itu ialah “suatu abstraksi mengenai suatu gejala atau realitas”. Realitas yang ditunjuk oleh konsep itu bisa berupa penyebutan orang-orang seperti: Muslimin, Muslimat, Kristiani, Hinduis, tradisionil, reformis; dan bisa juga berupa perilaku atau kelas-kelas fenomena, misalnya: perusuh, pemberontak, bangsawan, priyayi, dan rakyat. Konsep berarti pula kata benda umum, dalam ilmu politik umpamanya ada konsep-konsep kekuasaan, kewibawaan, kepemimpinan, konflik, dan integrasi. Demikian konsep dalam sejarah merupakan sebuah

abstraksi atas peristiwa-peristiwa masa lampau umat manusia.

Proses penentuan konsep disebut “konseptualisasi”, artinya seseorang membagi-bagi dan mengelompokkan fenomena empiris atas dasar persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Dalam hal ini maka konsep merupakan ide umum yang dipakai untuk membagi sesuatu dalam kelas-kelas atau bagian-bagian tertentu. Akan tetapi, pada prinsipnya konsep hanyalah melukiskan kategori tunggal, bukan merupakan pertalian antara kategori-kategori; sedangkan pertalian konsep-konsep disebut hipotesis-hipotesis, kerangka konseptual, atau teori-teori.

Jenis-jenis konsep di dalam sejarah, seperti halnya ilmu-ilmu sosial yang lain, dapat dibedakan dalam tiga jenis sebagai berikut:

a. Konsep empirik, ialah sesuatu yang dikonseptualisasikan itu dapat dibuktikan dan diukur dengan data pancaindera. Berdasarkan konsep empirik dapatlah sesuatu itu ditelaah secara intelektual, dan berbagai aspek yang ada di dalamnya dapat pula diidentifikasi serta dianalisis. Konsep empirik menghendaki dua bentuk definisi, yaitu: (1) *definisi konseptual*, yakni isi konsep dalam komunikasi baik lisan maupun tertulis; (2) *definisi operasional*, yakni konsep itu dapat ditunjukkan dalam gejala-gejalanya secara empiris (Alfian dalam *Basis*, 1992: 366). Contoh mengenai konsep “kaum santri”, dapat didefinisikan secara konseptual sebagai “struktur sosial atau kategori yang dibedakan dengan struktur sejenis yang lain atas dasar ketaatan, keyakinan, dan ritual”. Sementara secara operasional dapat pula ditetapkan bahwa yang termasuk dalam struktur itu adalah komunitas pesantren, kaum terpelajar, dan para aktivis muslim.

b. Konsep heuristik, ialah konsep yang dianggap tidak

nyata, tetapi digunakan untuk dapat memberi gambaran mengenai pertalian empiris dan untuk menuntun riset. Contohnya, konsep “kelompok dominan” atau konsep “kelompok kepentingan” dari ahli politik. Demikian pula konsep “kewirausahaan” atau “entrepreneurship” di dalam ilmu ekonomi. Konsep-konsep seperti ini menghendaki kejelasan fungsi-fungsi umum yang dapat dikembangkan pula untuk merujuk atau menunjuk pada orang yang menjalankan fungsi-fungsi itu. Menurut Alfian (dalam *Ibid.*), konsep-konsep seperti itu dapat dibedakan menjadi dua tipe: (1) *ideal type*, yakni konsep itu tidak seharusnya menunjuk secara langsung orang perorangan atau kelompok tertentu sehingga keadaannya bersifat fiktif. Namun demikian, konsep dimaksud tetap berguna untuk membuat gambaran mengenai pertaliannya dalam dunia empiris; (2) *real type*, yakni bukanlah fiksi sepenuhnya, melainkan suatu kelas umum mengenai orang-orang atau peristiwa yang riil.

c. *Konsep-konsep metafisik*. Contohnya, “Tuhan”, “sunnatullah”, dan “takdir” adalah konsep-konsep metafisis, karena pada prinsipnya harus diterima atas dasar keyakinan. Konsep semacam ini tidak mempunyai rujukan atau petunjuk empiris, tidak dapat diukur dan ditentukan melalui pancaindera, dan tidak dapat diumpamakan secara khusus untuk membantu sejarawan dalam konseptualisasi peristiwa-peristiwa nyata (*empiris*).

Berdasarkan klasifikasi di atas, kesemuanya adalah konsep tetapi tingkat abstraksinya berbeda-beda.

2. Kerangka Teoretik

Teori dalam disiplin sejarah biasanya dinamakan “kerangka

referensi” atau “skema pemikiran”. Dalam pengertian lebih luas, teori adalah suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam penelitiannya, dalam menyusun bahan-bahan (data) yang diperolehnya dari analisis sumber, dan juga dalam mengevaluasi hasil penemuannya (Alfian dalam *Basis*, Oktober 1992: 362).

Teori itu sendiri, dipandang sebagai bagian pokok ilmu sejarah, ialah apabila penulisan atas suatu peristiwa itu sampai kepada upaya melakukan analisa atas faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji (Kartodirdjo, 1992: 2). Sementara itu, apabila pendekatan, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah berfungsi sebagai pokok metodologi maka pendekatan itu dapat dioperasionalkan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori.

Karakteristik teori di dalam ilmu sejarah pada dasarnya tidak berbeda dengan teori-teori ilmiah pada umumnya. Menurut Percy S. Cohen (1969) yang dikutip T. Ibrahim Alfian (*Basis*, 1992: 363) bahwa definisi teori ilmiah adalah sebagai berikut: “*A scientific theory, is, ideally, a universal, empirical statement, which asserts a causal connection between two or more types of event*”. Untuk ini uraian selanjutnya akan mencoba menjelaskan tiga ciri teori ilmiah tersebut.

- a. Sebuah teori ilmiah adalah *universal*. Artinya, teori itu menyatakan sesuatu mengenai kondisi-kondisi yang mungkin melahirkan beberapa peristiwa atau jenis peristiwa. Berdasarkan pengertian ini, sifat universal sebuah teori tampak kontradiksi dengan sejarah sebagai ilmu yang mengungkapkan peristiwa dalam keunikannya. Padahal universalitas teori itu juga bisa berarti merujuk kepada proses generalisasi, yakni merujuk kepada

kenyataan yang ajeg (keteraturan), dalil, atau hukum yang berlaku untuk beberapa kasus. Dalam hal ini sifat universal memungkinkan terjadi dalam sejarah mengenai kecenderungan-kecenderungan sosial, khususnya segi-segi yang berhubungan dengan pola kelakuan manusia berdasarkan orientasi nilai, sistem sosial, kebutuhan ekonomis, dan sifat psikologis. Dengan perkataan lain, dalam pengkajian sejarah dengan pendekatan ilmu sosial akan terungkaplah pola, tendensi, dan struktur yang mirip antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sebagai contoh, jalannya suatu revolusi di satu negara dalam segi formalnya mirip dengan revolusi di negara lain. Akan tetapi, dalam segi substansinya setiap revolusi itu adalah unik. Jadi universalitas teori revolusi itu terletak pada hal formalnya. Upaya pencarian segi-segi formal atas peristiwa sejarah, menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 104), di antaranya dapat dilakukan dengan metode komparatif (perbandingan). Contohnya, mengenai suatu perbandingan sejarah “gerakan tarekat sebagai gerakan sosial-keagamaan” dapat diidentifikasi antara lain: soal ajaran, kepemimpinan, hubungan dengan penganut, mobilisasi, struktur organisasi, dan interaksi dengan golongan lain atau penguasa.

- b. Teori ilmiah harus empiris. Maksudnya, sifat pernyataan ilmiah diambil dari peristiwa-peristiwa khusus atau pernyataan itu dapat dibuktikan melalui observasi. Jadi, suatu teori disebut empiris bila teori itu dapat diuji, dan sebaliknya pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan observasi maka teori dapat diubah, disesuaikan, atau bahkan ditolak. Sebagai contoh, orang menyatakan bahwa “kaum muslimin tradisional itu cenderung lambat

dalam mengantisipasi pembaruan”, teori ini dibuktikan dalam gerakan kaum sufi misalnya, tetapi bisa juga tidak empiris kalau ternyata ada suasana khusus dari kaum sufi itu yang menunjukkan gejala adaptif terhadap kemajuan zaman.

- c. Suatu teori harus bersifat kausal. Ini berarti di dalam suatu pernyataan tentang peristiwa terdapat keterangan yang menyebutkan sebabnya. Dapat dikatakan pula bahwa terdapat kondisi-kondisi yang harus ada (*necessary conditions*) atau kondisi yang cukup (*sufficient conditions*) bagi terjadinya jenis-jenis peristiwa tertentu. Di dalam penjelasan historis, kausalitas peristiwa itu merupakan uraian atau jawaban atas pertanyaan “mengapa” dan keterangannya ditunjukkan secara eksplisit. Menurut Ankersmit (1987: 192), kausalitas dalam pengkajian sejarah biasanya berkaitan dengan proses-proses perubahan sehingga menyebutkan “sebab” sesuatu peristiwa itu berkaitan erat dengan keterangan tentang “perubahan”. Hal demikian sangatlah lazim di dalam pemikiran sejarah, sebab suatu proses sejarah itu sekaligus melihat hubungan kausalnya dengan gejala sejarah yang lain baik yang terjadi sebelumnya maupun sesudahnya, dan dengan begitu gerakan sejarah lazim pula disebut perubahan.

Teori-teori kausalitas dalam pengkajian sejarah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi monokausalitas dan multikausalitas. Yang pertama, kausalitas peristiwa dirujuk kepada suatu faktor saja (*deterministik*), yaitu misalnya determinisme geografis, rasial, ekonomis, dan sebagainya adapun multikausalitas dikembalikan kepada *perspektivisme*, artinya memandang penyebab suatu peristiwa itu dari

berbagai segi. Kausalitas yang kedua ini didasarkan pada alasan bahwa berbagai gejala tidak lagi dipandang secara sederhana, tetapi bersifat kompleks, sehingga berbagai unsur atau aspeknya dapat dianalisis dengan pendekatan dari beberapa perspektif, seperti perspektif ekonomis, sosial, politik, kultural, dan agama.

Sebagai pungkasan atas uraian ini, sebagaimana disimpulkan T. Ibrahim Alfian, teori itu pada dasarnya adalah seperangkat proposisi yang menerangkan bahwa konsep-konsep tertentu adalah saling bertalian dengan cara-cara tertentu. Proposisi-proposisi yang menceritakan bagaimana pertalian antar konsep adalah definisi, dalil, dan hipotesis. Pada gilirannya, segala teori dapat membantu sejarawan dalam merekonstruksi masa lampau selama prinsip relevansi tetap dipegang teguh.

E. Perubahan (*Changes*) sebagai Asas Konsepsi Sejarah

Kerangka konseptual dan teoretik untuk penelitian sejarah sebagaimana penjelasan di atas, terutama pada sifatnya yang kausalitas, sesungguhnya hal itu biasa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah tentang proses-poses perubahan. Hal ini sangatlah lazim dalam pemikiran sejarah, karena suatu proses sejarah pada dasarnya adalah juga proses perubahan (Ankersmith, 1987: 192). Sehubungan dengan relevansi sejarah dengan perubahan ini, maka dapatlah dikatakan bahwa asas pengembangan kerangka konseptual bagi penelitian sejarah lebih ditekankan kepada perspektif perubahan tersebut.

Secara umum, perkembangan peristiwa dalam kurun waktu tertentu memang berpapasan dengan bermacam-macam perubahan yang mempengaruhinya. Misalkan mengenai perubahan sosial, pendekatan sejarah perlu melacak struktur

sosial yang melatarbelangi perubahan-perubahan dalam masyarakat, termasuk di dalam konteks ini adalah konflik-konflik sosial dan kepentingan, sistem-sistem tradisional dan keagamaan, dan pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat yang bersangkutan (Poloma, 1984:23). Kemudian peristiwa-peristiwa itu di dalam gejalanya yang lebih kompleks dapat pula dilihat dari adanya *transformasi struktural*, yang ditelusuri dari adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi dan reorganisasi, dan proses perubahan jenis-jenis solidaritas di dalam sejarah.

Pengembangan metodologi sejarah berkenaan dengan perubahan-perubahan sesuatu peristiwa, sedikitnya didasarkan pada dua arah yang berlawanan. *Pertama*, melakukan deduksi dari yang umum ke yang khusus, dengan memperbandingkan model-model umum perubahan sejarah untuk melihat apa model-model peristiwa yang ditemukan dan dapat dimodifikasi. *Kedua*, melakukan induksi dari yang khusus ke yang umum dalam upaya menggambarkan proses perubahan pada masyarakat tertentu, dan untuk mencari keseimbangan beberapa refleksi tentang hubungan problematis antara peristiwa dan struktur. Perlu ditekankan di sini, seperti pengertian umumnya tentang 'perubahan sosial', maka dalam studi sejarah adalah perubahan-perubahan struktur dan fungsi, yang dilihat atau digunakan dalam menganalisis perubahannya itu mencakup perkembangan berbagai peristiwa (Burke, 2001: 195-196).

Banyak teori yang dikemukakan para ahli sejarah maupun sosial tentang konsep perubahan serta model-modelnya. Studi ini dapat menjelaskan dua model penting tentang perubahan yang dikemukakan Spencer dan Marx. Model Spencer yang bersifat *evoluf* dan *linear* adalah model yang menekankan pada evolusi sosial, yakni perubahan berlangsung secara pelan-pelan dan kumulatif, dan perubahan ditentukan dari

dalam (endogen). Dalam hal ini menurut Spencer, perubahan terjadi dari 'homogenitas yang tidak koheren ke heterogenitas koheren' (*ibid.*, hlm. 198). Model Spencer ini juga dikembangkan oleh Weber tentang perubahan sosial yang menghasilkan model modernisasi, yaitu proses perubahan dipandang secara esensial sebagai suatu perkembangan dari dalam, dan dunia luar hanya berperan sebagai pemberi rangsangan untuk 'adaptasi'. Proses perubahan yang dimaksudkan Weber, digambarkan dalam pertentangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Budaya masyarakat tradisional sering dikatakan religius, magis dan bahkan tak rasional, sementara budaya masyarakat modern dianggap sekuler, rasional, dan ilmiah. Weber sendiri menganggap sekularisasi, atau ia sebut sebagai 'hal yang mengecewakan pada dunia' (*Enzauberung der welt*) dan bentuk-bentuk organisasi yang lebih rasional adalah karakteristik pokok proses modernisasi, yakni konsep 'rasa keterpanggilan Protestan (asketisme duniawi) dipandang sebagai tahap krusial dalam proses modernisasi (*ibid.*, hlm. 200).

Berbeda dengan model Spencer, perubahan model Marx (model konflik) menggambarkan model atau sekuens (tahapan) perkembangan masyarakat yang revolusioner. Perubahan dalam model ini secara umum melihat perkembangan masyarakat bergantung pada sistem ekonomi dan mengandung konflik-konflik sosial yang mengakibatkan timbulnya krisis, revolusi, dan perubahan yang terputus-putus. Model ini memberi tempat bagi penjelasan-penjelasan perubahan dari perspektif faktor eksogen (luar). Melalui model ini memberikan penjelasan lebih global yang menekankan pada relasi antara perubahan pada suatu masyarakat dan perubahan di masyarakat lain. Di samping itu, model Marx lebih memperhatikan mekanisme perubahan dilihat dalam pengertian dialektik. Dengan

kata lain, penekanannya pada konflik dan pada akibat yang bukan hanya tidak dimaksudkan melainkan sangat berlawanan dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Penekanan pada revolusi memang merupakan karakteristik model Marx, bila dikontraskan dengan model spencer (baca, *ibid.*, hlm. 211-216).

Dengan mengacu dua model perubahan sosial tersebut, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahan tertentu, dapat dimodifikasi sebagai sebuah sintesis dalam kerangka konseptual sejarah. Mengikuti pendapat Peter Burke, bahwa implikasi model-model perubahan seperti itu secara sintesis adalah penolakan secara hitam putih terhadap tiga dikotomi, yaitu antara kontinuitas dan perubahan, antara faktor internal dan eksternal, dan antara struktur dan peristiwa (*ibid.*, hlm. 240). Konsepsi perubahan pada dasarnya selalu terkait dengan konsepsi kontinuitas. Dalam hal ini apa yang disebut sebagai “teori generasi” oleh Karl Manheim sesungguhnya menekankan pada ‘lokasi bersama dalam proses-proses sosial dan sejarah’ dalam bentuk pandangan tertentu terhadap dunia atau mentalitas. Sementara itu ‘campur tangan dari luar’ seperti dikembangkan Wachtel dan Sahlins, bahwa perubahan tidak hanya dari perspektif eksternal saja, tetapi kedua penulis itu menekankan hubungan atau kesesuaian antara faktor dalam (*endogen*) dan faktor luar (*eksogen*). Dalam model-model perubahan, diharapkan dapat dibahas faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat relatif terbuka (atau rentan) terhadap pengaruh luar, sedangkan sebagian lain lebih sanggup bertahan dari pengaruh tersebut.

F. Sumber dan Fakta Sejarah

1. Sumber Sejarah

Sumber sejarah sering kali disebut juga “data sejarah”. Perkataan “data” merupakan bentuk jamak dari kata

tunggal “*datum*” (bahasa Latin) yang berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo, 1995: 94). Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorisasian. Sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah data verbal sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Adapun klasifikasi sumber sejarah itu dapat dibedakan menurut bahannya, asal-usul atau urutan penyampaiannya, dan tujuan sumber itu dibuat. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis; sumber-sumber demikian menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Dapat pula sumber-sumber itu, menurut tujuannya, dibagi atas sumber-sumber formal dan informal.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang jenis sumber sejarah berdasarkan bahannya.

a. Sumber tertulis

Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, dalam arti sempit biasa disebut dengan dokumen. Adapun dokumen dalam arti yang luas juga meliputi monumen, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Dokumen tertulis itu, seperti pembagian R. van Niel atas sumber-sumber sejarah Jawa pada abad XIX yang tertulis dalam bahasa-bahasa Barat, ada enam kategori, yaitu: dokumen-dokumen pemerintah yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen pemerintah yang belum diterbitkan, laporan-laporan pemerintah, arsip pribadi yang belum diterbitkan, surat-surat keluarga, dan catatan-catatan perjalanan (Alfian, 1984: 35). Pengkategorisasian dokumen tertulis secara lebih luas lagi

ditunjukkan oleh Louis Gottschalk (1983: 60-77) menjadi 8 jenis sebagai berikut: (1) *rekaman sezaman*: instruksi, rekaman stenografis dan fonografis, surat-surat niaga dan hukum, buku-buku catatan dan memori pribadi; (2) *laporan konfidensial*: berita resmi militer dan diplomatik, jurnal atau bukh arian, dan surat-surat pribadi; (3) *laporan umum*: surat-surat kabar, memoir dan otobiografi, sejarah resmi atau diotorisasi; (4) *kuesioner* tertulis tentang informasi dan opini; (5) *dokumen-dokumen pemerintah*: laporan badan pemerintahan, undang-undang dan peraturan-peraturan; (6) *pernyataan opini*: tajuk rencana, esei, pidato, brosur, surat kepada redaksi, dan sebagainya; (7) *fiksi*: nyanyian dan puisi; (8) cerita rakyat atau *folklore*: nama-nama tempat, dan pepatah atau peribahasa.

Selain jenis dokumen-dokumen di atas, Garraghan (1957: 241-258) menambahkan dua kategori sumber tertulis lainnya, yaitu: (1) *annal dan kronik*, yakni bentuk-bentuk historiografi Abad Pertengahan; keduanya merupakan kelompok sumber spesifik yang meminta banyak perhatian kritis dari sejarawan; (2) *inskripsi*, yakni sejumlah besar data (politik, hukum, ekonomi, sosial, dan agama) yang tertambat dalam bentuk tulisan pada batu, perunggu, marmer, perkamen, atau bahan-bahan keras lainnya.

Data yang tercantum dalam bahan-bahan dokumenter itu pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, terutama tentang permasalahan yang tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat lagi. Namun bahan-bahan itu juga sering kali tidak lengkap, tidak representatif, tidak korespondensif dengan model konseptual, bahkan tidak memuat sama sekali data yang

relevan bagi permasalahan yang sedang diselidiki. Untuk semua ini, selain perlu diperhatikan segi-segi *autentisitas* dan *kredibilitas* dokumen itu (akan dibahas lebih lanjut dalam bab mengenai metode sejarah), penting pula dipersiapkan terlebih dahulu konsep dan teori yang sangat berguna untuk mensistematisasikan data dan mengklasifikasikan berdasarkan jenis serta karakteristik dokumen. Hubungan antara konsep dan data dari dokumen-dokumen, seperti digambarkan Sartono Kartodirdjo (1974: 24-34), antara lain dapat diorganisasikan fenomena kemasyarakatan dalam perkembangan historis. Menurut sejarawan ini, data sosial secara konseptual bisa dilihat dari ciri-ciri setiap bentuk bahan dokumenter di bawah ini.

1) Otobiografi

Otobiografi lazimnya dibedakan menjadi tiga macam: (a) otobiografi komprehensif, ialah otobiografi yang panjang dan bersegi banyak; (b) otobiografi topikal, yaitu isinya pendek dan bersifat khusus; dan (c) otobiografi yang didisikan, yakni otobiografi yang telah disusun oleh pihak lain. Data otobiografis sangat berguna bagi psikologi karena di dalam dokumen seperti itu termuat faktor-faktor subyektif seperti segi-segi efektif, motivasi, harapan-harapan, dan pengalaman, termasuk juga di dalamnya interpretasi serta konseptualisasi terhadap faktor-faktor itu. Otobiografi dapat pula memberikan data tentang faktor-faktor obyektif, umpamanya nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Contoh otobiografi Muhammad Natsir merupakan otobiografi yang disusun oleh pihak lain, yaitu Yusuf Adullah Puar

(1978). Berdasarkan riwayatnya dapat digambarkan kehidupan masyarakat di daerah Minangkabau, timbulnya sistem pendidikan modern, kehidupan di kota pada prakemerdekaan dan awal kemerdekaan Indonesia, gerakan modern Islam, nilai-nilai baru pada golongan elite agama, para politisi dan kaum intelegensia muslim dengan idealismenya tentang kehidupan bernegara.

- 2) Surat-surat pribadi, catatan atau buku harian dan memoir
Surat-surat pribadi sebagai bahan dokumenter biasanya memuat hal-hal penting sebagai berikut: (1) hubungan *dyadic*; (2) pokok pembicaraan tentang hubungan dan lembaga sosial; (3) tatasusila dan adat-istiadat yang tercermin dalam bahasa surat itu. Contoh yang paling akrab dengan sejarah masyarakat Indonesia ialah surat-surat R.A. Kartini kepada Nyonya Abendanon yang terkumpul dalam buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Telah menjadi pengetahuan umum, buku ini memuat idealisme tokoh wanita Indonesia tentang emansipasi, tetapi buku itu juga sesungguhnya memuat data tentang tradisi kuno dalam lingkungan keluarga bupati, cara pendidikan anak perempuan, kedudukan wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Jawa pada permulaan abad ini.

Buku harian merupakan dokumen yang sangat pribadi sifatnya. Dokumen semacam ini jarang sekali didapatkan, apalagi untuk masa lampau boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Di Indonesia orang mengenal buku harian baru pada beberapa dekade terakhir dan terbatas pada kalangan pejabat pemerintah atau kaum elite saja. Satu contoh di antara catatan harian yang langka itu ialah *Jakarta Diary* dari Mochtar Lubis yang banyak memuat data tentang situasi

masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Di dalamnya terdapat pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan interpretasi tentang kejadian-kejadian serta situasi lingkungannya. Sejenis dengan dokumen pribadi itu adalah *memoirs*, tetapi di dalamnya tidak banyak menyinggung masalah pribadi, melainkan soal-soal umum. Kebanyak dari *memoirs* merupakan kisah perjalanan sehingga bisa didapatkan data tentang keadaan suatu negeri, kota, atau daerah. Kisah perjalanan yang ditulis Tome Pires di dalam *Suma Oriental*, misalnya, memberikan gambaran struktur sosial dari masyarakat muslim pada abad ke-16 di kerajaan dan kota pantai seperti Malaka dan kota-kota pantai utara Jawa Timur, khususnya Tuban. Demikian halnya catatan perjalanan Ibn Batutah.

3) Surat kabar

Data yang dimuat dalam surat kabar kadang telah menunjukkan fakta, di samping juga merupakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran spekulatif. *Scope* data di dalam surat kabar sangatlah luas, di dalamnya meliputi soal-soal lokal maupun internasional dan secara substantif mencakup segala segi kehidupan sosial. Namun demikian, fakta-fakta dalam surat kabar pada umumnya sering kurang teliti atau berita-beritanya masih dangkal. Hal ini disebabkan singkatnya waktu yang tersedia untuk mengolah informasi-informasi atau untuk mengumpulkan informasi dari banyak sumber tertutup misalnya laporan-laporan pemerintah yang bersifat rahasia. Selain itu, segi-segi subyektivitas surat kabar cukup jelas karena pada umumnya merupakan penyaluran aspirasi dari golongan politik atau sosial tertentu.

4) Dokumen pemerintah

Di dalam dokumen pemerintah biasanya dimuat keputusan-keputusan, berita-berita, laporan-laporan pemerintah tentang peristiwa-peristiwa, laporan tahunan, data statistik, pernyataan pemerintah, daftar personalia birokrasi, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini lebih bersifat sepihak (pemerintah), tidak mencerminkan pikiran, ide, sentimen, aktivitas, serta hubungan sosial pada rakyat. Hal ini terutama sangat ketara dalam dokumen pemerintah Kolonial Belanda sehingga realita kongkrit dari kehidupan rakyat di pedesaan atau kota-kota kecil tidak dimuat. Oleh karena itu, sangat sulit mendapatkan data sosiologis seperti kedudukan sosial-ekonomi dari elit pedesaan, stratifikasi sosialnya, hubungan antara prestise dan kekuasaan, dan sebagainya dari dokumen pemerintah itu.

5) Cerita roman

Karya sastra seperti roman dan novel pada dasarnya bukan hanya merupakan karya ekspresif seseorang pengarang, tetapi di dalamnya juga kadang terungkap data yang menyangkut keadaan sosial dari periode tertentu. Keadaan sosial seperti struktur sosial, kelas sosial, dan lembaga-lembaga sosial datanya bisa didapatkan dalam cerita roman, bahkan penggambaran keadaan sosial itu cenderung lebih mendekati kenyataan dan tidak dilukiskan semata-mata menurut fantasi atau imajinasi yang bebas. Sebagai contoh, *Serat Musyawaratan Para Wali*, tokoh-tokoh dalam cerita ini menunjukkan struktur keagamaan seperti para wali, lembaga musyawarah, sistem interaksinya, dan sebagainya. Contoh lain, *Serat Centini*, yaitu karangan yang menggambarkan kehidupan sosial dari periode awal dan

pertengahan Mataram. Begitu pula bila kita membaca novel yang ditulis K.H. Saifuddin Zuhri yang berjudul *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (1974), di dalamnya banyak dimuat informasi tentang kiprah para pemimpin pesantren di Jawa dari periode akhir Belanda, zaman Jepang, dan masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Dalam karya terakhir ini juga terdapat data dan fakta gaya hidup dan pandangan kiai, gerakan organisasi keagamaan, dan idealisme kaum santri untuk perjuangan kebangsaan dan kenegaraan.

b. Sumber tidak tertulis

Termasuk dalam kategori sumber tidak tertulis itu adalah artefak (*artifact*) dan sumber lisan. Artefak dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat. Foto sangat mungkin dimiliki oleh keluarga, organisasi sosial, organisasi profesi, atau instansi-instansi. Foto setiap generasi akan menunjukkan perubahan sosial antar-berbagai struktur sosial itu. Lewat foto mungkin terungkap data tentang gaya hidup keluarga, perabot rumah atau kantor, jenis pakaian dan kendaraan, suasana sidang para pemuka organisasi, dan sebagainya. Demikian juga data yang bersumber pada bangunan akan dijumpai model-model arsitektur yang diciptakan oleh tiap generasi. Rancang bangun masjid, misalnya, mengalami banyak perubahan, sebab terkait dengan fungsi-fungsi kegiatan jamaah. Fungsi masjid pada dasarnya untuk kegiatan ibadah, tetapi lebih luas lagi mencakup kegiatan-kegiatan sosial-budaya. Oleh karena itu, pengurus/takmir masjid mungkin mengusahakan adanya kantor sekretariat, dapur umum, tempat penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, dan alat-alat yang dibutuhkan bagi kegiatan.

Sumber tidak tertulis yang lain adalah *sumber lisan*. Sumber ini secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah lisan.

Pengetahuan tentang kejadian-kejadian masa lampau didasarkan pada data atau informasi yang masih tersebar secara lisan. Garraghan (1957: 259-260) mengklasifikasikan sumber dimaksud menjadi dua kategori:

- a. Penyebaran lisan tentang kejadian-kejadian yang baru (*recent events*), dalam arti lain tentang peristiwa-peristiwa yang masih terekam di dalam ingatan orang. Data lisan seperti ini dapat dicapai melalui dua jalan: *pertama*, melalui saksi mata yang paling dekat dengan kejadian, dan *kedua*, melalui saksi perantara karena sulit merunut kembali saksi terdekat.
- b. Penyebaran lisan tentang peristiwa-peristiwa yang tipis kemungkinan terjadinya (*remote events*). Sumber ini lebih dikenal dengan istilah tradisi lisan (*oral tradition*), yakni informasi-informasi tentang kejadian sejarah disebarkan dari mulut kemulut; saksi terdekat maupun saksi perantara tidak dikenal, kecuali saksi yang menghubungkan informasi itu kepada pendengar. Tradisi lisan yang isinya samar-samar tetapi penuh arti (signifikan) itu biasanya tersebar melalui tiga jenjang: *pertama*, tersebar melalui cerita yang disampaikan oleh bapak kepada anaknya, dari guru kepada murid, atau dari generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, cerita sejarah diperkenalkan dalam adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga dan upacara keagamaan. Pada jenjang *ketiga*, cerita sejarah diabadikan dalam tulisan dan bentuk-bentuk gambar.

Garraghan (1957: 269-270) selanjutnya menyebutkan sejumlah terminologi mengenai sumber lisan yang kedua, *oral tradition*, sebagai berikut:

- 1) Fabel (*fable*), yaitu suatu cerita yang aktornya terdiri atas binatang-binatang buas, burung-burung, makhluk hidup yang bukan manusia (makhluk gaib), atau personifikasi abstrak lainnya yang mengambil perwatakan manusia.

Barangkali karya Hayy ibn Yaqdan merupakan salah satu contohnya.

- 2) Dongeng (*tale*). Suatu cerita yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan aktor yang tidak menentu. Sebagai contoh adalah dongeng Si Kabayan dari tanah Pasundan.
- 3) Mitos (*myth*). Suatu cerita atau sejenisnya yang bersumber seperti halnya sejarah, tetapi sarat dengan khayalan. Mitos selalu memuat tentang kehidupan manusia, dan biasanya mengambil manusia super sebagai tokohnya. Kisah para Wali, misalnya, sering kali mengarah kepada bentuk mitologis oleh para pengagumnya.
- 4) Legenda (*legend*). Suatu cerita yang dalam berbagai hal berisi kebenaran, termasuk di dalamnya elemen-elemen historis sering kali mengandung isi aktual. Contohnya, situs kota Troya Lama ditemukan berdasarkan legenda *Helen of Troy* atau *Great Horse of Troy*. Garraghan, mengikuti pendapat Lanzoni dan De Smelt, membedakan dua tipe legenda: *pertama*, legenda murni yang isinya tidak langsung memuat data sejarah, dan *kedua* adalah legenda yang bersifat sejarah, yakni mengandung isi yang bersifat sejarah dalam berbagai tingkatan. Kedua tipe tersebut bisa dipergunakan sebagai sumber sejarah sebab, walaupun legenda itu bersifat khayalan murni, paling sedikit dapat memberikan cakrawala tentang berbagai macam kebudayaan dan peradaban.
- 5) Saga, yaitu suatu cerita yang berpusat pada tokoh pahlawan. Saga biasanya merupakan cerita yang diambil dari fakta atau kebenaran dalam literatur dengan mengungkapkan tokoh-tokoh pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanannya.

2. Fakta Sejarah

Sebuah artikel yang menjelaskan tentang fakta-fakta sejarah ditulis oleh Carl L. Backer yang berjudul “*What are Historical Facts?*”. Tulisan ini dimuat dalam Han Mayerhoff, *The Philosophy of History in Our Time* (1959), halaman 120-137. Tulisan tersebut dipandang representatif bagi pembahasan berikut ini, dan di sini dikemukakan ringkasannya.

Backer memulai uraiannya dengan memberikan penegasan bahwa sejarah itu pada umumnya ditulis berdasarkan pemikiran dan tindakan manusia di masa lampau. Oleh karena itu, sejarawan harus berusaha mengadakan penyelidikan guna mengetahui segala yang telah diperbuat dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau itu. Dalam proses penyelidikan itu pula sejarawan harus bekerja untuk memperoleh fakta-fakta sejarah dan dapat memaparkannya. Persoalannya adalah apakah semua kejadian masa lampau itu dapat dikatakan fakta? Menurut Backer, fakta-fakta sejarah dapat dibedakan menjadi: (a) fakta-fakta keras (*hard facts*), yaitu fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya; dan (b) fakta-fakta lunak (*cold facts*), fakta-fakta yang belum dikenal dan masih perlu diselidiki kebenarannya. Untuk menguji kebenaran akan fakta-fakta itu, sejarawan harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, sejarawan juga harus pandai mengolah dan menyusun fakta-fakta itu agar dapat membuahkan rekonstruksi dalam bentuk kisah.

Secara lebih gamblang lagi, Backer mengajukan tiga pertanyaan pokok mengenai fakta-fakta sejarah: apakah fakta sejarah itu, di manakah fakta sejarah itu, dan kapan fakta sejarah itu muncul? Di bawah ini keterangan-keterangannya atas tiga permasalahan tersebut.

Pertama, apakah fakta sejarah itu? Fakta adalah “suatu statemen tentang suatu kejadian atau peristiwa”. Sebagai contoh, pada 710, Tarik ibn Ziad mendarat dekat bukit Gibraltar. Hampir

semua orang tahu akan fakta ini karena ia merupakan salah satu peristiwa penting dalam penyebaran Islam ke Spanyol. Akan tetapi fakta dimaksud masih sangat sederhana sehingga untuk kelengkapannya menimbulkan beberapa pertanyaan, di antaranya: apakah sewaktu pendaratan Tarik itu dengan menunggang kuda ataukah memakai kapal? Apakah selat yang dilewati Tarik itu panjang, lebar, dangkal, atau curam? Berapa lama Tarik menyeberangi selat itu?; dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat diajukan guna melengkapi fakta tadi. Tentu saja melalui sejumlah pertanyaan itu akan dapat dinyatakan seribu satu peristiwa dalam menyusun fakta tentang tokoh di atas. Jelasnya bahwa suatu fakta itu tidak tunggal, melainkan sangat kompleks, atau dalam pengertian lain bahwa fakta itu tidak lebih dari sekedar “simbol” berupa “statemen sederhana” yang dibentuk dari hasil generalisasi fakta-fakta.

Fakta yang tampak lebih simbolis, misalnya, dari hasil penelitian para sejarawan Jerman pada pertengahan abad 19 tentang adat-istiadat dari suku-suku primitif bangsa Jerman. Mereka menemukan suatu lembaga komunal yang disebut “nenek moyang bangsa Jerman atau *Teutonic Mark*”. Fakta ini merupakan hasil imajinasi para sejarawan dan meluas sebagai sebuah mitos. *Teutonic Mark* tetap merupakan fakta sejarah yang berasal dari sejarawan Jerman abad 19 itu.

Berdasarkan gambaran di atas, sangat penting bagi sejarawan untuk selalu selektif dalam memilih kejadian sejarah dan menentukan kenyataan yang menguatkan faktanya, walaupun sejarawan itu sendiri tidak sampai mendapatkan fakta keras; sebab sejarawan memang tidak langsung berhadapan dengan kejadian itu, melainkan melalui bekas-bekas atau statemen tentang peristiwa. Dengan demikian, fakta sejarah bukan semata-mata kejadian masa lalu, tetapi juga suatu simbol yang memungkinkan dapat diberi makna secara imajinatif. Melalui pemaksaan simbol

itulah sejarawan dapat menyatakan bahwa fakta itu adalah *hard* atau *cold* dan benar atau keliru.

Kedua, di manakah fakta sejarah itu? Dapat dikatakan bahwa fakta sejarah akan hanya terdapat di dalam pikiran seseorang. Sebuah contoh, “peristiwa pembunuhan Abraham Lincoln di Ford’s Theatre di Washington pada 14 April 1865”, ini merupakan peristiwa yang aktual dan merupakan fakta atas pernyataan yang betul-betul terjadi. Sungguhpun ia menjadi pembicaraan pada 1997, kita mengatakannya sebagai peristiwa aktual, dan sekarang kita menyebutnya juga sebagai fakta sejarah. Antara peristiwa aktual dan fakta sejarah memang kadangkala merupakan satu pengertian, padahal antara keduanya jelas berbeda. Bila dipertanyakan, di manakah fakta tentang peristiwa terbunuhnya Lincoln itu sekarang? Jelaslah kejadian itu sudah lewat, dan kini kita tidak menemukan lagi peristiwa itu, yang ada hanyalah kebenaran yang terbatas dari ingatan sejarawan, bahkan ada pula fakta yang hilang dari kejadiannya sediakala. Kemudian apa yang mesti dilakukan sejarawan dalam upaya memunculkan sesuatu yang hilang itu? Sejarawan dapat memaparkan kembali peristiwa-peristiwa bersangkutan melalui imajinasinya dengan bantuan sumber-sumber yang ada, yaitu berupa buku-buku, surat-surat kabar, catatan-catatan harian, dan sebagainya. Begitu pentingnya sumber tertulis sebab dengan tulisan atau catatan itulah manusia dapat mengabadikan ingatannya.

Ketiga, kapan fakta sejarah itu muncul? Apabila fakta sejarah itu sekarang muncul secara imajinatif di dalam pikiran seseorang maka fakta itu menjadi bagian dari waktu sekarang. Perkataan ‘sekarang’ sebetulnya merupakan suatu istilah yang tidak pasti, ia adalah suatu titik yang tidak dapat dibatasi di dalam waktu dan ia akan hilang sebelum seseorang memikirkannya. Bayangan atau ide yang ada sekarang akan segera masuk ke dalam masa lampau,

sebagaimana halnya gambaran atau ide-ide tentang masa lampau itu selalu tak dapat dipisahkan dari gambaran atau ide tentang masa yang akan datang. Oleh karena itu, apakah masih dapat diingat sesuatu yang diperbuat sekarang itu secara lengkap? Tentu saja hanyalah beberapa hal penting saja yang dapat dicatat, tetapi dengan membaca kembali catatan-catatan itu berarti sejarawan tertolong untuk mengingat kembali beberapa peristiwa yang telah lampau. Jadi, masa sekarang melalui imajinasi dan ide yang terkandung di dalamnya merupakan pertemuan dan perpanjangan masa lampau ke masa yang akan datang.

Di segi lain, dapat pula dikatakan bahwa fakta-fakta sejarah itu akan muncul apabila terdapat suatu “tujuan”. Suatu contoh, fakta-fakta sejarah tentang Kongres Berlin, seseorang akan menghidupkan kembali fakta-fakta itu melalui pikirannya ketika ia mempunyai tujuan berkenaan dengan kongres. Bagaimanapun, tanpa tujuan itu ia akan merasa sia-sia mencari kesulitan untuk menghidupkan kembali fakta-fakta sejarah di dalam ingatannya. Tujuan akan sesuatu fakta sejarah itu dapat muncul atau terjadi kapan saja. Persoalannya ialah apakah pencatatan dan pengingatan seseorang itu dapat bersifat obyektif? Tentu saja setiap penulis akan memberikan makna dan penafsiran terhadap sesuatu kejadian dengan wawasan yang berlainan, dan setiap generasi kembali menulis sejarahnya dengan tafsiran serta konstruksi yang sesuai dengan zamannya. Dengan begitu, jelaslah bahwa fakta-fakta sejarah itu bersifat subyektif. Setiap orang tidak akan dapat menghapuskan sama sekali perasaan pribadinya di dalam menggambarkan suatu peristiwa. Wawasan sejarawan sekarang dapat mempengaruhi jalan pikiran manusia di masa lampau, sama halnya pikiran sejarawan yang lampau dapat mempengaruhi pikiran sejarawan sekarang. Jadi, fakta-fakta sejarah itu tidak dapat dipisahkan dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

BAB II

ORIENTASI METODOLOGI SEJARAH ISLAM

A. Studi Keislaman dalam Perspektif Sejarah

Islam sebagai agama yang telah berkembang selama lebih dari empat belas abad menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang perlu terus dikaji berdasar berbagai sudut pandang (*perspektif*). Peristiwa-peristiwa yang secara garis besar menyangkut masalah-masalah ajaran, pemikiran, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya itu secara material (*obyek material*) adalah sama-sama merupakan obyek "Sejarah Islam". Akan tetapi masing-masing obyek tersebut dapat dijadikan sasaran studi dengan sudut pandang atau pendekatan (*obyek formal*) yang berbeda, yaitu antara *pendekatan sejarah* di satu segi dan *pendekatan keislaman* pada segi lainnya. Dalam hal ini, kedua pendekatan tersebut memiliki paradigma serta kerangka metodologis yang membedakannya antara disiplin ilmu umum (sejarah) dan ilmu keislaman. Namun sifat serta kegunaan sesuatu pendekatan itu pada dasarnya sebagai perangkat analisis, maka perbedaan itu justru bisa dikombinasikan dalam melihat sesuatu obyek studi. Inilah sebetulnya yang dimaksud dengan paradigma atau kerangka metodologi yang bersifat *integrasi-interkoneksi*. Jadi pemaduan dan saling terkaitnya antara dua disiplin yang berbeda itu bukan pada segi obyek materialnya melainkan semata-mata pada obyek formal dari sesuatu studi yang dilakukan.

Demikian proses integrasi-interkoneksi itu pada tataran paradigmatis akan meluas tidak hanya sebatas antara dua

disiplin yang berbeda, tergantung kepada obyek yang dijadikan sasaran studi. Misalkan dalam sejarah Islam itu berkenaan dengan peristiwa sosial yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Islam, maka interkoneksi dapat berlangsung antara tiga disiplin *sejarah-sosiologi-keislaman*. Antara sejarah dan sosiologi telah diuraikan pada bab terdahulu, yang secara garis besar mempertemukan antara karakter metodologisnya yang bersifat *prosesual* dan *struktural* atau antara kecenderungan yang bersifat *dyacronic* dan *syncronic*. Sementara keislaman itu sendiri di dalamnya juga terdapat banyak disiplin, paling sedikit mengenai ajaran dan pemikiran dapat dibedakan antara *aqidah*, *syari'ah*, dan *tasawwuf*. Maka pemaduan antar disiplin ini dapatlah dikembangkan dengan bertolak dari karakter masing-masing ilmu, sehingga apabila sejarah dan sosiologi memperlihatkan karakteristik metodologinya yang bersifat *induktif* dan *empiris*, sesungguhnya ilmu-ilmu keislaman lebih bersifat *deduktif* dan *normatif*. Di sinilah signifikansi metodologi yang *integratif-interkoneksi* tampak dalam peranan saling mengisi wawasan untuk memperkaya pandangan atas sesuatu obyek, gejala, atau permasalahan di dalam realitas Islam khususnya. Implementasi metodologi yang bersifat interkoneksi dapat dikembangkan menjadi sebuah model studi terhadap obyek-obyek keislaman.

Kecenderungan interkoneksi antara sejarah dan keislaman dalam pembahasan berikut ini secara garis besar bertolak pada asumsi-asumsi sebagai berikut. *Pertama*, sejarah sebagai suatu pendekatan dan metodologi dapat mengembangkan pemahaman berbagai gejala dalam dimensi waktu. Aspek kronologis merupakan ciri khas di dalam mengungkap peristiwa masa lampau, termasuk Islam dan umatnya. Peristiwa-peristiwa masa lampau itu dipelajari dalam konteks pertumbuhan, perkembangan

serta keruntuhan, dan secara kritis-diakronis segala peristiwa yang terjadi dilihat segi-segi prosesual serta perubahan-perubahan (*changes*), di samping gejala-gejala struktural serta faktor-faktor kausal atas peristiwa-peristiwa itu. *Kedua*, Islam dapat dipelajari dalam berbagai dimensinya, yakni keislaman itu sendiri yang mencakup ajaran, filsafat dan realitas empiris para pemeluknya berdasarkan perkembangan pada masa lampau. Makna keislaman dalam hal ini sebagai pengetahuan sejarah keislaman, sehingga studi terhadapnya sangat relevan mempergunakan pendekatan sejarah. *Ketiga*, karena itu sejarah dijadikan sebagai pendekatan dalam studi atas aneka-ragam peristiwa keislaman pada masa lampau berarti mempelajari secara kritis faktor-faktor prosesual, perubahan, dan kausalitas peristiwa sejarah Islam dan umatnya.

Selanjutnya berkenaan dengan *studi keislaman* itu sendiri, secara formal dapat bermula dari makna *Islam* sebagai penyebutan atas agama serta pemeluknya yang disebut *muslim*. Berdasar pengertian bahasa, pada kedua istilah tersebut tercermin hakekat agama Islam, yakni "keadaan orang yang membikin perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, karena kata *Islam* secara esensial adalah "masuk dalam perdamaian". Sebagai agama monoteisme, Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw., dan tujuan hidup manusia menurut Islam bukan hanya mencari keselamatan material (dunia) saja tetapi juga keselamatan hidup spiritual (akhirat). Intisari Islam adalah berserah diri atau taat sepenuhnya kepada kehendak Allah demi tercapainya kepribadian yang bersih. Penyerahan diri kepada kehendak Tuhan merupakan pengertian asasi kata *Islam*, karena di dalam agama ini kekuatan gaib (*supranatural*) dipandang sebagai suatu Zat yang berkuasa secara mutlak (*Ensiklopedi Islam Indonesia*, 1992: 445).

Karena itu seorang *Muslim* selalu menjalin hubungan dengan Tuhan (Allah) dalam kepatuhan, disamping hubungannya yang harmonis dengan sesama manusia (periksa, Q.S. 3:19). Dasar ajaran seperti ini sangatlah jelas akan menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga Islam merupakan bingkai bagi segala aspek kehidupan itu manakala ia dijadikan landasan yang tercermin di dalam segala bentuk peradaban para pemeluk agama ini.

Agama Islam secara umum biasa dipahami sebagai sistem kepercayaan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah (Alquran), yang dijelaskan atas sabda-sabda Muhammad saw. (al-Hadits), kemudian dikembangkan menjadi pandangan hidup pemeluknya melalui pemikiran-pemikiran para ulama, dan menjadi realitas kehidupan umat Islam di dalam keragaman paham, tindakan, komunitas, dan lingkungan. Pendefinisian lebih lanjut atas agama Islam ini, di dalam perkembangan mutakhir dipetakan berdasarkan kecenderungan bidang studi Islam.

Oleh karena itu apabila *Islam* dipahami sebagai obyek formal dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sejarah umat Islam, maka ia sebagaimana agama monoteisme yang mengembangkan ajarannya sebagai dasar moral dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan umat atau suatu bangsa yang menganut agama Islam. Kerangka pedoman bagi kehidupan agama ini bermula pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang menjadi dua sumber intisari ajaran Islam, Alquran dan Hadits. Kemudian seiring perkembangan zaman dan perluasan pengaruh serta wilayah penyebaran Islam, pedoman itu berkembang menjadi sistem gagasan yang tumbuh melalui jalur-jalur pemikiran keislaman. Secara kultural dan tradisional, jalur-jalur pemikiran Islam yang mendorong gerak peradaban umatnya, ialah tiga bidang disiplin keislaman di bidang

tauhid (teologi), *fiqh* (sosial dan hukum), dan *tasawwuf* (spiritual). Ketiga disiplin ini pada gilirannya memiliki pendekatan serta sudut pandang masing-masing, yang berfungsi menganalisis *setting idea* terhadap gejala-gejala empiris dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya di dalam kehidupan dan perkembangan umat Islam.

Karena itu, obyek formal studi keislaman dapat dinyatakan secara singkat, bahwa studi ini berpedoman pada tradisi teks (*hadharah al-nash*) baik Alquran, Hadits, dan pemikiran para ulama terhadap kedua sumber itu. Berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori deduktif tersebut, masing-masing disiplin (ilmu) keislaman seperti misalnya yang terpetakan dalam fakultas-fakultas atau program studi di perguruan tinggi agama di Indonesia (UIN, IAIN, STAIN, dan PTAIS lainnya) dapat mengembangkan pendekatan atau bahkan mempola kerangka metodologis yang berbeda antara satu disiplin dengan lainnya.

Selanjutnya, obyek material *studi keislaman* itu juga mencakup semua bidang studi keislaman. Seperti disebutkan Harun Nasution (1986) dalam karyanya, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, terdapat tujuh aspek studi keislaman, yaitu: 1) Ibadah dan latihan spiritual dan ajaran moral, 2) politik, 3) hukum, 4) teologi, 5) falsafah, 6) mistisisme, dan 7) pembaruan dalam Islam. Khususnya berkenaan dengan ajaran Islam, sejumlah ulama tradisional mengklasifikasinya menjadi tiga kelompok besar, yakni *akidah*, *syari'ah*, dan *akhlak-tasawuf*. Tiga disiplin ini memiliki percabangan masing-masing seiring perkembangan pemikiran, penafsiran-penafsiran, dan pengembangan ajaran itu dalam aliran-aliran. Di kalangan pemikir kontemporer, pembagian keislaman itu bahkan lebih terinci lagi, Fazlur Rahman misalnya, membaginya menjadi: 1) kehidupan Nabi Muhammad, baik hubungan dengan wahyu yang diterimanya

maupun tantangan dan strategi untuk menghadapi umat Yahudi dan Kristen, 2) Alquran, 3) Sunnah Nabi Muhammad, 4) Struktur hukum Islam, 5) Dialog antara teologi dan perkembangan dogma, 6) Syari'ah, 7) Perkembangan filsafat, 8) Praktek dan ajaran sufi, 9) Organisasi Sufi, 10) Perkembangan aliran-aliran, 11) Pendidikan, 12) Gerakan pembaruan pra modern, 13) Gerakan pembaruan modern, dan 13) Warisan dan prospek (*legacy and prospects*) (dalam H.M. Amin Abdullah, dkk., 2002: 128). Semua aspek ini dapat dijadikan sasaran studi keislaman berdasarkan pendekatan sejarah.

Orientasi Interkoneksitas

Pemaduan pendekatan sejarah dalam studi keislaman, sesungguhnya berorientasi kepada pemahaman mengenai fakta-fakta sejarah Islam maupun obyek-obyek keislaman lainnya, sehingga kedua pendekatan itu berperan sebagai metodologi dan kerangka referensi di dalam mempelajari obyek studi keislaman. Atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian, maka keislaman sebagai sasaran studi haruslah dijelaskan faktanya yang berhubungan dengan sesuatu waktu, apakah itu masalah kepercayaan, hukum, moral, sistem ekonomi, politik, budaya, pemikiran, dan sebagainya, dari mulai bentuk yang sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks. Penelitian terhadap masalah-masalah keislaman berdasarkan pendekatan sejarah dapat pula dikatakan sebagai penelitian "sejarah Islam", karena secara obyektif akan mengarahkan sasaran penelitiannya terhadap berbagai persoalan sejarah agama ini.

Jika pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan gejala-gejala agama dengan menelusuri sumber-sumber di masa silam, maka pendekatan bisa didasarkan kepada personal historis atau

atas perkembangan kebudayaan umat Islam. Pendekatan ini berusaha menelusuri perkembangan tokoh-tokoh agama secara individual, untuk menemukan sumber-sumber dan jejak perkembangan keagamaan sebagai dialog dengan dunia sekitarnya, dan juga mencari pola-pola interaksi antara agama dan masyarakat. Berdasarkan pendekatan tersebut, sejarawan dapat menyajikan deskripsi detail atau eksplanasi tentang sebab dan akibat sesuatu kejadian tertentu. Pendekatan sejarah pada gilirannya akan membimbing ke arah pengembangan teori tentang evolusi agama Islam dan perkembangan tipologi kelompok-kelompok keagamaan. Oleh karena itu pendekatan sejarah dapat melahirkan pemahaman lebih luas tentang berbagai persoalan keislaman.

Pemahaman lebih lanjut mengenai signifikansi pendekatan sejarah dalam studi keislaman ini, ingin diilustrasikan sekilas mengenai studi sejarah Kaum Sufi berikut ini. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan Kaum Sufi, baik secara kultural maupun struktural, namun segala faktor yang relevan dan kontekstual didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah diharapkan dapat menghasilkan sebuah penjelasan (*historical explanation*) dalam mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan tempat berlangsungnya gerakan Kaum Sufi, dan secara historis pula dapat diungkap kausalitas, asal-usul, dan segi-segi prosedural serta struktural. Kemudian berdasarkan pendekatan keislaman, segala aspek yang terkait dengan sejarah Kaum Sufi, kiranya dapat dipahami dengan pemikiran tentang tasawwuf. Namun, keyakinan dan ritus-ritus religius sebagaimana ditampilkan oleh Kaum Sufi, dalam pengertian Durkheim (1938), adalah “fakta-fakta sosial”. sehingga praktek-praktek ritual yang menggambarkan kebersamaan memiliki dampak sosial yang sangat signifikan bagi kolektifitas (dikutip Bryan S. Turner, 2006:

83). Sehubungan gejala sosiologis dalam sejarah Kaum Sufi itu, maka studi sejarah mengenaiya juga membutuhkan bantuan teori dan metodologi dari pendekatan sosiologi guna memahami pelbagai unsur dan faktor penyebab proses sejarah bersangkutan.

B. Kritisisme Sejarah Islam

Para ahli sejarah sering kali menyebutkan bahwa hakikat sejarah adalah penulisan kembali (*the history is written*). Hal ini dimaksudkan bahwa sejarah itu ada karena selalu dilakukan penulisan ulang terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau. Penulisan mana juga dimaksudkan bukan sekedar mengulang-ulang pengkisahan terhadap hasil-hasil pengkisahan yang sebelumnya, melainkan lebih dari itu adalah adanya penafsiran baru, yang tentunya didukung fakta-fakta baru terhadap sesuatu peristiwa masa lampau. Sementara penafsiran sejarah itu sendiri bisa beragam, tergantung pada perspektif atau pendekatan yang dikembangkan oleh sejarawan. Sikap dan pandangan kritis sejarawan merupakan langkah utama yang perlu dilakukan untuk menuju kepada pencapaian penulisan sajarah yang membebaskannya dari hanya memahami dan menafsirkan sejarah itu berdasarkan sudut pandang tertentu. Sebagaimana sejarah Islam selama ini lebih banyak disajikan dalam nuansa politik, sehingga membelenggu pemahaman umat Islam atas dinamika sejarahnya yang selalu bias politik, padahal aspek-aspek lain seperti budaya, sosial, ekonomi, pemikiran, dan sebagainya masih luput dari perhatian sejarawan muslim. Upaya membebaskan pengetahuan sejarah Islam ini membutuhkan kritisisme para sejarawan, terutama berdasarkan metodologi yang multidimensional serta integratif, guna memberikan pengertian atas perkembangan sejarah Islam yang menyeluruh.

Historiografi Islam secara integratif diharapkan memberi daya kritisisme yang membebaskan kita dari pengetahuan sejarah yang konvensional kepada pengetahuan sejarah yang rasional, atau dari hanya sejarah naratif menjadi pengetahuan sejarah yang kritis. Bertolak dari alasan tersebut, pembahasan Sejarah Islam (selanjutnya disingkat SI) diharapkan menampakkan fungsinya dalam tiga orientasi yang saling berhubungan. *Pertama*, sejarah Islam merupakan pengetahuan mengenai masa lampau Islam dan memiliki kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini. *Kedua*, pengetahuan tentang ide-ide yang melatarbelakangi berbagai aspek kehidupan umat Islam itu diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. *Ketiga*, sejarah Islam merupakan fakta-fakta yang didasarkan kepada pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat muslim (Mutahhari, 1986: 65-67). Oleh karena itu, cukup beralasan kalau SI dikembangkan kompetensinya menjadi bidang sejarah Islam yang menyeluruh: kebudayaan Islam, sosial Islam, politik Islam, ekonomi Islam, sistem keagamaan Islam, dan lain sebagainya. Di sinilah setiap sejarawan membutuhkan pencarian baru atas model penulisan, fakta-fakta, maupun penafsiran yang aktual dengan situasi masyarakat pembaca sejarah.

Para ahli di bidang metodologi sejarah modern sering kali menyatakan bahwa untuk mempermudah sejarawan di dalam pengkajiannya terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau dibutuhkan teori dan konsep, yang keduanya berfungsi sebagai alat-alat analisis serta sintesis sejarah. Kerangka teoretis maupun konseptual itu sendiri berarti metodologi di dalam pengkajian sejarah, dan pokok pangkal metodologi adalah pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Begitu halnya signifikansi kerangka konseptual dan teoretik bagi rekonstruksi SI. Sebagaimana disiplin sejarah

pada umumnya yang bersifat kausalitas dan lebih menekankan proses perubahan (Ankersmith, 1987: 192), maka SI akan selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam proses-proses kesinambungan dan perubahan (*continuity and changes*) selama berlangsungnya penyebaran agama ini. Relevansi SI dengan perkembangan peristiwa dalam kurun waktu tertentu perlu dianalisis berdasarkan bermacam-macam perubahan yang mempengaruhinya. Perlu ditekankan di sini, bahwa analisis perubahan dalam studi sejarah adalah perubahan-perubahan struktur dan fungsi atas perkembangan berbagai peristiwa (Burke, 2001: 195-196), demikian halnya dengan sejarah Islam.

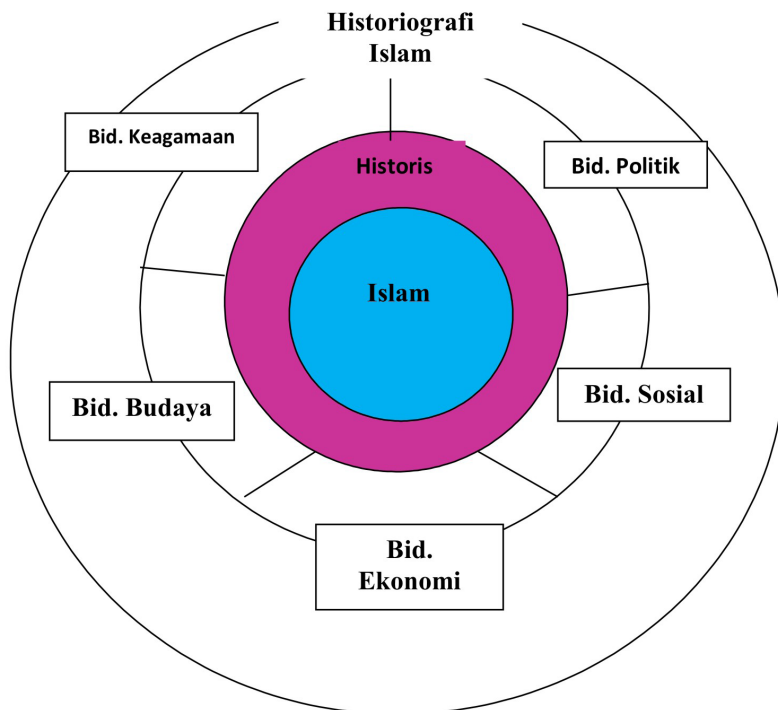
Apabila teori kesinambungan dan perubahan merupakan teori khas dalam ilmu sejarah, maka peristiwa-peristiwa pada masa lampau itu sendiri dapat diinterpretasi berdasarkan berbagai pendekatan yang bersumberkan pada disiplin-disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang sejarah tertentu. Kalau bagian-bagian sejarah itu adalah bidang politik, hukum, sosial, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, sains-teknologi, dan humaniora, maka alasan metodologisnya bahwa bidang-bidang itu akan dapat dijelaskan berdasarkan teori-teori yang bersumberkan pada pendekatan ilmu-ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan sebagainya yang masing-masing berperan memberikan kerangka konseptual dan teoretik terhadap interpretasi sejarah. Relevansi sebuah pendekatan tergantung jenis sejarah yang dianalisis, misalnya sejarah dalam bidang kebudayaan akan lebih tepat dinalisis dengan pendekatan antropologi, sejarah sekte-sekte keagamaan dengan sosiologi atau psikologi, dan seterusnya pada bidang sejarah lain dengan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi, pengembangan metodologi pengkajian sejarah akan mengarahkan perspektif integratif antara sejarah dan ilmu-ilmu lain.

Pentingnya pengembangan teori berdasarkan pendekatan yang berbeda terhadap historiografi Islam, umpamanya mengenai beberapa subsistem politik Islam—Negara Madinah, periode Khulafa ar-Rasyidun, zaman keemasan, zaman kemunduran dan gerakan kebangkitan Islam—harus ditulis kembali dalam suatu kerangka analitis yang relevan dengan realitas objektif masa lalu. Hal ini penting dilakukan, sebab terutama pada bentuk-bentuk historiografi akhbar dan sirah, analisis konseptual dan teoretis jelas tidak hadir, bahkan hampir seluruh karya sejarah seperti itu penekanan diberikan sepenuhnya pada pengumpulan data, tetapi pembentukan konseptual dan teoretis atas data tersebut sering sekali diabaikan. Mengenai kehidupan politik Nabi misalnya, masih banyak masalah yang ditulis kurang memuaskan menyangkut latar gagasan dari aktifitas-aktifitas politik Nabi, tentang perjanjian-perjanjiannya, dan prestasi-prestasi sosialnya. Karena itu, studi sejarah kritis para sejarawan diharapkan mampu mengetengahkan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan teori-teori yang sangat diperlukan untuk mempelajari sejarah pemikiran tersebut.

Analisis sejarah dengan pendekatan integratif, berarti mempergunakan pendekatan atau perspektif yang memadukan antar berbagai pendekatan dalam rangka memahami dan menjelaskan sesuatu objek sejarah. Kedudukan serta sifat pendekatan tersebut secara metodologis sesungguhnya sepadan dengan pendekatan multidimensional atau pendekatan interdisipliner. Dapat diilustrasikan secara sederhana, misalkan sejarah Islam tentang sufisme yang memiliki sejumlah dimensi, aspek, dan fakta yang dapat dijabarkan secara obyektif berdasarkan ragam disiplin, maka kajian terhadap fakta-fakta sejarah sufisme itu dapat dilakukan secara integratif berdasarkan pendekatan-pendekatan yang relevan. Implementasi pendekatan integratif memang terdapat

pembatasan, minimal antara dua pendekatan, tergantung gejala apa dan dalam dimensi mana gejala sejarah itu ingin dikaji. Berkenaan dengan sufisme dalam perkembangan ordo-ordo tarekat misalnya, secara formal-metodologis musti memadukan antara pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi di satu segi, sehingga jadilah "pendekatan historis-sosiologis". Namun pada segi lainnya musti dipergunakan pendekatan keislaman (doktrin atau ajaran yang relevan dengan peristiwa sejarah, dalam contoh ini khususnya doktrin kaum sufi) yang dapat menjelaskan latar ideologis yang melekat pada gerakan-gerakan kaum tarekat. Karena itu perspektif integratif dilangsungkan berdasar tiga pendekatan, historis, sosiologis, dan sufistik. Demikian seterusnya pemaduan antardisiplin yang berbeda dapat dilakukan sesuai obyek sejarah Islam.

Proses implementasi pendekatan integratif dalam kajian SI pada gilirannya merupakan proses sistemik antara sub-sistem sejarah Islam itu sendiri sebagai obyek kajian, tetapi pada setiap sub-sistem itu juga dapat diinterpretasi berdasarkan pemaduan antar pendekatan. Proses integratif dimaksud secara umum dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar I : Skema Sistem Integratif dalam Sejarah Islam.

Lingkaran berlapis ini tidak terpisah sendiri-sendiri melainkan berhubungan satu sama lainnya. Lingkaran-lingkaran ini dimaksudkan untuk mengelompokkan beberapa pendekatan sekaligus objek dari sistem sejarah Islam yang pada hakikatnya dapat dipelajari dengan cara-cara yang sama. Pada lapis lingkaran pertama adalah Islam sebagai sistem doktrin yang didasarkan pada wahyu Allah (Alquran), yang dijelaskan atas sabda-sabda Muhammad saw (al-Hadits), kemudian dikembangkan menjadi pandangan hidup pemeluknya melalui pemikiran-pemikiran para ulama dan menjadi landasan kehidupan umat Islam di dalam

keragaman paham, tindakan, komunitas, dan lingkungan. Jadi, kerangka pedoman bagi kehidupan umat Islam bermula pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., kemudian seiring perkembangan zaman dan perluasan pengaruh serta wilayah penyebaran Islam, pedoman itu berkembang menjadi sistem gagasan, perilaku, dan peristiwa-peristiwa keislaman.

Kemudian Islam dalam sistem doktrin dan pemikiran mengejawantah dalam lingkaran sejarah (dalam skema di atas adalah lapis lingkaran kedua) yang dapat dibedakan secara temporal maupun spasial. Historisitas Islam dapat dilihat dalam perkembangannya masa klasik, periode pertengahan dan periode modern. Untuk masing-masing babagan sejarah ini tentu saja Islam mengembangkan ajarannya sebagai dasar moral dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan umat atau suatu bangsa yang menganut agama Islam. Di sinilah peran pemikiran Islam mengarahkan perspektifnya ke dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Begitu pula sebaliknya, sejarah sebagai suatu pendekatan dan metodologi dapat mengembangkan pemahaman berbagai peristiwa keislaman dalam dimensi waktu. Aspek kronologis untuk mengungkap sejarah Islam dipelajari dalam konteks pertumbuhan, perkembangan serta kemunduran, dan secara kritis-diakronis segala pemikiran yang muncul dilihat segi-segi prosesusual serta perubahan-perubahan.

Gejala-gejala empiris dari sejarah Islam adalah menyangkut bidang-bidang keagamaan, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, maka semua inilah yang dimaksud skema di atas dalam lapis lingkaran ketiga. Untuk bidang-bidang sejarah itu pun dibutuhkan perspektif yang relevan, maka proses integrasi lebih mengejawantah antara pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu lain, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu.

Sementara itu, pendekatan keislaman dengan berbagai aspeknya juga terus dipergunakan untuk menafsirkan berbagai bidang sejarah, sehingga sejarawan dapat menyajikan deskripsi detail serta eksplanasi kritis atas obyek sejarah tertentu. Berdasarkan proses integrasi melalui skema tiga lingkaran berlapis itu pada gilirannya memasuki lapis lingkaran terakhir, yakni historiografi Islam berbasis pendekatan integratif. Hal ini bisa dilakukan dalam ragam penulisan sejarah menurut obyek dan cara penafsirannya yang berbeda-beda, tetapi substansi analisisnya sama-sama memadukan antar perspektif.

C. Bentangan Sejarah Islam

Bentangan sejarah Islam dalam kurun waktu yang sangat panjang dan luas cakupannya, yaitu semenjak sekitar limabelas abad yang lalu hingga perkembangannya dewasa ini, dengan berbagai peristiwa yang mengiringi penyebaran ajaran agama ini telah menampilkan panggung-panggung sejarah yang beragam khususnya dalam sistem kekuasaan dan peradaban umat Islam di berbagai penjuru dunia. Sebagaimana dipaparkan dalam buku-buku Sejarah Islam, dapat dipelajari bahwa Islam merupakan landasan bagi sistem peradaban yang berkembang dalam perumumannya dengan peradaban-peradaban umat manusia sebelum kedatangan ataupun penyebaran Islam. Karena itu, Islam sesungguhnya berperan sebagai faktor pengubah terhadap sistem peradaban umat manusia. Peran-peran perubahan tersebut dapat ditelaah mulai dari periode awal Islam memberikan respons adaptif maupun konfrontatif terhadap peradaban besar pada masanya, yakni Romawi dan Persia pra Islam, maupun periode-periode pertengahan Islam berhadapan dengan peradaban regional dan lokal.

Kekhasan historiografi ialah penekanannya pada dimensi waktu yang dipetakan berdasarkan periodisasi sejarah. Dalam hal ini, historiografi Islam yang dikembangkan para sejarawan kontemporer sering kali disederhanakan menjadi tiga tahap utama, yaitu: diturunkannya Islam di Jazirah Arab, penyebaran Islam dan tahap-tahap kejatuhannya, dan menyempitnya batas-batas daerah Islam. Penyederhanaan periodisasi sejarah seperti ini selaras dengan model historiografi modern yang banyak dikembangkan oleh para orientalis menjadi tiga babagan utama, yaitu: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern.

Sementara itu, lingkup sejarah Islam yang terbentang dalam jangka waktu sangat lama, yakni sejak Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. selalu mengalami pasang surut dalam babakan waktu yang berbeda-beda. Karenanya mempelajari sejarah ini akan terasa mudah apabila dibagi-bagi dalam babakan tertentu atau "periodisasi sejarah Islam". Penetapan periodisasi ini dapat didasarkan kepada beberapa alasan atau latarbelakang. Akan halnya periodisasi sejarah seperti contoh-contoh di atas, periodisasi sejarah peradaban Islam juga dapat dibagi dalam beberapa ciri pembabakan. Beberapa karya tentang sejarah (historiografi) yang ditulis oleh para ahli terdahulu menunjukkan model-model periodisasi sejarah Islam yang berbeda-beda. Di antaranya, karya Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (1983), membaginya berdasarkan perkembangan Islam pada masa Nabi dan para penguasa dalam dinasti-dinasti Islam. Seperti halnya dalam karya Hassan Ibrahim Hassan (1989), *Islamic History and culture (632-1986)* membagi periodisasi sejarah Islam itu menjadi sepuluh babakan sebagai berikut:

1. Periode Muhammad dan kebangkitan Islam (571-632)
2. Kehalifahan Ortodok (632-661 M)

3. Zaman Bani Umayyah (661-749)
4. Zaman Abasiyah I (750-847 M)
5. Zaman Abasiyah II (847-1055 M)
6. Zaman Abasiyah terakhir (1055-1258 M)
7. Timur Tengah setelah Bagdad jatuh (1258-1520)
8. Timur Tengah sampai abad XVIII (1520 –1800)
9. Timur Tengah pada abad XIX dan XX sampai Perang Dunia I (1798-1914).
10. Dunia Islam sejak Perang Dunia I (1914-1968)

Dalam karya-karya mutakhir tentang sejarah peradaban Islam, para ahli cenderung menyederhanakan periodisasi itu menjadi tiga babakan utama, yaitu: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Di antara karya-karya yang mengacu periodisasi seperti itu dibuat oleh Ira M. Lapidus dalam *A History of Islamic Societies* (1999) dengan pembabakan sebagai berikut:

1. *Periode awal peradaban Islam di Timur Tengah (abad VII-XIII M)*

Periode ini disebut juga sebagai periode “asal mula”, yang merupakan era pembentukan peradaban Islam sejak masa turun Alquran sampai abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula sejak masa Nabi Muhammad s.a.w. dan disusul dengan periode Islam klasik yang ditandai dengan kemajuan kepustakaan Arab berbagai hasil pengajaran Islam, dan asal usul peradaban Islam yang merupakan perpaduan dari tiga unsur kebudayaan (etnis-kesukuan, keagamaan, dan aristokratik).

Perkembangan peradaban Islam dalam periode tersebut bercirikan perpaduan antara peradaban Islam dengan pola-pola institusi imperium Timur Tengah, pola ekonomi, dan monoteistik yang telah mapan sebelumnya. Perkembangan

peradaban Islam itu telah menjadikan periode ini sebagai era Islam mayoritas di Timur Tengah. Dalam periode ini pula umat Islam membentuk negara baru dan sejumlah institusi kemasyarakatan (sekte teologi, mazhab hukum, dan kelompok sufi) dan penyusunan pola hubungan antara rezim politik dan badan-badan keagamaan. Dalam periode ini pertumbuhan masyarakat berlangsung dalam keselarasan institusi dan agama (Lapidus, I, 1999: ix).

Periode awal tersebut secara lebih rinci lagi dapat dibagi menjadi 3 fase besar: *pertama*, fase penciptaan komunitas baru yang bercorak Islam di Arabia sebagai hasil dari transformasi wilayah pinggiran dengan sebuah kemasyarakatan kekerabatan sebelumnya menjadi sebuah tipe monoteistik Timur Tengah dan secara politik sebagai masyarakat sentralisasi. Fase *kedua*, dimulai dengan penaklukan Timur Tengah oleh masyarakat Arab muslim. Dalam fase ini Islam merupakan agama dari sebuah negara kerajaan dan kalangan elite perkotaan. Adapun fase ketiga dapat dilihat dalam peran nilai-nilai Islam dan kelompok elite Islam mengubah mayoritas masyarakat Timur Tengah (*ibid.*, hlm. 14).

2. Periode penyebaran peradaban Islam Timur Tengah ke wilayah lain atau disebut juga era “Penyebaran global masyarakat Islam (abad XIII - XIX)”.

Pada periode ini, Islam bukan hanya menjadi agama masyarakat Arab Timur Tengah, melainkan juga telah menjadi agama masyarakat Asia Tengah dan Cina, India, Asia Tenggara, Afrika, dan masyarakat Balkan. Proses penyebaran Islam itu ditandai dengan interaksi nilai-nilai Islam dengan

nilai-nilai kemasyarakatan setempat. Dalam periode ini pula berlangsung konsolidasi sejumlah rezim Islam, terutama Usmani, Syafawi, Mughal, dan beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika dan di wilayah lainnya. Masing-masing sistem kekuasaan Islam ini mendasarkan kehidupannya peradabannya pada keyakinan, kultur, dan institusi sosial Islam yang berinteraksi dengan organisasi kemanusiaan, dengan sistem produksi dan pertukaran ekonomi dengan bentuk-bentuk kekeluargaan, kesukuan, dan dengan komunitas etnis non-Islam, atau dengan model-model kultur non Islam dan pra Islam. Pada periode ini tampak aspek-aspek peradaban Islam timur tengah ditranspormasikan ke dalam sejumlah masyarakat muslim di wilayah-wilayah yang berbeda.

3. Periode Perkembangan Modern Umat Islam (abad XIX- XX M)

Ciri periode ini adalah berlangsungnya modernisasi dan transformasi masyarakat muslim. Dalam periode ini umat Islam yang berbasis dominan di belahan dunia Timur berada dalam suasana terkacaukan oleh campur tangan bangsa Eropa. Peradaban Islam dalam keadaan merosot akibat kehancuran kekuatan imperium muslim, kemunduran ekonomi, konflik internal keagamaan dan kebangkitan politik serta ekonomi bangsa Eropa yang didukung oleh dominasi kultural mereka. Keadaan seperti itu mendorong sejumlah pembaruan umat Islam di abad XIX. Dalam periode ini perubahan sejarah diawali dengan gerakan-gerakan masyarakat muslim yang mengarah pada gerakan-gerakan modernisasi. Pada masing-masing wilayah pengaruh kekuatan Eropa terhadap gerakan muslim itu berbeda-beda, baik secara institusional maupun kultural. Perbedaan tersebut pada gilirannya melahirkan keragaman

tipe masyarakat Islam kontemporer. Ciri menonjol dalam perkembangan peradaban masyarakat Islam periode ini adalah peradaban yang merupakan produk interaksi antara masyarakat Islam regional dengan pengaruh Eropa.

Periode transformasi modern peradaban Islam itu, secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fase, yang sekaligus memperlihatkan beberapa gambaran umum yang berlaku di seluruh kawasan muslim.

Fase pertama, merupakan periode antara akhir abad XVIII sampai awal abad XX, yang ditandai dengan hancurnya sistem kenegaraan muslim dan dominasi teritorial serta komersial Eropa. Dalam fase ini elit politik, agama, dan kesukuan masyarakat muslim berusaha menetapkan pendekatan keagamaan dan ideologis baru bagi perkembangan internal masyarakat mereka.

Fase kedua, yaitu fase pembentukan negara nasional yang berlangsung setelah Perang Dunia I sampai pertengahan abad XX. Dalam fase ini kalangan elit negeri-negeri muslim berusaha membawakan identitas politik modern terhadap masyarakat mereka dan berusaha memprakarsai pengembangan ekonomi serta perubahan sosial.

Fase ketiga, ialah fase konsolidasi negara-negara nasional di seluruh kawasan muslim. Fase yang berlangsung sekitar pasca Perang Dunia II ini ditandai dengan pertentangan antara kecenderungan terhadap perkembangan yang tengah berlangsung dan peran utama Islam (*ibid.*, hlm. 10-11).

E. Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam

Topik pembahasan ini mengambil subjeknya adalah Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam (disingkat SPPI). Subjek ini sebetulnya merupakan satu jenis dari Sejarah Islam dalam khazanah

Ilmu Adab, tetapi kontribusi ilmiahnya yang lebih luas dapat diarahkan dalam pengembangan keilmuan (keislaman maupun umum) di perguruan tinggi agama. Penulis ingin membahas lebih jauh tentang rekonstruksi dan aktualisasi bidang tersebut dalam proses pengembangan keilmuan di perguruan tinggi tersebut.

Di sini penulis menyebut SPPI sebagai bagian dari Sejarah Islam. Keluasan cakupan Sejarah Islam sebagai sebuah disiplin ilmu, antara lain dapat dipahami dari pengertian dua konsep di dalamnya, yaitu sejarah dan Islam. Sejarah adalah pengetahuan ilmiah tentang peristiwa masa lampau yang bersifat kesinambungan dan perubahan (*continuity and changes*) dalam berbagai babagan waktu serta tempat yang berbeda, sedangkan Islam selain sebagai sistem ajaran yang bersumberkan pada wahyu juga merupakan sistem nilai dan perilaku pemeluk (umat Islam) berdasarkan ajaran-ajarannya. Sementara itu, pemikiran dengan peradaban dan kebudayaan dapat diposisikan dalam makna yang hampir sama sebagai setting idea dari segala aspek kehidupan dan peristiwa-peristiwa empirik di dalam Sejarah Islam. Namun perbedaan di antara ketiganya, bahwa peradaban lebih mencirikan segi-segi kemajuan, kebudayaan lebih menekankan pada fakta mental, sedangkan pemikiran merupakan fakta intelektual suatu bangsa atau umat. Jadi, Sejarah Islam secara obyektif di dalamnya tercakup sejarah peradaban, sejarah kebudayaan, sejarah pemikiran mengenai politik, sosial, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya pada masa lampau Islam dan umatnya semenjak kelahiran agama ini (abad ke-7 M) hingga sekarang.

SPPI dalam konteks disiplin sejarah pada umumnya termasuk dalam sejarah intelektual, yakni sejarah tentang ide-ide yang melatarbelakangi atau menyertai berbagai peristiwa sejarah umat manusia. Karena itu, SPPI sesungguhnya merupakan pengetahuan

tentang masa lampau perkembangan intelektual Islam dalam berbagai aspeknya, sehingga disiplin ini mengarahkan kajiannya secara multidimensional dan memiliki kontribusi integratif terhadap bidang-bidang lain di dalam disiplin Sejarah Islam itu sendiri, bahkan lebih luas lagi fungsi integratifnya itu memiliki arti penting bagi pengembangan keilmuan yang lain di perguruan tinggi agama Islam.

Oleh karena itu, rekonstruksi SPPI mendesak untuk diperbaharui baik dari segi relevansi metodologis, aspek-aspek pembahasan di dalamnya, maupun aktualisasinya bagi pengembangan keilmuan yang lain. Hal ini perlu dilakukan sedikitnya bertolak pada tiga alasan: 1) selama ini sejarah Islam masih didominasi informasi tentang peristiwa-peristiwa politik atau perkembangan sistem kekuasaan di dunia Islam; 2) kebanyakan historiografi Islam disajikan dalam bentuknya yang naratif-konvensional, belum secara kritis menyingkap faktor-faktor intelektual dari peristiwa-peristiwa; dan 3) penyajian sejarah Islam di luar disiplinnya kurang relevan dan aktual dengan pengembangan keilmuan pada sesuatu program studi. Di sinilah arti penting SPPI sebagai salah satu bidang studi keislaman, yang pada gilirannya diharapkan bisa memberikan kontribusi spesifik terhadap pengembangan keilmuan lain. Untuk ini, uraian selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan tentang apakah karakteristik SPPI, dan bagaimanakah rekonstruksi SPPI serta kemungkinan aktualisasinya bagi pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi agama Islam.

1. Karakteristik Sejarah Pemikiran Islam

Sejarah Pemikiran Islam sebagai satu jenis sejarah perlu dipahami terlebih dahulu dari perspektif ilmu sejarah sendiri, yaitu pengetahuan yang tersusun dari serangkaian fakta masa lampau dari keseluruhan pengalaman manusia; tetapi ilmu sejarah juga

dapat dimaknakan sebagai suatu metode yang dengannya fakta-fakta diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan dan dianalisis (Sardar, 1986: 208). Pengetahuan sejarah biasa dibedakan antara tiga jenis fakta, yaitu *artifact* (benda), *socifact* (hubungan sosial) dan *mentifact* (kejiwaan). Tertutama jenis fakta sejarah yang terakhir, dalam hal ini relevan dengan SPPI, ialah menyangkut semua fakta seperti yang terjadi dalam jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia. Padahal kesadaran itu adalah prinsip hidup utama atau realitas primer atas segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yakni segala bentuk kebudayaannya (Kartodirdjo, 1982: 176). Oleh karena itu, semua fakta sejarah sebenarnya bersumber pada ekspresi dari apa yang terjadi dalam mental orang, antara lain pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala macam unsur kesadaran. Dengan begitu, masalah kesadaran adalah sangat penting perannya sebagai faktor penggerak atau pencipta fakta-fakta sejarah lain, seperti revolusi, perang, gerakan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Berdasarkan perspektif ini sangatlah esensial untuk mengkaji mentifact dalam segala bentuk dan perkembangannya sebagai obyek studi sejarah pemikiran.

Aspek yang sangat menarik dalam sejarah intelektual adalah dialektika yang terjadi antara ideologi dan penghayatan oleh penganutnya. Dalam hal ini sangat menarik pula untuk dilacak hubungan yang ada antara ide atau alam pikiran dengan lokasi sosial pendukungnya. Seberapa jauh formasi ide atau ideologi ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor sosiologis para aktor atau pelaku yang memilikinya. Struktur pikiran khususnya dan struktur kesadaran pada umumnya perlu dipahami dalam hubungan dengan latar belakang sosio-kultural di mana pemikir hidup, sebagaimana secara khusus dipelajari dalam sosiologi pengetahuan. Di samping ideologi, sebenarnya bermacam-macam mentifact hanya dapat

diungkapkan makna atau identifikasinya apabila ditempatkan dalam suatu konteks sosio-kultural, sebab sejarah ide-ide secara kontekstual tidak mempunyai pertumbuhan sendiri melainkan sambung menyambung antara kehidupan nyata dan ide-ide.

Selanjutnya pemahaman lebih khusus tentang karakteristik “Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam”, bahwa secara definitif konsep ini dapat diartikan sebagai perkembangan ide atau ideologi Islam dalam perspektif sejarah. Cakupan serta lingkup kajian sejarah ini sangatlah luas, karena Islam sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan serta aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan, keseluruhannya tercermin dalam sejarah dan kehidupan umat Islam. Karena itu, cakupan pembahasan SPPI secara garis besar dapat dilihat dari latar pemikiran atas tiga aspek sejarah Islam berikut ini. *Pertama*, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam periode-periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad saw. sampai perkembangan Islam sekarang; *kedua*, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian; *ketiga*, kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam terutama dalam hubungannya dengan ibadat-ibadat, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat (Sardar, 1986: 11).

Dalam proses rekonstruksi sejarah pemikiran Islam, cukup dipermudah dengan adanya dokumentasi berbagai *mentifact*. Fakta-fakta historis yang diwariskan para sejarawan terdahulu berperan dalam pembentukan sejarah pemikiran, bahkan fakta sejarah yang dianggap berasal dari warisan masa lalu sangatlah luas cakupannya, yaitu terdapat pada sumber-sumber arkeologis, ekologis, ilmiah, etnografis dan visual. Masing-masing sumber itu

pun menyangkut struktur atau situs-situs yang erat hubungannya dengan pemikiran sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari suatu masyarakat Islam, sebagaimana sumber-sumber itu juga memberikan sumbangan pada pemahaman, evaluasi dan apresiasi berkenaan dengan gaya hidup, pemikiran, dan keyakinan.

Bertolak dari luasnya cakupan pembahasan SPPI, maka disiplin ini menampakkan fungsinya dalam tiga orientasi yang saling berhubungan. *Pertama*, disiplin ini merupakan pengetahuan mengenai pemikiran-pemikiran di masa lampau Islam dan memiliki kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini. *Kedua*, pengetahuan tentang ide-ide yang melatarbelakangi berbagai aspek kehidupan umat Islam itu yang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. *Ketiga*, sejarah pemikiran merupakan fakta intelektual atau falsafah yang didasarkan kepada pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat muslim (Mutahhari, 1986: 65-67). Oleh karena itu, cukup beralasan kalau SPPI dengan rincian kompetensinya seperti tersebut di atas dikembangkan menjadi sejarah pemikiran di bidang: Kebudayaan Islam, Sosial Islam, Politik Islam, Ekonomi Islam, sistem keagamaan Islam, dan lain sebagainya.

2. Perkembangan Historiografi Pemikiran Islam

Perlu diberikan pembatasan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud historiografi di sini adalah penjabaran atau penyelidikan mengenai peristiwa atau suatu aktualitas masa lampau. Karena itu, historiografi sesungguhnya bermuatan metodologi (sejarah) yang tidak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah. Beberapa model historiografi yang telah dikembangkan para tokoh sejarawan pada dasarnya menunjukkan keragaman tentang cara-cara yang dipergunakan mereka untuk mengkaji sejarah, selain itu juga menunjukkan keragaman penjabaran serta penafsiran terhadap

peristiwa-peristiwa sejarah. Berdasarkan karya-karya historiografi itulah mereka memberikan sumbangsih atas fungsi sejarah pada masa kini dan mendatang. Demikian halnya tentang Historiografi Pemikiran Islam, sebagaimana historiografi Islam pada umumnya, disebutkan Ziauddin Sardar (1986) bahwa penulisan sejarah ini secara garis besar telah berlangsung dalam dua model. *Pertama*, penulisan yang mengembangkan metodologi literatur isnad dan hadits, dengan muatan isinya lebih bersifat anekdot dan biografis, seperti karya-karya at-Tabari. *Kedua*, penulisan sejarah yang tidak sebatas dokumentasi kronologis, melainkan telah berubah menjadi analisis sosiologis, sebagaimana diterapkan Ibn Khaldun dan para sejarawan sesudahnya.

Kekhasan historiografi ialah penekanannya pada dimensi waktu yang dipetakan berdasarkan periodisasi sejarah. Dalam hal ini, keragaman historiografi Islam juga dapat dilihat dari penetapan periodisasi sejarah Islam yang ditulis oleh para sejarawan terdahulu. Dalam historiografi Islam yang dikembangkan para sejarawan kontemporer, periodisasi dimaksud seringkali disederhanakan menjadi tiga tahap utama, yaitu: diturunkannya Islam di Jazirah Arab, penyebaran Islam dan tahap-tahap kejatuhannya, dan menyempitnya batas-batas daerah Islam. Penyederhanaan periodisasi sejarah seperti ini selaras dengan model historiografi modern sebagaimana banyak dikembangkan oleh para orientalis yang memetakan periodisasi sejarah Islam menjadi tiga babagan utama, yaitu: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periodisasi sejarah semacam ini juga dapat disepadankan ke dalam periodisasi sejarah pemikiran Islam, umpamanya di sini kita mengacu model pembabagan yang dikemukakan oleh Ira M. Lapidus dalam *A History of Islamic Societies* (1999), sebagaimana telah dibahas di atas.

3. Rekonstruksi dan Aktualisasi Sejarah Pemikiran Islam

Apabila teori kesinambungan dan perubahan merupakan teori khas dalam ilmu sejarah, maka substansi pemikiran atas peristiwa-peristiwa pada masa lampau itu sendiri dapat diinterpretasi berdasarkan berbagai pendekatan yang bersumberkan pada disiplin-disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang pemikiran tertentu. Kalau bagian-bagian sejarah pemikiran itu adalah bidang politik, hukum, sosial, keagamaan, kebudayaan, pendidikan, sains-teknologi, dan humaniora, maka alasan metodologisnya bahwa bidang-bidang pemikiran itu akan dapat dijelaskan berdasarkan teori-teori yang bersumberkan pada pendekatan ilmu-ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan sebagainya yang masing-masing berperan memberikan kerangka konseptual dan teoretik terhadap interpretasi sejarah pemikiran. Relevansi sebuah pendekatan dengan sejarah pemikiran tergantung jenis pemikiran yang dianalisis, misalnya sejarah pemikiran dalam bidang kebudayaan akan lebih tepat dianalisis dengan pendekatan antropologi, sejarah sekte-sekte keagamaan dengan Pentingnya pengembangan teori berdasarkan pendekatan yang berbeda terhadap historiografi pemikiran Islam, umpamanya mengenai beberapa subsistem pemikiran politik Islam—Negara Madinah, periode Khulafa ar-Rasyidun, zaman keemasan, zaman kemunduran dan gerakan kebangkitan Islam—harus ditulis kembali dalam suatu kerangka analitis yang relevan dengan realitas obyektif masa lalu. Hal ini penting dilakukan, sebab terutama pada bentuk-bentuk historiografi akhbar dan sirah, analisis konseptual dan teoretis jelas tidak hadir, bahkan hampir seluruh karya sejarah seperti itu penekanan diberikan sepenuhnya pada pengumpulan data, tetapi pembentukan konseptual dan teoretis atas data tersebut sering sekali diabaikan. Mengenai kehidupan politik Nabi misalnya, masih

banyak masalah yang ditulis kurang memuaskan menyangkut latar gagasan dari aktifitas-aktifitas politik Nabi, tentang perjanjian-perjanjiannya, dan prestasi-prestasi sosialnya. Karena itu, studi sejarah kritis para sejarawan diharapkan mampu mengetengahkan gagasan-gagasan, konsep-konsep dan teori-teori yang sangat diperlukan untuk mempelajari sejarah pemikiran tersebut.

Analisis terhadap sejarah pemikiran, antara lain bisa dipergunakan pendekatan integratif, yakni pendekatan atau perspektif yang memadukan antar berbagai pendekatan dalam rangka memahami dan menjelaskan sesuatu obyek studi. Pemikiran Islam yang terpantul dalam gejala-gejala empiris dari sejarah Islam adalah menyangkut bidang-bidang keagamaan, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, maka untuk bidang-bidang sejarah pemikiran itu pun dibutuhkan perspektif yang relevan, sehingga proses integrasi lebih mengejewantah antara pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu lain, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu. Sementara itu, pendekatan keislaman dengan berbagai aspeknya juga terus dipergunakan untuk menafsirkan berbagai bidang sejarah pemikiran, sehingga sejarawan dapat menyajikan deskripsi detail serta eksplanasi kritis atas sesuatu pemikiran tertentu.

Berdasarkan proses integrasi itu pada gilirannya historiografi pemikiran Islam bisa dilakukan dalam ragam penulisan sejarah pemikiran menurut obyek dan cara penafsirannya yang berbeda-beda, tetapi substansi analisisnya sama-sama memadukan antar perspektif. Selanjutnya, proses rekonstruksi SPPI perlu dipetakan berdasarkan dimensi-dimensi pemikiran Islam itu sendiri. Misalnya, dipetakan kembali menjadi 7 aspek pemikiran sebagai berikut: 1) sumber dan pokok-pokok ajaran Islam, 2) teologi, 3) hukum, 4) mistisisme, 5) politik, 6) sosial-ekonomi, dan 7) filsafat

dan ilmu pengetahuan. Semua aspek keislaman ini sangatlah jelas dapat dijadikan sasaran studi atau obyek meterial dari SPPI, dan setiap obyek itupun dapat dikaji berdasarkan sudut pandang keilmuan tertentu sesuai dengan faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi sesuatu pemikiran.

Aspek-aspek pemikiran tersebut, dengan penyusunan kembali yang lebih sistematis dan kronologis dapat dijadikan bahan sillabi mata kuliah SPPI di jurusan Sejarah Islam di Fakultas Adab, Adapun aktualisasinya bagi disiplin lain di luar jurusan atau fakultas ini, dapat dilakukan dengan tetap menyebut nama mata kuliah SPPI tetapi kompetensi sillabusnya adalah menjabarkan beberapa aspek yang relevan dengan disiplin tertentu. Dapat dipetakan secara garis besar, bahwa muatan SPPI untuk fakultas Dakwah mengutamakan aspek-aspek pemikiran itu dalam konteks penyebaran Islam; untuk fakultas Ushuluddin sangat jelas menyangkut perkembangan seluruh aspek pemikiran teologi Islam; SPPI di fakultas Syari'ah lebih menekankan kajiannya tentang perkembangan pemikiran hukum Islam, berbeda dengan pengembangan SPPI di fakultas Tarbiyah yang lebih menekankan pada sejarah pemikiran tentang pendidikan Islam. Demikian seterusnya relevansi muatan SPPI dikembangkan dalam disiplin keilmuan lain, seperti misalnya di fakultas Sain dan Teknologi bisa lebih ditekankan pada sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, sedemikian halnya bagi keilmuan sosial dan humaniora lebih ditekankan pada pemikiran-pemikiran Islam di bidang politik, sosial, modernisasi Islam, dan bidang psikologi tampaknya bisa bersumberkan pada pemikiran-pemikiran tentang spiritualitas Islam dan sufisme. Dengan begitu, aktualisasi pengembangan SPPI sesuai fakultas-fakultas atau program-program studi, sehingga SPPI berfungsi efektif bagi

pengembangan studi keislaman. Demikian pula berdasarkan pengembangannya di dalam proses studi di perguruan tinggi agama dapat melahirkan wacana sejarah pemikiran yang relevan dengan sistem maupun subsistem ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum.

F. Ibn Khaldun tentang Penulisan Sejarah Kritis

Bagi para pemikir muslim, mempelajari sejarah merupakan sesuatu yang amat penting. Muhammad Abduh misalnya, seorang modernis yang pemikirannya banyak mempengaruhi kalangan muslim pembaharu di Indonesia, memperjuangkan agar sejarah diajarkan di perguruan al-Azhar. Pentingnya mempelajari sejarah, khususnya bagi kaum muslimin, seperti disimpulkan Nourouzzaman Shiddiqi, setidaknya karena tiga hal yang menjadi alasannya: pertama, kewajiban kaum muslimin untuk meneladani Rasulullah; kedua, sejarah sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami maksud Alquran dan al-Hadits; dan ketiga, untuk merekam peristiwa-peristiwa penting baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam (Shiddiqi dalam Taufik Abdulah, ed., 1989: 69).

Pengetahuan sejarah yang dimaksudkan oleh pemikir muslim, terutama mereka yang hidup pada abad pertengahan dan abad modern itu, bukan hanya sekedar *tarikh* dan cerita masa lalu yang baik-baik, apalagi cerita yang banyak bercampur dengan mitologi; akan tetapi mereka hampir sependapat untuk memberikan pengertian sejarah seperti dirumuskan Ibn Khaldun bahwa “sejarah adalah hasil upaya penemuan kebenaran, eksplanasi kritis tentang sebab dan genesis kebenaran sesuatu serta kedalaman pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa terjadi” (Thoha, 1986: 7). Dengan demikian, telaah filosofis dan kritik informasi adalah langkah-langkah yang

cukup menentukan dalam penulisan sejarah kritis.

Ibn Khaldun yang dikenal sebagai “Bapak Filsafat Sejarah” melalui *Muqaddimah* dia meminta agar orang mempelajari sejarah seperti itu, barangkali karena dia hidup pada Abad Pertengahan telah banyak menyaksikan karya-karya sejarah para penulis abad-abad sebelumnya terdapat cerita buatan atau menghilangkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan sengaja dilakukan demi maksud-maksud tertentu (Shiddiqi, 1989: 70). Sejarah sebelum Abad Pertengahan memang hanya sekedar bacaan hiburan, sebagai ilmu bantu dalam mempelajari Alquran dan al-Hadits, dan lebih banyak ditulis oleh orang-orang yang berpolitik.

Demikian berharga pandangan Ibn Khaldun bagi penulisan sejarah, maka dalam tulisan ini ingin dipaparkan kritik dan anjurannya. Namun, sebelum tiba pada fokus uraian tersebut, akan diungkap terlebih dahulu sekilas pandang tentang biografi tokoh dimaksud, kemudian model penulisan sejarah sebelumnya.

1. Ibn Khaldun dan Karyanya

Nama Ibn Khaldun sesungguhnya dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya, yaitu Khalid ibn Usman. Di Andalusia, Khalid ini dikenal dengan nama Khaldun, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Magribi yang suka menambah huruf ‘waw’ dan huruf ‘nun’ di belakang nama orang-orang terkemuka sebagai tanda penghormatan. Keturunan Khaldun di kemudian hari populer dengan sebutan Banu Khaldun. Cikal bakal mereka berasal dari Arabia selatan (Hadramaut, Yaman); mereka bermigrasi ke Andalusia sekitar abad VIII seiring dengan penyebaran Islam ke wilayah itu dan mereka menetap di Carmona, sebuah kota kecil di antara kota-kota Granada, Cordova, dan Sevilla (Wafi, 1985: 5).

Semenjak Sevilla dikuasai bangsa Nasrani (Spanyol), Banu

Khaldun mengungsi ke Afrika Utara, terutama Tunisia. Di Tunisia itulah Ibn Khaldun dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M. Ia adalah Wali al-Din Abdurahman ibn Mhammad ibn Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Khaludn. Muhammad, ayah pengarang *Muqadimah* ini, berbeda dengan saudara-saudaranya yang cenderung berpolitik, ia memilih kehidupan dalam bidang ilmiah dan terkenal sebagai ahli dalam bidang ilmu fiqh (hukum), bahasa dan sastra Arab. Ibn Khaldun dibesarkan dalam pangkuan ayahnya, dan ayahnya inilah sebagai gurunya yang pertama (Mukti Ali, 1970: 16).

Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan di Afrika Utara. Ibn Khaldun meneruskan pendidikan formalnya di sana hingga mencapai usia 18 tahun. Ia belajar Alquran dengan tafsirnya, al-Hadits, Fiqh mazhab Maliki, tasawuf, dan filsafat. Setelah usia 18 ia memasuki masa otodidak meneruskan apa yang telah didapatnya pada masa pendidikan formal. Tidak lama kemudian, di usianya menjelang 20 tahun, ia dipanggil oleh Ibn Tafrakin, penguasa Tunisia, untuk memegang jabatan sekretaris di istananya. Namun, karena pada permulaan tahun 753/1354 Tunisia diduduki Amir Constantine, maka Ibn Khaldun melarikan diri bersama para 'alim ulama Tunisia menuju Biskra. Segera setelah itu ia menggabungkan diri dengan Abu Inan, Sultan Fez (Maroko) hingga akhirnya diangkat menjadi salah seorang sekretaris istana. Semenjak itulah ambisinya semakin kuat untuk ikut campur dalam perjuangan politik, bahkan sempat mendukung perjuangan Raja Bougie yang baru saja dirampas kekuasaannya oleh Raja Inan. Sikapnya itu sempat tercium oleh penguasa Fez sehingga ia dipenjara selama dua tahun (*ibid*, 21-23). Ia dibebaskan dari penjara setelah Abu Inan meninggal dunia, kemudian oleh sultan penggantinya Ibn Khaldun dipercaya lagi untuk memegang jabatan

sekretaris, lalu Ketua Mahkamah Agung (Wafi, 1985: 32).

Setelah selama delapan tahun berkecimpung dalam pemerintahan di Fez, Ibn Khaldun pergi ke Andalusia guna memperoleh tempat bergerak yang lebih baik dan aman. Di sana dia diterima oleh Sultan Granada pada 1362 dan setahun kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi duat kepada Pedro, Raja Castilla. Sultan memberi tanah kepadanya—yang disebutnya sebagai tanah leluhur Ibn Khaldun—kemudian ia membawa keluarganya dari Afrika. Namun, di sini pun ia tidak bisa tinggal lama, karena khawatir akan menimbulkan iri hati perdana menteri, sehingga pada 1365 ia kembali lagi ke Afrika. Tidak lama sesudah itu ia diangkat menjadi perdana menteri oleh Sultan Bougi di Aljazair dan memimpin pasukan-pasukan kecil untuk memadamkan kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh suku Barbar (Issawi, 1976: 4). Rasanya sangat membosankan mengikuti berita secara terperinci tentang jejak Ibn Khaldun dalam beberapa tahun berikutnya, karena lebih dari sekali ia berganti tuan, mengembara antara Maroko dan Spanyol, hidup dengan masyarakat Badwi di Aljazair, dan memimpin pasukan dalam peperangan.

Pada 1375, Ibn Khaldun meninggalkan segala jabatan dan bersama keluarganya ia menetap di puri Qal'at ibn Salamah, dekat Tujin atau sekitar 6 km barat daya kota Frenada sekarang (Mukti Ali, 1970: 44). Di sini ia benar-benar mendapat waktu luang untuk melakukan penyelidikan ilmiah, selama empat tahun penuh ia menulis *Muqaddimah* (introduksi) dan kitab induknya yang berjudul *Kitab al-'Ibar w Diwan al-Mubtada wa al-Akhbar fi Ayyam al-'Arab wa al-Ajm wa al-Barbar wa Man 'Asarahum min Zawi al-Sultan al-Akbar* (kitab al-'Ibar, dan rekaman geneologis, dan peristiwa-peristiwa dari beberapa masa kehidupan bangsa Arab, 'Ajam (Persi), Barbar, dan bangsa yang sezaman dengan

mereka yang memiliki kekuasaan besar).

Muqaddimah sebagai kitab sejarah yang diilhami oleh pengalaman dan pengetahuan yang luas, sekalipun ia merupakan introduksi bagi *Kitab al-`Ibar* tetapi ia selalu disebut secara terpisah, dan dengan kitab itu nama Ibn Khaldun muncul sebagai ilmuawan kenamaan. Ia menyelesaikan kitab *Muqaddimah*nya itu hanya dalam waktu lima bulan dalam pertengahan 779/1377 (Mukti Ali, 1970: 45). Kitab ini secara keseluruhan memuat enam bab permasalahan pokok, yaitu:

Bab pertama, tentang masyarakat umat manusia pada umumnya, corak dan pembagiannya menurut ilmu bumi;

Bab kedua, tentang masyarakat pengembara, suku yang berpindah-pindah, dan golongan manusia liar;

Bab ketiga, tentang negara, kekuatan-kekuatan rohani dan duniawi serta kedudukan politik;

Bab keempat, tentang masyarakat yang menetap, kota-kota, dan propinsi-propinsi;

Bab kelima, tentang pertukangan, jalan-jalan kehidupan, dan kegiatan ekonomi;

Bab keenam, Ibn Khaldun secara panjang lebar membicarakan masalah-masalah ilmu pengetahuan dan pengajaran.

Adapun uraian mengenai manfaat historiografi, metode historiografi, dan ulasan sepintas mengenai manfaat historiografi, metode historiografi, dan ulasan sepintas mengenai kesalahan yang dilakukan para sejarawan, ditempatkannya pada bagian pendahuluan buku *Muqaddimah*.

Sementara kitab induknya sering disebut secara singkat, *al-`Ibar*, merupakan buku sejarah alam semesta atau *universal history*. Sebagaimana dikatakan oleh penulisnya, buku ini diklasifikasi menjadi sebuah pengantar (*Kitab Muqaddimah*) dan

tiga buku: *buku pertama*, menguraikan peradaban (*`umran*) dan ciri-cirinya yang hakiki; *buku kedua*, menguraikan sejarah, generasi dan negara orang-orang Arab, serta ulasan sekilas tentang bangsa-bangsa yang sezaman dengan mereka seperti Persia, Romawi, Turki, dan Eropa; *buku ketiga*, menguraikan sejarah bangsa Barbar dan negara-negara Magribi (*Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, 1986: 8). Kitab ini, *al-'Ibar*, ditutup dengan beberapa pasal mengenai otobiografi pengarang yang kemudian dikenal dengan nama *at-Ta'rif*. Pada bagian terakhir ini Ibn Khaldun telah menggambarkan kariernya dengan keterus-terangan yang istimewa dan penuh kebebasan sehingga menjadi model otobiografi yang menarik dan mengesankan (Jamil Ahmad, 1987: 432-424).

Setelah Ibn Khaldun berhasil menulis karya besar itu, pada 1382 ia berangkat menuju Kairo, Mesir yang pada waktu itu merupakan pusat kebudayaan Islam di dunia Arab, menjadi idaman Ibn Khaldun untuk mendapatkan lapangan dalam mengembangkan pikiran-pikirannya. Di sana ia disambut baik oleh Sultan az-Zahir Barquq dan diangkat sebagai guru besar untuk pelajaran Fiqh Maliki pada Madrasah Qamhiyyah dan pada tahun 1384 diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (Fathiyyah, 1987: 21-22). Kedudukan sebagai Qadi ini dipegangnya terus hingga 1406, saat ia meninggal dunia di usia 74 tahun. Ia dimakamkan di Kairo, di pemakaman para sufi. Begitulah selama 24 tahun ia tinggal di Mesir sehingga tidak mengherankan kalau ulama Azhar, terutama Muhammad Abduh, sangat mengaguminya.

2. Penulisan Sejarah sebelum Khaldun

Kemenonjolan Ibn Khaldun sebagai seorang sejarawan daripada para pendahulunya sesungguhnya terletak pada sikapnya yang obyektif dan kritis. Sikap demikian, seperti dapat kita baca dalam karya-karyanya di atas, karena Ibn Khaldun membaca

tingkah laku manusia secara obyektif, realistik, dan kritis, terutama di panggung sejarah Afrika Utara dan Spanyol. Namun, secara empiris ia juga sebagai tokoh terlibat langsung dalam berbagai kegiatan politik. Keadaan seperti ini tidak banyak dimiliki para penulis lain pada abad-abad sebelumnya.

Penulisan sejarah umat Islam mulai dikerjakan pada abad pertengahan abad ke-2/8 di masa pemerintahan Abbasiyah. Semua kegaitan penulisan sejarah ini dipusatkan di Irak sehingga dapat dimaklumi jika terlihat adanya kecenderungan untuk mengecilkan peranan dinasti sebelumnya (Umayyah) dalam membuas sejarah umat Islam (Shiddiqi, 1984: 20). Dengan demikian, penulisan sejarah pada masa itu dipengaruhi oleh kekuatan politik sehingga banyak informasi yang diperoleh dari karya-karya zaman itu yang dibuat semata-mata untuk memojokkan para penguasa terdahulu. Misalnya, Muawiyah dijuluki sebagai penguasa licik dan perebut kekuasaan, tidak mereka interpretasikan sebagai satu kecakapan Muawiyah, sedangkan untuk para penguasa di masa para penulis sejarah diberikan sanjungan dan pujian yang muluk-muluk.

Di samping pengaruh kekuatan politik, para penulis masa itu lebih banyak menggunakan “metode tradisional”, yakni hanya melihat dan menilai sumber berita (mata rantai *sanad*), bukan pada isi beritanya (*matan*). Diakui oleh at-Tabari, penulis sejarah dan ahli tafsir ternama pada abad ke-4/10 bahwa laporan-laporannya itu bisa dibantah atau tidak menurut kenyataan yang sebenarnya. Dalam kata pendahuluan karyanya, *Tarikh ar-Rasul wa al-Mulk* (Sejarah Rasul dan Para Penguasa), dia menyatakan “jika berita itu salah, maka kesalahan bukan terletak padanya tetapi pada si pemberi berita” (*ibid*: 23). Jadi, pada masa ini kerja sejarawan yang penting adalah menyebutkan rangkaian perawi, dari siapa mereka memperoleh berita itu. Pada umumnya mereka

tidak memasukkan catatan menurut pendapatnya sendiri, karena hal itu dianggap bukan bagian sejarah yang harus ditanganinya.

Situasi penulisan yang tradisionalistik itu pada masa yang sama mulai mendapat kritik, khususnya datang dari kalangan Mu'tazilah, penganut aliran rasional. Mereka sama halnya dengan sikapnya dalam pemahaman agama, mengkritik prinsip-prinsip aliran sejarah tradisional. Mereka menekankan pada pentingnya pemahaman yang rasional dan eksplorasi terhadap hakikat dan sebab-sebabnya, serta menelaah laporan yang hanya bersandarkan mata rantai periwayat. Alasan mereka bahwa orang banyak bisa saja bersetuju terhadap sesuatu yang tidak benar. Berarti mereka hanya bisa menerima apa yang beralasan dan menolak apa yang tidak beralasan. Salah seorang penulis yang menggunakan metode rasional ini ialah al-Masudi, orang pertama yang menggunakan metode topik dalam menulis sejarah—metode yang kemudian diikuti oleh Ibn Khaldun. Al-Mas'udi pula orang pertama yang memanfaatkan cerita-cerita sejarah dalam karyanya (Hitti, 1973: 391), meskipun banyak cerita yang dibuatnya menjadi bahan kritik Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*.

Munculnya dua metode penulisan sejarah pada abad-abad ke-9 dan ke-10 M itu sesungguhnya merupakan akibat dari sikap kontroversial antara para teolog. Berkembangnya metode tradisional adalah sebagai akibat pandangan kaum teolog bahwa sejarah itu tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Menurut mereka, status sejarah hanyalah *dhan* (prasangka). Oleh karena itu, termasuk para teolog dialektik mempertahankan konsepsi tradisional tentang hakikat dan metode sejarah. Sementara itu pula metode rasional harus diklaim sebagai perwujudan alam pikiran Mu'tazilah. Umat Islam yang mayoritas Sunni memang banyak mengecam paham Mu'tazilah dan sering

kali menolaknya secara total. Dengan demikian, konsepsi dan metode tradisional bisa mendominasi penulisan sejarah sampai masa Ibn Khaldun (Shaddiqi, 1984: 32).

3. Metodologi Sejarah Kritis

Di atas telah disebutkan bahwa judul karya besar Ibn Khaldun adalah *Kitab al-'Ibar*. Kata *'ibar*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *'ibrah* berarti contoh atau pelajaran moral yang baik, tampaknya merupakan kata kunci dalam teori sejarah Ibn Khaldun. Bahkan, oleh sebagian sejarawan muslim tradisional, kata itu dipergunakan untuk memberi sanggahan atas pandangan teolog yang menganggap sejarah hanyalah sekedar hiburan, karena konsep itu juga bisa menyangkut sejarah dalam Alquran dan al-Hadits (*Ibid*: 48). Menurut Muhsin Mahdi, akar kata *'ibrah* ialah *birr* yang artinya hampir sama pada semua bahasa Semit, terutama Arab, yaitu melalui, melampaui, menyeberang; tetapi juga dapat bermakna melanggar perbatasan (Mahdi, 1971: 67).

Bagi Ibn Khaldun sendiri, prinsip *'ibrah* era kaitannya dengan upaya penelitian ilmiah atau filosofi tentang peristiwa sejarah, dan usaha itu menjadi bagian dari hikmah atau *sophia*. Menurut Syafii Ma'arif, *'ibrah* tidak saja menjadi kata penghubung antara sejarah dan hikmah, tetapi juga merupakan proses perenungan sejarah dengan tujuan untuk memahaminya dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya sebagai pedoman bertindak (Ma'arif, 1985: 7). Dengan prinsip tersebut berarti semakin jelas apa yang disebut sebagai kegunaan masa lampau (sejarah) untuk masa kini dan masa mendatang.

Mengapa Ibn Khaldun begitu semangat untuk mempertautkan sejarah kepada filsafat? Tampaknya ia ingin mengatakan, seperti halnya Benedetto Croce, bahwa sejarah memberikan inspiratif dan

intuitif kepada filsafat, sedangkan filsafat menawarkan kekuatan logik kepada sejarah. Maka, dengan dibekali logika kritis, seorang sejarawan akan mampu menyaring dan mengkritik sumber-sumber sejarah, tulisan maupun lisan, sebelum ia sampai kepada proses penyajian final dari penyelidikannya.

Ibn Khaldun, sambil mengkritik al-Mas'udi dan al-Bakri, mengamati tujuh kelemahan yang sering melekat pada karya historiografi, ialah: (1) sikap memihak kepada pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab tertentu; (2) terlalu percaya kepada pihak penukil berita sejarah; (3) gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat dan didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan; (4) asumsi yang tak beralasan terhadap sumber berita; (5) ketidaktahuan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya; (6) kecenderungan manusia untuk mendekatkan diri kepada para penguasa dan orang-orang yang berpengaruh; (7) yang lebih penting diperhatikan ialah ketidaktahuan tentang watak berbagai kondisi yang muncul dalam peradaban (*'umran*) (*Muqaddimah*, Thoha, 1986: 58-59).

Berdasarkan tujuh kriteria di atas, Ibn Khaldun banyak mengkritik kelemahan para penulis sejarah, termasuk al-Mas'udi yang sebagian metodenya dia ikuti. Ibn Khaldun mengatakan bahwa cerita tentang keadaan al-Rasyid yang dikatakan suka minum *khamr* dan jatuh mabuk dalam pesta-pesta dengan para pembesar istana sama sekali tidak benar. Maha Suci Allah, sungguh kami tidak mengetahuinya telah melakukan kejahatan yang demikian. Hal ini tidak cocok dengan kedudukan dan tugas al-Rasyid melakukan kewajiban-kewajiban agama dan keadilan dalam kedudukannya sebagai seorang khalifah. ... At-Tabari dan sejarawan lainnya menceritakan bahwa al-Rasyid salat sunat seratus rakaat setiap hari. Satu tahun dia berperang melawan

orang-orang yang tidak beriman dan setahun lagi melakukan ibadah haji Dia bukan orang yang gampang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan dianggap sebagai dosa besar oleh para pemuka agama Mereka (para khalifah Abbasiyah pertama, pen.) tetap memelihara kesederhanaan agama dan kekerasan sikap kepadangpasirannya (*ibid*: 28-38).

Contoh lain misalnya al-Mas'udi menceritakan tentang Iskandar Agung yang didatangi oleh binatang-binatang laut sewaktu ia membangun kota Iskandariyah di Mesir. Untuk menanggulangi gangguan binatang yang aneh ini, Iskandar lalu masuk ke dalam peti yang dibuat itu dan terus menyelam ke laut, maka sewaktu dalam laut inilah ia menulis bentuk-bentuk binatang setan itu dan membuat patung-patungnya. Patung-patung ini lalu ditegakkan dekat kota yang sedang didirikan. Demi melihat patung-patung yang menyerupai dirinya itu maka larilah binatang setan, dan selamatlah Iskandar membangun kota. Ceritera semacam ini adalah berita-berita *khurafat* menurut Ibn Khaldun dan tidak masuk akal (*ibid*: 59).

Ibn Khaldun mengatakan lebih lanjut bahwa ceritera-ceritera semacam ini banyak sekali dan sudah dikenal dalam buku para sejarawan. Motivasi untuk menulis dan membicarakannya adalah tendensi untuk tenggelam dalam kesenangan yang diharamkan. Mereka beralasan menulis cerita seperti itu karena ingin menunjukkan suka cita terhadap masyarakat yang tenggelam dalam kesenangan tersebut. Karena itu, sebagian besar sejarawan terus menulis ceritera semacam itu dari apa yang mereka cari sewaktu membuka buku-buku sumber sejarah (*diwan*).

Ibn Khaldun banyak sekali memberikan contoh dan menunjukkan kesalahan-kesalahan pemberitaan sejarawan, dan menurutnya hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan historiografi

menjadi tidak berarti dan orang-orang yang mempelajarinya menjadi bingung. Oleh karena itu, kata Ibn Khaldun, sarjana yang terjun ke lapangan ini (sejarah) membutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip politik, watak segala yang ada, perbedaan bangsa-bangsa, tempat-tempat dan periode-periode dalam hubungannya dengan sistem kehidupan, nilai-nilai akhlak, kebiasaan, sekte-sekte, mazhab-mazhab dan segala ihwal lainnya (*ibid*: 45). Pendapat Ibn Khaldun ini tampaknya sesuai dengan metode dan pendekatan yang kita kenal sekarang sebagai “*Multidimensional Approach*” dalam penelitian sejarah.

Pada bagian pertama dari buku *al-`Ibar*, Ibn Khaldun mempertegas kembali metode penelitian sejarah yang diidamkannya itu. Penyelidikan bisa dilaksanakan hanya dalam cahaya pengetahuan tentang watak-watak peradaban. Inilah metode yang paling baik dan paling meyakinkan untuk dipergunakan dalam usaha menyelidiki informasi sejarah secara kritis, untuk dipergunakan dalam usaha memisahkan kebenaran yang terkandung di dalam informasi itu dari kebohongannya. Hal ini dilakukan sebelum kritik terhadap para perawi, sebab kritik yang demikian itu baru dijalankan setelah yakin, apakah kejadian yang diceritakan itu sendiri mungkin atau tidak mungkin. Sebab, apabila kejadian yang diceritakan itu tidak mungkin maka tidak perlu diadakan penyelidikan yang kritis terhadap pribadi orang-orang yang menyampaikan cerita-cerita itu (*ibid*: 61-62).

Adapun penyelidikan terhadap pribadi para penutur ceritera (*ta’dil wa tarjih*/keadilan dan kecenderungan) merupakan cara yang dianggap benar hanya dalam hubungannya dengan informasi yang berkenaan dengan syariat atau ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Yang Menetapkan Hukum melalui Nabi Muhammad. Sementara informasi bukan syariat, kebenarannya harus diuji dengan mempertimbangkan

kesesuaian (*konformiti*) atau ketidaksesuaian informasi dengan kondisi-kondisi umum. Oleh karena itu, bagi Ibn Khaldun, untuk kepentingan penelitian hal-hal yang berkenaan dengan syariat bisa dipergunakan normatif dalam upaya membedakan kebenaran dari kebatilan yang terdapat dalam informasi sejarah. Metode ini menurutnya identik dengan teori peradaban. Kita harus membedakan mana gejala yang menurut kodratnya sendiri dan mana gejala yang timbul kebetulan dan tidak penting, dan akhirnya menurut kodratnya tidak mungkin terjadi (*ibid*: 62).

* * *

Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa; Ibn Khaldun tidak saja sebagai tokoh yang terlibat secara mendalam dalam berbagai kegiatan politik, tetapi sekaligus juga bertindak sebagai pengamat yang sangat jeli dalam membaca dan merekam peristiwa-peristiwa yang dilihat dan dialami serta ia menuangkannya dalam suatu teori yang “modern”. Perkataan modern ini tentu harus kita bedakan dari yang kita pahami dalam teori-teori ilmu sosial yang berkembang di Barat sejak abad XIX.

Sejarah mempunyai tujuan praktis bagi Ibn Khaldun sebagaimana telah disinggung di muka. Tujuan praktis itu ialah untuk menangkap tanda-tanda yang dipantulkan oleh *‘ibar* dalam kejadian sejarah. Tetapi penyelidikan sejarah tidak akan berhasil tanpa bantuan ilmu lain. Ilmu lain inilah yang diistilahkan Ibn Khaldun sebagai ilmu kultur (*‘ilm al-‘umran*). Ilmu kultur ini bertugas mencari pengertian tentang sebab-sebab yang mendorong manusia bertindak, di samping melacak pemahaman tentang akibat-akibat dari tindakan itu, yaitu seperti yang tercermin dalam peristiwa sejarah umat Islam.

G. Rekonstruksi Sejarah Islam di Indonesia

Semenjak masa kemerdekaan Indonesia, terdapat keinginan para sejarawan untuk menggunakan metodologi dan pola-pola baru dalam bidang ilmu sejarah. Kecenderungan ini terdorong oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial yang secara metodologis menyumbang pada pengembangan ilmu sejarah. Berdasarkan kecenderungan ini timbulah jenis-jenis sejarah baru, seperti sejarah analisis, sejarah struktural, sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan sejarah budaya. Pertumbuhan berbagai jenis sejarah itu juga pada gilirannya diikuti oleh gaya penulisan baru, menggantikan sejarah konvensional yang selama ini menonjolkan segi-segi prosedural dari sesuatu peristiwa sejarah.

Seiring dengan kecenderungan ilmu sejarah itu, sejarah Indonesia diupayakan mampu mengungkap banyak persoalan dan obyek-obyek baru sejalan perubahan sosial dan kehidupan bangsa Indonesia (Kartodirdjo, 1982: 2). Salah satu wilayah yang patut dipelajari dalam penelitian sejarah di negeri ini adalah perkembangan Islam yang telah terbentuk dalam kelompok-kelompok sosial serta ciri-ciri kolektif lainnya seperti kelompok ulama, organisasi keagamaan, gerakan reformasi, dan tradisi-tradisi keagamaan.

Islam di Indonesia memang dalam perjalanan sejarahnya telah menciptakan masyarakat-masyarakat dengan corak “tradisi Islam” yang berbeda-beda dan bentuk struktur sosial yang juga tidak sama, baik pada masa kolonial dengan coraknya yang bersifat lokal, maupun pada masa “masyarakat nasional” yang mulai terbentuk sejak awal abad XX. Dalam hal ini, penulisan sejarah umat Islam merupakan sesuatu yang penting mendapat perhatian, bukan saja karena umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, tetapi juga karena peristiwa-peristiwa historis yang cenderung dimotivasi oleh agama ini pada kenyataannya merupakan pendukung atau bagian

yang selalu mewarnai “sejarah nasional”. Dari pendekatan ini akan dapat dilihat bahwa sejarah umat Islam di Indonesia bukan saja bermula dari proses internal umat, tetapi juga harus dihadapkan pada kenyataan struktural, sehingga obyek atau peristiwa sejarah umat Islam pun akan dapat dianalisis berdasarkan pendekatan multidimensioanl.

Dalam pembahasan berikut ini ditunjukkan satu arah baru penulisan sejarah Islam di Indonesia, terutama yang berpangkal pada penggunaan pendekatan sosiologis. Hal ini diharapkan sebagai upaya menambah wawasan dan wacana baru di dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia yang selama ini lebih banyak dikembangkan dalam penulisannya yang bersifat intelektual dan politik.

1. Model-model Penulisan Sejarah Islam

Pengungkapan sejarah tentang peranan umat Islam itu telah dilakukan dalam keanekaragaman bentuk, model, serta kecenderungan penulisan. Hal ini dapat dimaklumi karena para sejarawan tidak mewakili asumsi pada prasangka ilmiah yang tidak sama. Sebagaimana historiografi Indonesia pada umumnya, penulisan sejarah Islam pertama kali adalah berupa “historiografi tradisional” seperti terbaca dalam *babad*, *tambo*, *hikayat*, dan *silsilah*. Sifat penulisan sejarah tersebut tampak simbolik dan berfungsi sebagai akulturasi pandangan hidup. Adapun bandingan atas bentuk hitoriografi itu adalah apa yang disebut dengan “historiografi modern” yang ditandai oleh kepastian historisitas dalam penulisannya. Sejarah modern di tanah air kita dirintis oleh penulis-penulis Barat yang umumnya adalah pegawai kolonial atau para misionaris.

Karya-karya sejarah berdasarkan dua model penulisan di atas, selain berfungsi sebagai sumber sejarah, juga telah mempengaruhi

metode dan pendekatan para sarjana kontemporer yang menulis tentang Islam di Indonesia. Pada kalangan sarjana Belanda menelaah sejarah dimaksud sering kali menggunakan metode analisa sastra, sedangkan sarjana Amerika lebih mementingkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam pengkajiannya. Meskipun demikian, ada pula di antara sarjana Belanda, seperti B.J. Schrike, bersedia menerapkan pendekatan sosiologis, dan tokoh ini banyak mendapat pujian dari sebagian sarjana Indonesia (Steenbrink, 1984: 12).

Selanjutnya, bila kita memperhatikan hasil karya sarjana Indonesia maka terlihat adanya beberapa pendekatan yang dipergunakan. Hamka misalnya, dalam *Sejarah Umat Islam*, jilid IV, dengan mengandalkan banyak sumber tradisional, menulis perkembangan Islam di negeri ini dengan menggunakan pendekatan “*Hero Worship*” sehingga bagi ulama-pujangga itu sejarah adalah kisah pahlawan dan dinasti. Sementara sejarawan lain, Uka Tjandrasasmita dalam buku yang dieditnya, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid III, menekankan proses ekonomi sebagai penyebab Islam tersiar di Kepulauan Nusantara. Dari kedua karya ini tampak bahwa yang pertama terpengaruh oleh pemikiran Hegel dengan mengutamakan ide dan cita-cita, tetapi agak mengabaikan proses dan struktur; sedangkan karya yang kedua tampaknya terpengaruh oleh pemikiran Marx, merupaka kebalikannya dari karya Hamka.

Perbedaan pendekatan itu juga dapat diperhatikan dalam karya-karya sarjana lain, di antaranya Sartono Kartodirdjo, Alfian, Taufik Abdullah, Ibrahim Alfian, dan Kuntowijoyo. Di dalam karya-karya mereka berkenaan dengan sejarah umat Islam lebih menonjolkan pentingnya penerapan ilmu-ilmu sosial. Sejarawan lain seperti Deliar Noer, M. Syafii Maarif, dan sarjana IAIN/UIIN pada umumnya menitikberatkan perhatiannya terhadap perkembangan intelektual dalam perspektif sejarah Islam di Indonesia.

Suatu hal yang menarik, buku yang tampak komprehensif ialah buku yang diterbitkan MUI, *Sejarah Umat Islam di Indonesia* (1991), barangkali karena para penulisnya (sebuah tim) adalah sarjana sejarah yang cenderung menggunakan ilmu-ilmu sosial dalam penelitiannya, maka sejarah yang disajikannya lebih struktural. Sebagaimana yang dinyatakan Taufiq Abdullah, editor buku ini, bahwa dari pendekatan yang dipergunakannya akan dilihat dinamika sejarah umat Islam di Indonesia bukan saja bermula dari proses internal umat, tetapi juga dalam penghadapannya dengan kenyataan struktural (Abdullah, ed., 1991: 27).

2. Perspektif Sosiologis dalam Historiografi Islam

Sejarah Islam dalam sudut pandang sosiologis, harus bertolak dari kerangka pemikiran umum bahwa Islam sebagai agama wahyu telah menampakkan dirinya dalam keanekaragaman sejarah dan situasi sosial-budaya dari masyarakat pemeluknya (Abdullah, 1987: 2). Begitu pula Islam di Indonesia, sebagai agama yang bersumber dari daerah “asing” ternyata bagi para pemeluknya merupakan sistem keyakinan yang terkait serta mewarnai segala aspek kehidupan mereka. Atas alasan inilah masyarakat Islam selalu muncul dalam setiap permasalahan sejarah Indonesia, dan tentunya semenjak periode awal penyebaran Islam di Nusantara. Dengan demikian, telaah sosiologis atas sejarah Islam di kawasan ini bisa ditelusur pada setiap periode hingga perkembangannya paling akhir.

Kontak-kontak pertama antara para penyiar Islam dengan berjenis masyarakat dan kebudayaannya menunjukkan proses akulturasi yang sangat jelas. Proses ini sudah barang tentu mencakup usaha-usaha para penyiar (da'i atau muballigh) menghadapi pengaruh kultural dari masyarakat yang dijadikan sasaran penyiaran Islam, atau usaha-usaha untuk mencari bentuk

penyesuaian terhadap ideologi baru (Kartodirdjo, 1992: 160). Proses pembentukan komunitas Islam makin jelas semenjak munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada akhir abad ke-13 hingga pusat-pusat kekuasaan Islam itu terbentuk dan berkembang mulai abad ke-16. Sejak itulah berbagai pranata keislaman, khususnya masjid, pesantren, dan lembaga ulama, memasuki jaringan kehidupan sosial (Abdullah, 1987: 232). Di saat perkembangan sosial yang kian meningkat, proses struktural Islam memacu perubahan dan pertumbuhan sistem kultural baru di beberapa daerah Nusantara. Hal ini dapat dijumpai antara lain dalam situasi pengislaman Malaka, Banten, Makassar, dan daerah lainnya.

Kekuatan sosial Islam mulai abad XVII menampilkan perannya yang sangat besar dalam reaksi masyarakat Indonesia terhadap kekuatan Barat. Komunitas muslim di Banten dibawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, sebagai contoh, menampilkan reaksi-reaksi sosial yang didorong oleh keyakinan agama terhadap pelebaran dominasi VOC. Gejala yang sama ditunjukkan dalam kepeloporan Sultan Agung Mataram, tetapi konflik Mataram dengan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir juga merupakan gambaran tentang dinamika sosial Islam. Begitu halnya di saat dominasi politik dan ekonomi Belanda makin dirasa banyak merugikan penduduk di pedesaan, terutama pada abad XIX, telah mendorong munculnya gerakan-gerakan *messianis* yang justru diperkuat oleh unsur-unsur religius. Aspek keagamaan termasuk dalam orientasi gerakan-gerakan sosial pada abad itu, sehingga gerakan rakyat bukan hanya untuk tercapainya harapan messianistis, melainkan terkandung pula di dalamnya ideologi *perang sabil* menghadapi kekuatan kafir (Kartodirdjo, 1982: 188-189). Meskipun demikian, berkecamuknya perang-perang seperti Paderi, Diponegoro, Aceh, dan pemberontakan petani di Banten, protes sosial kaum Rifa'iyah

di Jawa Tengah, dan sebagainya masing-masing memiliki asal-usul dan proses sejarahnya yang berbeda-beda.

Kemudian, semenjak awal abad XX timbul gelombang baru mengenai dinamika umat Islam yang berbarengan dengan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Gerakan-gerakan keagamaan pada masanya memperlihatkan diri dalam berbagai organisasi sosial dan kecenderungan pola pemikiran keagamaan yang tidak sama (lih. Deliar Noer, 1985). Modernisasi dan reformasi Islam sebagai suatu gejala dari gerakan itu ditunjukkan dalam usaha-usaha umat Islam melalui Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Sementara gejala lainnya adalah gerakan tradisional yang berusaha mempertahankan pola-pola keagamaan yang telah lama berkembang di Nusantara, sebagaimana ditunjukkan oleh Nahdatul Ulama (NU), Al-Wasliyah, dan PERTI. Setiap gerakan itu pada prinsipinya mempermasalahkan bagaimana sesungguhnya Islam itu bisa terpancar dalam tingkah laku kehidupan pribadi dan kenyataan sosial. Oleh karenanya, *proses integrasi yang terus menerus antara ajaran agama dengan sikap dan cara hidup pribadi maupun sosial* merupakan usaha yang selalu dilakukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam perjuangan mereka melalui organisasi-organisasi itu. Terlepas dari adanya suasana konflik yang selalu mewarnai dinamika umat Islam pada abad ini, yang lebih penting lagi untuk menjadi perhatian sejarawan adalah suasana intenasiasi, yakni proses penghayatan ajaran Islam dan penjelmaannya dalam kehidupan pribadi serta hubungan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya semakin jelas pentingnya pemahaman sejarah Islam dengan pendekatan ilmu sosial, khususnya sosiologi agama. Interpretasi terhadap peristiwa hari lampau umat itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan kritik teks, melainkan perlu dimapankan dengan

interpretasi yang dilakukan terhadap realitas sosial dalam pengertian luas, sehingga pendekatan yang berfungsi sebagai referensi awal ialah *pendekatan yang bertolak dari realitas sosial dan dinamika historis*. Contoh kerja historiografi Islam di negeri ini berdasarkan pendekatan tersebut dilakukan Wertheim mengenai gerakan reformasi agama. Dalam karyanya *Indonesia Society in Transition* (1969) gejala-gejala reformasi agama dianalisa secara sosiologis dan memakai cara berpikir dialektis. Wertheim cenderung memperlakukan agama sebagai salah satu ideologi sosial di mana kehadiran dan peralihan agama itu terkait erat dengan perkembangan dan perbuahan sosial. Pembaruan agama baginya merupakan refleksi langsung dari proses perkembangan sosial dan ekonomi, dan usahanya untuk mencari paralelisme antara pemikiran agama dengan struktur sosial tercermin dalam pembahasannya mengenai sejarah Islam. Pendekatan serupa telah dilakukan Harry J. Benda yang menunjukkan segi-segi “perubahan” dan “persambung-an” mengenai peristiwa-peristiwa sejarah Islam di Indonesia.

3. Arah Penulisan Sejarah Islam di Indonesia

Berdasarkan pembahasan di atas tampak bahwa peranan Islam dalam sejarah bangsa Indonesia, baik ia sebagai dasar solidaritas, dasar motivasi dan sikap ideologi, maupun sebagai unsur pendorong atau pengesahan kultur dan struktural, maka penulisan sejarah Islam pada dasarnya bisa berdiri sendiri. Namun karena secara material ia tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia pada umumnya, maka sejarah Islam di Indonesia tidak perlu isolatif dalam arti tetap merupakan bagian dari Sejarah Nasional Indonesia. Dalam hal ini, barangkali penulisan yang bersifat umum itu akan dapat dilakukan atas dukungan hasil-hasil studi monografis, termasuk di dalamnya

sejarah Islam di Indonesia dalam kasus-kasus lokal berdasarkan pendekatan yang ditawarkan di atas.

Oleh karena Islam di Indonesia adalah sebagai kekuatan historis, ia selalu menampakkan sifat keragaman masyarakat dan tentu saja variasi dari tekanan pengaruh Islam juga berbeda-beda dari suatu komunitas ke komunitas lain. Untuk itu upaya kategorisasi dan identifikasi atas jenis-jenis kekuatan itu perlu dilakukan. Atas upaya demikian, penulisan sejarah Islam di negeri ini diharapkan akan mampu mengungkapkan banyak persoalan. Obyek-obyek serta dimensi-dimensi baru berdasarkan perubahan sosial dalam kehidupan umat Islam khususnya, dan juga dalam kaitannya dengan struktur kehidupan sosial bangsa Indonesia, dapat dikaji antara lain melalui pendekatan sosiologis.

Apabila penulisan sejarah Islam yang secara metodologis dilengkapi dengan alat-alat analitis seperti berdasarkan konsep dan teori sosiologis itu, maka kemampuan sejarawan yang berminat di bidang ini akan lebih meningkat. Begitu pula studi dan pengungkapan sejarah Islam, baik berupa *macrohistoris* maupun *microhistoris* berdasarkan arah baru penulisan akan lebih banyak dihasilkan, dan penulisan sejarah Islam di Indonesia tidak lagi terpaku pada sejarah konvensional dan sejarah naratif.

Sebagai pungkasan atas pembahasan ini, mengingat begitu penting peranan Islam dalam sejarah bangsa Indonesia baik ia sebagai dasar solidaritas sosial, dasar motivasi dan ideologis, maupun sebagai unsur pendorong atau pengesahan kultural dan struktural, maka penulisan sejarah Islam kiranya bisa berdiri sendiri. Namun, secara material tidak terpisahkan dari sejarah Indonesia pada umumnya, maka sejarah Islam tetap merupakan bagian yang tak terisolasi dari sejarah nasional Indonesia. Dalam hal ini yang terpenting bahwa Islam sebagai kekuatan sejarah selalu tampil

dalam keragaman sifat masyarakatnya serta variasi dari tekanan pengaruhnya yang berbeda-beda pada komunitas satu dengan komunitas lainnya. Upaya kategorisasi dan identifikasi atas jenis-jenis kekuatan umat Islam itu harus ditelusuri dalam sejarah. Pada gilirannya, penulisan sejarah Islam yang sosiologis akan mampu mengungkapkan banyak persoalan dan obyek-obyek baru serta dimensi-dimensi perubahan sosial dalam kehidupan umat Islam.

BAB III

METODE SEJARAH

Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Metode di sini dapat dibedakan dari metodologi, sebab metodologi adalah “*science of methods*”, yakni ilmu yang membicarakan jalan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian, menurut Florence M.A. Hilbish (1952) adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu subjek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. Oleh karena itu, metode sejarah dalam pengertiannya yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historik.

Pengertian yang lebih khusus, sebagaimana dikemukakan Gilbert J. Garraghan (1957: 33), bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Gottschalk (1983: 32) menjelaskan metode sejarah sebagai “proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Berdasarkan pengertian di atas, para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah. Istilah-istilah yang dipergunakan bagi keempat langkah itu

berbeda-beda, tetapi makna serta maksudnya sama. Gottschalk (1983: 18), misalnya, mensistematisasikan langkah-langkah itu sebagai berikut:

1. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan;
2. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak otentik;
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik;
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut biasa juga diistilahkan dengan: *heuristik*, kritik atau *verifikasi*, *aufassung* atau *interpretasi*, dan *darstellung* atau *historiografi*.

A. Metode Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam pembahasan terdahulu telah dipaparkan tentang sumber-sumber sejarah, terutama dilihat dalam kategorisasi sumber itu berdasarkan bahannya. Uraian berikut ini ingin menjelaskan lebih lanjut tentang teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah itu. Teknik dimaksud biasa dinamakan *heuristik*, yaitu berasal dari kata Yunani *heurishein*, artinya memperoleh. Menurut G.J. Renier (1997: 113), heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.

Apakah alat-alat heuristik itu?

Apabila sumber-sumber sejarah itu ternyata adalah terdapat di museum-museum atau perpustakaan maka katalog-katalog dapat

dipergunakan sebagai alat utama heuristik. Akan tetapi, sumber tertulis itu tidak selamanya terkoleksi secara rapi. Ternyata sumber-sumber itu terdapat pada koleksi swasta atau perorangan, maka yang terpenting ialah dapat diketahui tempat-tempat atau di mana koleksi dokumen-dokumen itu tersedia.

Sebelum peneliti mengayunkan langkahnya lebih jauh di dalam pencarian sumber-sumber yang lebih terperinci, sebetulnya panduan heuristik yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan membaca bibliografi terdahulu mengenai topik penelitian. Berdasarkan bacaan ini, selain peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjaring sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukannya. Lalu peneliti memperhatikan setiap jejak itu dan bagian-bagiannya dengan selalu bertanya apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah.

Suatu prinsip di dalam heuristik ialah sejarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa; sedangkan dalam sumber lisan yang dianggap primer ialah wawancara langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Adapun kebanyakan berita di koran, majalah, dan buku adalah sumber sekunder, karena disampaikan oleh bukan saksi mata. Segala bentuk sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, biasanya tersajikan dalam aneka bahan dan ragam tulisan. Sumber sejarah Indonesia, misalnya, banyak disajikan dalam bahasa Belanda, melayu, Jawa, atau Arab. Oleh karena itu, pengolahan atas sumber-sumber yang diperoleh sangat mutlak perlu penguasaan bahasa-bahasa sumber.

Pekerjaan peneliti dalam melakukan telaah dokumen atau *library research* ialah membuat catatan. Data penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka itu mustahil hanya dapat disimpan dalam ingatan semata, tetapi seharusnya dibuatkan catatan-catatan dari sumber-sumber yang ditelaah itu. Satu cara praktis dalam membuat catatan ini adalah dengan menggunakan kertas lepas atau kartu yang dipotong-potong. Ukuran standar kartu lepas yaitu $7\frac{1}{2}$ cm \times $2\frac{1}{2}$ cm, 10 cm \times 15 cm, atau $12\frac{1}{2}$ cm \times 21 cm (Alfian, 1984: 2). Apa saja yang harus dicatat dalam kartu ini? Adalah hal-hal yang pokok saja, dan tidak semua hal yang perlu dicatat, itu sama persis dengan yang didapat dari sumber yang sedang dihadapi.

Sedikitnya ada tiga bentuk catatan yang dapat dibuat, sebagaimana dikemukakan Florence M.A. Hilbish (dalam Alfian, *ibid.*), yaitu: (1) *quotation* (kutipan langsung), (2) *citation* atau *indirect quotation* (kutipan tidak langsung), dan (3) *summary* (ringkasan) dan *comment* (komentar). Perbedaan harus jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan laporannya nanti.

Untuk memudahkan pengecekan kembali atas fakta maupun opini yang dimuat di dalam kartu maka jenis kutipan harus disebutkan. Fakta yang dicatat di dalam setiap lembaran kartu sebaiknya tidak lebih dari satu butir fakta, dan untuk fakta lainnya dibuat catatan pada kartu yang berbeda. Pada setiap kartu juga perlu ada petunjuk dari sumber mana bahan-bahan catatan itu diperoleh, termasuk di dalamnya mengenai segala data publikasi, yaitu nama pengarang, tahun terbit, jilid berapa, nama penerbit, dan kota penerbit. Namun, apabila data publikasi itu telah dicatat secara khusus pada daftar bibliografi maka pada kartu lepas cukup dituliskan nama pengarang, judul dan nomor halamannya saja.

contoh:

KUTIPAN LANGSUNG

Martin van Bruinessen, Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Suralaya, hlm. 94.

Khalifah dari Kiai Tolhah Cirebon yang paling penting adalah 'Abdullah Mubarrak, belakangan dikenal sebagai Abah Sepuh. 'Abdullah melakukan baiat ulang dengan 'Abd al-Karim Banten di Makkah, dan pada tahun 1905 mendirikan Pesantren Suryalaya di Pagerageung, dekat Tasikmalaya.

Begitulah seterusnya model pembuatan catatan yang berupa kutipan tidak langsung, komentar, dan ringkasan yang tidak dicontohkan lagi di sini.

Selanjutnya, bagaimana teknik pengumpulan sumber lisan? Dalam hal ini wawancara atau *interview* merupakan teknik yang sangat penting. Wawancara langsung dengan saksi atau pelaku peristiwa dapat dianggap sebagai sumber primer manakala sama sekali tidak dijumpai data tertulis. Namun begitu, wawancara itu sebagai bahan penjelas atas kesamaran data atau apa yang diamati oleh peneliti dirasa belum lengkap. Paling sedikit ada tiga syarat yang sebaiknya dipenuhi oleh peneliti sebelum melangsungkan wawancara. *Pertama*, banyak membaca di sekitar permasalahan yang akan dipertanyakan sehingga peneliti cukup mampu manakala harus terjadi dialog dengan informan. *Kedua*, dipersiapkan alat tulis dan alat perekam yang baik. Bahkan, *tape recorder* dipandang sangat penting agar keterangan-keterangan dari informan dapat ditampung secara lebih utuh dan lengkap. Apalagi kalau informan yang diwawancarai dalam suatu kesempatan lebih dari seseorang maka *tape recorder* akan sangat membantu peneliti. *Ketiga*, peneliti terlebih dahulu sudah menyiapkan bahan-bahan pertanyaan, yaitu berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan

terarah sesuai dengan permasalahan yang akan dihimpun.

Pada waktu wawancara itu dilangsungkan, peneliti harus memperhatikan kode etik tertentu agar informan dengan segala senang hati bersedia memberikan jawaban atau penjelasan, di antaranya: jangan ada kesan memaksa, pertanyaan cukup singkat dan setaraf dengan tingkat pengetahuan informan, peneliti harus bersabar untuk siap menjadi pendengar, bersikap toleran dan tidak menyinggung perasaan informan, dan sebagainya. Sesuai wawancara, semua hasil remakan itu harus segera ditranskrip, dan pada lembaran transkrip jangan lupa dicantumkan tanggal wawancara serta identitas informan, lalu mintakan tanda tangan.

B. Metode Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern; dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Berikut ini kedua teknik verifikasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Keaslian Sumber

Peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya yang lain. Otentisitas semuanya ini minimal dapat diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok sebagai berikut:

- a. Kapan sumber itu dibuat? Peneliti harus menemukan tanggal pembuatan dokumen. Manakala tidak dijumpai tanggal yang pasti, penerkaan mengenai tanggal kira-kira dapat dilakukan

dengan cara penetapan tanggal paling awal yang mungkin (*terminus post quem*) dan tanggal paling akhir yang mungkin (*terminus ante quem*). Setelah tanggal dari dokumen itu dapat diterka lalu dihubungkan dengan materi sumber untuk mengetahui apakah tidak anakronistik (menyalahi zaman). Misalnya, sebuah dokumen dengan huruf ketikan diklaim berasal dari abad XVIII, jelas tidak tepat, sebab mesin ketik belum ditemukan sebelum abad XIX.

- b. Di mana sumber itu dibuat? Berarti peneliti harus mengetahui asal-usul dan lokasi pembuatan sumber yang dapat menciptakan keasliannya. Lokasi pembuatan sumber itu bisa saja berbeda dengan tempat di mana sumber itu tersimpan. Jika sesuatu dokumen tersimpan di tempat-tempat tertentu, seperti di dalam arsip keluarga, kantor niaga, kantor pemerintah, atau perpustakaan, maka penyimpanannya dapat menciptakan praanggapan mengenai otentisitas.
- c. Siapa yang membuat? Hal ini mengharuskan adanya penyelidikan atas kepengarangan. Jadi, setelah diketahui siapa pengarang dari sesuatu dokumen, peneliti berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap pengarang mengenai skap, watak, pendidikan, dan sebagainya. Namun, otentisitas akan lebih mudah dibuktikan dari tulisan tangan, tanda tangan, jenis huruf, atau cap jempol. Adapun pengetahuan tentang personalitas, lingkungan, dan kegiatan-kegiatan si pengarang akan lebih diperlukan bagi kritik intern.
- d. Dari bahan apa sumber itu dibuat? Untuk hal ini analisis terhadap bahan atau materi yang berlaku pada zaman tertentu bisa menunjukkan otentisitas. Beberapa pertimbangan untuk menguji keaslian bahan dokumen, misalnya, kertas masih jarang ditemukan sebelum abad XV,

dan percetakan tidak dikenal; potlot masih sulit ditemukan pada sebelum abad XVI; dan kertas (India) baru ada pada akhir abad XIX (Gottschalk, 1983: 82).

- e. Apakah sumber itu dalam bentuk asli? Dalam hal ini pengujian mengenai integritas sumber merupakan hal yang sangat menentukan. Kecacatan sumber dimungkinkan terjadi pada bagian-bagian dokumen atau keseluruhannya yang disebabkan oleh usaha sengaja untuk memalsukan atau kesalahan disengaja. Untuk ini perlu dilakukan kritik teks sebagaimana teknik yang berlaku di kalangan ahli filologi. Perubahan atau pengurangan terhadap teks memang bisa terjadi pada teks yang telah mengalami penurunan atau penyaduran berkali-kali, maka peneliti harus berusaha memperbandingkan pelbagai kopi satu sama lain. Dalam banyak hal teks asli dapat direstorasi secara mendekati atau secara lengkap. Dalam pada itu pula peneliti sejarah harus berusaha untuk menetapkan kopi mana yang paling dekat dengan yang asli dalam aspek waktunya.

2. Kesahihan Sumber

Pertanyaan pokok untuk menetapkan kredibilitas sumber ialah, "Nilai bukti apakah yang ada di dalam sumber?" Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Menurut Gilbert J. Garraghan, kekeliruan saksi pada umumnya ditimbulkan oleh dua penyebab utama: *pertama*, kekeliruan dalam sumber informal yang terjadi dalam usaha menjelaskan, menginterpretasikan, atau menarik kesimpulan dari sesuatu sumber itu. Setiap usaha untuk menentukan faktor yang sebenarnya juga dapat dengan mudah mengakibatkan kekeliruan. *Kedua*, kekeliruan dalam sumber formal. Penyebabnya ialah kekeliruan yang disengaja terhadap kesaksian yang pada mulanya penuh kepercayaan; detail kesksian

tidak dapat dipercaya; dan para saksi terbukti tidak mampu menyampaikan kesaksiannya secara sehat, cermat, dan jujur (Garraghan, 1957: 232). Atas semua penyebab kekeliruan ini, kredibilitas sumber akan lebih tepat bila ditelusurinya berdasarkan proses-proses dalam kesaksian. Oleh karena itu, kritik dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses itu serta untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi.

Penyebab ketidaksahihan isi sumber itu memang sangatlah kompleks. Selain disebabkan kekeliruan tersebut di atas, bisa juga terjadi karena perspektif perasaan, karena ilusi dan halusinasi, sintesis dari kenyataan yang dirasakan, dalam reproduksi dan komunikasi, dan kekeliruan lebih sering terjadi dalam catatan sejarah. Di sini kritik intern dapatlah digambarkan berdasarkan beberapa jenis sumber sejarah berikut ini.

- a. Dalam biografi. Peneliti dapat menemukan penyimpangan fakta karena biografer simpati kepada subjeknya sehingga cenderung melebih-lebihkan kenyataan yang sebenarnya. Biografer mengurangi kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari subjeknya untuk membentuk kesan bahwa kebesaran namanya adalah pura-pura saja. Di samping itu, biografer menarik kesimpulan secara bebas. Menghadapi semua gejala demikian, teknik psikoanalitik dapat membantu untuk menginterpretasikan sifat sejarah.
- b. Dalam memoir. Karena memoir merupakan ingatan yang luas maka ia dapat salah dengan lamanya selang waktu. Kritik terhadapnya dapat dilakukan dengan meninjau jurnal, catatan harian, memoranda, dan bahan-bahan serupa lainnya dari waktu yang sama. Adakalanya memoir itu juga dikerjakan dalam kesamaan pribadi yang kompleks sehingga penulisnya sering kali memiliki alasan-alasan tersendiri. Karena itu, keraguan atas objektivitasnya merupakan sasaran

kritik untuk menemukan kesesuaian dengan fakta.

- c. Dalam buku harian, jurnal dan surat-surat. Seperti pada biografi dan memoir, kriteria yang dikenakan pada penilaian kredibilitasnya berlaku juga pada buku harian. Bahkan, sifat-sifat buku harian atau jurnal lebih dipengaruhi oleh subjektivitas, maka tingkat kepercayaannya harus diuji dengan kriteria yang dapat digunakan untuk bukti kebenaran secara umum. Peneliti harus memperhatikan penulisnya dalam memberikan informasi yang benar, kejujurannya, dan kemampuannya untuk menyatakan sesuatu yang tepat.
- d. Dalam surat kabar. Uraian berita kadang-kadang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan sehingga kekeliruan sering lebih besar daripada yang diperoleh dari bentuk catatan sejarah khas lainnya, dan banyak hal yang perlu diragukan mengenai perinciannya. Dalam editorial sering kali diasumsikan bahwa surat kabar mencerminkan sentimen lokal dan regional dalam politik atau masalah lain. Begitulah isi surat kabar dalam segala aspeknya memang dapat dijadikan sumber informasi yang penting bagi sejarawan, tetapi ia juga harus selalu berhati-hati.
- e. Dalam inskripsi sangat mungkin ditemukan tanggal yang salah atau pernyataan tentang peristiwa yang tidak pernah terjadi, baik karena motif patriotisme maupun pemujaan lainnya, maka harus diuji nilai buktinya.

Adapun berkenaan dengan sumber-sumber lisan, bila ingin teruji kredibilitasnya sebagai fakta sejarah, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat umum. Sumber lisan (tradisi) harus didukung oleh saksi yang berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang terdekat. Sejumlah saksi itu harus sejajar

dan bebas serta mampu mengungkapkan fakta yang teruji kebenarannya.

- b. Syarat-syarat khusus. Sumber lisan mengandung kejadian penting yang diketahui umum; telah terjadi kepercayaan umum pada masa tertentu; selama masa tertentu itu tradisi dapat berlanjut tanpa protes atau penolakan perseorangan; lamanya tradisi relatif terbatas; merupakan aplikasi dari penelitian yang kritis; dan tradisi tidak pernah ditolak oleh pemikiran yang kritis (Garraghan, 1957: 261-262).

Dalam hal tertentu menurut Garraghan, tradisi lisan kadang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan sumber-sumber tertulis. Sebab, penutur ceritera yang sudah ahli dapat memberikan informasinya tanpa suatu kesalahan, tetapi kesalahan justru dilakukan oleh penyalinnya. Untuk ini, tradisi yang telah ditulis dapat pula dikonfirmasi kembali kepada sumber lisan yang lebih akurat.

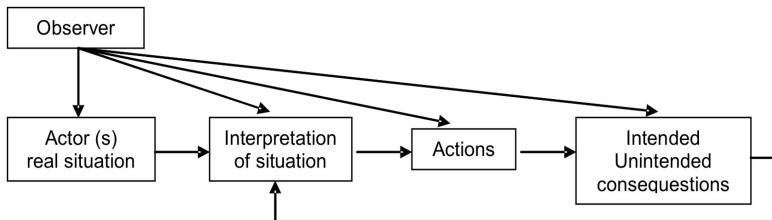
Kredibilitas sumber baik tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua positif. Dengan perkataan lain, segi positifnya itu ditentukan oleh keadaan sumber yang *ultimate* atau saksi primer yang mampu dan berkeinginan menceritakan kebenaran, atau saksi primer dengan akurat melaporkan secara terperinci mengenai hal yang sedang diteliti. Lebih dari itu, perincian dimaksud memperoleh dukungan secara bebas (*external corroboration*). Koroborasi yang dapat pula berarti suatu informasi itu berasal dari dua kesaksian atau lebih, dalam kenyataannya bisa menciptakan kredibilitas yang lebih umum, asalkan tetap memperhatikan reputasi pengarang yang mencintai kebenaran, tak adanya kontradiksi dalam sesuatu dokumen itu sendiri atau dengan sumber-sumber lain, bebas dari anakronisme, dan cocok dengan fakta yang telah diambil secara lain (Alfian, 1985: 7-8; Gottschalk, 1983: 115).

C. Metode Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama di dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995: 100). Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Berkhofer, dikutip Alfian, 1994). Seperti dicontohkan oleh Kuntowijoyo, sintesis atas fakta tentang pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang mengungsi, penurunan dan pengibaran bendera ialah ditemukan fakta bahwa telah terjadi “revolusi”. Dengan demikian, pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah data dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti punya konsep yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam. Di sinilah interpretasi sering disebut juga sebagai penyebab timbulnya subjektivitas.

Dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Data sejarah kadang mengandung beberapa sebab yang membantu mencapai hasil dalam berbagai bentuknya. Walaupun suatu sebab kadangkala dapat mengantarkan kepada hasil tertentu, tetapi mungkin juga sebab yang sama dapat mengantarkan kepada hasil yang berlawanan dalam lingkungan lain. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam

waktu yang sama. Jadi jelaslah, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian peneliti akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu. Analisis sejarah dengan pendekatan situasional, sebagaimana dijelaskan oleh Berkhofer, secara singkat adalah skema berikut ini:



Dalam menginterpretasikan sejarah, peneliti kadang terpaksa membuat dugaan yang dibayangkan dari data yang ada dan berusaha untuk menemukan penjelasannya sesuai dengan dugaan-dugaan itu. Hal demikian bisa saja mengarah kepada hasil yang tidak sesuai dengan hakikat sejarah itu sendiri, bahkan yang ada hanyalah cerminan pemikiran, aliran, atau selaras si peneliti. Untuk itu, peneliti sebaiknya memusatkan perhatiannya pada pos-pos tertentu yang membicarakan sesuatu masalah, misalnya dengan mempelajari tokoh-tokoh, lingkungan kejadian yang melingkupinya, dan perbedaan atau persamaan sifat keanggotaan masyarakat. Selanjutnya, perhatian peneliti diarahkan kepada analisis mengenai apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat orang yang menimbulkan perubahan melalui dimensi waktu.

Metode interpretasi sejarah memang pada umumnya sering diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Beberapa interpretasi mengenai sejarah yang muncul dalam aliran-aliran filsafat itu

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Interpretasi Monistik*, yakni interpretasi yang bersifat tinggal atau suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka. Interpretasi ini meliputi:

- a. Interpretasi teologis, yang menekankan pada takdir Tuhan sehingga peranan gerak sejarah bersifat pasif.
- b. Interpretasi geografis, yakni peranan sejarah ditentukan oleh faktor geografis, dengan pertimbangan letak bumi akan mempengaruhi pola hidup dan cara hidup manusia.
- c. Interpretasi ekonomis, yang secara deterministik faktor ekonomi sangat berpengaruh, sekalipun tidak dapat menerangkan mengapa suatu suku bangsa berbeda padahal perekomiannya hampir sama.
- d. Interpretasi rasial, ialah penafsiran yang ditentukan oleh peranan ras atau bangsa. Secara ilmiah memang agak sulit dipertanggungjawabkan karena antara kebudayaan suatu bangsa tidak mesti selalu berhubungan dengan rasnya.

2. *Interpreatsi Pluralistik*. Interpretasi semacam ini dimunculkan oleh para filsuf abad XIX yang mengemukakan bahwa sejarah akan mengikjuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang bersifat multikompleks.

Para ahli sejarah membebaskan penggunaan apa saja dari bentuk dan metode interpretasi itu yang logis untuk mencapai tujuannya. Meskipun di kalangan sejarawan modern kecenderungannya terhadap interpretasi pluralis lebih diutamakan, karena mereka beranggapan bahwa kemajuan studi sejarha dapat didorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan lainnya.

D. Metode Historiografi (Penulisan Sejarah)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi

di sini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya tepat atau tidak; apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai atau tidak; dan sebagainya. Jadi, dengan penulisa itu akan dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.

Di antara syarat umum yang harus diperhatikan peneliti di dalam pemaparan sejarah adalah:

1. Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan dengan bahasa yang baik. Misalnya, peneliti harus memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik, mengerti bagaimana memilih kata atau gaya bahasa yang tepat dalam mengungkapkan maksudnya, bahasa yang mudah dan dapat jelas dipahami, tidak menggunakan bahasa sastra murni yang cenderung membuat kelebihan-kelebihan tulisannya, dan data dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasanya yang khas.
2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai dengan perjalanan sejarah.
3. Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.

Dalam hal ini perlu dibuat pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan.

4. Keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengemukakan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan atas bukti-bukti yang terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman, 1986: 171-177).

Cukup jelaslah bahwa hal yang membedakan penulisan sejarah dengan penulisan ilmiah bidang lain ialah penekanannya pada aspek kronologis. Karena itu, alur pemaparan data harus selalu diurutkan kronologisnya, sekalipun yang ditunjukkan di dalam pokok setiap pembahasan adalah tema tertentu pula. Demikianlah, misalnya yang ditulis itu “Perubahan Struktur Penganut Tarekat Qadiriyyah di Yogyakarta, 1955-1995”, urutan kronologinya ditentukan sebagai berikut: keadaan penganut sekitar 1955-1965, 1965-1975, 1975-1985, dan 1985-1995. Dalam setiap dasawars itu perubahan struktur ditentukan dengan latar sosial-ekonomi penganut. Ternyata, penganut Tarekat Qadiriyyah di Yogyakarta berubah strukturnya dari para petani, para pedagang, para pegawai, dan seterusnya kaum terpelajar. Dengan demikian, cara mengurutkan pembahasan dapat ditempuh berdasarkan kategori dari struktur penganut tarekat itu. Perubahan pada setiap periode itu dapat pula berkenaan dengan aspek-aspek lain yang menonjol, misalnya mengenai peranan dan aktivitas subjek penelitian, lantas setiap aspek itu dijadikan bagian penting dalam penyusunan kerangka (*outline*) penulisan.

Penyajian penelitian secara garis besar terdiri atas tiga bagian: (1) pengantar, (2) hasil penelitian, (3) simpulan. Setiap bagian biasanya terjabarkan dalam bab-bab atau subbab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat, yang penting antara satu bab dengan bab yang lain harus ada pertaliannya yang jelas.

Bagian pengantar, atau biasanya disebut dengan pendahuluan atau mukaddimah, merupakan bagian yang sangat penting dalam

penulisan. Di dalamnya, selain yang ditentukan oleh formalitas, harus dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, teori dan konsep yang dipakai, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari proposal penelitian.

Bagian hasil penelitian, sebagai inti dari penulisan, di dalamnya memuat bab-bab yang berisi uraian serta pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti. Dalam bab-bab inilah ditunjukkan kemampuan peneliti dalam melakukan kajian serta menyajikannya dengan secara sistematis dan terperinci. Pola berpikir dalam pemaparan fakta-fakta, baik secara deduktif maupun induktif, sangat memegang peranan penting dalam membahas permasalahan yang sedang dijadikan objek kajian. Setiap fakta yang ditulis harus disertai data yang mendukung. Di sini juga tampak pertanggungjawaban penulis, terutama mengenai kutipan langsung maupun tak langsung atas fakta dan data, yaitu dengan mencantumkan catatan tentang sumber kutipan itu. Pencantuman catatan kutipan dianggap penting karena berarti juga mencerminkan etika ilmiah penulis serta memberikan kemudahan bagi pembacanya.

Adapun bagian simpulan, isinya adalah mengemukakan generalisasi dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan merupakan hasil dari analisis terhadap data dan fakta yang telah dihimpun atau merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dirumuskan di bagian pengantar. Harus selalu diingat bahwa simpulan itu bukanlah merupakan ikhtisar atau ringkasan dari uraian-uraian terdahulu, melainkan intisari yang ditarik dari apa yang telah diuraikan secara panjang lebar. Simpulan harus dirumuskan secara ringkas, jelas dan tegas serta merupakan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya.

Semua bagian dari laporan itu biasanya ditulis dalam beberapa tahap. Langkah pertama kali setelah *outline* ditetapkan ialah

membuat draf laporan (berupa naskah kasar). Dalam penyusunan draf ini data sejarah dikelompokkan ke dalam bab-bab atau subbab dan mengurutkannya sesuai waktu atau berdasar kelompok masalah sejenis. Selama penyusunan data sejarah itu pasti akan muncul masalah baru yang karenanya mendorong peneliti untuk menganalisis atau melengkapi data yang ada dengan data lain. Pada gilirannya kolektivitas data dapat mencerminkan peristiwa sejarah yang berdiri sendiri, memiliki ciri-ciri yang khas, tetapi juga didukung oleh data sejarah lainnya yang terkait.

Penyusunan draf kemungkinan terjadi berulang kali baik karena ada perubahan, perbaikan ataupun karena data pada permulaan ggur dengan munculnya data yang lebih penting. Begitu pula secara teknis, perubahan draf bisa terjadi, misalnya dengan penghapusan bagian-bagian yang dirasa kurang sesuai, memperbaiki susunan kalimat, mengganti istilah-istilah yang kurang tepat atau jelas, dan sebagainya. Bila peneliti mempunyai konsultan atau pembimbing, biasanya perubahan atau perbaikan itu terjadi atas saran dan pertimbangan konsultan, maka peneliti harus memperhatikannya. Barulah setelah draf laporan dianggap *final* dilakukan penggandaan laporan, misalnya diketik atau dicetak. Pada tahap akhir ini peneliti jangan lupa memperhatikan teknik penulisan sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku.

Kelengkapan laporan hasil penelitian bisa berbeda-beda, tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh lembaga atau instansi yang mengharapkan laporan hasil penelitian itu. Namun pada umumnya, selain bagian-bagian pokok tersebut di atas, laporan diawali dengan bagian formalitas. Dalam bagian ini biasanya terdiri dari: halaman judul, nota dari pembimbing atau konsultan, pengesahan panitiap enguji, motto dan persembahan (jika dikehendaki penulis), kata pengantar dari penulis, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar lampiran (*appendix*), dan daftar istilah (*index*). Bagian formalitas lainnya yang diletakkan pada bagian akhir laporan, terutama adalah daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN SEJARAH

A. Teknik Pemilihan Topik dan Judul Penelitian Sejarah

Topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian ilmiah. Topik tidak sama dengan judul, karena yang dimaksud dengan judul adalah “abstraksi” dari masalah atau topik yang dirumuskan dalam bentuk kalimat. Sekedar contoh perbedaan antara topik dan judul ialah karya Harry J. Benda, sejarawan ini memilih topik “Islam di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang”, lalu hasil penelitiannya itu diberi judul *The Crescent and the Rising Sun* (Bulan Sabit dan Matahari Terbit): *Indonesian Islam under the Japanese Occupation*. Dalam judul ini ternyata masih diperlihatkan juga topik penelitiannya sehingga bisa saja memang topik penelitian itu sebagai judul penelitiannya. Soal ini soal selera saja, akan tetapi di dalam sebuah judul penelitian ilmiah biasanya terdiri dari: (1) masalah, objek, atau topik penelitian sejarah; (2) subjek sejarah; (3) lokasi atau daerah; (4) tahun atau waktu terjadinya peristiwa sejarah; dan kadang disebutkan pula (5) desain, strategi, atau metode penelitian. Objek peristiwa seperti dalam judul di atas adalah “kehidupan politik” atau “perkembangan peran”; subjeknya “umat Islam” dan “pemerintah Jepang”; lokasinya “di Indonesia, khususnya di Jawa”; dan waktunya pada masa “pendudukan Jepang” atau bisa juga dengan penentuan angka “1942-1945” misalnya.

Bagaimana mencari topik yang tepat? Dalam hal ini harus kembali kepada motif penelitian itu, yakni bukanlah semata-mata untuk menghasilkan karya yang bersifat kompilasi, akan tetapi haruslah dapat memberikan sumbangan baru kepada perkembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan data baru dari penemuannya dalam melaksanakan penelitian atau interpretasi baru terhadap data yang telah lama dikenal orang (Alfian, 1994: 2).

Bagaimana cara memilih topik penelitian sejarah? Menurut Kuntowijoyo (1995: 90), topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat ini dapat dipahami bahwa topik itu bisa ditemukan atas: (1) kegemaran tertentu atau pengenalan yang lebih dekat tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, atau pengalaman peneliti; dan (2) keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat. Jadi, bagi mahasiswa Fakultas Adab UIN, Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, misalnya, maka topik yang akan lebih tepat untuk dipilihnya adalah di sekitar “Islam dan umat Islam”. Di sekitar topik yang masih sangat umum ini, mahasiswa dapat memilih topik yang spesifik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disarankan Louis Gottschalk (1983: 41) sebagai berikut:

- (1) Perangkat pertanyaan yang *bersifat geografis*, yaitu terfokus kepada interogatif: “Di mana?”
- (2) Perangkat pertanyaan yang *bersifat biografis*, yaitu dipusatkan di sekitar interogatif: “Siapa?”
- (3) Perangkat pertanyaan yang *bersifat kronologis*, yaitu dipusatkan di sekitar interogatif: “Bilamana?”
- (4) Perangkat pertanyaan yang *bersifat fungsional*, yakni berpusat di sekitar interogatif: “Apa?”

Berkaitan dengan sejarah Islam dan umatnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka pertama kali harus dipertanyakan “umat Islam di mana?” benua, kawasan, negeri, daerah, kota, desa, dan sebagainya. Kedua, “umat Islam sebagai orang apa atau kelompok apa?” etnis, aliran, organisasi, tokoh, dan sebagainya. Ketiga, “dalam periode yang mana pada masa silam Islam dan umatnya itu yang akan dipelajari?” awal Islam, abad pertengahan, abad modern, tahun 1905, periode kemerdekaan Indonesia, dan sebagainya. Keempat, “peristiwa atau kegiatan jenis apa dari umat Islam itu?” politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pemikiran, ajaran, dan seterusnya.

Apabila seorang mahasiswa telah dapat memilih topik-topik sejarah yang menarik hatinya, tetapi ia mungkin bingung menentukan topik yang tepat untuk penelitiannya, maka jalan yang bisa melapangkannya ialah mencari informasi di seputar aspek yang menarik minatnya itu. Pencarian informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara:

Pertama, meminta penjelasan atau saran-saran kepada orang lain seperti dosen, sejarawan, atau komunitas ilmiah lainnya yang dipandang mengerti tentang topik penelitian ditentukan.

Kedua, yang lebih penting lagi, ialah membaca berbagai karangan atau buku-buku untuk mengenal segala segi permasalahan yang bertalian dengan topik penelitian.

Melalui cara yang kedua khususnya, mahasiswa akan dapat mengenal hal-hal yang bersifat umum, singkat, dan sederhana. Untuk ini cukuplah dilakukan dengan pembacaan buku-buku teks dan ensiklopedi. Di dalam karya-karya seperti ini mahasiswa, selain dapat memperoleh gambaran umum tentang hal-hal yang belum dikenalnya, juga dapat mengenal bibliografi atau daftar pustaka yang dipergunakan oleh pengarang buku-buku itu. Dengan

demikian, melalui pembacaan atas buku-buku yang bersifat umum itu mahasiswa dapat mengenal buku-buku, karangan-karangan, serta sumber-sumber yang mengkhususkan pembahasan tentang topik penelitiannya.

Pada gilirannya topik yang tepat untuk dipilih bukanlah semata-mata karena menarik minat, sesuai disiplin, dan terdapat literatur yang mendukungnya, melainkan si pemilih topik itu harus juga mempertimbangkan kriteria lain. Menurut T. Ibrahim Alfian (1984: 17-18) ada tiga kriteria yang hendaknya diperhatikan oleh mahasiswa atau peneliti sejarah:

Pertama, dilihat dari sudut *nilai* topik itu hendaknya merupakan salah satu aspek pengalaman manusia yang dianggap penting dan berarti dari sudut sosial.

Kedua, topik harus *orisinil*. Dalam hal ini apabila sejarah yang ada dipandang belum sempurna maka ia harus berusaha membuktikan hal baru yang substansial dan penting, atau menunjukkan interpretasi baru yang dapat dipertanggung jawabkan dengan pembuktian-pembuktian baru itu.

Ketiga, topik yang dipilih haruslah *praktis*, yakni "*workable*", dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia, tidak terlalu luas sehingga melampaui waktu; terjangkau sumber-sumbernya, dan bisa menguasai bahasa yang terdapat dalam sumber-sumber itu; disesuaikan dengan keperluan, artinya apakah lingkungan topik itu untuk menyusun makalah, skripsi, tesis, disertasi, atau sebuah buku.

B. Teknik Proposal Penelitian Sejarah

Rencana penelitian biasa juga disebut usul atau proposal penelitian. Perencanaan penelitian pada intinya merupakan serentetan petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis. Suatu perencanaan penelitian dalam bidang ilmiah apapun, dan

khususnya dalam bidang sejarah, membutuhkan pemikiran yang seksama sehingga sering kali memakan waktu yang tidak sebentar. Tidak sedikit mahasiswa yang menemukan kesulitan dan studinya tidak kunjung selesai karena terbentur sekian lama dalam memilih topik serta menjabarkannya dalam perencanaan yang lengkap, baik, dan benar. Padahal berhasil dan tidaknya sebuah penelitian sebagian besar ditentukan oleh perencanaannya. Demikianlah penelitian dengan perencanaan yang tepat akan merupakan setengah jaminan bahwa pelaksanaan maupun hasil penelitiannya akan berjalan dan bermutu. Meskipun begitu, yang namanya suatu perencanaan tetaplah bersifat sementara sehingga perbaikan atau penyesuaian selalu mungkin terjadi.

Isi suatu perencanaan penelitian biasanya memuat uraian yang terperinci dari kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meneliti sebuah topik yang telah ditentukan. Perincian sebuah proposal itu tidak perlu seragam, tergantung pada badan, lembaga, atau fakultas yang menerima proposal itu, yang tentunya akan berbeda-beda antar badan atau lembaga. Namun isi proposal penelitian pada umumnya terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis (bila ada), cara penelitian, dan jadwal penelitian.

1. Latar Belakang

Latar belakang biasanya diidentikkan dengan sejarah tentang sesuatu masalah yang akan diteliti. Masalah sejarah sudah barang tentu adalah sesuatu peristiwa masa lampau yang dipertanyakan dan sangat penting untuk dipecahkan, atau sesuatu yang mengandung beberapa kemungkinan pemecahan serta jawabannya berdasarkan fakta-fakta masa lampau. Dalam hal ini uraian mengenai latar belakang sesuatu

topik hanyalah garis besarnya saja. Begitu pula latar sejarah itu secara kronologis hendaknya hanya di seputar waktu terdekat dengan topik. Jadi, kalaulah topik yang diteliti itu adalah tentang “Islam pada abad 19” maka latar belakangnya tidak perlu sampai menyangkut perihal Islam itu pada abad-abad yang jauh sebelumnya.

Hal lain yang harus diuraikan di sini ialah jawaban atas pertanyaan “mengapa masalah itu diteliti?”. Berarti penjelasan mengenai alasan-alasan masalah itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti merupakan uraian tentang urgensinya penelitian. Contoh pentingnya penelitian itu antara lain karena menyangkut masalah umum (masyarakat), merupakan mata rantai sejarah, dan melengkapi khazanah ilmu pengetahuan. Kecuali itu, perlu juga dijelaskan kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

Dalam bagian latar belakang ini perlu dikemukakan pula “keaslian penelitian”, yaitu dengan menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan secara tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan. Di sini disebutkan tentang garis besar metode penelitian dan faedah yang dapat diharapkan, terutama bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan masyarakat.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bagian ini dimaksudkan memberikan penjelasan tentang *pembatasan* di satu segi dan *perumusan* pada segi lainnya. Pembatasan dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus ke dalam banyaknya data yang ingin diteliti, sehingga luasan dan batas penelitian dalam tempat dan waktu perlu dijelaskan.

Contoh, masalah “perjuangan umat Islam”, masalah ini amat luas, bisa perjuangannya di bidang politik, sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Untuk itu perlu ditentukan segi-segi mana dari persoalan yang luas itu akan dijadikan pusat perhatian. Lingkup tempat juga perlu dibatasi, apakah mencakup seluruh Indonesia, pulau Sumatera, ataukah daerah yang lebih kecil lagi. Demikian pula batasan waktu atau periode yang dijadikan konsentrasi penelitian. Di dalam penjelasan atas batas-batas tersebut perlu dikemukakan alasannya secara tepat. Oleh karena itu, pembatasan masalah juga dapat dikatakan sama maksudnya dengan ruang lingkup penelitian.

Sementara itu mengenai perumusan masalah diuraikan lebih jelas lagi tentang masalah yang telah ditetapkan di dalam latar belakang penelitian. Dengan perkataan lain, masalah itu diidentifikasi dengan rumusan yang secara eksplisit dalam urutan sesuai dengan intensitas terhadap topik penelitian. Bentuk perumusan masalah pada umumnya berupa kalimat pertanyaan, tetapi juga dalam kalimat pertanyaan yang menggugah perhatian. Akan tetapi, di sini dapat pula keduanya sekaligus, misalnya, rumusan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan sebagai penegasan topik, lalu diikuti pertanyaan-pertanyaan pokok yang pada gilirannya berfungsi untuk menjabarkan topik dimaksud.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam bagian ini pertama-tama disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Tujuan berarti sebagai tindak lanjut terhadap masalah yang diidentifikasi sehingga apa yang dituju hendaklah sesuai dengan urutan masalah yang telah dirumuskan.

Adapun kegunaan penelitian yang secara garis besar telah diuraikan dalam latar belakang di sini lebih ditegaskan lagi kemanfaatan penelitian itu bagi pengembangan suatu ilmu dan bagi kegunaan praktis. Namun kegunaan apapun harus tetap terkait dengan maksud dan tujuan penelitian itu sendiri.

4. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk penelitian sejarah, berarti perlu dikemukakan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh hasil penelitian yang akan di-*review*. Dalam *review* itu dikemukakan apa kekurangan para peneliti terdahulu dan apa yang masih perlu diteliti. Apabila persoalan sejarah yang akan diteliti itu ternyata belum ada historiografinya maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan hal penelitian dapat dipergunakan, dan isinya sama menjelaskan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan. Sedapat mungkin fakta-fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya.

5. Landasan Teori

Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh peneliti atau mahasiswa. Dalam hal ini landasan teori adalah sama maksudnya dengan “kerangka pemikiran”, yakni jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan, dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi (Wahyu, 1987: 31). Kerangka teoretis yang relevan pada gilirannya berfungsi

sebagai tuntunan untuk menjawab, memecahkan, atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu, atau untuk merumuskan hipotesis. Penyusunan landasan teori pada umumnya dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti (Program Pascasarjana UGM, 1992: 4). Dalam penelitian sejarah, teori yang dipergunakan biasanya disusun sesuai dengan pendekatan apa dan bidang sejarah mana yang diteliti. Bila yang diteliti adalah mengenai sejarah sosial maka teori-teori yang relevan akan lebih tepat diambil dari sosiologi. Begitu pula bidang sejarah yang lain seperti agama, kebudayaan, ekonomi, dan politik.

Menurut Mely G. Tan (dalam Koentjaraningrat, 1989: 19), teori-teori itu pada dasarnya merupakan “pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dan faktor-faktor tertentu dalam masyarakat”. Salah satu contoh dikemukakan oleh G. Tan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomis. Teori terkenal dari Max Weber, yang menyatakan adanya hubungan positif antara agama Protestan dan bangkitnya kapitalisme, dapat dipergunakan sebagai landasan bagi penyusunan kerangka pemikiran atas persoalan-persoalan ekonomis itu. Berdasarkan teori Weber banyak sekali hipotesa yang dapat diperoleh, yakni dengan meluaskan konsep agama Protestan dengan agama-agama lain, termasuk Islam, atau sistem nilai budaya pada umumnya, dan juga meluaskan konsep kapitalisme dengan kegiatan ekonomis pada umumnya. Di dalam sejarah Islam di Indonesia khususnya, penelitian berdasarkan teori ini sangatlah mungkin dilakukan. Misalnya,

tentang pertumbuhan dan dinamika kelas menengah muslim di Jawa, atau hubungan antara agama Islam dan kegiatan-kegiatan bersifat *entrepreneur* di suatu daerah di Sumatera, dan sebagainya.

Penyusunan teori dapat pula dilakukan dengan penjelasan atas konsep-konsep atau *constructs*. Dalam penelitian sejarah dengan pendekatan ilmu sosial, konsep seperti kedudukan, peranan, interaksi sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, kesadaran politik, integrasi nasional, partisipasi, kebudayaan, dan nilai-nilai budaya merupakan unsur-unsur pokok yang penting diperhatikan. Di sini peneliti harus memilih konsep-konsep mana yang tepat, dan perlulah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup dan batas persoalan, sehingga jumlah konsep yang dijabarkan itu bersangkutan paut dengan persoalan-persoalan yang hendak diteliti. Adapun cara penjabaran serta penyusunannya dapat dilakukan dengan cara berpikir *deduktif*, sebab teori-teori yang dijadikan landasan itu adalah yang berlaku umum (bersifat general), sedangkan spesifikasinya tidak lain adalah fakta-fakta sejarah sebagai jawaban atas masalah yang diidentifikasi dan akan ditunjukkan nanti di dalam pembahasan hasil penelitian.

6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penelitian. Sedikitnya ada lima macam metode penelitian yang bisa dipilih: historis, deskriptif, korelasional, eksperimental, dan kuasi-eksperimental (Surakhmad, 1984). Pilihan yang tepat atas salah satu metode ini sangat tergantung pada maksud dan tujuan penelitian. Jadi, sangatlah tepat apabila tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi dan

menganalisis peristiwa-peristiwa masa lampau maka metode yang dipergunakan adalah metode historis.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, metode historis itu bertumpu pada empat langkah kegiatan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perlu ditegaskan bahwa uraian mengenai langkah-langkah tersebut dalam sebuah proposal bukanlah hanya berupa definisi-definisi mengenai setiap langkah itu, melainkan yang lebih penting lagi adalah “langkah operasional” yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya. Misalnya, uraian tentang heuristik (pengumpulan sumber), peneliti harus menjelaskan sumber-sumber apakah yang akan dicari, bagaimana mencari, dan di mana mencari. Begitu pula langkah yang lain harus dijelaskan, bagaimana kritik sumber dilakukan, interpretasi seperti apakah yang akan dilakukan, dan bagaimana langkah serta sistem penulisan laporan penelitian itu akan dilakukan.

C. Contoh Proposal Penelitian Sejarah Islam

Judul Penelitian: GERAKAN SOSIAL-POLITIK KAUM TAREKAT DI PRIANGAN PADA ABAD XX

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Gerakan Kaum Tarekat di Indonesia ditunjukkan dalam peranan serta kepeloporan para Sufi mengembangkan sufisme atau tarekat.¹ Sejak awal islamisasi Nusantara hingga perkembangan

¹ Diketahui, bahwa pengertian tarekat pada mulanya adalah “jalan menuju Tuhan”. Akan tetapi istilah tarekat biasa dihubungkan dengan organisasi atau aliran di seputar metode para Sufi. Istilah “Sufi” sendiri dalam studi ini adalah guru tarekat. Mereka berperan mengembangkan ajaran esoterisme Islam yang menekankan kebersihan dan kesucian hati dengan melakukan ibadah-ibadah agar mencapai hubungan yang dekat dengan Allah untuk memperoleh ridha atau

Islam pada abad XX peranan utama para Sufi itu² adalah di bidang keagamaan, tetapi kekuatan sosial penganut serta tantangan politik telah mendorong mereka untuk mengembangkan gerakan-gerakan sosial-politik. Peranan para Sufi selalu berlangsung dari gagasan dan perilaku mereka mengembangkan doktrin, model-model gerakan tarekat, dan respons terhadap tantangan sosial-politik. Namun peranan mereka itu melalui gerakan Kaum Tarekat, khususnya dalam hubungan sosial-politik mengalami perubahan selama abad XX. Apabila pada abad sebelumnya mereka sering kali menampilkan perlawanan-perlawanan melalui pemberontakan fisik terhadap kolonialisme Barat, dan banyak peristiwa akibat solidaritas Kaum

perkenan-Nya. Metode mereka menitikberatkan pada sistem latihan meditasi maupun amalan (*dzikir* dan *wirid*). Peranan para Sufi secara luas bukan hanya mengembangkan sistem doktrinal atau pemikiran-pemikiran tokoh Sufi tentang ajaran *tasawuf*, mereka juga mengembangkan fungsi ajaran itu terhadap fenomena-fenomena sosial maupun politik di dalam kehidupan pemeluknya. Karena itu kepemimpinan seorang Sufi juga biasa mengembangkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi sosial melalui "Gerakan Kaum Tarekat".

² Mengenai peranan Kaum Sufi pada awal Islamisasi Nusantara ditunjukkan dalam corak keagamaan Islam yang didominasi sistem ajaran dan perilaku sufisme. Untuk gejala sejarah demikian, antara lain dijelaskan C. Snouck Hurgronje, "De Islam in Nederlandsch Indie", VG.VI,11; A.H. Johns, "Sufisme an Category in Indonesia Literature and History", *JSAH*, Vol.2, (July 1961), hlm. 10-23; dalam Uka Tjandrasasmita, ed., *Sejarah Nasional Indonesia*, III (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 111. Sementara itu tentang peranan mereka pada abad XVII-XVIII, dapat dibaca Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), karya ini lebih mengemukakan pengumpulan pemikiran Kaum Sufi yang beragam sebagai akar pembaruan pemikiran Islam. Adapun peranan Guru Tarekat pada abad XIX, antara lain dapat dibaca Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus mengenai gerakan Sosial di Indonesia*, terj. Hasan Basri dan Bur Rasuanto (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984); dan Karl A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). Berdasarkan dua karya terakhir, Kaum Tarekat cukup menonjol dalam gerakan sosial-politik, terutama gerakan radikal melawan kolonialisme Belanda.

Tarekat dapat mendorong kegiatan sosial dan politik yang potensial bagi gerakan-gerakan rakyat,³ maka perlawanan anti-kolonial itu terus berlangsung pada permulaan abad ini meskipun jarang terjadi dalam gerakan yang radikal. Hubungan sosial-politik Kaum Tarekat kemudian berubah sesudah kemerdekaan Indonesia menjadi hubungan yang ditunjukkan dalam proses-proses kerjasama antara tarekat-tarekat dengan pemerintah dan kekuatan sosial-politik lainnya.

Studi tentang gerakan Kaum Tarekat seperti tersebut di atas, dalam kajian sejarah Islam di Indonesia abad XX masih kurang mendapat perhatian, dibandingkan dengan kajian-kajian tentang gerakan pembaruan Islam.⁴ Sementara itu, karya-karya sarjana asing maupun Indonesia yang membahas tentang gerakan-gerakan tarekat pada abad ini⁵ lebih diletakkan pada konteks perkembangan ajaran dan peran para Sufi terhadap tradisi keagamaan; pandangan hidup pemimpin agama (kiai atau ulama); dan gambaran umum perkembangan aliran tarekat tertentu. Selain itu, informasi ilmiah tentang kiprah para Sufi tampak belum seimbang dengan banyaknya aliran-aliran tarekat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,

³ Baca, Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, hlm. 208.

⁴ Misalnya, Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985), Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of Muslim Modernist Organization Under dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), M. Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan Majelis Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1986), M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan fikih dalam Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), dan Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998).

⁵ Antara lain karya Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1984); Simuh, *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), dan karya Martin Van Bruinessen *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1992).

padahal masing-masing tarekat menampilkan beraneka-ragam fakta historis. Karena itulah mendorong studi ini untuk menganalisis gejala-gejala sejarah mengenai dinamika sosial-politik, yang secara khusus dilakukan terhadap peranan para Sufi dalam gerakan Kaum Tarekat yang berkembang di wilayah Priangan.

Studi tentang gerakan Kaum Tarekat di bidang sosial-politik ini sebetulnya bermuara pada kehidupan religius dalam pengamalan sufisme melalui tarekat. Namun hubungan *deddic* antara Guru dan Murid atau Pengikut Tarekat dapat menunjukkan model kehidupan sosial, sehingga proses-proses hubungan antar mereka melahirkan gerakan sosial-keagamaan yang khas. Sedemikian lanjut gerakan-gerakan yang terjadi di kalangan Kaum Tarekat itu pada gilirannya mendorong kegiatan-kegiatan yang berfungsi hubungan politik mereka dengan penguasa atau pemerintah. Fenomena sosial-politik Kaum Tarekat, seperti halnya terjadi di daerah Priangan, lebih sering ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan keagamaan, kegiatan sosial, dan partisipasi politik.

Sementara itu, gerakan Kaum Tarekat mengalami perubahan model hubungan dan kegiatan pada abad XX itu berlangsung atas dinamika internal komunitas suatu tarekat pada tingkat lokal, bersamaan dengan dinamika umat Islam pada tingkat nasional, tetapi juga disebabkan pengaruh gerakan Kaum Sufi di dunia Islam. Khususnya reformasi Kaum Sufi di daerah-daerah pusat Islam, baik dilakukan individu-individu ataupun gerakan-gerakan sosial, menyebar ke berbagai wilayah (negara) Muslim di Gurun Sahara Afrika Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, bahkan sampai ke Cina.⁶ Demikian pengaruh gerakan sufisme itu berkembang di

⁶ Elizabeth Sirriyeh, *Sufi dan Anti Sufi*, terj. Ade Alimah (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Sufi, 1999), hlm. 2.

Indonesia yang ditunjukkan dalam gerakan-gerakan tarekat pada tingkat lokal. Seperti halnya di daerah Priangan, dapatlah dikatakan gerakan mereka merupakan bagian dari wacana perkembangan dan pembaruan Islam di bidang sufisme tersebut. Kaum Tarekat di daerah ini melakukan pembaharuan dan pengembangan ajaran sufisme melalui pengabdian mereka dalam kehidupan keagamaan. Sementara itu mereka juga berperan penting dalam gerakan-gerakan sosial maupun politik umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya bagi kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Faktor lain terhadap perubahan gerakan Kaum Tarekat di daerah penelitian ini, dapat diperhatikan dari basis sosial penganut (murid-murid tarekat) pada dua periode sejarah abad XX. Pengikut tarekat pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia lebih banyak datang dari masyarakat petani di pedesaan, sedangkan sesudah kemerdekaan selain masyarakat pedesaan juga pengikut tarekat itu datang dari kalangan masyarakat kota. Karena faktor ini mendorong gerakan Kaum Tarekat dapat memainkan peranan yang tidak kalah penting daripada gerakan-gerakan pembaruan Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdatul Ulama (NU). Akan tetapi Kaum Tarekat diasumsikan telah menampilkan gerakannya yang unik, yaitu terjadi dalam keragaman model pengembangan ajaran tarekat, fungsi ajaran dan ritual bagi dinamika sosial-politik mereka, dan model-model relasi sosial mereka terhadap kekuatan-kekuatan politik.

Keunikan-keunikan gerakan Kaum Tarekat seperti diasumsikan tersebut di atas dikaji secara khusus terhadap gerakan-gerakan tiga tarekat dengan pusat perguruannya masing-masing sebagai berikut. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (selanjutnya disingkat TQN) di Pondok Pesantren Suryalaya (selanjutnya disebut

Kaum Godebag); Tarekat Idrisiyah (selanjutnya disebut *Kaum Wara'i*) di Pondok Pesantren Pagendingan, keduanya di daerah Tasikmalaya; dan Tarekat Tijaniyah (selanjutnya disebut *Kaum Tijani*) di daerah Garut. Ketiga tarekat ini bertahan sebagai basis spiritual dan sosio-keagamaan dengan pengaruhnya melampaui batas wilayah pusat-pusat perguruan tarekat tersebut. Berbeda dengan tarekat-tarekat yang sama di daerah lain, khususnya Taekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang pusat perguruannya terdapat di daerah-daerah Sumatera, Banten, Jawa Tengah dan Timur, NTB, dan daerah lainnya, TQN Suryalaya memiliki kekhasan dalam sistem pengembangan serta pengaruhnya yang lebih luas daripada tarekat yang sama di daerah lain. Demikian pula Tarekat Idrisiyah di Pagendingan Tasikmalaya, bahkan ia hingga kini merupakan pusat perguruannya di Indonesia. Sementara itu, Tarekat Tijaniyah di Garut sebagai mata-rantai dari pusat pengembangannya di Cirebon, pada pasca kemerdekaan menjadi salah satu pusat pengembangan Tijaniyah yang berpengaruh di di Jawa Barat.

Tiga komunitas tarekat tersebut mengembangkan sistem ajaran, tradisi, dan gerakan yang berbeda, sehingga satu sama lain melahirkan tipologi gerakan tarekat yang berlainan pula di bidang sosial-politik. Antara ketiganya secara garis besar dapat dibedakan, bahwa *Kaum Godebag* menampilkan gerakannya dalam aspek-aspek tersebut yang bersifat *inklusif* dan *pragmatis*. *Kaum Wara'i* dalam banyak hal bersifat *eksklusif* dan *fundamentalis*; sedangkan *Kaum Tijani* di Garut menunjukkan gerakannya yang moderat di antara kecenderungan dua gerakan sebelumnya. Studi ini membahas tipe-tipe gerakan Kaum Tarekat dalam konteks sosial-politik tersebut, dengan analisis yang menunjukkan *continuity and changes* dari peristiwa-peristiwa gerakan mereka dalam sejarahnya sepanjang abad XX.

Sudut pandang historis atas kelangsungan serta perubahan gerakan Kaum Tarekat dalam studi ini dipetakan berkenaan dengan pengembangan ajaran sufisme, corak kepemimpinan dan pengaruh para Sufi pada basis sosial pengikut tarekat, dan model-model hubungan sosial-politik. Perubahan aspek-aspek ini yang terjadi dalam gerakan tiga tarekat itu diasumsikan, bahwa pengembangan sufisme pada periode kolonial terbatas dalam praktek tarekat dengan pola kepemimpinan yang terkonsentrasi kepada seorang mursyid, dan pengikutnya kebanyakan petani pedesaan; sedangkan sesudah kemerdekaan aspek-aspek tersebut berubah menjadi model gerakan sosial tarekat dengan kepemimpinan kelompok (*mursyid* dan sejumlah wakilnya) serta pengikutnya ditambah penduduk perkotaan. Adapun kelangsungan serta perubahan gerakan Kaum Tarekat di bidang sosial-politik, diasumsikan terjadi dalam bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah pada periode kolonial, kemudian berubah menjadi kerjasama dalam bentuk hubungan-hubungan sosial-politik antara komunitas tarekat masing-masing dengan pemerintah pada masa kemerdekaan.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, orientasi studi ini secara obyektif bertolak pada alasan-alasan di bawah ini.

Pertama, secara umum perkembangan sufisme dalam studi-studi terdahulu lebih dipahami sebagai fakta agama berdasarkan realitas spiritual dan moral yang dibangun atas fundasi ajaran tasawuf. Masih banyak dimensi lain dari sufisme itu yang dapat dijelaskan sebagai fakta keagamaan berdasarkan kenyataan sosial-politik Kaum Tarekat. Karena itu dimensi sosial-politik menjadi perhatian utama studi ini dalam rangka melengkapi informasi ilmiah di sekitar gerakan sufisme.

Kedua, peranan para Sufi dalam gerakan tarekat mengalami

perubahan dimungkinkan terjadi berdasarkan dinamika interpretasi para Sufi terhadap sistem ajaran tasawuf serta pola pengembangannya dan fungsi ajaran mereka dalam merespons situasi sosial-politik pada dua periode sejarah yang disebutkan. Karena itu analisis faktor-faktor ajaran dan sejarah terhadap perubahan gerakan Kaum Tarekat menjadi alasan tersendiri dilakukan studi ini.

Ketiga, pembuktian historis dalam studi ini yang didasarkan pada unit kajiannya melalui tiga tarekat di daerah Priangan, dimaksudkan untuk mencari kejelasan tipologi gerakan tarekat. Alasannya, keunikan sejarah masing-masing tarekat sebagaimana dikemukakan di atas dipandang mewakili model-model gerakan sufisme di dunia Islam, karena karakteristik penyebaran tarekat pada umumnya berlangsung dalam tradisi keterjalinan (*silsilah*) antar Sufi. Akan tetapi gerakan Kaum Tarekat di daerah penelitian ini juga dapat mewakili sejarah perkembangan aliran-aliran sufisme di Indonesia, karena ketiga tarekat bukan saja berperan sebagai pusat perguruannya yang berkedudukan di tingkat lokal, melainkan dari masing-masing pusat tarekat itu telah menyebar cabang-cabangnya pada lingkup nasional.

Keempat, gerakan Kaum Tarekat di Priangan itu cukup menonjolkan aktivitasnya di bidang keagamaan, bahkan kekuatan massa pengikutnya pada setiap tarekat sangat berpotensi bagi gerakan-gerakan sosial dan hubungan-hubungan politik. Sementara itu, wacana sejarah Indonesia abad XX lebih banyak memberikan perhatian terhadap gerakan Kaum Tarekat hanyalah dijadikan bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai perkembangan umat Islam. Bahkan terdapat kesimpulan sepihak, bahwa sufisme dan komunitas tarekat pada abad XX merupakan

gejala dan wahana pelarian dari tanggung jawab sosial dan politik.⁷ Karenanya studi ini mencoba menyanggah kesimpulan semacam itu, sebab peran keagamaan dan sosial Kaum Tarekat merupakan suatu kekuatan sosial yang justru diperhitungkan berbagai pihak di dalam proses politik dan kebijakan-kebijakan.

Alasan-alasan di atas merupakan pangkal tolak dan pendorong studi ini untuk memetakan model-model gerakan keagamaan terutama berdasarkan pembuktian-pembuktian historis. Studi ini juga dilakukan untuk menjelaskan variasi sejarah lokal dalam upaya memperkaya informasi tentang tipologi gerakan sufisme. Tipe-tipe gerakan tarekat khususnya dalam konteks perubahan sosial dan politik merupakan fakta sejarah dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan dari perkembangan umat Islam pada umumnya, sehingga studi ini berguna memberikan sumbangannya terhadap analisis mengenai hubungan agama dan sosial-politik dalam sejarah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan historis dan pemikiran yang dipaparkan dalam pembahasan di atas, penelitian ini memfokuskan kajian terhadap tipologi gerakan Kaum Tarekat berdasarkan karakteristik gerakan sosial-politik tiga tarekat di Priangan. Pelacakan terhadap tipologi gerakan ini didasarkan permasalahan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, mengapa ketiga tarekat itu tumbuh sebagai suatu gerakan keagamaan di daerah penelitian, dan bagaimanakah fungsi doktrin Sufi terhadap dinamika sosial-politik Kaum Tarekat? *Kedua*, bagaimanakah peranan sosial-politik

⁷ Kesimpulan seperti ini misalnya, dikemukakan Martin van Bruinessen dalam tulisannya tentang "Tarekat dan Politik: Amalan untuk Dunia atau Akherat", dalam *Pesantren*, No. 1 Vol. II, 1992, hlm. 5.

Kaum Tarekat berdasar perubahan gerakan ketiga tarekat yang diteliti dalam konteks sejarah abad XX? *Ketiga*, bagaimanakah tipologi gerakan sosial-politik Kaum Tarekat serta faktor-faktor apakah yang membentuk tipe gerakan masing-masing tarekat itu?; dan *keempat*, bagaimanakah sumbangan gerakan Kaum Tarekat terhadap dinamika agama, sosial, dan politik?

Seiring permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan berdasar asumsi teoretik berikut. *Pertama*, perkembangan sufisme di dunia Islam mempengaruhi pertumbuhan dan dinamika keagamaan masyarakat (muslim) lokal di daerah Priangan, sementara itu para guru tarekat di daerah ini mengembangkan ajarannya bagi praktik-praktik keagamaan yang juga berfungsi terhadap gerakan sosial-politik Kaum Tarekat. *Kedua*, proses hubungan guru dan murid pada setiap tarekat dalam pengembangan ajaran dan praktik tasawuf tidak hanya bermakna agama saja, tetapi kekuatan sosial-keagamaan mereka juga berpotensi bagi gerakan sosial-politik. *Ketiga*, gerakan Kaum Tarekat di Priangan berlangsung di tengah dinamika sosial-politik lokal dan nasional, sehingga dinamika itu mempengaruhi perubahan gerakan, peran, dan hubungan sosial-politik mereka. *Keempat*, perbedaan pemahaman doktrin dan praktik keagamaan sufisme pada masing-masing merupakan faktor-faktor dominan yang memperjelas tipologi gerakan Kaum Sufi.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian terhadap masalah-masalah tersebut di atas, dilakukan di Priangan, sebuah wilayah Karesidenan pada zaman Kolonial Belanda, yang sekarang mencakup beberapa daerah di propinsi Jawa Barat. Akan tetapi daerah yang dijadikan unit penelitian dalam memahami faktor-faktor sosial-budaya dan

politik atas perkembangan sufisme ini hanyalah daerah-daerah di Priangan Timur, yaitu kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Garut. Di daerah-daerah inilah ketiga tarekat memusatkan gerakan dengan keterjalinan *silsilah* lebih awal pada lingkup dunia Islam, tetapi kemudian penyebarannya ke luar daerah pada tingkat lokal dan nasional telah memposisikan peran penting ketiga tarekat bersangkutan dalam perkembangan Islam di Priangan.

Pusat-pusat gerakan Kaum Sufi di daerah penelitian tersebut mencakup Pondok Pesantren Suryalaya bagi Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dan Pondok Pesantren Fatahiyyah Idrisiyah (Fadris) Pagendingan bagi Tarekat Idrisiyah, keduanya di daerah Tasikmalaya, dan Pondok Pesantren Biru serta Zawiyah-zawiyah di Garut bagi Tarekat Tijaniyah. Ketiga pusat tarekat ini mengembangkan sufisme yang tidak hanya berdasarkan pola yang ditransmisikan dari ajaran dan ritual para pendiri tarekat bersangkutan di Timur Tengah dan Afrika Utara, melainkan masing-masing tarekat telah membentuk pola pengembangannya tersendiri yang bersifat lokal. Oleh karena itu, studi ini berusaha menganalisis pengembangan tarekat-tarekat tersebut. Adapun lingkup pembahasan di dalamnya berkenaan dengan pola-pola pengembangan ajaran, kepemimpinan dan perilaku hubungan antar struktur, dan basis sosial pengikut pada masing-masing tarekat.

Pembahasan mengenai tipologi gerakan Kaum Sufi dalam bidang pengembangan sufisme patut dianalisis lebih lanjut segi-segi perubahannya. Pembahasan dalam hal ini dikategorikan berdasarkan perubahan pengembangan doktrin serta pengaruhnya bagi penganut pada setiap tarekat. Dapat diasumsikan, bahwa Taekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah menampilkan pola pengembangan ajaran yang *tradisional* berubah menjadi *inklusif* dan *pragmatif*; sedangkan Tarekat Idrisiyah mengembangkannya dari pola *ortodoks* ke pola *eksklusif* dan *fundamentalis*. Sementara

itu Tarekat Tijaniyah berubah dari pola pengembangan ajaran yang *eksklusif-fundamentalis* menjadi *inklusif-pragmatis*. Perubahan tipologi pengembangan ajaran sufisme di sini mencakup beberapa tipe tersebut.

Adapun fokus studi ini mengenai gerakan sosial-politik Kaum Tarekat, dikembangkan dalam lingkup pembahasan tentang pola kepemimpinan mereka di dalam komunitas tarekat masing-masing dan pola hubungan kepemimpinan mereka dengan kekuatan sosial-politik dan pemerintah. Semua aspek pembahasan tersebut dianalisis dari masing-masing tarekat yang dapat menunjukkan perubahan menurut kategori yang diasumsikan sebagai berikut. *Pertama*, Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah berubah gerakannya di bidang sosial-politik dari gerakan *non-aktif* menjadi *pro-aktif*. *Kedua*, Tarekat Idrisiyyah menunjukkan gerakan sosial-politik yang berubah dari gerakan *reaksioner* menjadi *partisipasi*; sedangkan *ketiga*, Tarekat Tijaniyah menampilkan perubahan dalam bidang ini dari gerakan *antisipatif* menjadi *aktif*.

Seluruh pembahasan studi ini dengan cakupan dan lingkup pembahasan di atas dapat menghasilkan temuan-temuan mengenai *sejarah sufisme*. Kategori temuan ini merupakan kontribusi ilmu sejarah tentang perubahan keagamaan dalam hubungannya dengan sosial-politik. Adapun analisis utama tentang sejarah dimaksud mencakup babakan peristiwa-peristiwa pada masa kekuasaan Kolonial dan masa Kemerdekaan Indonesia abad XX.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kajian tentang gerakan Kaum Sufi ini memiliki arti penting dalam upaya memperkaya teori sejarah dalam studi keislaman. Guna menyokong teori dimaksud, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan. *Pertama*, menjelaskan gerakan Kaum Tarekat

di Priangan, berdasarkan tipologi gerakan tiga tarekat yang berpengaruh di daerah ini. *Kedua*, menjelaskan peran Kaum Sufi melalui tarekat-tarekat, baik dalam pengembangan ajaran, kepemimpinan, maupun sosial-keagamaan dalam perspektif sejarah. *Ketiga*, memahami proses-proses hubungan sosial-politik Kaum Tarekat, khususnya dengan kekuatan sosial-politik dan pemerintah berdasarkan perubahan sosial dan politik di Indoensia pada abad XX.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kegunaan pendekatan *sociological-history* dalam penelitian agama. Nilai penting pendekatan dimaksud secara metodologis bertujuan mencari pengertian (*verstehen*) terhadap pola keagamaan dan gerakan Kaum Sufi berhubungan dengan perubahan sosial dan politik. Kajian berdasarkan metodologi ini dapat dipergunakan untuk memberikan interpretasi atas pola keagamaan di kalangan Muslim pada umumnya. Oleh karena itu gejala-gejala historis dan sosiologis yang muncul dari masing-masing tarekat merupakan tujuan terpenting dalam upaya menemukan tipologi gerakan keagamaan.

Di samping kegunaan penelitian tersebut, hasil penelitian ini dapat menjelaskan fungsi gerakan tarekat sebagai model keagamaan dalam dinamika masyarakat Indonesia yang semakin plural. Karena itu, hasil penelitian diletakkan dalam perspektif sejarah mengenai *continuity and changes*, hubungan dialektik sistem ajaran serta ritual tarekat dan dinamika sosial penganut tarekat, serta hubungan fungsional keagamaan sufisme dan politik. Penelitian ini pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan (*knowledge*), khususnya sejarah dan studi keislaman, antara lain: *pertama*, penjelasan tentang sufisme dapat digunakan sebagai alat analisis sejarawan untuk menelaah

proses-proses sosial-politik masyarakat Muslim. *Kedua*, kerangka teori untuk menjelaskan peran dan fungsi sosial maupun politik dapat dipahami dari pengaruh-pengaruh doktrin dan praktik keagamaan. Demikian kegunaan secara praktis dapat dijadikan alternatif keagamaan oleh masyarakat muslim pada umumnya maupun para pengambil keputusan sebagai bahan pertimbangan kebijakan mereka di bidang sosial-keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perkembangan sufisme dalam proses panjang islamisasi di Nusantara, telah dilakukan oleh para Sarjana Indonesia maupun Luar Negeri. Mereka lebih menitikberatkan kajiannya pada aspek biografi tokoh-tokoh Sufi atau guru-guru Tarekat dan ajaran-ajaran mistik. Kajian mereka lebih didasarkan pendekatan filologis atas karya-karya para Sufi, yang menghasilkan sejarah intelektual Islam di Nusantara pada abad XVII-XVIII.⁸ Sementara untuk kajian gerakan sosial Kaum Sufi, dilakukan pertamakali oleh Sartono Kartodirdjo terhadap peristiwa gerakan mereka pada abad XIX, yaitu dalam *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*. Meskipun demikian, gerakan mereka dalam karya ini dibahas sebagai bagian dari gerakan sosial secara umum⁹. Guru Tarekat atau pemimpin mistik, menurut kajian ini, memainkan peranan utama dalam hampir seluruh rangkaian pemberontakan petani di Banten. Peran sosial Kaum Sufi dalam peristiwa tersebut berlangsung melalui jaringan sosial Tarekat Qadiriyyah dan berdasar ajaran-ajaran yang bersifat *mesianik*. Berbeda dengan

⁸ Contohnya dalam hal ini adalah karya Azyumardi Azra tersebut di muka.

⁹ Sartono Kartodirdjo, *The Peasant's Revolt of Banten in 1888 Its Conditions, Course and Sequel, a case Study of Social Movements in Indonesia* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966); terjemahan buku ini, lihat catatan halaman no. 2.

karya tersebut, kajian ini dilakukan terhadap Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di luar Banten, meskipun *silsilah* keguruan terdapat keterjalinan antara Syeikh Abdullah Mubarrok (Abah Sepuh) di Suryalaya dengan Syeikh Abdul Karim Banten. Namun gerakan tarekat di Suryalaya terjadi dalam kurun waktu yang berbeda, disamping sifat gerakan yang *mesianik* telah berubah bentuknya menjadi akomodatif terhadap pihak yang dipandang sebagai obyek protes sosial gerakan itu. Dengan demikian studi ini dan karya tersebut berfungsi saling melengkapi, terutama keluasan metodologi dan kekayaan fakta dalam buku tersebut dapat dijadikan acuan studi ini.

Karya lain yang memiliki kedekatan obyek kajian dengan studi ini adalah dua karya peneliti ahli di bidang antropologi: Zamakhsyari Dhofier dan Martin van Bruinessen. Kedua peneliti ini memberikan perhatian penuh terhadap tradisi pesantren dan perkembangan Tarekat-tarekat di Jawa. Peneliti pertama dalam karyanya, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, merupakan kajian dengan pendekatan antropologi terhadap pesantren Tegalsari di Jawa Tengah dan Tebuireng di Jawa Timur. Studi lapangan dilakukan pada tahun 1977-1978, dengan fokus utama peranan Kiai dari kedua pesantren tradisional tersebut.¹⁰ Buku yang ditulis dalam tujuh bab pembahasan itu, menyajikan satu pembahasan khusus mengenai *Kiai* dan *Tarekat* pada bab kelima.¹¹ Dhofier menyebutkan, bahwa *Tarekat Qadiriyyah* merupakan Tarekat yang paling berpengaruh di daerah-daerah penelitian, di samping Tarekat-tarekat lain seperti: Syatariyyah,

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 135-147.

Siddiqiyah, Syadhiliyah, dan Wahidiyah. Namun pembahasannya belum pula dijelaskan tentang latar historis dan fungsi sosial-politik, kecuali lebih jauh diterangkan tentang pemaknaan para Kiai terhadap doktrin tasawuf dalam lingkungan pesantren. Oleh karena itu, selain karena Dhofier tidak memberikan perhatian khusus tentang gerakan Tarekat, penelitian ini berbeda dengannya dalam penekanan terhadap pendekatan sejarah.

Sementara itu, Martin van Bruinessen, merupakan orang pertama yang mengkaji secara umum sebuah tarekat di Indonesia, *Tarekat Naqsyabandiyah*. Karya yang disusun dalam 17 bab pembahasan¹² ini tidak dipetakan secara kronologis dan spasial yang ketat, melainkan Tarekat Naqsyabandiyah digambarkan secara umum dalam ketersambungan *silsilah* keguruan, penyebarannya mulai dari pusat pertama tarekat tersebut di Turki sejak awal abad XVII sampai dengan perkembangan ke wilayah Islam yang lain pada abad XIX. Adapun perkembangan tarekat ini di Indonesia digambarkan secara umum dari asal-usul perkembangan hingga penyebaran cabang-cabang di daerah-daerah pada periode kontemporer. Prioritas pembahasan Martin tentang Naqsyabandiyah adalah berkenaan dengan silsilah guru, ajaran-ajaran, dan jaringan penganut. Karya ini sangat berarti bagi studi awal tentang Naqsyabandiyah, sehingga dalam segi tertentu memberikan kontribusi tentang fakta asal-usul dan ajaran Naqsyabandiyah, termasuk pemaduannya dengan Qadiriyyah dalam Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Begitu pula mengenai Tarekat-tarekat yang berbeda, sebagaimana ia menuliskannya dalam

¹² Baca, Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1992).

buku lain, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*,¹³ dengan model kajiannya yang hampir sama.

Selain karya-karya di atas, terdapat karya-karya yang memiliki kedekatan tema tentang sosial-politik Kaum Sufi. *Pertama*, dilakukan oleh Endang Turmudi dalam karyanya, *Strugling for the Ulama: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*, yang telah diterbitkan dalam edisi Indonesia berjudul *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Lkis, 2003). Salah satu bab dalam buku ini secara khusus membahas tentang “Kekiaian melalui Gerakan Tarekat”, dengan kesimpulan bahwa faktor kekuatan pengaruh *kiai* di wilayah penelitian karena tarekat dijadikan wahana mobilitas massa, termasuk untuk kepentingan politik *kiai*. Dalam hal ini, bukan hanya kajiannya yang lebih sinkronis-antropologis, melainkan juga dimensi historis atas relevansi gerakan sufisme terhadap perilaku politik *kiai* tidak menjadi fokus penelitian tersebut, sedangkan penelitian ini menekankan segi-segi diakronik atas peristiwa-peristiwa sosiologis para *kiai* pemimpin tarekat.

Kedua, karya yang hampir sama obyek kajiannya dengan Turmuzi dilakukan Mahmud Sujuthi terhadap *Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang* (2001). Karya ini hanya memfokuskan pada satu Tarekat dan hubungannya dengan politik Orde Baru, sehingga variasi sifat hubungan tarekat (agama) dan politik hanya bersumberkan pada kecenderungan perilaku politik tiga kelompok penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang pada masa pemerintahan Orde Baru. Analisis Suyuthi tentang hubungan politik tersebut berdasarkan hubungan

¹³ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995).

sinkronik antara komunitas tarekat dan pemerintah, yang dikategorikan ke dalam tiga model hubungan sosial: *akomodatif*, *antagonistik*, dan *moderat*. Kategori hubungan ini terdapat kemiripan dengan tipologi gerakan tarekat di Priangan, tetapi studi ini mengkategorikan kecenderungan tersebut dalam tiga aliran tarekat yang berbeda. Selain itu studi ini mengemukakan dimensi-dimensi politik secara diakronik-sosiologis, berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya sinkronik-sosiologis terhadap peristiwa-peristiwa sosial-politik Kaum Tarekat itu.

Karya-karya lain memiliki kedekatan tema dengan studi ini dalam kaitannya dengan kepemimpinan pemuka agama dan gerakan keagamaan di wilayah Priangan, sekurangnya terdapat dua hasil penelitian etnografi yang penting dijadikan perbandingan serta terdapat relevansi dengan obyek studi ini. *Pertama*, hasil penelitian Karl D Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat* (1990). Jackson dalam karyanya ini menfokuskan penelitian tentang perilaku politik petani tiga desa di Priangan Timur pasca pemberontakan Darul Islam (1950-1960-an). Ketiga desa yang dijadikan model perilaku politik itu dikategorikan menjadi *Desa DI*, *Desa Pro-Pemerintah*, dan *Desa Gonta Ganti*. Latar keagamaan yang dianalisis sebagai faktor ideologis terhadap kecenderungan perilaku poliitik tersebut, bahwa umat Islam di desa-desa penelitian terpetakan ke dalam ortodoks-tradisional, ortodoks-modern, dan asal mengaku Islam atau sinkretis. Variabel-variabel untuk menjelaskan kecenderungan tersebut dilakukan Jackson secara kuantitatif atas gejala-gejala sosial masyarakat bersangkutan. Dalam hal ortodoksi-tradisional terdapat relevansinya dengan keagamaan Kaum Sufi dalam penelitian ini, meskipun kecenderungan politik mereka dimungkinkan berbeda dengan apa yang disimpulkan Jackson.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan masalah-masalahnya secara kualitatif dan dalam kenyataan yang berubah. Penelitian ini melihat pola keagamaan sufisme yang “ortodoks-tradisional” itu berbeda gejalanya dalam tiga gerakan tarekat.

Kedua, Kiai dan Perubahan Sosial oleh Hiroko Horikoshi. Penelitian dilakukan di desa Cipari, Garut pada 1975, dengan kajian yang bersifat antropologis. Kepemimpinan *Kiai* yang dikategorikan menjadi *ulama* dan *ustaz* dipandang mampu memberikan respons terhadap tawaran-tawaran modern pada tingkat lokal maupun nasional. Kajian etnografis tersebut juga memberikan dukungan dengan memaparkan sebuah desa yang tampaknya termasuk desa Islam ortodoks. Namun kepemimpinan kiai dalam perspektif sufisme tidak dibahasnya secara khusus, kecuali sedikit tentang dimensi mistik yang diasumsikan menjadi latar keagamaan kharismatik kiai. Sumbangsih teoretik Horikoshi, bahwa nilai-nilai agama dalam kepemimpinan kiai itu tetap tidak berubah, sedangkan perilaku-perilaku politik masyarakat desa berubah sama sekali di bawah kepemimpinan kiai desa yang sama.

F. Kerangka Teoretik

Kesan umum masyarakat tentang Kaum Tarekat, secara sederhana adalah pelaku sufisme atau pengamal aspek ajaran esoterisme Islam yang menekankan kebersihan dan kesucian hati. Mereka banyak melakukan ibadah dalam rangka hubungan dekat kepada Allah untuk memperoleh ridha atau perkenan-Nya serta agar mencapai ma’rifat. Karena itu perilaku sufisme ini merupakan model keagamaan yang tumbuh dalam penghayatan Islam. Secara khusus yang dimaksud Kaum Sufi sendiri, ialah mereka yang berperan sebagai guru serta pengembang sesuatu tarekat dari tiga tarekat utama di Priangan. Namun atas kedudukan serta peran

mereka dalam tarekat itu telah menciptakan berbagai bentuk hubungan sosial, termasuk hubungannya dengan sosial-politik luar komunitas mereka.

Tarekat sebagai suatu terminologi sufisme, pada dasarnya seperti didefinisikan Trimmingham, adalah suatu metode praktis yang dijalankan para Sufi dalam membimbing murid untuk merasakan hakikat Tuhan.¹⁴ Tetapi kemudian tarekat biasa dihubungkan dengan nama ordo sufisme, dilihat dari kegiatan guru (disebut juga *syekh* atau *mursyid*) mengajarkan sesuatu tarekat kepada murid-murid melalui latihan-latihan spiritual (*riyadah*). Pola-pola hubungan guru-murid inilah merupakan bentuk sosial dalam komunitas tarekat. Para guru tarekat memegang peranan utama dalam menentukan tingkat kemampuan spiritual murid, sehingga apabila seorang murid dipandang telah memiliki kemampuan tertentu, maka dia bias sampai menduduki *khalifah* (pengganti atau wakil) untuk menyampaikan metode-metode gurunya.¹⁵ Sebaliknya, para murid sesuatu tarekat yang biasanya datang dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kepatuhan sebagai pengikut para Sufi, dan mereka berperan sebagai penunjang gerakan-gerakan tarekat.

Pendirian pokok disertasi ini, bahwa berdasarkan gerakan sufisme melalui tiga tarekat di Priangan, kaum Sufi memiliki potensi mengerahkan fungsi tarekat ke dalam gerakan-gerakan sosial-politik mereka dan hubungannya dengan perubahan politik lokal maupun nasional pada abad XX. Dalam studi ini dijelaskan model sosial-politik Kaum Tarekat yang ditemukan dari tarekat-

¹⁴ J. Spencer Trimmingham, *The Sufi Orders in Islam* (London: Oxford University Press, 1973), hlm. 3-4.

¹⁵ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 194.

tarekat berdasarkan kepercayaan agama, kepemimpinan, sosial pengikut, dan pengalaman politik yang berbeda-beda. Karena itu paradigma yang dibangun adalah “Kaum Tarekat melakukan gerakan sosial-politik atas kewibawaan dan fungsi mediator para Sufi untuk kepentingan-kepentingan sosial-politik mereka dengan gerakannya seiring perubahan politik bangsa”. Paradigma ini dikembangkan berdasarkan konsep-konsep pokok di bawah ini.

1. Sosial-keagamaan Kaum Tarekat

Sufisme yang berkembang melalui tarekat-tarekat, seperti dikemukakan di atas, merupakan sistem kepercayaan yang menjadi landasan Kaum Tarekat di dalam membentuk kepribadian serta gerakan mereka. Karenanya keyakinan dan ritus-ritus religius Kaum Tarekat seperti ini bukan hanya membentuk fakta keagamaan, melainkan juga sebagai fakta-fakta sosial. Menurut pengertian Durkheim (1938), bahwa keyakinan dan ritus seperti itu pada dasarnya benar-benar bersifat individual mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku individu. Namun, menurutnya, konteks sosiologi agama memperlihatkan dampak sosial dari praktek-praktek yang berkaitan dengan kategori-kategori religius, sehingga praktek-praktek ritual yang menggambarkan kebersamaan memiliki dampak sosial yang sangat signifikan bagi kolektifitas.¹⁶ Gagasan Durkheim ini, seperti halnya dipahami Parsons adalah sebagai landasan teoretis tentang sosial-keagamaan. Lebih lanjut Parsons menyatakan, tatanan sosial yang ditekankan pada fakta moral dan kesadaran kolektif telah menjadi bagian subyektifitas individual melalui mekanisme ritual religius. Setiap masyarakat

¹⁶ Dikutip dari Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 83.

memiliki keyakinan kolektif tertentu yang disebarkan melalui ritual-ritual tertentu pula.¹⁷

Sosial-keagamaan seperti ditampilkan Kaum Tarekat di Priangan pada permulaan abad XX khususnya, dicirikan sebagai sistem yang memenuhi kebutuhan orang-orang kampung (*tribesmen*) yang buta huruf, baik dalam kehidupan sosial maupun religius. Pada waktu itu kesalehan dan unsur pembentuk religiusitas masyarakat rural sangat bertolak belakang dengan gaya hidup rasional dan formal masyarakat urban. Bagi masyarakat rural yang buta huruf, orang suci adalah penubuhan agama dalam bentuk emosi, yang ditata secara hierarkhis berdasarkan pewarisan kharisma.¹⁸ Proses religiusitas yang dilakukan Kaum Tarekat memberikan kesempatan untuk melestarikan dan menyempurnakan ekspresi religiusitas, dengan tradisi yang diistilahkan *barakah* bisa diterapkan pada individu maupun kelompok. Para Sufi biasanya populer, membaaur, mewariskan kharisma dan kurang bersifat ortodoks.

2. Kaum Tarekat dan Sosial-politik

Karakteristik sosial Kaum Tarekat sebagaimana uraian di atas melahirkan model-model hubungan sosial dengan kekuatan-kekuatan politik. Di sinilah pada intinya yang dimaksudkan dengan “sosial-politik”, yaitu sebagai “sistem komunitas, hubungan-hubungan sosial, dan potensi gerakan sosial berfungsi terhadap gerakan politik sesuatu komunitas itu sendiri dan hubungannya dengan sistem politik luar”, seperti terjadi dalam sejarah Kaum Tarekat pada tiga komunitas tarekat di daerah penelitian ini.

Konsep utama yang dijadikan pertimbangan teoretis tentang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

sosial-politik Kaum Tarekat, sesuai watak kepemimpinan di dalam gerakan ini, adalah konsep “*kharisma*” atau kewibawaan. *Kharisma* dalam konteks ini seperti dipahami Karl D Jackson sebagai “kewibawaan tradisional”, dan konsep ini adalah suatu jenis kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan tersebut didefinisikan sebagai interaksi antara pribadi-pribadi atau kelompok yang pada saat tertentu seorang pelaku (Sufi, yang mempengaruhi) mengubah perilaku pelaku kedua (yang dipengaruhi, Penganut/Murid).¹⁹ Kewibawaan tradisional Kaum Sufi merupakan penggunaan kekuasaan personal yang dihimpun melalui peranan masa lampau dan masa kini mereka sebagai penyedia, pendidik, pelindung, dan sumber nilai-nilai agama, bahkan status unggul mereka menjadi media hubungan ketergantungan pihak lain, khususnya para penganut.

Kepemimpinan kharismatik Kaum Sufi serta kemampuannya mempertahankan sufisme, termasuk implementasi teoretik tentang kemampuan agama dapat bertahan dalam masyarakat sekuler. Posisi agama seperti ini, oleh sejarawan atau sosiolog biasa dikaitkan dengan fungsi politik agama sebagai alat bagi kaum minoritas untuk melawan, mengadakan protes, dan kritik politik. Peran oposisional yang dimainkan pemuka agama dalam konflik kolonialisme, misalnya dalam kasus pemberontakan rakyat melawan Kolonial Belanda pada abad XIX, bisa dijadikan pertanda adanya berbagai persoalan yang lebih besar menyangkut kemampuan agama bertahan dan melawan kolonialisme dalam skala global. Muatan ritual dan ideologis Kaum Tarekat pada gilirannya bisa berkembang secara rasional karena adanya

¹⁹ Bandingkan dengan Karl D Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Grafika, 1990), hlm. 201.

kepentingan politik mereka, sekalipun karakter esensial tarekat tetap dikembangkan.

Untuk memahami sisi khas gerakan Kaum Tarekat, khususnya peran politik yang dimainkannya, perlu dikaji lingkungan sosial tempat gerakan tersebut, karakter-karakter spesifik dari pengemban ideologi-ideologi dan peristiwa-peristiwa yang membentuk gerakan-gerakan religius. Selanjutnya, pemisahan antara perkembangan dengan sifat dasar sufisme bisa dikaji lewat respons formatif yang ditujukan pada kerangka politik tempat Kaum Tarekat tersebut membentuk dan mengembangkan doktrin-doktrin sufisme dan praktek-praktek tarekat.²⁰

Kaum Tarekat berhadapan dengan Kolonialisme, seperti halnya *Islam dan Kolonialisme*, “di samping tantangan ekonomi dan politik terhadap praktek dan institusi-institusi tradisional, para pemimpin Muslim juga merasa terancam oleh meluasnya sekularisme Barat, sistem pendidikan Barat dan aktifitas misionaris Krsitianitas (Watt, 1969; Jansen, 1979).²¹ Dengan perspektif tersebut, agama (sufisme) menjadikan fungsi-fungsi publik dalam masyarakat sekuler, yaitu sebagai jaringan politik untuk melawan kolonialisme, namun arti penting agama secara politis dalam masyarakat terjajah hanya turun ke gelanggang perlawanan selaku kaum nasionalis terhadap kolonial Barat. Dalam skala lokal dan nasional berdasar perkembangannya paling mutakhir, agama sering kali mengandaikan adanya vitalitas dan semangat baru sebagai media kultural perlawanan politik menentang kebudayaan-kebudayaan atau kolonialisme bangsa yang terjajah.

Gerakan sosial-politik Kaum Tarekat sebetulnya berlangsung

²⁰ *Ibid.*, hlm. 359.

²¹ *Ibid.*, hlm. 356.

dalam Sejarah Islam Modern. Untuk ini menganalisa respons politik mereka dapat dipergunakan dua fase berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu *pembaruan Islam* dan *nasionalisme sekuler*. Pada *fase pertama*, ketika respons Islam berlangsung terhadap kolonialisme Eropa, terdapat penekanan menyeluruh akan pentingnya skriptualisme (komitmen terhadap aktivitas duniawi), kritik sosial terhadap religiusitas rakyat, dan gerakan untuk mereformasi institusi-institusi sosial, terutama pendidikan, hukum, dan keluarga.²² Dalam fase tersebut justru Kaum Tarekat dianggap penyebab utama tersebarnya etika irrasional dan pasif di kalangan umat di daerah rural. Sementara itu, *fase kedua*, pembaruan Islam dilakukan dalam berbagai upaya melegitimasi perubahan sosial dan sikap-sikap baru yang mengacu pada tradisi digantikan oleh komitmen yang lebih sekuler terhadap nasionalisme dan politik nasional tanpa keluar dari kerangka asumsi-asumsi religius. Skriptualisme dapat memadukan antara masyarakat tradisional-religius dengan dunia sekuler politik modern. Skriptualisme berfungsi sebagai model sosial dengan muatan nilai-nilai tradisional masyarakat Islam dipindahkan ke dalam masyarakat sekuler modern. Proses pendaran tersebut dimungkinkan mengubah muatan dan fungsi agama seperti dalam gerakan tiga tarekat di Priangan. Kecenderungan demikian didukung dengan gambaran Geertz (1989) tentang pemuka agama pedesaan Jawa Timur, juga di daerah yang sama dalam gambaran Turmuzi (2004) dan Suyuthi (2001), bahwa para kiai, khususnya yang berposisi sebagai *mursyid* tarekat, memperlihatkan kekuatan politik yang mampu berperan merespons proses politik nasional.

²² Wolf, (1971), p. 367 dalam Turner, *Agama dan Teori Sosial*, hlm. 172.

3. Kaum Tarekat dan Perubahan Sosial-politik

Posisi Kaum Tarekat dalam masyarakat penelitian tampak begitu kuat, mereka biasanya menduduki posisi-posisi penghubung dan penyangga, sekalipun mereka tidak hanya merupakan satu-satunya kelompok yang mempunyai akses hubungan dengan sistem luar. Mereka tidak hanya menahan arus perubahan, tetapi secara aktif mendorong terjadinya perubahan mendasar di bidang pengembangan ajaran Sufi, menciptakan peluang-peluang pendidikan berbasis perbaikan moral dan spiritual, dan merespons beberapa problematika dampak modernisasi.

Berdasarkan posisi para Sufi dalam gerakan Kaum Tarekat, tampaknya konsep “mediator” dapat dipergunakan sebagai landasan teoretis konteks ini. Konsep “mediator” ini sering kali dipergunakan para ahli ilmu sosial sebagai pendekatan untuk menganalisis perubahan dalam masyarakat dan peringkat integrasi nasional. “Mediator” dapat didefinisikan sebagai orang-orang atau kelompok yang menempati posisi penghubung dan perantara antara masyarakat dan sistem nasional yang bercorak perkotaan.²³ Seiring dengan posisi struktur dalam jaringan masyarakat yang kompleks, “mediator” dapat juga diperankan oleh pemimpin tradisional yang “membentengi titik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan keseluruhan sistem yang lebih luas; bertindak sebagai penyangga atau penengah antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan, menjaga terpeliharanya daya pendorong dinamika masyarakat yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan mereka.²⁴ Meskipun tidak

²³ Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*

selamanya berfungsi sama, peran mediator semacam itu dapat juga berupa “*cultural broker*” atau makelar budaya dan agen modernisasi yang secara aktif mencoba mengenalkan elemen-elemen budaya kota kepada masyarakat.

Gerakan Kaum Tarekat di Priangan selama abad XX dapat dipastikan berpapasan dengan bermacam-macam perubahan sosial-politik yang memberikan pengaruh terhadap sistem sosial dan dinamika politik mereka. Karena itu studi ini berusaha melacak struktur sosial, konflik-konflik sosial dan kepentingan, sistem-sistem tradisional dan keagamaan, dan pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat yang bersangkutan,²⁵ yang diduga merupakan faktor dominan atas perubahan-perubahan gerakan politik di kalangan penganut tarekat. Kemudian gerakan sosial-politik mereka di dalam gejalanya yang lebih kompleks dapat pula dilihat dari adanya *transformasi struktural*. Berdasarkan konsep ini, menurut Sartono Kartodirdjo, perubahan dapat ditelusuri dari adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi dan reorganisasi, dan proses seperti itu telah mengubah secara fundamental dan kualitatif jenis solidaritas,²⁶ sebagaimana terjadi dalam proses gerakan sosial-politik Kaum Tarekat.

Sehubungan dengan analisis terhadap perubahan sosial-politik dalam gerakan Kaum Tarekat, perlu ditekankan di sini, bahwa yang dimaksud adalah perubahan-perubahan struktur dan fungsi sosial tiga kelompok tarekat yang dilihat atau digunakan

²⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terj. YOSOGAMA (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm 23. Lihat pula Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Jogjakarta*, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 3.

²⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm 161-162.

dalam menganalisis perubahan mencakup perkembangan politik.²⁷ Penekanan analisa pada pengertian yang sempit menyangkut dinamika internal Kaum Tarekat, tetapi pada definisi yang lebih luas berkenaan dengan perubahan-perubahan mereka dalam hubungannya dengan situasi eksternal secara politik. Studi ini mengarahkan pembahasannya berdasarkan dua model utama tentang perubahan, yaitu model evolusi (model Spencer) dan model konflik (model Marx). Di bawah ini, kedua model tersebut dapat disajikan dalam penjelasan yang sederhana.

Model Spencer adalah model yang menekankan pada evolusi sosial, dengan kata lain perubahan sosial yang berlangsung secara pelan-pelan dan kumulatif, serta ditentukan dari dalam (*endogen*). Dalam hal ini menurut Spencer, perubahan terjadi dari 'homogenitas yang tidak koheren ke heterogenitas koheren'.²⁸ Diasumsikan model perubahan seperti ini terjadi dalam perkembangan sosial Kaum Tarekat. Model Spencer itu juga dikembangkan antara lain oleh Weber tentang perubahan sosial yang menghasilkan model modernisasi, yaitu proses perubahan dipandang secara esensial sebagai suatu perkembangan dari dalam, dan dunia luar hanya berperan sebagai pemberi rangsangan untuk 'adaptasi'. Proses perubahan yang dimaksudkan Weber, digambarkan dalam pertentangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Budaya masyarakat tradisional sering dikatakan religius, magis dan bahkan tidak rasional, sementara budaya masyarakat modern dianggap sekuler, rasional, dan ilmiah. Weber sendiri menganggap sekularisasi, atau ia sebut sebagai 'hal

²⁷ Pengertian studi perubahan seperti ini mengikuti teori Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed & Zulfami (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 195-196.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 198.

yang mengecewakan pada dunia' (*Enzauberung der welt*) dan bentuk-bentuk organisasi yang lebih rasional adalah karakteristik pokok proses modernisasi, yakni konsep 'rasa keterpanggilan Protestan (asketisme duniawi) dipandang sebagai tahap krusial dalam proses modernisasi.²⁹

Kesejajaran model perubahan sosio-kultural seperti tersebut di atas dengan yang terjadi dalam sejarah Kaum Tarekat tampaknya cukup jelas. Misalnya, tarekat menjadi semakin penting dan terus memainkan peranan dalam kehidupan religius yang tradisional, tetapi mereka juga akomodatif terhadap modernisasi dengan ragam bentuk gerakan, khususnya di bidang sosial-politik, sedangkan sikap-sikap masyarakat luar (khususnya birokrasi sekuler) semakin berperan memberdayakan fungsi sosial yang disumbangkan Kaum Tarekat. Namun demikian, studi ini tidak sepenuhnya berdasarkan penjelasan tentang perubahan sosial yang dibangun dalam model Spencer, yang bersifat *evolitif* dan *linear* saja, karena di dalam gerakan Kaum Tarekat itu juga terjadi perubahan yang pada dasarnya bersifat internal bagi sistem sosial mereka dengan pengembangan potensi dan pertumbuhan cabang-cabang, tetapi perubahan di dalamnya juga menggambarkan tahapan perkembangan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam model Marx.

Perubahan dalam model Marx, secara umum melihat perkembangan masyarakat itu bergantung pada sistem ekonomi dan mengandung konflik-konflik sosial yang mengakibatkan timbulnya krisis, revolusi, dan perubahan yang terputus-putus. Model ini memberi tempat bagi penjelasan-penjelasan perubahan sosial dari perspektif faktor luar (*eksogen*). Melalui model ini

²⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

memberikan penjelasan yang lebih global yang menekankan pada relasi antara perubahan pada suatu masyarakat dan perubahan di masyarakat lain. Di samping itu, model Marx lebih memperhatikan mekanisme perubahan, terutama dilihat dalam pengertian dialektik. Dengan kata lain, penekanannya pada konflik dan akibatnya yang sangat berlawanan dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Penekanan pada revolusi memang merupakan karakteristik model Marx, bila dikontraskan dengan model Spencer.³⁰

Apabila model Marx dimodifikasi ke dalam analisis tentang gerakan Kaum Tarekat, beberapa aspek memiliki relevansinya. Bahwa perubahan-perubahan di kalangan mereka terjadi karena hubungan dengan pihak luar, terutama dilihat dari terjadinya interaksi antara komunitas sosial mereka dengan masyarakat lain. Di samping itu terjadinya modifikasi gerakan maupun kelembagaan dalam peran mereka di bidang dakwah dan pendidikan, terjadi sebagai respons terhadap tawaran-tawaran luar, termasuk modernisasi dan dampaknya pada masyarakat. Namun begitu, perubahan yang ditunjukkan Kaum Tarekat dengan karakternya tersendiri memang menunjukkan suasana konflik, tetapi tidak selamanya hal itu berlangsung secara revolusi.

Oleh karena itu, dengan mengacu kepada dua model perubahan sosial tersebut, dapat dimodifikasi sebuah sintesis sebagai teori lain dalam bagian kerangka konseptual ini. Dapat dikemukakan, dengan mengikuti pendapat Peter Burke, bahwa implikasi model-model perubahan seperti tersebut di atas, secara sintesis adalah penolakan secara hitam putih terhadap tiga dikotomi, yaitu antara kontinuitas dan perubahan, antara faktor

³⁰ *Ibid.*, hlm. 211-216.

internal dan eksternal, dan antara struktur dan peristiwa.³¹

Konsepsi perubahan pada dasarnya selalu terkait dengan konsepsi kontinuitas. Dalam hal ini apa yang disebut sebagai “teori generasi” oleh Karl Mannheim sesungguhnya menekankan pada ‘lokasi bersama dalam proses-proses sosial dan sejarah’ dalam bentuk pandangan tertentu terhadap dunia atau mentalitas. Sementara itu ‘campur tangan dari luar’ seperti dikembangkan Wachtel dan Sahlins, perubahan pada dasarnya tidak hanya dari perspektif eksternal saja, tetapi kedua penulis itu menekankan hubungan atau kesesuaian antara faktor dalam (*endogen*) dan faktor luar (*eksogen*). Untuk model-model perubahan yang terjadi pada Kaum Tarekat di daerah penelitian ini, dapat dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tarekat relatif terbuka terhadap pengaruh luar, sedangkan sebagian lain sanggup bertahan dari pengaruh tersebut.

Adapun ‘hubungan antara kejadian dan struktur’, seperti dikemukakan oleh Le Roy Ladurie bahwa kejadian-kejadian hanyalah merupakan refleksi dari struktur, bukannya mengubah struktur. Meskipun demikian hubungannya dengan gerakan Kaum Tarekat, bahwa peristiwa-peristiwa lebih lazim disebut ‘gerakan sosial bertipe reaktif dan akomodatif, terutama gerakan mereka yang memprotes atau merespons perubahan politik yang mengancam cara hidup yang berlaku. Dalam hal ini persoalannya, apakah peristiwa-peristiwa gerakan mereka itu pada dasarnya untuk memulai suatu proses perubahan politik atautkah gerakan mereka merupakan reaksi atas perubahan politik yang terjadi dalam sistem luar. Sangatlah jelas, perbedaan itu dapat ditemukan dalam jenis gerakan berdasarkan keterkaitan antara peristiwa dan struktur Kaum Tarekat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 240.

G. Metode Penelitian

Studi ini berusaha melacak faktor-faktor yang melatarbelakangi dan mempengaruhi gerakan sosial-politik Kaum Tarekat. Faktor-faktor yang relevan serta kontekstual dengan permasalahan pokok penelitian ini dipelajari melalui *pendekatan sejarah*. Berdasar pendekatan ini, penjelasan atas peristiwa-peristiwa masa lampau (*historical explanation*) didasarkan babakan waktu selama berlangsungnya gerakan-gerakan Kaum Tarekat tersebut, yaitu masa Kolonial dan masa Kemerdekaan. Meskipun demikian, kategori-kategori pembahasan atas peristiwa-peristiwa yang unik dan logis tidaklah secara kaku mengikuti babakan ini, melainkan dipetakan berdasar tema-tema sentral menyangkut gerakan-gerakan mereka selama dua periode sejarah tersebut.

Dalam menjelaskan sejarah ini digunakan konsep-konsep yang relevan dengan karakteristik obyek penelitian. Karena Kaum Tarekat adalah subyek keagamaan Islam berbasis sufisme, maka konsep sosial-keagamaan seperti dipaparkan di muka berguna sebagai penjas atas peristiwa sejarah bersangkutan. Pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa gerakan dimaksud, dipergunakan pula *pendekatan sosiologi*, khususnya berkenaan dengan perilaku hubungan aktor yang memimpin dan penganut yang dipimpin, interpretasi terhadap situasi yang menjadi faktor hubungan, bentuk-bentuk gerakan sosial, dan kejadian-kejadian sebagai dampak gerakan.³²

Penelitian ini bertolak dari telaah dokumen dan observasi awal tentang tiga kelompok tarekat: Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (TQN) Suryalaya (selanjutnya disebut *Kaum*

³² Robert F. Berkhofer, Jr., *A Behavioral Approach to Historical Analysis* (New York: The Free Press, 1971), hlm. 67-74.

Godebag), Tarekat Idrisiyah (selanjutnya disebut *Kaum Wara'i*), dan Tarekat Tijaniyah (selanjutnya disebut *Kaum Tijani*), yang menunjuk realitas sufisme serta tipologi gerakannya. Kemudian fokus gerakan dalam bidang sosial-politik dilihat dalam hubungannya dengan kekuatan sosial-politik dan pemerintah. Berdasar kategori subyek penelitian tersebut dikembangkan tiga tipe ideal gerakan sosial-politik Kaum Tarekat: (1) *Inklusif-pragmatis*, jika hubungan sosial-politik itu berlangsung secara terbuka, (2) *Eksklusif-fundamentalis*, jika sebaliknya dari tipe pertama, dan (3) *Moderat*, jika hubungan sosial-politik berlangsung secara netral.³³ Satu tipe dengan yang lain diasumsikan berlaku untuk masing-masing kelompok tarekat dalam konteks perubahan politik di Indonesia pada abad XX, sehingga setiap tipe gerakan itu juga menunjukkan perubahan.

Untuk ini, data awal yang dicari adalah faktor-faktor dominan yang mendorong munculnya gerakan, seperti asal-usul dan pencetus gerakan, sosialisasi ajaran sebagai dasar gerakan, mobilisasi pengikut, dan kausalitas gerakan serta faktor *counter action* terhadap gerakan.³⁴ Data ini disamping berguna memperdalam pembahasan tipologi gerakan Kaum Tarekat, pada gilirannya menjadi bahan analisis tentang peristiwa hubungan sosial-politik. Sementara itu, data kebijakan Pemerintah Kolonial (Belanda dan Jepang) dan Pemerintah Indonesia (Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi), dicari sehubungan analisis kejadian-kejadian yang mendorong sikap dan reaksi sosial-politik Kaum Tarekat.

³³ Bandingkan dengan Mahmud Suyuthi, *Politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang* (Yogyakarta: Gelang Press, 2001), hlm. 211. Untuk tiga kategori serupa itu, penulis ini menyebutnya sebagai *adapti-kompromisf, antagonistik, dan koperatif*.

³⁴ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior* (London: the Macmillan Company, 1962), hlm. 1-23.

1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasar kenyataan Kaum Tarekat memusatkan gerakannya melalui pesantren, tetapi pengaruhnya juga meluas ke komunitas-komunitas pengikut, maka penelitian ini menetapkan pesantren dan cabang-cabang tarekat di daerah Priangan sebagai unit analisis. Lokasi penelitian ditetapkan di Pesantren-pesantren Suryalaya dan Pagendingan (keduanya di daerah Tasikmalaya), dan Pesantren Biru di daerah Garut. Generalisasi dilakukan dengan memposisikan kasus ini dalam konteks hubungan sosial-politik yang lebih luas, baik umat Islam di daerah Priangan maupun Pemerintah di tingkat nasional.

Peristiwa-peristiwa historis-sosiologis diteliti berkenaan dengan dua kategori sasaran. *Pertama*, berkenaan dengan subyek penelitian, yaitu Kaum Tarekat dalam kasus ini adalah para guru dan murid dari masing-masing tiga tarekat. Para guru tarekat dengan gelar dan jumlah mereka berbeda-beda, yaitu pada TQN Suryalaya bergelar *mursyid*, dan sampai sekarang berjumlah 2 orang; pada Idrisiah Pagendingan biasa dipanggil *Syeikhul Akbar*, sebanyak 3 orang; sedangkan pada Tijaniyah Garut disebut *Khalifah*, sebanyak 3 orang. Antara seorang guru tarekat dengan yang lain, berdasar regenerasi dan pelimpahan kepemimpinan mengembangkan gerakan tarekat dalam waktu yang berbeda. Kemudian pada setiap periode kepemimpinan, para guru dibantu oleh sejumlah wakil dengan sebutan yang berbeda pula. Pada TQN Suryalaya disebut *Wakil Talqin*, pada Idrisiah disebut *Wakil Syeikh*, sedangkan pada tarekat Tijaniyah disebut *Muqaddam*. Kelengkapan subyek atas dua struktur, Guru Sufi dan Wakilnya dalam kepemimpinan tarekat ini, ialah kelompok penganut masing-masing tarekat.

Kedua, sasaran obyektif penelitian ini adalah *Gerakan Sosial-politik*. Konsep *gerakan* dalam hal ini didefinisikan sebagai

“kegiatan-kegiatan dalam bentuk aksi-aksi sosial” yang dilakukan atau melibatkan kalangan Sufi dari tiga tarekat yang diteliti. Model-model hubungan struktural-fungsional antara Guru dan Wakilnya dan Murid-murid Tarekat merupakan obyek pertamakali dibahas. Obyek utama lainnya adalah berkenaan dengan konsep “Sosial-politik”, dalam hal ini pembahasannya melekat dalam obyek gerakan tersebut. Tetapi sosial-politik dimaksud juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sosial yang bermuatan atau bahkan berfungsi politik, baik fungsi politik itu berlaku di dalam kegiatan sosial internal Kaum Tarekat, maupun gerakan sosial mereka yang berhubungan dengan politik Pemerintah.

Obyek penelitian tersebut digambarkan secara kualitatif dalam perspektif sejarah. Karena itu, pembahasan atas gerakan sosial-politik yang terjadi dalam komunitas Kaum Tarekat didekati dari dua arah yang berhubungan. *Pertama*, secara *deduksi*, yakni model-model umum gerakan berdasar teori-teori yang telah dikemukakan, dibandingkan untuk melihat model gerakan yang terjadi dalam sejarah gerakan Kaum Tarekat. Dengan metode ini bentuk-bentuk gerakan mereka dapat ditemukan dan dimodifikasi. *Kedua*, secara *induksi*, yakni proses gerakan berdasar model-model yang khas terjadi di dalam setiap tarekat digambarkan untuk mencari keseimbangan hubungan problematis antara peristiwa dan struktur pada beberapa kasus gerakan. Selanjutnya, berdasar proses induksi ini dapat memberikan generalisasi *continuity and changes* mengenai agama dan politik.

2. Tahap Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya merekonstruksi masa lampau atas obyek penelitian itu ditempuh dengan metode sejarah. Menurut prosedur metode ini, langkah pertama penelitian dilakukan dengan *heuristik*

(pengumpulan data). Penelitian ini melakukan pengumpulan data atas sumber-sumber tertulis, yang dilangsungkan dengan *metode penggunaan bahan dokumen*.³⁵ Kritik sumber secara internal dan eksternal, dilakukan bersamaan dalam proses pengumpulan data. Kedua kritik ini juga diberlakukan dalam seleksi informan saat pengumpulan data melalui *metode wawancara*.

Sumber-sumber tertulis yang ditemukan penelitian ini adalah brosur-brosur dan koran-koran yang didapatkan di Perpustakaan Nasional di Jakarta dan Perpustakaan Daerah di Bandung, Tasikmalaya, dan Garut. Sumber-sumber tersebut membantu penemuan data tentang situasi umum daerah dan masyarakat penelitian. Adapun sumber tertulis lain berkenaan dengan obyek penelitian adalah karya-karya para Sufi setempat, laporan-laporan pesantren atau yayasan, dan dokumen-dokumen lokal, yang didapatkan di pesantren-pesantren penelitian. Berdasar sumber-sumber kedua ini dapat ditemukan data tentang ajaran sufisme, gagasan-gagasan Kaum Sufi, dan peristiwa-peristiwa gerakan tarekat. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber baik karya-karya para sarjana dan peneliti maupun media cetak, yang langsung atau hanya terkait dengan informasi mengenai sejarah sufisme dan peristiwa-peristiwa sosial-politik di wilayah penelitian. Data berdasarkan sumber terakhir sangat membantu analisis penelitian ini.

Kelangkaan sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan informasi lebih banyak tentang obyek penelitian mengharuskan peneliti menempuh metode *wawancara* secara mendalam

³⁵ Mengenai metode ini, lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumenter", dalam Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm 25.; atau Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 94-97.

kepada para saksi sejarah dan tokoh-tokoh gerakan tarekat sekarang.³⁶ Sejumlah informan dijumpai di lokasi-lokasi penelitian, beberapa di antara mereka adalah generasi berusia lanjut yang sempat menjadi pelaku gerakan atau penyaksi peristiwa-peristiwa pada dua periode sejarah (Kolonial dan Kemerdekaan). Bahkan dari sebagian mereka, data *life history* para tokoh Sufi generasi pertama, dapat diterangkan secara gamblang. Sebagian jumlah informan adalah para guru tarekat dan tokoh gerakan yang hidup pada generasi kedua, mereka dapat dijumpai di pesantren-pesantren dan daerah penelitian. Dari informan generasi ini sebagian data sejarah dapat diceritakan, dan mereka lebih banyak mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya sampai sekarang, sehingga berdasar informasi mereka masalah-masalah penelitian ini dapat dipecahkan.

Masih mengenai langkah pengumpulan data, observasi lapangan dilakukan dengan *pengamatan langsung*. Lokasi pusat-pusat gerakan tarekat diamati lebih awal guna memperoleh gambaran tentang jejak-jejak masa lalu. Metode ini juga dilakukan terhadap praktik ritual jamaah tarekat: *Mingguan*, *Bulanan*, dan *Tahunan*. Hasil observasi tersebut diperoleh informasi tentang model ritual bersama, hubungan sosial, dan gagasan-gagasan para Sufi atau wakilnya dalam pidato-pidato mereka. Bersamaan observasi ini, wawancara terus dilakukan guna memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen.

Baik *pengamatan* maupun *wawancara* dilakukan secara berselang-seling selama penelitian lapangan. Peneliti tinggal di

³⁶ Metode ini sebetulnya biasa dipergunakan dalam metode sejarah sebagai pelengkap terhadap metode bahan dokumenter. Baca, Kuntowijoyo, *ibid.*, hlm. 23. Namun penelitian ini justru banyak menggunakannya sebagai metode utama karena ketiadaan sumber tertulis.

daerah penelitian dalam waktu yang tidak tetap. Pada September 2005 selama dua minggu di Garut, kemudian pada Juni 2006 selama seminggu di Pagendingan, dan tiga minggu pada akhir Agustus 2006 di Suryalaya. Sesudah itu observasi dan wawancara masih dilakukan selama seminggu di bulan Desember 2006, kemudian selama dua minggu pada bulan Maret 2007 penelitian dilaksanakan kembali di Garut.

Setelah data terkumpul, *interpretasi* sejarah dilakukan sebagai langkah ketiga. Prosedur penelitian sejarah memang harus berlangsung demikian, tetapi langkah ini pun dilaksanakan dalam proses penulisan sejarah (*historiografi*) yang sesungguhnya merupakan langkah terakhir metode sejarah. Proses interpretasi atau analisis data dilakukan dengan cara sintesis fakta-fakta yang diperoleh melalui eksplanasi sejarah.³⁷ Karenanya, mekanisme interpretasi dilangsungkan terhadap data dokumenter, hasil wawancara dan observasi, berdasarkan kategori masalah yang mengacu kepada kerangka teori penelitian ini. Fakta-fakta sejarah selanjutnya dikategorikan sesuai tipe gerakan Kaum Tarekat dan hubungan sosial-politik dalam konteks perubahan. Kategorisasi fakta ini sekaligus mencerminkan garis besar *historiografi* di dalam uraian logis atau kausal untuk memperkuat kesimpulan³⁸ di akhir penulisan disertasi. Dengan demikian, seluruh penjelasan sejarah dalam disertasi ini merupakan kesatuan bahasan sistematis berikut ini.

³⁷ Ibrahim Alfian, *Sejarah dan Permasalahan Masa Kini* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada) (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985), hlm.7.

³⁸ Miles & Huberman, (1992), dikutip dari Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), hlm. 42.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memulai pembahasan dalam Bab I sebagai pengantar atas lima bab pembahasan berikutnya tentang isi dan kesimpulan. Bab Pendahuluan mengemukakan latar permasalahan mengapa gerakan sufisme dipilih sebagai obyek penelitian. Berdasar problem-problem akademik yang dibahas dalam sub-bab pertama tersebut, ruang lingkup dan arti pentingnya penelitian menjadi sub-sub pembahasan yang berbeda untuk menjelaskan kekhususan penelitian ini dibanding penelitian terdahulu. Pembahasan atas karya-karya terdahulu yang berguna mempertajam perbedaan serta memperkaya kerangka teoretik penelitian ini dibahas dalam sub-bab tersendiri, sebagaimana sub pembahasan lain tentang metode penelitian. Selanjutnya, bab ini dipungkas dengan sistematika pembahasan.

Pembahasan Bab II, menggambarkan keterjalinan dunia sufisme dalam penyebaran tarekat-tarekat, serta gambaran umum tentang perkembangan sufisme dan tarekat di daerah Priangan. Pembahasan ini disistematisasikan menjadi tiga sub-bab: *Sufisme dalam Jaringan Guru-guru Tarekat; Aliran-aliran Tarekat dan Keagamaan Masyarakat; dan Posisi Tarekat dalam Dinamika Umat Islam*. Semua pembahasan tersebut memberikan pengertian tentang latar sejarah mengenai kemunculan serta perkembangan peranan Kaum Sufi dalam gerakan tiga tarekat di daerah penelitian.

Bab III secara khusus memperlihatkan *Gerakan Keagamaan Kaum Tarekat*. Pembahasan bab ini dilihat dari tiga segi dalam keterkaitannya tentang *Ajaran dan Sistem Ritual Tarekat*, kemudian *Struktur Guru-murid*, dan *Komunitas-komunitas Tarekat dan Aktivasnya*. Pembahasan ketiga aspek ini diurutkan dalam tiga sub pembahasan, satu sama lain mencakup fakta-fakta dari tiga tarekat

serta memperlihatkan perbedaan kronologi maupun substansi yang mempengaruhi kemunculan gerakan masing-masing tarekat. Setiap aspek pembahasan dijelaskan berdasar karakteristik ajaran Kaum Sufi, kepemimpinan, struktur keorganisasian, dan sosial penganut tarekat. Semua pembahasan ini didasarkan fakta historis dan sosial selama periode perkembangan masing-masing tarekat.

Pembahasan selanjutnya tentang *Hubungan Sosial-politik Kaum Tarekat* sebagai gambaran tentang gerakan sosial dan politik mereka dibahas dalam Bab IV. Bab ini dijabarkan ke dalam sub pembahasan pertama mengenai *Perlawanan terhadap Penguasa Asing* pada masa Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang. Pembahasan berikutnya adalah *Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia* pada masa Kemerdekaan dilihat dalam hubungan politik mereka dengan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pembahasan terakhir bab ini tentang *Keterlibatan Kaum Tarekat dalam Partai Politik dan Organisasi Massa (Ormas)*, khususnya partai politik dan Ormas-ormas Islam yang berkembang di wilayah penelitian pada periode kemerdekaan hingga sekarang. Keseluruhan narasi serta analisis bab IV tersebut mencerminkan pola umum berdasarkan gerakan sosial-politik Kaum Tarekat yang dapat memperjelas model-model khusus gerakan tarekat, sebagaimana dikategorisasikan dalam analisis bab berikutnya.

Adapun pembahasan pada Bab V memperlihatkan *Tipologi Gerakan Tarekat di Priangan* berdasarkan gerakan masing-masing tarekat di bidang keagamaan, sosial, dan politik. Setiap gerakan tarekat dijelaskan tipenya yang dominan, sehingga pembahasan ini dapat mempertegas pembuktian atas asumsi-asumsi yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Karena itu sub-sub pembahasan bab ini dibagi ke dalam tiga kategori secara berurutan: *Inklusivisme-Prgamatis TQN Suryalaya*,

Eksklusifisme-Fundamentalis Kaum Wara'i, dan Moderasi Kaum Tijani. Berdasarkan kategorisasi demikian yang juga didukung dengan analisis fakta-fakta pada bab-bab sebelumnya, bab ini berfungsi lebih mendekati kepada akhir pembahasan disertai ini pada Bab VI, yaitu bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Di bagian ini dapat dikemukakan taori-teori hubungan Agama, Sosial, dan Politik dalam sejarah sufisme berdasarkan: *Fungsi Doktrin terhadap Hubungan Sosial-politik Kaum Tarekat; Peran Sosial-politik Kaum Tarekat; Model-model Gerakan Tarekat; dan Kontribusi Kaum Tarekat.* Simpulan teoretik tersebut pada gilirannya bukan hanya diharapkan berfungsi untuk pengembangan teori serta pengetahuan baru dalam ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga memberikan sumbangan praktis bagi berbagai pihak, sebagaimana disarankan pada akhir penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.M. Amin., dkk. *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta; IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Suryomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (ed.). *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1987.
- _____. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- _____. *ed., Sejarah Umat Islam di Indonesia*, Jakarta MUI, 1991.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Pustaka. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Ali, A. Mukti. *Ibn Khaldun dan Asal-usul Sosiologi*, I, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1970.
- Almanak Muhammadiyah 1419*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1998.
- Alfian, T. Ibrahim, dkk. *Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: LERES IAIN Sunan Kalijaga, 1984.
- _____. *Sejarah dan Permasalahan Masa Kini*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1985.
- _____. *Tentang Metodologi Sejarah*, Supplement atas Buku *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*. T.n.p: tt.
- Al-Syarqawi, 'Effat. *Filsafat Kebudayaan Islam*, terj. Ahmad Rofi 'Usmani. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Amin, Miska Muhammad. *Epistemologi Islam, Pengantar Filsafat*

- Pengetahuan Islam*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Ankersmit, F.R. *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Moderen Tentang Filsafat Sejarah*, terj. Dick Hartoko. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Asy'ari, Musa. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Yogyakarta: LESFI, 1999.
- Audah, Ali. *Ibn Khaldun*. Jakarta; Pustaka Firdaus, 1986.
- Basis* (Majalah Kebudayaan Umum), Oktober 1992 –XL-No.10.
- Berkhoper, Jr. Robert. F. *Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: The Free Press, 1997.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed & Zulfami. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Craib, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Djamari. *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Fyzee, A.A.A. *Kebudayaan Islam (Asal-usul dan Perkembangannya)*, Terj. Syamsuddin Abdullah, Yogyakarta: Bagus Arafah. 1982.
- Garraghan, S.J., Gilbert J. A. *Guide to Historical Method*. London: Macmillan Education LTD, 1957.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara, 1981.
- Gottshalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI-Press, 1983.
- Gustave E. Von Grunebaum, *Modern: The Search for Cultural Identity*. New York: Ancore, 1964.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*, IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hassan, Hassan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs, from the Earliest Time to the Present*. London: MacMillan, 1973.
- Hugiono dan P.K. Poerwantana. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*, cet. IV. Beirut: Dar Ihya al-Turasi al-'Arabi, t.t.
- _____. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Terj. F. Rosenthal. London: Routledge and Keegan Paul, 1967.
- _____. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1971.
- Issawi, Charles. *Filsafat Islam tentang Sejarah*, terj. A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Hiostoriografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- _____. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1980.
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Flores: Nusa Indah, 1980.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- _____. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid*, Terj. Ghufroon A. Mas'udi. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Ma'arif, M. Safi'i. *Kontribusi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: LSIPM, 1985.

- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History*. Chicago: The University of Chicago Press, 1964.
- Meyerhoff, Hans. *The Philosophy of History in Our Time*. New York: Doubleday Anchor Books, 1959.
- McCullagh, C. Behan. *The Logic of History*. New York: Routledge, 2004.
- Mutahhari, Murthada. *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, Terj. M. Hashem. Bnadung: Mizan, 1985.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1974
- Nicholson, Reynold A. *A Literary History of the Arabs*. Cambridge: The University Press, 1969.
- Noer, Deliar. *Gerakan-gerakan Moderen Islam di Indonsia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Olsen, Marvin E. *The Process of Social Organization*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. 1986.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, terj. YOSOGAMA. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Rahardjo, M. Dawam, ed. *Insan Kamil*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- _____. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Raliby, Osman. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Renier, G.J. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terj. Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986.
- Shibel, Fuad Muhammad. *Kebudayaan Islam menurut Tinjauan Toynbee*, terj. Bustani A. Gani dan Chatibul Umam. Jakarta:

- Bulan Bintang, 1977
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M, 1983.
- _____. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior*, New York: the Free Press. 1962.
- Soedjatmoko, dkk. Ed. *Historiografi Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia, 1995.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke -19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan. *Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu dan Pendidikan*, terj. Dahlan. Bandung: CV. Diponegoro, 1987.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: dasar metode, teknik*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Tjandrasasmita, Uka, ed. *Sejarah Nasional Indonesia, III*, Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Umar, A. Mu'in, dkk, ed. *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- _____. *Historiografi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah*, terj. Mu'in Umar, dkk. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Von Grunebaum, Gustave E. *Modern: The Search for Cultural Identity*. New York: Ancore, 1964.
- Wafi, Ali Abdulwahid. *Ibn Khaldun Riwayat dan Karyanya*, terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Grafiti Press. 1985
- Wertheim, W.F. *Indonesia Society in Transition*. The Hague: W. van Hoeve, 1969.

APENDIKS

CONTOH METODOLOGI INTERPRETASI SEJARAH

Model Interpretasi Sejarah I

MENJELASKAN TINDAKAN-TINDAKAN KOLEKTIF¹

Sejarawan terus-menerus berusaha memahami mengapa sekelompok orang bertindak bersama-sama di masa lalu. Secara kasar kelompok sosial dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, ada yang disebut sebagai kumpulan/agregat, sekelompok orang yang bertindak melakukan tindakan serupa atas dasar mereka sendiri, seperti para pemilih pada sebuah pemilihan umum. *Kedua*, ada kelompok sosial yang dibentuk ketika beberapa orang bersepakat untuk melakukan tindakan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok sosial yang ketiga adalah organisasi, yang merupakan sebuah institusi dimana tiap anggotanya mempunyai satu atau lebih tugas dan peran yang jelas, dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang bergabung ke dalam lembaga semacam itu mengikatkan diri untuk berperilaku berdasarkan cara-cara yang digariskan oleh lembaga tersebut, melakukan peran yang mereka asumsikan sesuai dengan aturan-aturan itu. fokus pembahasan kita sekarang adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua kelompok pertama, yaitu tindakan kelompok agregat, dan perilaku kelompok sosial yang terkoordinasi. Tentu saja, perilaku organisasi juga merupakan kajian sejarawan, tetapi itu diluar luas lingkup pembahasan buku ini.

¹ Tulisan ini diterjemahkan dan disarikan dari buku C. Behan McCullagh, *The Truth of History* (New York, Routledge, 2004).

Hal yang sering kali terjadi dalam menjelaskan tindakan kolektif adalah dengan melakukan generalisasi dan mengaitkannya dengan beberapa peristiwa lain. Misalnya, banyak orang Irlandia bermigrasi ke Australia pada 1840 untuk melepaskan diri dari hutang dan kemiskinan pada masa kelaparan yang mematikan. Seseorang mungkin saja menjelaskan perilaku mereka dalam cara generalisasi; dalam masa sulit, orang sering dan akan bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Ada beberapa kekhawatiran atas kebenaran cara generalisasi semacam ini, karena perilaku manusia tidak selalu seteratur dan bisa diprediksi seperti itu. Permasalahan ini akan dibahas pada bab ini, yaitu pembahasan mengenai interpretasi generalisasi. Terdapat dua cara mengatasi pengecualian-pengecualian dalam generalisasi. *Pertama* adalah dengan menyaring fakta, yaitu mengeluarkan kondisi-kondisi pengecualian. Yang kedua, solusi yang lebih baik, adalah dengan menafsirkan peristiwa sebagai sebuah pernyataan bertendensi, yang dapat dibantah dengan dengan tendensi lain. Hal yang penting untuk dicatat pada tahap ini adalah bahwa perilaku kolektif sering kali dapat dijelaskan dalam kerangka generalisasi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa teori perubahan sosial.

Walaupun demikian, penjelasan perilaku kolektif dengan menggunakan apa yang disebut “pendekatan tindakan”, yaitu penjelasan yang berfokus pada cara individu tergerak untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Beberapa orang berpendapat bahwa satu-satunya cara menjelaskan perilaku adalah dengan melihat alasan/sebab yang dipertimbangkan seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Phillip Pettit menyebut cara ini ‘teori kesimpulan’ (*inference theory*), sebagai lawan dari ‘teori keputusan’ (*decision theory*) dan ‘teori pilihan rasional’ (*rational choice theory*). (Pettit, 1993: 45, 272-6). Hlm yang penting dalam

teori kesimpulan adalah klaimnya bahwa 'hasrat/ keinginan dapat dievaluasi secara rasional' (hlm. 240). Menurut pendapatnya, semua tindakan adalah produk pemikiran dan pertimbangan. Ini mendukung pendapat Pettit tentang otonomi manusia, bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya. Sebagian besar isi bukunya yang terakhir, *The Common Mind* (1993) berisi argumennya mempertahankan keyakinannya tentang otonomi manusia, melawan mereka yang berpendapat bahwa otonomi manusia dapat dikesampingkan oleh fakta sosial (bab 3). Teori keputusan berpendapat bahwa orang digerakan oleh hasrat/keinginan mereka, kadang-kadang tanpa mempertimbangkannya, dan teori pilihan rasional berasumsi bahwa orang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Pettit menolak kedua teori diatas, dan mempertahankan keyakinannya atas teori otonomi. Tetapi secara luas sudah diketahui bahwa orang tidak selalu bertindak secara rasional, otonom, sebagaimana juga sering diakui oleh Pettit. Orang sering bertindak berdasarkan kebiasaan dan hasrat yang tidak dipikirkan matang-matang; dan mereka adalah korban motif bawah sadar. Mengabaikan sebab-sebab fundamental perilaku manusia diatas sama dengan mengabaikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Mereka yang menyukai pendekatan tindakan untuk menjelaskan tindakan kolektif menghadapi kesulitan tertentu. Mereka harus menjelaskan, tidak hanya mengapa individu bertindak seperti yang mereka lakukan, tetapi juga mengapa begitu banyak dari mereka bertindak dalam cara yang sama. Peneliti perilaku individu enggan untuk membahas pertanyaan ini, dan saya menduga itu dikarenakan terkait dengan topik determinisme sosial. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa perilaku kolektif berasal dari rasionalitas kolektif. Tetapi rasionalitas sendirian tidak

dapat menjelaskan itu. Orang hanya bereaksi terhadap situasi tertentu dengan cara yang sama, hanya jika mereka mempunyai keyakinan yang sama mengenai hlm itu, juga nilai-nilai dan hasrat yang sama. Jadi, untuk menjelaskan respon kolektif dari perspektif individu, seseorang harus memperhatikan sumber keyakinan dan hasrat kolektif tersebut.

Sejarawan dan sosiolog telah menemukan sumber perilaku kolektif dalam kaidah-kaidah (*convention*) sosial, ideologi budaya, dan kepentingan pribadi. Dalam membahas ketiga sumber itu, saya akan menjelaskan bagaimana sumber-sumber itu mempengaruhi perilaku manusia, dan khususnya mengenai apakah sumber-sumber itu dapat mengalahkan rasionalitas dan otonomi berpikir manusia. Saya berpendapat bahwa dalam tiap kasus manusia tetap dapat bereaksi secara rasional ketika sumber-sumber diatas mempengaruhi mereka, tetapi cukup sering terjadi orang mengikuti sumber kekuatan sosial tanpa banyak berpikir. Sumber-sumber kekuatan sosial ini tidak mencabut otonomi seseorang untuk berpikir bebas, tetapi sering manusia tidak menggunakan otonomi yang dipunyainya itu.

Jika ada tiga cara untuk menjelaskan perilaku-perilaku kolektif, apakah itu berarti suatu penjelasan sejarah terserah pada pilihan yang disukai sejarawan? Jika demikian, maka penjelasan sejarah akan sangat subyektif. Dalam kenyataannya, perilaku kolektif dapat disebabkan oleh berbagai macam hlm. Orang berhenti di lampu merah, sebagian karena kebiasaan atau menuruti kaidah umum, sebagian karena ingin menghindari kecelakaan dan denda, dan juga karena ini adalah kepentingan mereka sendiri untuk melakukan itu. Sejarawan sering hanya menyebutkan penyebab yang menarik bagi mereka sendiri, sehingga penjelasan mereka menjadi agak subyektif. Walaupun begitu, saya menekankan bahwa penjelasan

yang fair harus menyebutkan semua penyebab utama, supaya penjelasan mengenai penyebab peristiwa sejarah tidak salah saji. Jika aturan ini diikuti, maka kelonggaran bagi sejarawan hanya terletak pada penentuan sebab-sebab penting mana yang berlaku pada suatu peristiwa, dimana hlm ini tergantung pada pandangan sejarawan mengenai sifat manusia.

Tindakan Kolektif sebagai Ekspresi Kaidah yang Dianut Bersama

Ilmuwan sosial telah meneliti teori yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan kita adalah respon konvensional terhadap penafsiran situasi. Mungkin pandangan yang paling terkenal datang dari Pierre Bourdieu, yang bukunya sangat berpengaruh, yaitu *Outline of a Theory of Practice* (1997) telah menarik perhatian akan pentingnya peran kaidah-kaidah umum dalam menentukan perilaku manusia. Dia mengatakan, bahwa selama pertumbuhannya, manusia mempelajari kaidah-kaidah untuk menafsirkan situasi dalam cara tertentu, untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi, dan untuk bereaksi dengan pola perilaku tertentu. Tiap orang membentuk kaidahnya sendiri, atau kebiasaan-kebiasaan, yang disebut oleh Bourdieu sebagai '*habitus*'. 'Seseorang dikendalikan oleh habitus mereka, dikarenakan habitus ini berada di dalam diri mereka sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan-tindakan mereka' (hlm. 8). Tindakan-tindakan yang diambil oleh seseorang, katanya, adalah tindakan yang memberikan keuntungan bagi mereka.

Bourdieu yakin bahwa perilaku individu dan kelompok paling tepat dipahami sebagai sebuah ekspresi kaidah-kaidah. Pendeknya, habitus—produk sejarah—, menghasilkan tindakan individual dan kelompok—dan sejarah—, sesuai dengan skema yang dibentuk oleh sejarah. Sistem kaidah-kaidah ini adalah prinsip

kontinuitas dan keteraturan di mana seseorang mempersepsi dunia sosial tanpa mampu memberi landasan rasional. Dan pada saat yang sama, prinsip transformasi dan revolusi yang mana sosiologi mekanistik ekstrinsik dan determinisme ataupun subyektifitas spontan ataupun internal subyektifisme tidak mampu menjelaskannya (hlm. 82).

Kebanyakan ekspresi protes abad XIX di Eropa dijelaskan sebagai respon konvensional terhadap ketidakadilan. Sejarawan seperti George Rude (1984) dan E.P. Thompson (1968) misalnya, menemukan bahwa banyak kerusuhan roti di Inggris adalah respon konvensional terhadap ketidakadilan 'kenaikan harga roti ketika supply roti terbatas'. Dalam kerusuhan ini rakyat menahan padi dan menjualnya pada tingkat harga yang dianggap pantas, sering kali mengembalikan uang kepada pedagang padi. Rude menunjukkan bentuk-bentuk protes konvensional lain: Petani Jazquarie, dan demonstrasi di pabrik-pabrik pada masa modern (hlm. 5). Charles Tilly telah menulis sebuah catatan menarik tentang bermacam-macam sifat 'repertoar tindakan-tindakan kolektif' yang ada dalam masyarakat tradisional (1978, bab 5). Dia mengatakan bahwa 'tindakan kolektif biasanya memakai cara tertentu yang sudah dikenal baik oleh partisipan. (hlm. 143).

Pembajakan, pemberontakan di kapal, perusakan mesin, perkelahian antar kampung, pemberontakan terhadap penetapan pajak, kerusuhan pangan, pembunuhan, penipuan, suatu waktu telah menjadi repertoar standar tindakan kolektif beberapa kelompok. Suatu waktu orang pernah menganggap dirinya sebagai orang yang mempunyai legitimasi untuk melakukan dan menyampaikan aspirasi ketidakpuasan. (*Ibid.*, hlm 153) (lihat juga Rude, 1981, bab 15).

Betapa sangat menyakinkannya pandangan bahwa kerusuhan

adalah respon konvensional terhadap ketidakadilan membuat para sejarawan memperingatkan bahaya menerapkan pandangan itu tanpa berpikir kritis. John Stevenson mengatakan bahwa salah satu bentuk arogansi yang hlmus dalam penulisan sejarah adalah melihat semua kekerasan sebagai 'protes' dan semua partisipan kerusuhan sebagai kaum proletar yang bijaksana (Stevenson, 1976: 4). Dia memperingatkan bahwa tidak mungkin setiap anggota kelompok massa mempunyai niat dan maksud yang sama (hlm. 11). Meskipun begitu, dalam banyak kasus, mayoritas orang yang terlibat dalam kerusuhan roti tampaknya mengetahui apa yang mereka protes: kenaikan dalam harga roti akan mempengaruhi semua hal.

Tetapi, salah untuk menyatakan bahwa semua tindakan kolektif disebabkan oleh sejumlah orang mengikuti kaidah-kaidah. Sering kali orang bertindak bersama-sama karena merespon dorongan seorang pemimpin agar mereka melakukan suatu tindakan. Misalnya, E.P. Thompson mengidentifikasi jenis kerusuhan lain, yang disebutnya sebagai 'penggunaan massa sebagai alat untuk menekan, oleh orang 'di atas' atau 'diluar' massa tersebut. (Thompson, 1968, hlm. 67). Dia mencontohkan massa di London yang dipimpin oleh Wilkes pada tahun 1760 dan 1770 (hlm. 11). Mereka memberontak dengan alasan semata-mata untuk 'kemerdekaan', tetapi banyak pengikutnya tidak mengerti untuk masalah apa yang mereka ributkan. Mereka bertindak hanya karena pimpinan mereka memerintahkan untuk melakukan itu.

Ketika pemimpin membujuk pengikutnya untuk berperilaku di luar cara yang konvensional, banyak orang merasa terkejut. Perilaku di luar kebiasaan pasukan pemanah Inggris pada pertempuran Crecy (26 Agustus 1346) adalah contohnya. Let Edouard Perroy menceritakan kisahnya:

Mengapa Edward (Edward III, raja Inggris) keluar sebagai pemenang

pada pertempuran yang tidak seimbang ini, dimana pada kondisi normal dia seharusnya mudah untuk dihancurkan? Jurnalists menyalahkan para ksatria Prancis yang terlalu terburu-buru maju menyerang dengan kuda yang terperosok, dan menyerang secara membabi buta tanpa menunggu untuk bergabung dengan pasukan tambahan. Pada kenyataannya, Edward menjadi pemenang, tampak aneh, karena jumlah pasukannya sangat sedikit. Untuk menunggu pasukan musuh di medan terbuka, melakukan pertempuran satu lawan satu, dimana dalam pandangannya itu adalah cara bertempur yang terhormat, dan yang para pengikutnya ingin sekali melakukannya, akan menjadi kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu dia mengubah taktik, yang mana jauh di lubuk hatinya, dia merasa malu karenanya. Dia memilih medan yang menguntungkan, yang memungkinkan dia mengikuti gerakan musuh. Pasukan berkudanya ditempatkan di belakang, menunggu sampai saatnya maju masuk ke kancah perang. Barikade dari kayu dan ranting melindungi pasukan infanteri. Pertama, para pemanah dari Welsh diperintahkan dengan cepat untuk membinasakan kuda, dan melucuti kuda pasukan musuh. Bahkan kanon yang jumlahnya tidak seberapa, ditembakkan pada saat itu hanya untuk menciptakan kepanikan. Ketika pertempuran dimulai, perang itu menjadi ajang pembantaian. Medan pertempuran penuh dengan tubuh bangsawan Prancis yang bergelimpangan.

(Perroy, 1962: 119).

Ada banyak literatur yang membahas dan meneliti tipe-tipe respon sosial. Erving Goffman (1971) dan H. Garfinkel (1967) menunjukkan bagaimana orang mempelajari tidak hanya aturan-aturan, tapi juga yang terpenting mempelajari peran-peran dan apa yang disebut dengan 'karakter', yang diharapkan orang lain untuk mereka mainkan. R. Harre dan P.F. Secord meluaskan analisisnya dengan memasukan rutinitas dan ritual (1972 bab 9).

Apakah penjelasan tindakan kolektif dalam kerangka mengikuti kaidah sosial sesuai dengan pandangan manusia sebagai

mahluk rasional dan otonom? Atau apakah itu menunjukkan determinisme sosial? Berkenaan dengan pertanyaan itu, Bourdieu ingin menemukan jalan tengah di antara kedua titik ekstrim itu. Dia menganggap bahwa manusia hanya setengah menyadari kaidah-kaidah yang mengendalikan dirinya.

Karena tindakan seseorang adalah produk sebuah *modus operandi*, yang itu tidak diciptakan dan disadarinya, tindakan-tindakan itu mengandung ‘maksud pribadi (*obyektif*)’, yang selalu mengendalikan pikiran sadarnya (*counscious*)’....hlm itu dikarenakan subyek tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, bahwa apa yang mereka lakukan mempunyai arti lebih dari yang mereka tahu (Bourdieu, 1977: 79).

Contoh kaidah sosial yang berlaku di masyarakat disebutkan Bourdieu dalam makalahnya berjudul ‘Strategi Perkawinan Sebagai Sebuah Strategi Reproduksi Sosial (1976). Hipotesis awal dia adalah, anda dapat memahami praktik perkawinan dan pewarisan yang berlaku di antara petani di Bearn Pyrenees jika anda melihatnya sebagai cara untuk melestarikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sosial, yang tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. Perkawinan dirancang untuk memelihara ‘pewarisan dari jalur bapak’, dengan tetap menyatukan tanah, dan menjaga “simbol patrimonial”, dengan memelihara status sosial keluarga, dalam waktu yang sama, juga memelihara ‘*primogeniture*’, dimana anak sulung adalah pewaris tanah. Fungsi utama perkawinan adalah untuk ‘menghasilkan keturunan untuk tenaga kerja’ dan ‘untuk meneruskan warisan’ (hlm. 122). Setiap perkawinan memerlukan rancangan strategi khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip diatas. Prinsip-prinsip yang melandasi setiap perkawinan kadang-kadang dibuat secara sistematis dan eksplisit, tetapi menjelaskan strategi yang diambil adalah aturan yang paling baik. Aturan-aturan

yang sudah jelas kadang-kadang dilanggar, misalnya ketika tidak ada anak laki-laki dalam satu keluarga, maka anak perempuan boleh mewarisi tanah, sepanjang itu adalah strategy yang paling mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip diatas. Kaidah-kaidah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip itu adalah 'habitus', yang mengendalikan segi-segi kehidupan petani Bearn.

Anthony Giddens meletakkan pengetahuan orang akan aturan sosial dalam 'kesadaran praktis', sebagai lawan dari 'kesadaran teoritis' (Giddens, 1984: 21-3; 90). Kesadaran praktis mengatur bagaimana untuk bertindak sepantasnya pada sebuah situasi (disini Giddens meminjam analisis Wittgenstein tentang memahami). Ini bukan pengetahuan proporsional, tapi pengetahuan 'tahu-bagaimana'. Ini dipelajari, tetapi tidak direnungkan. Tampaknya kebanyakan kaidah yang kita pegang diperoleh begitu saja dari meniru orang lain. Proses ini jelas melibatkan penggunaan beberapa abstraksi atas praktek yang diamati, agar aturan yang sesuai dapat diterapkan dalam situasi yang baru. Kita tampaknya mempelajari perilaku sosial seperti kita belajar bahasa, kita mempelajari bagaimana menggunakan aturan-aturan yang relevan tanpa harus mengidentifikasi aturan-aturan itu. Ini adalah bentuk pengkondisian sosial. Seseorang dapat, tentu saja, membuat suatu aturan dan mendiskusikannya, tapi orang biasanya hanya menirunya secara otomatis, lebih banyak karena kebiasaan.

Jika penjelasan perilaku konvensional ini akurat, maka pengaruh tradisi terhadap individu melibatkan proses perbandingan, abstraksi dan aplikasi; perbandingan situasi yang serupa, abstraksi prinsip yang relevan yang harus diikuti, dan aplikasi prinsip-prinsip dalam kondisi khusus yang dihadapi. Proses mengikuti kaidah-kaidah tidak sepenuhnya mengungkung pikiran seseorang. Tetapi respon konvensional tidak juga bisa dianggap

sepenuhnya rasional dan otonom, karena orang tidak selalu merenungkan aturan-aturan yang mereka ikuti. Kita semua punya kecenderungan alamiah untuk melakukan apa yang orang lain harapkan, setidaknya sampai batas tertentu. Mungkin karena alam bawah sadar kita menyadari bahwa lebih menguntungkan untuk melakukan itu.

Sering kali sulit untuk mengetahui apakah orang yang melakukan suatu tradisi melakukannya karena tahu dan menyetujui tradisi itu, atau apakah mereka bertindak tanpa menyadari bahwa mereka digerakan oleh kaidah-kaidah yang mereka pelajari dari masyarakat. Bayangkan, misalnya, 17 kaidah yang mengatur sabung ayam di masyarakat Bali, yang oleh Clifford Geertz disebutkan dalam '*Deep Play*' (Geertz, 1972: 207-10). Geertz mengatakan bahwa dia menyarikan aturan ini dari meneliti perilaku para penyabung dan dari pernyataan informan. Dia menyatakan bahwa 'para petani Bali sendiri menyadari dengan baik aturan-aturan ini, dan dapat, setidaknya pada seorang antropolog, menyebutkan sebagian besar aturan itu dalam istilah-istilah yang hampir sama dengan yang saya buat (hlm. 210). Meskipun begitu, seseorang dapat membayangkan banyak orang Bali mengikuti aturan-aturan ini dengan hanya meniru dan melakukan praktek itu, tanpa pernah merumuskan aturan dibalikinya. Alangkah alamiahnya mengikuti sebuah aturan seperti ini, tanpa berpikir panjang; jika seekor ayam luar kampung bertarung dengan ayam lokal, maka anda harus mendukung ayam lokal'.

Tampaknya orang sering kali tidak sadar mengapa mereka bereaksi terhadap sebuah situasi sebagaimana mereka lakukan, tanpa berpikir apakah reaksi sesuai. Sedikit orang yang menyadari pengaruh pengkondisian sosial. Orang hanya sadar pada keterbatasan dan kesulitan yang mereka hadapi, dan bahwa respon yang

sesuai adalah tindakan yang sekiranya disetujui komunitas. Mereka secara alamiah cenderung untuk melakukan apa yang diharapkan masyarakat, tetapi tetap bebas untuk menentang harapan itu jika mereka mau, seperti yang dilakukan oleh para remaja.

Penjelasan Rasional Tindakan Kolektif

Sejarawan kadang-kadang menjelaskan tindakan kolektif dengan mengatakan bahwa masyarakat dipengaruhi oleh ideologi, yang mengarahkan pikiran mereka sehingga mereka merespon suatu situasi dengan cara yang sama.

George Rude telah membahas beberapa penyebab tindakan kolektif dalam bukunya *Ideology and Popular Protest* (1980). Dia menyebutkan dua macam ideologi yang mengarahkan perilaku kelompok: keyakinan tradisional “inherent” mengenai hak-hak manusia, dan sistem kerangka berpikir yang merupakan doktrin terstruktur yang disusun oleh seorang ahli.

Contoh keyakinan ‘inherent’ adalah apa yang terjadi di Eropa pada abad XIX, yaitu keyakinan para petani atas hak atas tanah, keyakinan penduduk kota untuk membeli roti pada tingkat harga yang “adil”, dan keyakinan yang menyebar luas mengenai kemerdekaan. Keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang sudah menjadi *mentalité* alamiah manusia, dan ini menjelaskan terjadinya banyak demonstrasi, kerusuhan pangan, dan pemberontakan kaum petani. Rude mengatakan bahwa ini adalah motivasi yang konservatif, *backward-looking*, mengarahkan orang untuk memperjuangkan hak-hak lamanya ketika berhadapan dengan perubahan. Ideologi semacam ini menjadi banyak menjelaskan reaksi orang terhadap suatu situasi, sebagaimana telah digambarkan pada bagian sebelumnya.

Tipe ideologi kedua, dirumuskan oleh pemikir politik,

forward-looking, menjustifikasi perubahan yang akan memenuhi hak-hak suatu kelompok. Gagasan Rousseau, Taine dan Marx telah diketahui menginspirasi gerakan revolusi. Menurut Rude, untuk dapat diterima, teori-teori itu harus sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat, dan gagasan-gagasan itu harus dianggap dapat memperbaiki kondisi yang sudah ada. Teori-teori itu biasanya dimodifikasi oleh mereka yang menggunakannya, supaya sesuai dengan tuntutan-tuntutan khusus mereka (Rude, 1980, bab 2; lihat juga Rude, 1981, bab 4). Pada saat revolusi Prancis, Rude mengamati, ada dua ideologi yang dipakai: “pada pemberontakan pada Mei 1795 orang menggunakan topi dan baju bertuliskan slogan ‘konstitusi 1793’ dan ‘roti’” (1981, hlm. 220).

Menarik untuk melihat bahwa analisa Rude cocok dengan penjelasan Bernard Bailyn’s mengenai revolusi Amerika dalam *The Origin of American Politic* (1979). Bailyn memulai bukunya dengan sebuah catatan tentang keyakinan inheren tradisional pada abad XIX di Amerika: “titik awalnya adalah berkembangnya lingkungan intelektual di kalangan politikus, dimana hlm itu menjadi suatu bagian budaya” (hlm. 14-15). Ada sikap arogansi para perumus konstitusi Inggris, yang memicu perjuangan abad 17, yang akhirnya menjamin kebebasan individu dengan menyeimbangkan hak raja, kaum bangsawan dan dewan perwakilan rakyat. Keseimbangan itu menghindarkan dari nafsu jahat tirani, oligarki dan aturan mafia. Bailyn kemudian menggambarkan literatur yang dihasilkan kelompok oposisi di Inggris, terutama pada masa rejim Walpole, artikel yang ditulis oleh John Trenchard dan Thomas Gordon (‘Cato’) di sayap kiri, dan tulisan Viscount Bolingbroke, dalam *The Craftsman*, di sayap kanan. Kedua belah pihak menyerang pemerintahan Walpole yang dituduh telah banyak menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat

demi kepentingan pribadi. Bailyn mengatakan kecepatan pihak koloni Amerika dalam mengumpulkan artikel oposisi yang berisi protes dan memasukan gagasan-gagasan itu kedalam persepsi masyarakat sangat mengagumkan (hlm. 54). Dia mengatakan, alasan mengapa propanda ini menarik perhatian, adalah karena rakyat Amerika marah kepada gubernur kerajaan Inggris yang memveto undang-undang koloni, membubarkan dewan perwakilan rakyat daerah, mengangkat dan memecat hakim, bahkan mengadili, dan memamerkan kekuasaan prerogatif lainnya. Selain itu, penyerangan otoritas pemerintah Inggris dijustifikasi sebagai tindakan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.

Buku Bailyn disusun untuk menjelaskan mengapa terjadi revolusi Amerika (*ibid.*, hlm. 13), terutama untuk menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin revolusi sendiri adalah penyebab terjadinya ledakan revolusi tersebut (hlm. 12). Bailyn secara gamblang menyebutkan bahwa para pemimpin itu bertanggung jawab terhadap revolusi secara keseluruhan. Dia mengatakan bahwa pandangan mengenai pemerintahan Inggris yang digambarkan oleh "John Adams, dan terus menerus dielaborasi, dari 1765 sampai 1775, sebagaimana juga dilakukan oleh Samuel Adams dan Thomas Jefferson (hlm. 12). Gerakan revolusi biasanya dilihat sebagai permulaan peristiwa yaitu penolakan undang-undang perangko, memuncak pada saat terjadinya deklarasi kemerdekaan tahun 1783, dan diakhiri dengan perjanjian damai pada 1783. Bailyn menjelaskan mengapa warga Amerika menginginkan berpisah dari pemerintahan Inggris. Yang tidak dia jelaskan adalah mengapa rakyat Amerika memilih bentuk pemberontakan itu dan tidak yang lain. Dia menjelaskan peristiwa pemberontakan dengan satu penggambaran. Penjelasan rasional dibuat, sebagaimana layaknya sebuah penjelasan sebab-akibat,

untuk disesuaikan dengan aspek-aspek dalam tindakan-tindakan subyek sejarah yang secara khusus menarik perhatian sejarawan.

Untuk menjelaskan bentuk khusus tindakan kolektif, sejarawan biasanya harus menyajikan fakta rinci mengenai keyakinan yang berkembang pada saat itu, hasrat dan rencana-rencana orang yang terlibat, yang mengarahkan perilaku mereka. Fakta ini biasanya disampaikan dalam pertemuan kelompok, sering kali berupa rekomendasi dari pimpinan kelompok. Salah satu peristiwa pemberontakan selama revolusi Amerika adalah peristiwa yang terkenal dengan pesta teh Boston (Boston Tea Party). Jika seorang sejarawan ingin menjelaskan mengapa pada sore, 16 Desember 1773, sekitar 50 penduduk Boston, berpakaian Indian, membajak 3 kapal Inggris dan membuang sekitar 300 peti berisi teh yang rencananya akan dibawa ke pelabuhan Boston, maka penjelasan Bailyn hampir tidak memadai. Penjelasan Bailyn tidak menjelaskan mengapa bentuk pemberontakan itu yang dipilih. Untuk menemukan penjelasan mengapa penduduk Boston memutuskan untuk membuang teh orang Inggris, orang mungkin harus melihat kembali buku Robert Middlekauf berjudul *Glorious Cause, the American Revolution, 1763-1784* (1982). Penjelasan secara gamblang merekonstruksi pikiran orang-orang yang terlibat. Menurutnya, mereka bereaksi terhadap undang-undang yang mengatur perdagangan teh yang dikeluarkan bulan Mei 1773. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan India timur menjual langsung produk tehnya ke Amerika, tanpa melalui perantara Inggris atau membayar pajak, yang kemudian hlm itu menurunkan harganya dibawah teh dari Belanda yang tidak pernah dikenakan pungutan-pungutan tersebut. Orang Amerika telah berhenti membeli teh dari Inggris sementara pemerintahan Inggris tetap memungut pajak 3 pound-3 pence. Biaya ini sangat merugikan

perusahaan India Timur. Perjanjian baru telah dibuat untuk membuat teh Inggris kembali menarik minat orang Amerika. Tetapi undang-undang perdagangan teh tetap menuntut orang Amerika untuk membayar pajak, yang tentu saja memicu kemarahan. Hal inilah yang menyebabkan penduduk Boston dan lainnya menolak pengimporan teh dari Inggris. Mereka melihat perjanjian itu sebagai skenario untuk menipu Amerika, dengan membujuk mereka supaya menerima ketentuan pajak. Pada sebuah pertemuan di Boston pada suatu sore, banyak warga menolak untuk menerima impor teh dari Inggris dan membayar pajak.

Martin Selinger membedakan 'ideologi fundamental', yaitu seperangkat prinsip-prinsip mendasar teori politik, dengan 'ideologi operasional', yaitu prinsip-prinsip prudensial, yang dibuat untuk menjustifikasi suatu kebijakan khusus (Thompson, 1984, hlm. 79). Ketika sekelompok orang bersatu melakukan sebuah tindakan kolektif, mereka biasanya menerima argumentasi pemimpin mereka. Argument itu biasanya terdiri dari pernyataan mengenai prinsip-prinsip, dan juga petunjuk tindakan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip itu. Argumen itu memberikan semacam pembenaran ideologis terhadap tindakan kolektif. Ideologi ini biasanya terkandung dalam grand ideology yang familiar bagi orang-orang yang terlibat. Sebuah deskripsi ideologis, mengenai prinsip politik ideal tidak dengan sendirinya menyebabkan terjadinya suatu tindakan. Pertimbangan moral dan pragmatis juga penting dalam menentukan tindakan apa yang akan dilakukan, sebagaimana dikatakan oleh Michael Oakeshott dalam '*Rationalisme in Politic*' (Oakeshott, 1962; cp. Rayner, 1980). Tetapi sebuah ideologi dapat menentukan tujuan-tujuan, dan mengarahkan serta melegitimasi tindakan.

Ideologi dapat memberikan alasan terjadinya suatu tindakan,

khususnya dengan menentukan tujuan-tujuan bersama. Tujuan-tujuan itu dapat dijadikan landasan dalam menjelaskan alasan terjadinya tindakan kolektif, seperti sebuah revolusi atau pemberontakan. Apakah itu berarti sejarawan menganggap orang yang merespon ideologi sebagai orang yang berpikir rasional dan otonom? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperhatikan perbedaan dua konsep ideologi yang diidentifikasi oleh John B. Thompson. Yang *pertama*, dia menyebut 'konsep netral', yang melihat ideologi hanya sebagai sebuah keyakinan tentang lembaga dan praktek-praktek. Yang *kedua* adalah 'konsep kritis', yang menganggap ideologi sebagai 'terkait erat dengan proses mempertahankan hubungan kekuasaan yang asimetris-yaitu proses mempertahankan dominasi'. (Thompson, 1984: 4). Thompson memilih konsep kedua, yang disarikan dari ajaran Marx dan Engels. Menurut pendapat ini, ideologi adalah teori-teori mengenai kewajiban sosial yang dirancang oleh kelas yang berkuasa untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaannya. Konsekuensinya, ideologi semacam itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dimana telah terjadi ketidakadilan dalam sistem, tetapi hanya menunjukkan adanya 'kesalahan kesadaran' dalam sifat masyarakat. Kelas yang berkuasa menggunakan superioritas ekonomi dan politiknya untuk mengukuhkan ideologinya itu dengan segala cara: lewat hukum, pendidikan, literatur, dan media masa. Hasilnya, ideologi semacam ini menjadi propaganda, alat untuk dominasi politik.

Jelas orang yang bertindak dilandasi oleh ideologi semacam ini telah bertindak tidak rasional dalam dua hal: *pertama*, mereka menerima seperangkat keyakinan yang jelas salah. Dan *kedua*, mereka mengikuti keyakinan-keyakinan itu, bukan karena mereka menilai itu secara rasional, tetapi karena mereka telah digiring

untuk menerimanya oleh pihak yang otoritasnya mereka hormati. (lihat Boudon, 1989, bab 4 untuk diskusi masalah ini).

Thompson memilih konsep ideologi kritis sebagai dasar sebuah dominasi politik. Ideologi biasanya memihak kepentingan mereka yang menyebarkannya, tetapi itu tidak berarti bahwa pemihakan kepentingan adalah satu-satunya fungsi ideologi atau bahkan fungsi utamanya. Ideologi sering dibuat untuk menjustifikasi lembaga sosial, praktek dan kebijakan-kebijakan. Ideologi dapat diterapkan, tidak hanya pada teori politik, tetapi juga dalam teori ekonomi, teori sosial, bahkan dalam pendidikan dan agama. Seperangkat keyakinan dalam masyarakat bisa benar, dan tetap digunakan untuk melegitimasi program sosial tertentu. Ideologi juga tidak selalu dirancang untuk melanggengkan kekuasaan kelompok yang sedang berkuasa. Saya dapat menggunakannya untuk mengkritik pemerintahan yang sedang berjalan, atau bahkan untuk menjustifikasi revolusi politik, sebagaimana sudah saya sebutkan. Dengan kata lain, 'konsep netral' ideologi adalah sebuah konsep yang luas, dan 'konsep kritis' hanyalah sebuah kasus khusus dalam konteks luas.

Jika sebuah tindakan diarahkan oleh sebuah ideologi yang tidak mempertanyakan struktur masyarakat, tetapi hanya menawarkan justifikasi pada beberapa lembaga dan praktik, maka tindakan itu selalu bersifat irasional. Orang yang terlibat mungkin telah menguji ideologi itu dengan kritis, dan mempunyai alasan yang bagus untuk menilainya sebagai ideologi yang benar. Bahkan jika sejarawan berpendapat alasan-alasan yang digunakannya salah, tidak berarti orang yang mengikuti ideologi itu bertindak irasional dari sudut pandang mereka. Masalahnya adalah orang yang bertindak berdasarkan sebuah ideologi sering kali tidak kritis, dan menerimanya hanya karena rasa hormat terhadap orang yang menyebarkannya, dan

keuntungan yang bisa diperoleh jika mendukungnya. Sebagaimana dikatakan Boudon, mereka yang mengikuti seorang pemimpin dalam melakukan perubahan sosial sering kali tidak bisa menilai kebenaran ideologi tersebut, karena mereka tidak mempunyai informasi yang relevan untuk melakukan itu. (Boudon, 1989: 95-6). Tetapi mereka tetap bertindak berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan pada mereka, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak rasional dan otonom.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa mereka yang aktif mensosialisasikan sebuah ideologi sering kali mengharapkan komitmen emosional dan rasional dari para pengikutnya. Setelah mempelajari dampak penggunaan teknik propaganda modern oleh diktator di Eropa sebelum dan selama perang dunia kedua, sejarawan 'revisionist' James G. Randall, dan Avery Craven, menemukan kesamaan penyalahgunaan status politik untuk membakar kemarahan publik pada tahun-tahun sebelum pecahnya perang sipil Amerika.

Dengan pernyataan itu, jelas Randal meyakini bahwa politikus Amerika sering mengeluarkan pernyataan ideologis yang irasional dan mengobarkan fanatisme yang kuat pada pengikutnya. Kedua belah pihak, Selatan dan Utara, menciptakan kepanikan dan ketakutan terhadap pihak lain. Dengan termakan propaganda itu, orang bertindak irasional, persis seperti orang termakan propaganda Nazi: orang German menerima keyakinan irasional mengenai kaum Yahudi, dan superioritas ras Aria (Godhagen, 1996). Padahal informasi tersedia bagi mereka, dimana mereka sebetulnya dapat mengkritisi pernyataan-pernyataan pemimpin mereka tersebut.

Jadi, ideologi itu sering tidak benar, dan mereka yang menerimanya bertindak sangat irasional. Emosi sering menyebabkan irasionalitas, dalam bentuk yang sudah kita kenal. Jika orang sangat

menginginkan atau takut terhadap keadaan tertentu, mereka cenderung mudah menerima pernyataan tentang suatu keadaan tanpa berpikir kritis, dan bertindak tanpa banyak merenungkannya dulu (lihat McCullagh, 1990). Oleh karena itu, emosi sering memberi penjelasan yang tepat tentang irasionalitas. Pihak Selatan sangat takut diserang atas hak mereka untuk mempunyai budak, dan mereka akan melakukan apa saja untuk menahan pihak Utara, yang diwakili oleh Lincoln dan partai Republik di pantai, walaupun sebenarnya ancaman terhadap pemerintahan Selatan sebelum pecah perang sipil tidak besar. Orang dengan amarah dapat bertindak rasional, tapi yang sering kali terjadi tidak. Salah untuk beranggapan bahwa mereka yang bertindak berdasarkan ideologi selalu bertindak rasional dan otonom. Mereka sering bertindak untuk suatu alasan yang sebetulnya dapat mereka ketahui kesalahannya.

Penjelasan yang Mengasumsikan adanya Kepentingan Bersama

Cara lain dimana sejarawan menjelaskan tindakan kolektif adalah dengan mengasumsikan bahwa mereka melakukan itu untuk mengejar keuntungan pribadi. Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa orang ingin memaksimalkan keuntungan, khususnya keuntungan ekonomi. (untuk melihat diskusi yang lebih jelas mengenai masalah ini silahkan lihat Little, 1991, bab 3,7). Teori ekonomi juga mendukung asumsi ini. Walaupun demikian, kepentingan manusia bukan hanya kepentingan ekonomi, tetapi termasuk juga hal-hal yang meningkatkan kesejahteraannya, seperti kesehatan, seks dan persahabatan, status sosial dan kekuasaan, serta karir (lihat , hlm 226-31).

Asumsi yang menyatakan bahwa orang bertindak atas kepentingan pribadi dapat memberikan penjelasan yang masuk

akal atas terjadinya perilaku kolektif. Misalnya, penjelasan mengenai mengapa sekelompok orang Jerman mendukung partai sosialis nasional pimpinan Adolf Hitler walaupun ideologinya itu berbahaya dan tidak masuk akal, adalah karena beberapa program partai tersebut menguntungkan kelompok orang itu. Kelompok pengusaha kecil dan seniman, yang menderita selama depresi ekonomi di akhir 1920, berharap partai itu akan melindungi mereka dari pengusaha kapitalis bermodal besar dan dari serikat buruh; tahun 1932 sekelompok besar tuan tanah dan pemilik pabrik melihat partai sebagai pertahanan melawan komunisme; dan kaum muda yang frustrasi karena susah mencari pekerjaan dan kegagalan partai lain mengatasi hlm itu, merespon idealisme nasionalisme dan heroisme yang didengungkan oleh propaganda Nazi. Selain itu, partai juga memenuhi kepentingan ekonomi sebagian besar kelompok masyarakat (lihat Stachura, 1983: 20-3; dan lihat Schoenbaum, 1967: 70). Bahkan tanpa bukti dokumenter yang cukup, penjelasan ini tampak sangat masuk akal.

Raymond Boudon beralih pada penjelasan dalam kerangka pemenuhan kepentingan pelaku sebagai penjelasan alternatif dari penjelasan untuk melindungi hukum. Dia mengatakan bahwa tindakan-tindakan haruslah dilihat mempunyai fungsi 'adaptasi' bagi pelakunya dalam situasi itu (Bodon, 1986: 30). Dan untuk rasional dalam konteks luas (hlm. 51). Dia juga memilih pendekatan ini. Dalam bukunya yang terdahulu, Boudon menjelaskan tindakan kolektif dengan mengacu pada pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan pelaku. (Boubon, 1982: 9, 153-4). Tetapi karena pilihan dan tujuan pelaku sulit untuk diketahui, dia berpendapat bahwa cukup dengan melihat respon yang, jika seseorang ditempatkan pada situasi itu, dia akan melakukan hal yang sama.

Untuk mengetahui kepentingan pelaku, Boudon memberi

perhatian khusus pada situasi yang dihadapi pelaku. Ini memungkinkannya untuk menyimpulkan alasan orang melakukan suatu tindakan dengan lebih rinci. Misalnya, Webber menyatakan bahwa kapitalis mengambil ide Calvinisme karena doktrin itu mendukung keinginan mereka untuk bekerja keras dan memaksimalkan kemakmuran. Tetapi lebih banyak lagi yang bisa dijelaskan, menurut Boudon, jika sejarawan meneliti situasi khusus pada abad 16, sebagaimana dilakukan oleh Trevor-Roper. Misalnya, pengusaha di kota perdagangan yang cukup besar, seperti Milan dan Anwerp, yang menganut agama baru, melihat kepentingan mereka untuk bergerak menghadapi gerakan counter-reformasi untuk membebaskan kota-kota seperti Amsterdam (hlm. 147-9).

Sosiolog telah mengembangkan model perilaku rasional, terutama perilaku ekonomi rasional, berdasarkan asumsi bahwa orang selalu bertindak atas kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini telah membuktikan asumsi yang berguna untuk memprediksi perilaku ekonomi, sedemikian rupa sehingga penyimpangan dari asumsi itu akan memicu penyelidikan lebih lanjut. Misalnya, sudah terbukti bahwa orang tidak akan memberi banyak untuk memperoleh sesuatu/barang, jika dia dapat memperolehnya dengan memberi sedikit. Seorang pekerja tidak akan membayar iuran serikat buruh, jika dia masih tetap akan menerima manfaat dari aktifitas serikat buruh tersebut dari kontribusi pegawai lain. Lalu mengapa, orang mau mengorbankan miliknya untuk kepentingan kelompok, jika dia tidak memperoleh keuntungan pribadi dari tindakannya itu? Mengapa tidak banyak orang menjadi "*free riders*"?

Untuk mempertahankan asumsi bahwa orang secara umum bertindak disebabkan oleh keuntungan ekonomi pribadi, sosiolog telah meneliti motif kepentingan pribadi kepada orang-orang yang

mendukung kepentingan kelompok. Russell Hardin, misalnya, telah menunjukkan bahwa ketika aktifitas kelompok sedang berlangsung, orang tergerak untuk mendukungnya dengan berbagai macam kontribusi positif dan negatif. Serikat buruh dapat memberikan fasilitas/ manfaat bagi anggotanya, dan dapat juga menggagalkan jaminan sosial bagi mereka yang menolak untuk bergabung. Tekanan sosial seperti itu hanya berlaku efektif pada komunitas tertutup. Akan lebih sulit lagi menjelaskan bagaimana orang akan melakukan suatu kerjasama jika kita berasumsi bahwa orang mengutamakan kepentingan pribadinya. Hardin mengatakan bahwa ketika suatu hubungan kerjasama antara beberapa orang sedang berlangsung, adalah tindakan yang rasional bagi mereka untuk bekerjasama untuk tujuan bersama, sepanjang mereka setuju jika salah satu pihak melakukan kecurangan maka pihak lain akan menahan keuntungan orang itu. (Hardin, 1982: 13, 145ff., 193-4).

Michael Taylor telah mendukung pandangan Hardin, menekankan terutama pada sanksi sosial pada komunitas tertutup. Menurutnya, jika orang mendapatkan keuntungan dengan bergabung dengan suatu kelompok, atau akan dirugikan jika tidak bergabung, maka dia cenderung akan bergabung. Taylor menyimpulkan bahwa orang miskin cenderung untuk bergabung dengan suatu kelompok atas dasar keuntungan pribadi dibanding orang kaya. Jadi, keuntungan pribadi tampaknya cenderung menjadi alasan terjadinya revolusi dan pemberontakan kelas miskin (Taylor, 1988, hlm. 90-2). Tetapi Hardin dan Taylor berpendapat bahwa partisipasi dalam suatu kelompok tidak selalu dimotifasi oleh keuntungan pribadi. Taylor mengatakan bahwa terkadang orang berpartisipasi karena masalah prinsip, kadang untuk alasan altruistik, juga terkadang karena senang saja (hlm. 87-90). Tidak dapat dibantah, bahwa keuntungan pribadi adalah motif yang

paling kuat yang mengatur perilaku manusia, tapi itu bukan satu-satunya. Meskipun begitu, jika tidak ada bukti lain yang masuk akal akan adanya motif lain, maka tetap langkah yang paling beralasan bagi sejarawan adalah memperhatikan motif pemenuhan tujuan/kepentingan pribadi dalam menjelaskan perilaku manusia.

Secara umum, sejarawan berasumsi bahwa orang dapat mengetahui suatu keadaan dimana kesejahteraan mereka dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dan secara sadar merumuskan tujuan-tujuan yang sesuai dengan kepentingan mereka tersebut. Tapi ada juga bukti yang menunjukkan bahwa orang terkadang bertindak demi kepentingan pribadi, tanpa menyadari fakta itu (lihat McCullagh, 1991a). Tampaknya orang dapat secara tidak sadar dipengaruhi oleh kepentingan mereka, dan mengejar kesejahteraannya itu sambil mengira bahwa mereka bertindak demi alasan lain. Marx dan Engels yakin bahwa orang mengejar keuntungan ekonomi pribadi walaupun mereka beralasan bahwa mereka bertindak untuk alasan hukum, moral atau religius. Perumusan ideologi untuk melegitimasi perilaku ini, menurut Engels, dilakukan dengan sadar tetapi berdasarkan kesadaran yang salah (dikutip oleh Eyerman, 1981: 75), menekankan bahwa orang yang mengkonstruksi suatu ideologi terkadang tidak sadar akan fakta bahwa mereka melakukan itu untuk mengejar keuntungan pribadi. Pada sisi lain, Marx berpendapat bahwa proses perubahan sejarah dipercepat jika orang disadarkan akan keuntungan yang diperoleh dari suatu situasi, dan didorong untuk memperjuangkannya. Dalam *Manifesto of the Communist party*, misalnya, dia menulis tentang komunis di Jerman: mereka tidak pernah berhenti, walaupun sebentar, untuk membakar semangat kelas pekerja dan menggunakan cara tercerdik untuk menyadarkan mereka tentang adanya perbenturan kepentingan antara kaum

borjuis dan proletar, dalam rangka ...setelah kejatuhan kelas menengah di Jerman, perlawanan terhadap kaum borjuis itu sendiri dapat segera dimulai (Marx dan Engles, 1888: 90).

Sebagian besar sosiolog lebih menyukai penjelasan tindakan kolektif dalam kerangka pencapaian kepentingan kelompok yang dinyatakan (*articulated*). Misalnya, sebagai respon terhadap '*Breakdown theory*', yang melihat pemberontakan sebagai konsekuensi alamiah penentangan terhadap kekangan-kekangan sosial, Tilly bersaudara pelan-pelan menyusun argumentasi untuk melawan teori itu. *Counter-argument* ini menekankan pada pentingnya solidaritas dan pernyataan kepentingan (*articulated interest*) daripada salah urus negara atau kesulitan ekonomi. Teori ini menganggap kekerasan kolektif sebagai produk sampingan tindakan kolektif,—produk sampingan, karena kekerasan berkembang dari interaksi kelompok yang melakukan suatu tindakan kolektif. Pada sebagian besar kasus, kekerasan terjadi ketika satu kelompok menolak menerima klaim kelompok lain (C.L. dan R. Tillym 1975: 243).

Pernyataan kepentingan orang tidak selalu sesuai dengan tujuan pribadi mereka yang real, karena orang sering salah menentukan apa yang penting dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Tetapi pernyataan kepentingan pribadi sering dapat dengan baik menjelaskan perilaku seseorang. Oleh karenanya Charles Tilly lebih memilih penjelasan tindakan kolektif berdasarkan kerangka pemenuhan pernyataan kepentingan pelaku, tidak peduli apakah pernyataan kepentingan itu sama dengan kepentingan pribadi mereka atau tidak. Dia tidak sepenuhnya menghapuskan kemungkinan bahwa orang mengejar keuntungan pribadi, sebagaimana disimpulkan oleh Marx, tapi Tilly mengatakan bahwa dia akan 'memperlakukan hubungan perilaku

sebagai petunjuk mengenai kepentingan yang akan dikejar orang dalam jangka pendek dan jangka panjang. (Tilly, 1978: 61). Dengan kata lain, dia yakin kepentingan pribadi mempengaruhi perilaku seseorang, walaupun tidak dalam setiap kejadian.

Charles Tilly juga menemukan beberapa kesulitan untuk menjelaskan tindakan dengan mengacu pada kepentingan pribadi. Kepentingan jangka pendek bisa jadi berbeda dengan kepentingan jangka panjang, dalam situasi seperti itu, yang mana yang diasumsikan akan diacu oleh seseorang bersifat operatif? John Elster telah mencatat beberapa situasi yang bertolak belakang: antara perubahan atau status quo, sementara atau fundamental, ekonomi atau politik' (Elster, 1983: 60). Mungkin saja terjadi situasi dimana kepentingan pribadi meliputi semua hlm tersebut diatas, namun itu tidak mempersulit penjelasannya. Dalam kondisi semacam itu, sejarawan akan memilih salah satu penyebab yang memberikan penjelasan paling pas atas tindakan yang dilakukan dalam situasi tertentu.

Ilustrasi Karl Menheim tentang pentingnya kepentingan pribadi dalam menjelaskan perilaku kelompok sangat mengesankan. Dia mengidentifikasi 5 filsafat politik, atau yang sekarang dikenal dengan istilah 'ideologi', dan memperlihatkan bagaimana masing-masing ideologi itu mendasari kepentingan-kepentingan kelompok yang menganutnya. Kelima teori itu adalah birokrasi konservatif, sejarah konservatif, pemikiran liberal-demokratik borjuis, konsep sosialis-komunis, dan fasisme. Sebagai contoh, dalam memberi komentar terhadap konservatisme sejarah yang dinyatakan oleh Burke dan banyak orang Jerman konservatif pada abad XIX, yang mengklaim bahwa pemerintahan paling baik jika diserahkan pada dinasti keluarga yang sudah lama berpengalaman dalam memegang kekuasaan.

Manheim menulis: “Akar sosiologis pernyataan ini dengan segera tampak jelas. Itu memperlihatkan ideologi bangsawan yang dominan di Inggris dan Jerman, dan ideologi itu dikembangkan untuk melegitimasi kepemimpinan mereka dalam pemerintahan. Elemen *je suis quoi* dalam politik, yang hanya dapat diperoleh dari banyaknya pengalaman, dan yang menunjukkan bahwa itu adalah aturan bagi mereka yang mempunyai pengalaman memegang kepemimpinan politik dari generasi ke generasi, dimaksudkan untuk menjustifikasi pemerintahan oleh kelas bangsawan. Hal ini menjelaskan situasi dimana kepentingan sosial suatu kelompok mengakibatkan anggota kelompok tersebut sensitive terhadap aspek kehidupan sosial tertentu yang pada situasi lain tidak terjadi (Manheim, 1960: 107).

Menurut pendapat Manheim ‘setiap bentuk pemikiran sejarah dan politik ditentukan oleh kondisi sosial pemikir dan kelompoknya’ (hlm. 111). Asumsi bahwa orang terkadang melakukan tindakan untuk mengejar keuntungan pribadi dengan tidak menyadari motivasinya itu, menjelaskan suatu kondisi dimana persepsi seseorang berbeda dengan perilaku mayoritas orang. Bayangkan seorang politisi yang pertama kali datang kesuatu daerah untuk kampanye menjelang pemilu, dimana dia memperlihatkan kepedulian pada kesejahteraan masyarakat di daerah itu dengan menjanjikan untuk membangun ini itu jika dia menang. Mungkin saja si politisi merasa dia betul-betul peduli terhadap kesejahteraan penduduk di daerah itu, dan tidak menyadari kepentingan pribadi di balik perilakunya itu. Tentu saja, masa pemilih di daerah itu akan bersikap skeptis terhadap kebaikan si politisi. Pada kenyataannya sekarang ini kita mencurigai adanya kepentingan pribadi dibalik setiap pernyataan politik. Sangat jarang sekelompok orang dalam jumlah besar bertindak semata-mata karena ‘ikhlas’. Ketika rakyat Amerika mengatakan mereka

memperjuangkan hak-hak untuk merdeka, tidak ada keraguan, kita boleh curiga ada kepentingan ekonomi dan politik dibaliknya. Disebutkan bahwa petani di Virginia mempunyai hutang lebih dari 2 juta pound kepada pedagang Inggris di awal pecahnya revolusi, 20 atau 30 kali lipat jumlah uang yang dimiliki Negara.

Dalam kasus politisi yang menyatakan kepeduliannya terhadap massa pemilih, orang yang sinis diantara kita cenderung untuk mencurigai bahwa keuntungan pribadi adalah satu-satunya motif, dan pernyataan kepedulian terhadap rakyat di daerah itu dibuat demi mengejar keuntungan tersebut. Dengan demikian, penjelasan penyebab perilaku politisi harus difokuskan pada kepentingan pribadi, dan bukan atas pernyataan niat baiknya akan membangun berbagai prasarana. Meskipun begitu, dalam banyak kasus, legitimasi masyarakat terhadap suatu perilaku mempengaruhi perilaku sendiri. Jika tindakan seseorang tidak dapat dibenarkan, mereka cenderung tidak akan melakukannya. Jika orang Amerika tidak menjustifikasi pemberontakan, tidak mungkin gagasan itu mendapatkan dukungan luas. Tetapi, sejarawan harus waspada akan pentingnya keuntungan pribadi sebagai sebuah motif, karena itu berlaku pada kebanyakan kasus. Bailyn melakukan penelitian khusus tentang landasan ideologi yang telah mendorong terjadinya revolusi, tetapi sejarawan lain memberikan penjelasan pasti bahwa keuntungan ekonomi dan politiklah yang harus diperhatikan.

Teori yang menyatakan bahwa orang berpikir rasional dan otonom didukung oleh fakta bahwa kebanyakan manusia dimotivasi, disadari atau tidak, oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Pettit enggan mengakui kekuatan motif pencapaian kepentingan pribadi dalam hidup kita. Dia terutama menentang pendapat bahwa motif keuntungan pribadi dapat berfungsi

di bawah sadar, yang menyebabkan itu sangat jarang terjadi. Tidak ada keraguan bahwa bisa terjadi seperti itu: kita adalah subyek penipuan diri mengenai hlm-hlm yang memotivasi diri. Tetapi gagasan bahwa hlm itu terjadi pada sebagian besar kita sepanjang waktu adalah keterlaluhan dan dibuat-buat. Berdasarkan rekonsiliasi ini, ongkos yang dibutuhkan untuk menerima teori pilihan rasional menjadi terlalu tinggi. Hal itu akan membutuhkan revisi mendalam atas pandangan kita bahwa manusia bertindak secara spontan (Pettit, 1993: 273-4).

Untuk menjelaskan peristiwa sejarah dengan teori pencapaian kepentingan kelas, harus diperlihatkan adanya solidaritas kelas, kesadaran kelas, kekuatan kelas, dan ada keterkaitan yang jelas antara tujuan kelas dan akibat yang dihasilkan gerakan itu dalam sejarah. Jika tidak, maka argumentasi itu tergelincir pada kesimpulan *post-hoc holistic* (Lloyd, 1986: 259). Tidak ada tindakan individu atau kelompok yang merupakan konsekuensi pasti dari kondisi sebelumnya. Orang selalu dapat memutuskan untuk mengejar tujuan berbeda dari tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan. Sejauh yang sejarawan dapat lakukan adalah mencari alasan-alasan yang paling mungkin atau yang pada akhirnya diambil oleh pelaku. Tugas mereka adalah menunjukkan penyebab timbulnya suatu tindakan, bukan untuk menunjukan besarnya peluang keterjadian suatu tindakan. Tapi kepentingan pribadi tidak hanya disimpulkan dari tindakan yang mereka tunjukkan, kepentingan-kepentingan itu juga harus masuk akal, dalam konteks keterbatasan sosial dan fisik si pelaku. Pada saat suatu kebutuhan semakin mendesak, semakin besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan untuk memperolehnya. Sehingga kadang-kadang tindakan kelompok sangat mungkin terjadi, ketika itu adalah respon bersama terhadap kebutuhan bersama yang

mendesak. Tetapi individu dalam satu kelompok bisa memilih untuk bertindak berdasarkan kebutuhan yang tidak terlalu mendesak. Dengan mengacu pada kepentingan bersama mungkin dapat menjelaskan perilaku kelompok secara akurat, walaupun itu tetap tidak menjelaskan mengapa tindakan itu dilakukan.

Tilly menyatakan bahwa publikasi ideologi biasanya dilakukan untuk mempercepat proses revolusi. Tetapi apa yang dijelaskan oleh sebuah ideologi adalah kemana arah revolusi itu menuju. Tilly lebih tertarik untuk menguraikan bagaimana suatu revolusi terjadi daripada menjelaskan bentuk khusus sebuah peristiwa dalam revolusi. Sebagaimana dia tulis dalam pengantar *From Mobilization to Revolution* (1978): 'saya akan selalu mulai mengilustrasikan peristiwa sejarah dari kondisi spesifik ... tetapi penjelasan berikutnya akan berfokus pada analisis perilaku kolektif (hlm. 5). Sampai batas tertentu, kepentingan kelompok pada kenyataannya dapat menjelaskan bagaimana terjadinya maupun arah sebuah revolusi. Tetapi kepentingan kelompok jarang dapat menjelaskan arah revolusi secara rinci. Hal ini tidak menjadi masalah, jika sejarawan menaruh minat yang kecil terhadap model penjelasan itu.

Sebagai kesimpulan, tindakan kolektif dapat dijelaskan sebagai reaksi rasional sejumlah orang terhadap kesulitan bersama berdasarkan seperangkat keyakinan dan nilai-nilai yang sama. Tetapi sering kali perilaku kolektif tidak serasional dan otonom seperti pernyataan di atas. Sering kali tindakan kolektif disebabkan oleh kebiasaan mengikuti aturan umum yang berlaku dalam masyarakat; melalui penerimaan ideologi tanpa proses berpikir, atau melalui pengaruh kepentingan pribadi. Sejarawan secara umum harus mempertimbangkan semua kemungkinan ini ketika meneliti sebab-sebab terjadinya tindakan kolektif.

Model Interpretasi Sejarah II

MENILAI PENAFSIRAN PERISTIWA SEJARAH²*

Sejarawan sering kali menyusun narasi untuk menggambarkan peristiwa masa lampau dengan menggunakan penafsiran *colligatory* atau penafsiran general. Semua bentuk interpretasi ini dituntut untuk dapat dipercaya (*credible*), wajar (*fair*), dan jelas (*intelligible*).

Kredibilitas penafsiran peristiwa sejarah

Khalayak pembaca menuntut pemaparan sejarawan mengenai peristiwa masa lampau untuk dapat dipercaya, artinya sejarawan menyajikan cukup alasan untuk membuat pembaca mempercayai kebenaran penafsiran tersebut. Kita tidak bisa membuktikan bahwa suatu gambaran dunia mengandung kebenaran, karena tidak ada satu teori yang ideal dalam menjelaskan semua peristiwa yang terjadi di dunia. Tetapi ketika gambaran dunia itu didukung oleh agama, dan tidak ada alasan untuk menganggap gambaran itu salah, maka biasanya cukup berdasar untuk mempercayai bahwa gambaran dunia tersebut benar.

Ada beberapa jenis pemaparan sejarah yang dituntut untuk dapat dipercaya/kredibel, yaitu deskripsi yang masuk akal (*common sense*) atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan hubungan sebab-akibat, deskripsi pola-pola asosiasi/hubungan (*colligatory*) peristiwa-peristiwa masa lampau, dan deskripsi ringkas (*summary*) subyek historis. Dalam tulisan ini ingin diajukan beberapa kritikan atas kredibilitas jenis deskripsi peristiwa sejarah *colligatory* dan deskripsi

² Tulisan ini diterjemahkan dan disarikan dari C. Behan McCullagh, *The Logic of History* (New York, Routledge, 2004). hlm. 138-150.

ringkas. Ada empat kritikan utama atas kredibilitas kedua jenis penafsiran sejarah di atas, yang akan dijelaskan secara berurutan.

Siklus Hermeneutika

Interpretasi colligatory dan interpretasi ringkas atas peristiwa sejarah yang menggunakan definisi kata-kata tertentu dinilai benar jika peristiwa-peristiwa khusus yang diacu oleh penafsiran itu membenarkan penggunaan definisi kata-kata tersebut. Misalnya, jika suatu revolusi politik didefinisikan sebagai peristiwa yang berlangsung cepat dan seketika, disertai perubahan kekuasaan dalam pemerintahan dan konstitusi sebuah negara, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi revolusi politik di Inggris 1648, di Prancis 1789, dan Rusia 1917. Dalam ketiga kasus tersebut, pemerintahan kerajaan dihapus dan digantikan oleh pemerintahan republik.

Kritik yang pertama adalah bahwa fakta-fakta khusus yang membenarkan penafsiran umum pada kenyataannya dimaknai sesuai dengan penafsiran tersebut. Keberatan semacam ini diajukan oleh Robert Berkofer. Dalam bukunya *Beyond the Great Story*, dia mengatakan bahwa fakta-fakta khusus dalam sejarah mempunyai maknanya ketika fakta-fakta tersebut ditempatkan dalam konteks sejarah. “Masalah fakta sejarah”, dia menulis, “adalah dalam sejarah itu sendiri, dimana mereka merupakan konstruksi-konstruksi dan interpretasi-interpretasi peristiwa masa lalu. Bukti belum menjadi fakta sampai dia diberi makna berdasarkan suatu kerangka atau perspektif tertentu” (Berkofer, 1995: 53), sehingga fakta tidak mempunyai keberadaan yang independen di luar konteksnya. Berkofer menyadari bahwa sejarawan biasanya mempertahankan interpretasinya dengan mengacu pada ‘fakta’, sebagaimana kita lihat di atas, tetapi dia menganggap argumen semacam itu sebagai retorika kosong;

“analisa retorika modern; memasukan argumen yang logis dan tidak logis sebagai bagian dari presentasi sejarah untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya” (*Ibid.*, hlm.80 dan 101).

Kesalahan dalam argumentasi ini terdapat dalam asumsinya, yaitu karena peristiwa sejarah dimaknai berdasar konteksnya, maka konteks yang digunakan biasanya adalah penafsiran umum peristiwa itu sendiri. Jika demikian yang terjadi, maka kita menghadapi masalah siklus hermeneutika; kebenaran suatu penafsiran umum tergantung pada deskripsi peristiwa-peristiwa yang ditafsirkan, dan kebenaran deskripsi peristiwa-peristiwa itu tergantung pada penafsiran umum atas peristiwa-peristiwa tersebut. Namun demikian, makna dari peristiwa-peristiwa rasional (*common-sense*) didapat dari penilaian atas kelogisannya, dan dari konteks sehari-hari, jadi tidak terlalu tergantung pada penafsiran umum. Kredibilitas bukanlah fungsi interpretasi atas peristiwa yang terjadi.

Memang kadang-kadang signifikansi suatu bukti historis tergantung pada interpretasi kompleks peristiwanya. Hal ini berlaku pada interpretasi niat/ maksud tindakan seseorang, dimana hal itu ditentukan dengan menilai penjelasan niat dan maksud yang paling sesuai/ cocok dengan tindakan-tindakan pelaku, dalam konteks dimana tindakan itu terjadi. Tetapi sering kali, fakta historis bersifat independen dari interpretasi kompleks peristiwa ketika fakta-fakta itu terjadi.

Subyektifitas Perspektif Sejarawan

Ada dua versi kritikan atas subyektifitas sejarawan, keduanya tidak terlalu meyakinkan.

Kritik yang *pertama* berkaitan dengan perbedaan antara subyek yang diamati (*observable*), misalnya manusia dan aktifitasnya, dengan gagasan sejarawan atas pola-pola yang dibentuk oleh aktifitas tersebut. Interpretasi atas manusia dan aktifitasnya dapat

diuji kebenarannya, karena aktifitas-aktifitas itu telah terjadi di dunia. Tapi gagasan sejarawan mengenai pola yang dibentuk oleh aktifitas-aktifitas tersebut hanya ada dalam kepala sejarawan itu sendiri. Sehingga tampaknya deskripsi gagasan sejarawan tidak dapat mengacu pada apapun yang nyata di dunia. Gagasan-gagasan itu hanyalah ekspresi bagaimana peristiwa-peristiwa tampak dari sudut pandang sejarawan. Sebagaimana dikatakan ER. Ankersmit, "generalisasi tidak menampilkan kebenaran realitas socio-historis; generalisasi hanya merefleksikan kecenderungan kita untuk mengkonsepsi realitas dengan pola regularitas". (Ankersmit, 1983: 160). Dia mengatakan bahwa, "sejarah itu sendiri tidak mempunyai pola narasi ataupun struktur" (*ibid.*, hlm. 110). Menurut Ankersmit, "lanskap histories" tidak begitu saja *tersedia (given)* untuk sejarawan, mereka harus *membuatnya (construct)*.... struktur narasi adalah sebuah struktur yang "dipinjamkan" atau "dipakai" pada sejarah masa lalu, dan bukan refleksi struktur yang obyektif terjadi di masa lalu itu sendiri' (*ibid.*, hlm. 86).

Ankersmit tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut, bahkan cenderung untuk menyangkalnya (lihat McCullagh, hlm. 57-9). Ada banyak fakta sosial yang disimpulkan berdasarkan (*supervene*) peristiwa-peristiwa khusus, tetapi dianggap sama nyatanya dengan peristiwa itu. Misalnya, permainan sepak bola terdiri dari banyak perilaku tertentu, orang berperilaku menurut aturan-tertentu dalam konsteks fisik tertentu, tetapi tidak ada yang menyangkal bahwa permainan itu terjadi. Begitu pula, suatu pemilihan tergantung pada pemilih yang memberikan suara mereka melalui serangkaian tindakan, tetapi pemilihan itu dianggap cukup nyata terjadi. Begitu pula, suatu revolusi tergantung pada pola-pola perilaku tertentu, tetapi dapat dikatakan revolusi terjadi karena timbulnya perilaku tertentu. Tentu saja, konsep colligatory umum

ada dalam benak sejarawan, tetapi peristiwa yang digambarkan mereka dapat cukup nyata terjadi.

Kritikan yang *kedua* menolak obyektivitas penafsiran colligatory dan pola umum atas peristiwa sejarah dengan alasan bahwa sejarawan selalu menampilkan masa lalu dalam cara yang sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai mereka, sebagaimana bisa kita lihat dalam tulisan mereka mengenai topik tertentu, sehingga naif dan salah jika kita mengira interpretasi umum atas peristiwa sejarah bersifat obyektif dan kredible. Itulah argumen yang diajukan oleh Peter Novick dalam pengantar bukunya mengenai Histiografi Amerika yang berjudul *That Noble Dream* (Novick, 1988). Di dalamnya dia menulis bahwa konsep sejarah yang obyektif telah mesosialisasikan perbedaan yang keliru dan menyesatkan antara catatan sejarah yang “disimpangkan” oleh asumsi-asumsi dan maksud ideologis, dan sejarah yang bebas dari asumsi-asumsi tersebut (*ibid.*, hlm. 6).

Tidak ada keraguan bahwa sejarawan sering kali menaruh perhatian pada bagian peristiwa masa lalu yang paling menarik bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti pemaparan mereka menjadi tidak rasional dan salah, sebagaimana diasumsikan oleh Novick. Mereka yang menulis sejarah secara “*top down*”, sering kali membuat suatu pola penulisan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi kebanyakan sejarawan lebih berhati-hati mengecek penafsiran mereka dengan melihat fakta-fakta yang sudah diketahui, untuk menjamin kebenaran interpretatif mereka.

Kebanyakan Generalisasi atas Peristiwa Sejarah adalah Salah

Kritikan ini khususnya ditujukan pada penafsiran sejarah ringkas general (*general summary interpretation*), yang menyajikan struktur narasi tertentu. Generalisasi atas peristiwa sejarah sering

kali salah, karena mengabaikan pengecualian-pengecualian. Permasalahan ini khususnya terjadi pada interpretasi general summary, karena ruang lingkup peristiwa biasanya sangat luas, dan kemungkinan adanya fakta-fakta yang dihilangkan sangat besar. Interpretasi general yang tadinya dimaksudkan untuk memaparkan sejarah secara komprehensif, dengan memberikan data yang akurat dan seimbang atas subyek, sering dikritik karena penghapusan-penghapusan fakta-fakta tersebut.

Dalam tulisannya yang membahas revolusi Amerika, T.H. Breen menunjukkan ketidak-memadaiannya penjelasan peristiwa-peristiwa penting seputar revolusi. Biasanya peperangan antara Amerika dan Inggris dijelaskan timbul sebagai akibat pungutan pajak yang tidak berimbang oleh pemerintah Inggris, tapi dia mengatakan penjelasan ini kurang dapat menjelaskan suasana kebencian, nyaris paranoid, yang berkembang di kalangan warga koloni (Breen, 1997: 31). Bernard Bailyn menduga orang Amerika sangat khawatir adanya kemungkinan berkembangnya tirani dalam pemerintahan Inggris melalui pengadilan yang tidak jujur, dan mereka melihat penetapan pajak sebagai buktinya. Tetapi interpretasi itu, kata Breen, tampaknya tidak cukup menjelaskan perasaan terhina yang secara luas dirasakan orang Amerika pada saat itu. Model retorika yang tajam dan pedas yang digunakan oleh pemerintah Inggris menuntut kita untuk mempertimbangkan berkembangnya kecemasan diantara orang Amerika bahwa pihak Inggris secara sistematis sedang menempatkan mereka sebagai warga kelas dua. Keluhan orang Amerika bahwa saudara mereka (Inggris) telah memperlakukan mereka seperti "Negro" tidak bisa begitu saja dijelaskan sebagai bentuk oposisi politik.

Breen mengemukakan interpretasinya sendiri atas motif orang Amerika. Interpretasinya cukup menarik, tapi generalisasinya

sangat “bersih”, sehingga kita perlu curiga bahwa interpretasinya itu tidak akurat. Menurut Breen, sebelum 1760 Amerika menganggap diri mereka sebagai orang Inggris, atau sederajat dengan orang Inggris. Mereka percaya bahwa pihak Inggris pun menerima mereka sebagai mitra, sekutu dalam perang melawan Prancis, pembela setia melawan paham protestan, dan bersama-sama mendukung perluasan perdagangan dunia’ (hlm. 27). Dengan ditetapkannya undang-undang perangko (*stamp act*), orang Amerika tiba-tiba menyadari bahwa Inggris sama sekali tidak menganggap mereka sebagai mitra sederajat. Sumber kemarahan bukan hanya masalah penetapan pajak yang tidak seimbang, tetapi juga kesadaran baru bahwa mereka dianggap sebagai warga kelas-dua, dan dipandang rendah sebagai orang “kampung” yang tidak berhak mendapatkan kebebasan penuh (hlm 39). Setelah kesetiaan yang mereka berikan sebagai sekutu dalam perang 7 tahun, koloni merasa “dikhianati” (hlm. 31). Mereka menuntut kebebasan, untuk memulihkan harga diri, dan pada tahap ini mereka mengusung kata-kata tema liberalisme, yang belum pernah digunakan sebelumnya (hlm. 37). Teori liberal berutang pada awal tahap revolusi ini, dimana popularitasnya bermula dari penggunaannya sebagai strategi retorik. Liberalisme di kemudian hari melegitimasi deklarasi dan perang kemerdekaan. Dan kemudian negara baru memberikan identitas baru kepada warga Amerika.

Haruskah kita menerima interpretasi Breen ini? Breen berpendapat bahwa interpretasinya mencakup lebih banyak segi dan fakta peristiwa revolusi daripada teori lainnya. Namun demikian, ada tiga hal yang perlu dipertanyakan. *Pertama*, apakah semua orang Amerika mempunyai karakteristik yang sama sebagaimana digambarkan oleh Breen? Dalam hal ini apakah orang Amerika yang terlibat dalam perang melawan Inggris didorong motifasi yang kuat,

yaitu perasaan dikhianati dan direndahkan. *Kedua*, perlu diteliti apakah alasan tersebut adalah motivasi utama mereka melakukan revolusi. Saya setuju dengan Breen bahwa penjelasan sejarah yang dibatasi pada teori perjuangan hak-hak sipil kurang memberi penjelasan terhadap rasa amarah para pejuang revolusi. Tetapi amarah itu dapat dijelaskan sebagai kemarahan terhadap Inggris yang menguras kekayaan rakyat Amerika, kemarahan yang bukan hanya didasarkan pada pemikiran bahwa tindakan itu tidak adil, tapi juga oleh perasaan alamiah terusiknya kepentingan diri. Orang akan segera merasa marah apabila seseorang merampas uangnya. Kita harus mempertimbangkan adanya kompleksitas motivasi; alasan emosional dan rasional sama-sama berperan dalam memicu terjadinya suatu tindakan. Yang *ketiga*, seseorang dapat meneliti setiap tahapan utama dalam konflik untuk melihat apakah orang Amerika berperilaku sesuai dengan yang digambarkan oleh Breen, dan apakah tindakan mereka juga mempunyai motivasi lain. Cukup membingungkan bahwa Breen tidak mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam interpretasinya. Saya ragu bahwa kemarahan seperti yang digambarkan Breen dirasakan oleh semua rakyat Amerika, dan bahwa itulah motivasi utama terjadinya revolusi. Saya curiga Breen menyukai teori psikologi yang menerangkan peristiwa-peristiwa sebagai ekspresi emosi, dan dia menerapkannya dalam menjelaskan periode sajarah tersebut.

Kritikan Lyotard terhadap skema pemaparan sejarah secara garis besar (*grand narrative schemes*) ditujukan pada semua bentuk generalisasi, tanpa terkecuali (lihat McCullagh, 1998: 298-302). Daripada mengeneralisasi sejarah, Lyotard menganjurkan agar sejarawan membatasi pembahasannya ke dalam penjelasan mendalam peristiwa-peristiwa khusus. Saya curiga dia merekomendasikan itu karena dia meyakini bahwa generalisasi

biasanya dilakukan untuk melegitimasi penggunaan kekuasaan untuk menindas.

Generalisasi ringkas (*summary generalization*) tidak digunakan untuk menarik kesimpulan dari bukti atau menjelaskan tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tetapi interpretasi ini menekankan pada hubungan-hubungan yang dipandang signifikan. Jika kebanyakan orang Amerika sangat marah karena direndahkan oleh pihak Inggris sampai mendorong mereka untuk melakukan perlawanan, fakta ini mungkin relevan dengan fakta yang terjadi pada pemerintahan lain, yang memperlakukan satu bagian wilayah mereka lebih rendah dari yang lain. Begitu pula, jika agama menjadi alasan yang mendorong terjadinya perlawanan rakyat Inggris terhadap kerajaan, maka alasan tersebut bisa juga terjadi di negara lain. Fakta bahwa tidak semua rakyat Amerika marah terhadap Inggris, dan bahwa tidak semua rakyat Inggris memberontak terhadap kerajaan demi kebebasan beragama, tidak mengurangi signifikansi interpretasi generalisasi. Asalkan suatu tindakan dilakukan oleh sebagian besar orang maka dapat dikatakan fakta itu signifikan. Meskipun demikian, sejarawan tetap berkewajiban untuk membuat generalisasinya seakurat mungkin, untuk terhindar dari interpretasi yang menyesatkan.

Interpretasi Sejarah Biasanya Diperdebatkan

Sejarawan sering kali membangun reputasinya dengan cara menyerang penafsiran sejarah terdahulu dan sebagai gantinya mengajukan interpretasi baru. Kita sudah lihat contohnya pada perdebatan Breen mengenai Revolusi Amerika. Tidak ada keraguan bahwa banyak interpretasi sejarah yang segera tergantikan oleh interpretasi baru, lalu apakah itu artinya kita tidak bisa sepenuhnya percaya terhadap interpretasi-interpretasi sejarah? Inilah kritik

paling utama yang ditujukan kepada kredibilitas interpretasi sejarah.

Ada tiga alasan utama untuk mengajukan interpretasi baru atas sebuah subyek atau suatu periode sejarah. *Pertama* adalah adanya bukti-bukti baru yang menyingkap informasi yang menuntut perubahan interpretasi sebelumnya. *Kedua*, sejarawan menemukan aspek penting dalam subyek sejarah yang sebelumnya tidak diperhatikan. *Ketiga*, sejarawan mengadopsi teori explanatory, seperti yang dilakukan oleh Breen, yang jarang dilakukan oleh sejarawan tempo dulu.

Dampak bukti baru terhadap interpretasi sejarah dapat berbeda-beda. Sering kali memodifikasi bagian paparan rasional (*common sense*) subyek, sementara penulisan sejarah tetap dibiarkan sebagaimana adanya. Tetapi informasi baru juga dapat meruntuhkan generalisasi sejarah. Contohnya terjadi pada sejarah ekonomi, dimana metode statistik dalam “sejarah baru ekonomi” telah membawa pada penemuan-penemuan yang secara drastis meragukan interpretasi generalisasi lama. John A. Davis melaporkan bahwa model Ekonomi tinggal-landas (*take-off*) W.W. Rostow dalam buku *The Stages of Economic Growth: A Non-Comunist Manifesto* (1960), memicu dilakukannya banyak penelitian yang meragukan validitas model tersebut. Sebagai sebuah bukti empiris yang ditimbulkan oleh agenda penelitian disusun, untuk menguji keraguan mereka atas validitas teori tersebut. Penelitian itu memperlihatkan bukti yang meruntuhkan validitas konsep ekonomi tinggal-landas (*take-off*) seketika, dengan membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan industri yang banyak terjadi adalah proses pembangunan yang lambat, tersendat, dan tidak berkesinambungan (Davis, 1989: 47).

Sejarawan yang bertanggung jawab akan mengetahui apakah generalisasi yang mereka lakukan dibangun atas sampel

yang representatif dan signifikan atau tidak. (lihat McCulligh, 1984: 144-9). Jika mereka tidak yakin, maka mereka harus memberitahunya pada pembaca, sehingga mereka dapat membaca interpretasi tersebut dengan tingkat skeptisisme yang sesuai. Pemaparan sejarah impresionistis, hal mana tidak memakai landasan data statistik, adalah tipe interpretasi yang paling tidak bisa diandalkan di antara semua jenis interpretasi. Ketidak-memadaan data adalah alasan yang paling penting untuk meragukan generalisasi.

Alasan kedua terjadinya perubahan di dalam interpretasi sejarah ringkas adalah karena ada perubahan hal-hal yang menjadi minat sejarawan. Hal ini khususnya terjadi pada penjelasan general sebab-akibat (*general causal explanation*) peristiwa-peristiwa utama. Pada abad yang lalu, sejarawan pertama kali tertarik pada peran ideologi pemimpin dalam terjadinya perubahan masyarakat, kemudian pada kepentingan ekonomi pemimpin dan pengikutnya, mengikuti gagasan Marx bahwa ideologi hanyalah alat justifikasi pencapaian kepentingan ekonomi, dan lalu pada akhirnya sejarawan tertarik pada motivasi massa yang mengikuti para pemimpinnya, khususnya pada wacana dan simbol yang menggerakkan mereka. Kita dapat melacak pergantian ini dengan mudah dalam historiografi revolusi Inggris, Amerika dan Prancis.

Bersamaan dengan perubahan minat, terjadi pula perubahan popularitas teori perubahan sosial, dari Whig ke Marxist dan ke Postmodern. Malah, masyarakat digerakkan oleh gagasan/ide, kepentingan, dan wacana. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa sejarawan cenderung menekankan satu penyebab di atas yang lain, tetapi tidak ada cukup teori yang membenarkan itu. Meskipun demikian, ketidakpastian mengenai mana yang lebih penting di antara ketiga itu adalah

sumber ketidakstabilan penjelasan-penjelasan sejarah.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, sejarawan seharusnya bersikap skeptis terhadap generalisasi ringkas (*summary generalization*) yang tidak disertai dengan data statistik yang cukup, atau pada generalisasi yang menekankan satu penyebab, dan mengabaikan penyebab lain. Sejarawan yang bertanggung jawab akan hati-hati dalam memberitahukan pada pembaca ketika situasi tersebut terjadi, dan memperingatkan mereka bahwa penerimaan terhadap generalisasi harus bersifat sementara. Perlu dicatat bahwa untuk meragukan validitas generalisasi yang dibuatnya, seseorang tidak harus menunggu sampai generalisasinya itu terbukti salah. Bukti yang tidak memadai sudah cukup sebagai alasan pernyataan keraguan. Dan disertai dengan kesadaran bahwa teori baru akan muncul yang membuat penjelasan sebelumnya tidak memadai.

Kewajaran (Fairness)

Ketika paparan rasional (*commonsense narrative*), paparan colligatory (*colligatory narrative*), atau interpretasi ringkas (*summary interpretation*) disajikan sebagai laporan komprehensif atas subyek histories, ketiga bentuk itu tidak saja dituntut untuk kredibel, tetapi juga melaporkan subyek tersebut secara wajar (*fair*). Laporan parsial subyek sejarah dapat bersifat kredibel tapi tidak wajar. Misalnya menggambarkan sifat-sifat baik seseorang, dan mengabaikan sifat-sifat buruknya. Mungkin cukup beralasan untuk mempercayai sifat-sifat itu, tetapi jika segi buruk tidak disebutkan, maka keseluruhan kesan dari karakter orang tersebut akan menyesatkan.

Ada tiga situasi yang biasanya terjadi dimana sejarah disajikan tidak wajar dan menyesatkan. Salah satu di antara sudah digambarkan di atas, yaitu ketika sejarawan menggambarkan hanya

sebagian sifat subyek, walaupun benar, sehingga memberikan kesan yang salah secara keseluruhan. Yang kedua adalah ketika sejarawan memilih beberapa penyebab terjadinya suatu peristiwa, dan tidak menyebutkan semuanya. Dan yang ketiga, sejarah yang ditulis secara parsial memberi kesan menyesatkan tentang pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa. Kekhawatiran sejarawan terhadap bentuk-bentuk ketidakwajaran tersebut di atas terdapat dalam komentar mereka terhadap penjelasan Conrad Russel atas Perang Sipil Inggris (Russell, 1990).

Kewajaran Deskripsi Sejarah

Interpretasi sebab-akibat atas peristiwa sejarah selalu memasukkan gambaran umum mengenai keadaan yang terjadi pada saat itu. Cara pertama, sejarawan dikritik karena tidak berlaku wajar, berkaitan dengan kewajaran penggambaran keadaan itu. Sebagaimana sudah kita bahas, suatu deskripsi dikatakan menyesatkan jika menggambarkan hanya sebagian subyek—walaupun benar—, sehingga memberikan kesan keseluruhan yang salah. Sering kali dalam generalisasi ada sedikit panghapusan/penghilangan fakta, tetapi jika ada banyak bagian yang dihilangkan, maka sejarawan yang bertanggung jawab akan mengakuinya, dan membatasi generalisasinya. Memang diakui ada ruang untuk penilaian subyektif, yaitu dalam menentukan tingkat penghilangan (*exception*) fakta/data yang dapat ditoleransi. Menurut saya tingkat keakuratan suatu interpretasi tergantung sebagian pada tujuan interpretasi generalisasi itu dibuat. Jika untuk data statistik, maka diperlukan tingkat toleransi yang kecil. Jika tujuannya untuk mendapatkan kesan umum, maka tingkat toleransi bisa lebih besar. Tapi sejarawan yang hati-hati akan menginformasikan kepada pembaca penghilangan-penghilangan tersebut, terutama

jika dengan penghilangan itu bisa menyebabkan interpretasi sejarah yang dibuatnya menyesatkan pembaca.

Russel memulai penjelasannya mengenai penyebab perang sipil Inggris dengan menggambarkan hubungan antara raja dengan parlemen di bawah kekuasaan James I dan Charles I sampai 1930. Dia menyatakan bahwa pada saat itu secara keseluruhan parlemen sangat mendukung kerajaan, dimana parlemen menganggap kesetiaan kepada raja sebagai sebuah kewajiban. Kritikus sejarah menganggap bahwa gambaran ini menyesatkan, karena telah mengabaikan ketidaksepakatan yang cukup serius antara raja dan parlemen. Russell memaparkan bahwa kebanyakan ketegangan yang muncul antara raja dan parlemen adalah dikarenakan parlemen mengutamakan kepentingan lokal di atas kepentingan nasional, dan tidak memenuhi tugasnya mendukung kerajaan, dengan tidak mengesahkan pajak-pajak untuk penyelenggaraan operasional kerajaan. Kondisi ini menyebabkan raja kekurangan sumber daya untuk mengalahkan Skotlandia pada 1639-40.

Kritikus telah menemukan bahwa penafsiran Russel itu telah menyesatkan dalam dua hal; pertama, banyaknya badan-badan/ organisasi berskala nasional yang berdiri pada masa itu telah membuktikan bahwa penduduk lokal tidak terlalu mementingkan diri sendiri seperti yang digambarkan oleh Russel. Clive Holmes telah menemukan bahwa banyak di antara mereka mempunyai wawasan dan peduli terhadap isu-isu agama dan konstitusi.... (dan) berpartisipasi dalam budaya politik nasional (dikutip *ibid.*, hlm. 16). Hughes menyimpulkan bahwa oposisi terhadap Charles tidak bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kepentingan lokal, tapi bersifat umum, dimana orang-orang peduli terhadap arah pemerintahan pusat' (Hughes, 1998: 57). Memang ada beberapa kepedulian terhadap isu lokal di antara rakyat, tetapi adalah

menyesatkan untuk menyimpulkan bahwa itu adalah satu-satunya koncern mereka, atau bahkan menganggap itu alasan utama.

Kedua, pernyataan Russell bahwa parlemen tidak akan mengesahkan pajak untuk raja juga menyesatkan. Kata Hughes: "Gambaran Russell tentang majelis rakyat yang tidak pernah mengeluarkan keputusan yang memberatkan rakyat hanya memotret secara parsial" (*ibid.*, hlm. 27). Memang parlemen tidak terlalu antusias untuk menaikkan pajak, tapi mereka melakukan hal itu bulan Mei dan Juni 194 (lihat Cust dan Hughes., hlm. 30). Itulah contoh penjelasan peristiwa masa lalu tidak wajar.

Keadilan/kewajaran Interpretasi Sebab-akibat

Cara kedua tentang interpretasi umum sebab-akibat bersifat tidak wajar adalah mereka mengidentifikasi penyebab-penyebab penting terjadinya suatu peristiwa, tetapi tidak semua. Jika sejarawan memilih pola interpretasi sebab-akibat, maka mereka harus memasukan semua penyebab yang relevan, dalam tingkat generalitas (*the level of generality*) dan tingkat kerincian (*the degree of detail*) yang sesuai. Tingkat generalitas dan kerincian adalah suatu tingkat yang dikandung oleh buku atau makalah dimana interpretasi itu dilakukan. Buku yang ringkas biasanya menggambarkan hanya penyebab-penyebab utama, yaitu penyebab yang secara substansial meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Buku yang mengandung banyak detail menyajikan penyebab minor selain penyebab utama. Sekali lagi, tentu saja ada ruang untuk subyektifitas, tetapi yang jelas hal yang tidak bisa diterima adalah ketika penyebab utama diabaikan.

Keadilan/ kewajaran Penisbahan Tanggung jawab

Cara ketiga yang umum terjadi dalam interpretasi sejarah

sering kali tidak wajar adalah kesalahan pelekatan tanggung jawab atas terjadinya peristiwa sejarah. Tidak mengejutkan untuk mengetahui bahwa pada masa perang sipil, pendukung kerajaan menyalahkan kaum puritan sementara kaum puritan menyalahkan pendukung raja. Ann Hughes menulis, ada dua teori konspirasi yang menjelaskan konflik agama dan politik; keduanya rasional dan saling melemahkan. (Hughes, 1998: 113). Raja dan pendukungnya cemas terhadap semangat egalitarian yang baru berkembang di kalangan Calvinist (hlm. 109); sementara yang lainnya menghubungkan pengadilan para penganut paham Armenian dengan usaha untuk memelihara otoritas Paus di Inggris (hlm. 122). Masing-masing menyalahkan pihak lain atas terjadinya konflik, dan mengklaim bahwa keterlibatan dirinya dalam perang itu adalah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional.

Sejarawan diharapkan untuk tidak bias dalam penilaian tanggung jawab. Tentu saja kedua pihak sama-sama bertanggung jawab atas terjadinya perang sipil Inggris. Penilaian tanggung jawab didasarkan pada analisis penyebab suatu peristiwa. Tanggung jawab penyebab (*causal responsibility*) tidak cukup untuk tanggung jawab moral (*moral responsibility*). Untuk secara moral bertanggung jawab atas suatu peristiwa, orang tidak hanya membantu melakukan tindakan agar sesuatu terjadi, tetapi juga melakukannya dengan penuh kesadaran dan kebebasan. Lebih lanjut, agar seseorang dipuji atau disalahkan atas suatu tindakan, mereka harus dinilai berdasarkan standar nilai tertentu, yang kiranya dipegang oleh orang tersebut. Di sinilah kesulitannya, siapa yang berhak menentukan standar yang pantas untuk dipegang oleh orang lain? Misalnya, raja dan parlemen jelas mempunyai standar yang berbeda mengenai perilaku anggota kerajaan.

Tampaknya sangat sulit bagi sejarawan untuk memutuskan

standar yang dipegang oleh masyarakat, dan mereka tidak boleh berusaha untuk memuji atau menyalahkan seseorang atas sesuatu yang terjadi di masa lalu. Walaupun begitu, mereka dapat membuat penilaian yang rasional atas derajat kebebasan seseorang dalam menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Sejarawan harus memahami tekanan-tekanan yang dialami pelaku, dan apakah pelaku dapat meramalkan akibat tindakannya itu. Singkatnya, sejarawan harus bisa memberikan tanggung jawab atas perilaku mereka, tanpa memuji atau menyalahkannya atas apa yang telah terjadi. Sebuah interpretasi yang wajar harus menyebutkan semua tindakan, pada tingkat generalitas dan kerincian yang sesuai, yaitu seseorang mengetahui konsekuensi tindakannya. Memang terkadang sulit untuk memutuskan apakah seseorang bertanggung jawab atas suatu kejadian yang timbul karena perbuatannya. Tetapi sering kali sangat jelas bahwa seseorang mengetahui konsekuensi tindakan mereka dan dengan sukarela melakukan tindakan itu. Suatu paparan sejarah yang wajar adalah suatu paparan yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa diidentifikasi, pada tingkat generalitas dan kerincian yang sesuai.

Sewajar apakah hasil koreksi catatan sejarah? Ada begitu banyak dokumen bukti dari masa lalu, dan begitu banyak serta rumit peristiwa yang terjadi, sehingga memang sulit untuk yakin bahwa suatu penjelasan sudah disajikan secara wajar. Dalam hal ini seseorang harus memaklulkannya pada proses pergantian generasi sejarawan yang perlahan-lahan tetapi pasti, akan memperbaiki penjelasan sejarah yang dibuat pendahulunya. Prinsip yang layak dipegang adalah bahwa interpretasi sejarah secara luas diterima sebagai sebuah kebenaran tetapi tetap terbuka terhadap perbaikan. Analoginya dalam sains, adalah seperti teori yang diterima luas sebagai sebuah paradigma, tetapi selalu dimodifikasi

dan diperbaiki melalui penelitian yang terus-menerus. Mungkin inilah yang dimaksud dengan tingkat kewajaran (*fairness*).

Dalam prakteknya, sejarawan menilai kewajaran sebuah interpretasi sejarah berdasarkan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa itu, dalam batas-batas yang diketahuinya. Dengan demikian, tujuan mereka adalah menghasilkan catatan peristiwa sejarah yang disajikan secara relatif wajar berdasarkan semua bukti-bukti yang bisa didapat. Sekali lagi, pertanyaan mengenai tingkat/derajat jumlah bukti yang diperlukan untuk dapat dikatakan mewakili semua bukti adalah pertanyaan yang penting. Misalnya, jika sejarawan mempelajari beragam sampel pamphlet dalam jumlah besar yang dicetak selama masa revolusi Inggris, maka sejarawan layak mengklaim telah menyajikan interpretasi sejarah secara wajar. Ketika ada bukti dalam jumlah besar, seperti dalam kasus ini, kemungkinan terjadinya perubahan interpretasi berdasarkan bukti baru sangat kecil. Dalam kasus lain, dimana hanya tersedia sedikit bukti, perubahan interpretasi karena tambahan bukti dapat saja terjadi. Jika bukti sedikit, sejarawan jarang bisa yakin bahwa mereka telah bersikap wajar terhadap subyek sejarah.

Kejelasan Interpretasi Sejarah

Interpretasi *colligatory* dan interpretasi ringkas atas suatu peristiwa sejarah membuat peristiwa yang mereka tafsirkan jelas dimengerti dengan memberi perhatian kepada tujuan-tujuan penting yang ingin dicapai lewat peristiwa-peristiwa itu, nilai-nilai yang dikemukakan oleh subyek, atau konsekwensi penting yang dihasilkan. Dengan cara ini, sejarawan menampilkan pola signifikansi yang tidak akan terlihat jika peristiwanya dianggap berdiri sendiri. Sering kali pola itu sendiri menjadi subyek

penelitian lebih lanjut.

Walsh memberikan banyak contoh penafsiran colligatory, salah satunya adalah mengenai berapa banyak undang-undang kebijakan luar negeri Jerman yang dapat dikaitkan dengan kebijakan “Kemuliaan dan ekspansi German” pada masa Hitler. Dia juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai tertentu memberi karakter terhadap aktifitas-aktifitas seperti gerakan pencerahan, gerakan romantisme, abad reformasi di Inggris pada abad XIX, dan bangkitnya sistem kapitalisme. Sementara itu istilah-istilah formal colligatory (*formal colligatory term*) mengidentifikasi tipe-tipe perubahan seperti pertumbuhan dan kemunduran, revolusi dan evolusi, tetapi tidak dapat membantu kita untuk memahami mengapa perubahan itu terjadi.

Beberapa interpretasi ringkas menambah kejelasan suatu peristiwa sementara yang lain hanya meringkas (*sum-up*) struktur narasi. Ketika Woods menyimpulkan kehidupan Senator Fullbright sebagai seorang yang berdedikasi dalam mendorong masyarakat dan Negara untuk bertekad meraih cita-cita yang realistis sebagai landasan untuk kemajuan individu dan Nasional, dia telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman kita tentang potensi seorang manusia. Interpretasi ringkas perang sipil Inggris berusaha untuk mengidentifikasi kelompok utama yang terlibat dalam konflik dan menjelaskan nilai-nilai yang menyatukan kelompok tersebut. Dengan demikian, selain memberikan ringkasan narasi, interpretasi ini juga memberi kita pemahaman tentang motif yang melatar belakangi peristiwa tersebut.

Kadang-kadang interpretasi sejarah membuat setting suatu peristiwa masuk akal dalam tiga cara yang disebutkan di atas. Sebuah interpretasi atas revolusi Prancis, misalnya, biasanya akan menggambarkan tujuan-tujuan para pemimpin kelompok

dikaitkan dengan keputusan dan tindakan-tindakannya, dan nilai-nilai yang menggerakkan para pengikut untuk mendukung mereka, dan tahapan-tahapan terjadinya revolusi itu.

Jika pola umum suatu peristiwa sejarah telah diidentifikasi, misalnya peristiwa gerakan kebudayaan, perang sipil atau revolusi politik, sejarawan biasanya akan memperlakukan peristiwa itu sebagaimana adanya, dan mendiskusikan mengapa peristiwa itu terjadi, kapan terjadi, dan apa dampaknya.

Meskipun interpretasi *colligatory* dan interpretasi ringkas menambah kejelasan suatu peristiwa, interpretasi ini disajikan dalam cara yang sangat umum, menunjukkan tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai, atau nilai-nilai umum yang terwujud dalam suatu gerakan kebudayaan dan politik. Peristiwa individual dibuat menjadi lebih jelas dengan ditempatkan di dalam tubuh narasi (*the body of the narrative*), sementara keterjadiannya (*occurrence*) dijelaskan secara rinci. Walaupun begitu, interpretasi *colligatory* dan ringkas sering kali mengidentifikasi dasar aspirasi umum, dan nilai-nilai yang biasanya diabaikan oleh penjelasan tunggal, sehingga memberi penjelasan sedikit lebih mendalam atas peristiwa sejarah dibanding dengan penjelasan oleh narasi itu sendiri.

INDEKS

TENTANG PENULIS



Dudung Abdurahman, lahir di Ciamis Jawa Barat, 6 Maret 1963. Riwayat pendidikannya, dimulai dari MI (1975), MTsN (1979), MAN sembari modok di Pesantren Darussalam (1982), ketiga jenjang pendidikan tersebut diselesaikan di Ciamis. Kemudian ia mengikuti pendidikan tinggi di IAIN Sunan Kalijaga, pada Fakultas Adab mulai tahun ajaran 1982/1983 dan menamatkan program sarjana muda pada 1985, sedangkan program sarjana (Drs.) diselesaikan pada 1988 di fakultas yang sama pada jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI). Pertengahan 1992 meneruskan studi lanjut (S2) Ilmu Sejarah di Sekolah Pascasarjana UGM, tamat pada awal 1997. Program doktor (S3) ditempuh mulai 2004 dan diselesaikan pada Pebruari 2009 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada Oktober tahun tersebut memperoleh jabatan Guru Besar dalam bidang Sejarah Pemikiran Islam.

Semenjak menamatkan program studi S1 kemudian meniti karier di almaternya, penulis mulai aktif melakukan penelitian, khususnya bidang sejarah dan budaya Islam. Keaktifannya di

bidang penelitian ditopang dengan beberapa program pelatihan penelitian yang pernah diikutinya, antara lain: PLPA (Program Latihan Penelitian Agama) selama enam bulan pada 1990 yang diselenggarakan Badan Litbang Departemen Agama RI; Pelatihan Penelitian Antropologi (1993), Pelatihan Penelitian Filologi (1995), Pelatihan Penelitian Gender (1997) dan lain sebagainya di Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga; Workshop Metodologi Penelitian Sosial-Keagamaan (2003) yang diselenggarakan Dikti Diknas RI di Jakarta; dan Workshop Research Management di NTU Singapore, Desember 2006. Dalam melangsungkan tugasnya sebagai tenaga pengajar serta keaktifannya di dunia penelitian, penulis juga sempat dipercaya memimpin sebagai Sekretaris Jurusan (1998-2001) dan sebagai Ketua Jurusan SKI Fakultas Adab (2001-2003). Sejak 2003 hingga pertengahan 2007 menjadi Kepala Lembaga Penelitian IAIN/UIN Sunan Kalijaga, menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan (2008-2010) dan sekarang (sejak Januari 2011) sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Selama menempuh kariernya sebagai dosen dan peneliti, penulis telah menghasilkan lebih kurang 40 judul karya ilmiah, baik hasil penelitian, artikel dalam jurnal, maupun buku. Di antara bukunya yang sudah diterbitkan *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, 2000; *Pelita Hati dari Suryalaya*. Jakarta: Penerbit Kalimah, 2001; *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003; *Gerakan Sosil-politik Kaum Tarekat*. Yogyakarta: Arruz Media, 2009; editor buku: *Islam dan Budaya lokal dalam Seni Pertunjukan Rakyat*. dan M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.